



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2025-2029

Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Penelitian dan Pengembangan



dr. H. KHAIRUL, M.Kes.
Wali Kota Tarakan



IBNU SAUD IS
Wakil Wali Kota Tarakan



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN
dan
WALI KOTA TARAKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan Pembangunan Daerah.
7. Misi adalah Rumusan Umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
8. Program adalah penjabaran kebijakan PD dalam bentuk upayah yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 2

RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan program Wali Kota yang memuat Tujuan, Sasaran, strategi, arah kebijakan, Pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta Program PD dan lintas PD yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH;
 - c. BAB III : VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
 - d. BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH; DAN
 - e. BAB V : PENUTUP.
- (2) Uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD secara berkala.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERUBAHAN RPJMD

Pasal 5

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. terjadi perubahan yang mendasar, meliputi terjadinya:
1. bencana alam;
 2. goncangan politik;
 3. krisis ekonomi;
 4. konflik sosial budaya;
 5. gangguan keamanan;
 6. pemekaran Daerah; dan/atau
 7. perubahan kebijakan Nasional.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Rencana Startegis PD.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 20 Agustus 2025

WALI KOTA TARAKAN,


KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,


JAMALUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2025 NOMOR 84

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN, PROVINSI KALIMANTAN
UTARA: (84/2/2025)



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
PERATURAN PERDA NOMOR 2 TAHUN 2025	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-6
1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya	I-13
1.4 Maksud dan Tujuan	I-25
1.5 Sistematika Penulisan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029	I-27
BAB II GAMBAR UMUM DAERAH	II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-2
2.1.1 Posisi dan Peran Strategis Kota Tarakan	II-2
2.1.2 Potensi Sumber Daya Alam Kota Tarakan	II-18
2.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	II-23
2.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	II-24
2.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas	II-27
2.1.6 Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	II-30
2.1.7 Demografi	II-32
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-36
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi	II-36
2.2.2 Kesehatan Untuk Semua	II-48
2.2.3 Pendidikan Berkualitas Merata	II-52
2.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif	II-55
2.2.5 Beragam Masalah dan Berkebudayaan Maju	II-56
2.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif	II-58
2.3 Aspek Daya Saing Daerah	II-60
2.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia	II-60
2.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	II-61
2.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru	II-66
2.3.4 Transformasi Digital	II-69
2.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	II-72
2.3.6 Perkotaan dan Pedesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	II-74
2.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro	II-74
2.4 Aspek Pelayanan Umum	II-75
2.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	II-75
2.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial	II-77



2.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	II-78
2.4.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah	II-79
2.5 Gambaran Keuangan Daerah	II-81
2.5.1 Realisasi APBD 2020-2024	II-82
2.5.2 Proyeksi Keuangan Daerah 2026-2030.....	II-99
2.6 Permasalahan dan Isu Strategis	II-110
2.6.1 Permasalahan.....	II-110
2.6.2 Isu Strategis	II-119

BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN

DAERAH	III-1
3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	III-1
3.2 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan	III-20

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	IV-1
4.1 Program Perangkat Daerah.....	IV-1
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	IV-77

BAB V PENUTUP	V-1
5.1 Kesimpulan	V-1
5.2 Kaidah Pelaksanaan	V-2



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Keselarasan Dokumen RPJMD dengan RPJPD Kota Tarakan	I-15
Tabel 2.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Tarakan	II-4
Tabel 2.2 Luas dan Penyebaran Masing-masing Kemiringan Lahan.....	II-6
Tabel 2.3 Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota Kota Menurut Kecamatan di Kota Tarakan, 2023	II-7
Tabel 2.4 Rencana Pola Ruang Kota Tarakan Tahun 2021-2041	II-14
Tabel 2.5 Rencana Penyediaan RTH Kota Tarakan Tahun 2021-2041.....	II-15
Tabel 2.6 Pemasaran Hasil Perikanan Kota Tarakan Tahun 2019-2023....	II-19
Tabel 2.7 Perkembangan Produksi Padi dan Beras Kota Tarakan Tahun 2020-2024	II-20
Tabel 2.8 Produksi Tanaman Sayuran Kota Tarakan Tahun 2020-2024...	II-20
Tabel 2.9 Luasan Status Daya Dukung Air di Kota Tarakan	II-24
Tabel 2.10 Luasan Status Daya Dukung Pangan di Kota Tarakan	II-25
Tabel 2.11 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Tarakan Tahun 2020-2024	II-28
Tabel 2.12 Data Pengelolaan Sampah di Kota Tarakan Tahun 2020-2024..	II-29
Tabel 2.13 Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Tarakan Tahun 2020-2024	II-33
Tabel 2.14 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Tarakan Tahun 2020 – 2024	II-34
Tabel 2.15 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kota Tarakan 2020-2024	II-34
Tabel 2.16 Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Tarakan.....	II-35
Tabel 2.17 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Tarakan Tahun 2020-2024..	II-38
Tabel 2.18 Perkembangan PDRB Per Kapita Kab/Kota di Kalimantan Utara Tahun 2020-2024 (dalam juta rupiah)	II-40
Tabel 2.19 Data Kemiskinan Kota Tarakan Tahun 2020-2024.....	II-42
Tabel 2.20 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Tarakan di Kalimantan Utara Tahun 2023-2024.....	II-55
Tabel 2.21 Indeks Kota Toleran Kota Tarakan Tahun 2020-2024	II-57
Tabel 2.22 Indeks Pemberdayaan gender (IDG) di Kota Tarakan Tahun 2019-2024	II-59
Tabel 2.23 Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kota Tarakan Tahun 2019-2024	II-59
Tabel 2.24 PDRB Industri Pengolahan Kota Tarakan Tahun 2020-2024....	II-62
Tabel 2.25 PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Kota Tarakan Tahun 2020-2024	II-63
Tabel 2.26 Indeks Inovasi Daerah Kota Tarakan Tahun 2020-2024.....	II-65
Tabel 2.27 Indeks Pembangunan Statistik Kota Tarakan Tahun 2024.....	II-70
Tabel 2.28 Indeks Reformasi Birokrasi Kota Tarakan Tahun 2020-2024	II-76
Tabel 2.29 Nilai SAKIP Kota Tarakan Tahun 2020-2024.....	II-74
Tabel 2.30 Indeks Daya Saing Kota Tarakan Tahun 2022-2024.....	II-75
Tabel 2.31 Capaian Indikator Kinerja Kunci	II-80
Tabel 2.32 Skala Interval Otonomi Fiskal	II-86



Tabel 2.33 Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kota Tarakan Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah)	II-86
Tabel 2.34 Realisasi APBD Kota Tarakan Tahun 2020-2024.....	II-88
Tabel 2.35 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Tarakan Tahun 2020-2024 .	II-90
Tabel 2.36 Realisasi Belanja Daerah Kota Tarakan Tahun 2020-2024.....	II-93
Tabel 2.37 Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Tarakan Tahun 2020-2024 .	II-96
Tabel 2.38 Neraca Daerah Kota Tarakan Tahun 2020-2024	II-98
Tabel 2.39 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2030	II-103
Tabel 2.40 Isu Strategis Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2029	II-146
Tabel 3.1 Perumusan Penjelasan Visi Pembangunan Kota Tarakan Tahun 2025-2029	III-2
Tabel 3.2 Sasaran Visi RPJMD Kota Tarakan 2025-2029	III-7
Tabel 3.3 Rumusan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029	III-18
Tabel 3.4 Strategi Pembangunan Menurut Tujuan dan Sasaran.....	III-21
Tabel 3.5 Penahapan Pembangunan RPJMD	III-32
Tabel 3.6 Arah Kebijakan Setiap Misi RPJMD Kota Tarakan.....	III-34
Tabel 3.7 Program Prioritas RPJMD Kota Tarakan 2025-2029.....	III-38
Tabel 4.1 Indikator Program, Target dan Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2030	IV-34
Tabel 4.2 Indikator Kinerja Kunci (IKU) Daerah.....	IV-78
Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah (IKD)	IV-79



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Proses Penyusunan, Pelaksanaan Serta Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	I-4
Gambar 1.2 Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor Lainny	I-14
Gambar 2.1 Peta Adminitratif Kota Tarakan	II-3
Gambar 2.2 Persentase Luas Daratan	II-5
Gambar 2.3 Peta Kemiringan Lahan Kota Tarakan	II-7
Gambar 2.4 Peta Daerah Aliran Sungai Kota Tarakan	II-9
Gambar 2.5 Peta Hidrologi Kota Tarakan	II-10
Gambar 2.6 Peta Penggunaan Lahan Kota Tarakan	II-13
Gambar 2.7 Jumlah Penduduk (Jiwa) Kota Tarakan 2010,2020-2024	II-33
Gambar 2.8 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Tarakan Tahun 2020-2024 (Triliun Rupiah)	II-37
Gambar 2.9 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Tarakan Tahun 2020-2024 (%)	II-37
Gambar 2.10 PDRB Kota Tarakan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020-2024 (Triliun Rupiah)	II-39
Gambar 2.11 Indeks Gini/Gini Rasio Kota Tarakan Tahun 2019-2024	II-41
Gambar 2.12 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Tarakan Tahun 2018-2024	II-44
Gambar 2.13 TPAK Kota Tarakan Tahun 2019-2024	II-45
Gambar 2.14 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tarakan Tahun 2019-2024	II-46
Gambar 2.15 Indeks Pembangunan Manusia Kota Tarakan Tahun 2020-2024	II-47
Gambar 2.16 Angka Usia Harapan Hidup Kota Tarakan Tahun 2020-2024	II-49
Gambar 2.17 Prevalensi Stunting Menurut SSGI Tahun 2021-2024.....	II-50
Gambar 2.18 Data e-PPGBM Balita Tahun 2021-2024	II-51
Gambar 2.19 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota Tarakan Tahun 2019-2024	II-49
Gambar 2.20 Angka Harapan Lama Sekolah Kota Tarakan 2019-2024	II-53
Gambar 2.21 Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan) di Kota Tarakan Tahun 2019-2024	II-61
Gambar 2.22 TPAK Kota Tarakan Tahun 2019-2024	II-64
Gambar 2.23 Desa/Kelurahan Blankspot di Kota Tarakan Tahun 2020-2023	II-70
Gambar 2.24 Laju Inflasi Kota Tarakan Tahun 2019-2024	II-75
Gambar 2.25 Persentase Penegakan PERDA Kota Tarakan Tahun 2019-2023	II-78
Gambar 2.25 Persentase Penegakan PERDA Kota Tarakan Tahun 2019-2023	II-73
Gambar 2.25 Persentase Penegakan PERDA Kota Tarakan Tahun 2019-2023	II-73



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting yang mendukung keberhasilan sistem perencanaan pembangunan nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut, perencanaan pembangunan bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Selain itu, perencanaan pembangunan juga bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, pengoptimalan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah memerlukan perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang hingga perencanaan jangka pendek yang substansinya saling berkaitan. Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi cita-cita pembangunan serta strategi dan cara pencapaiannya. Karena itu disusun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memberikan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah. Terkait dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di bidang perencanaan, diamanatkan juga bahwa Pemerintahan Daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029

integral dari pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 258 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini memiliki makna bahwa Pemerintahan daerah melaksanakan pembangunan sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki. Dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah harus bersinergi dan mendukung pencapaian target pembangunan Nasional, sehingga dapat diwujudkan tujuan bernegara.

Pelaksanaan pembangunan daerah diawali dengan penyusunan rencana sebagai permulaan dari siklus perencanaan pembangunan. Berdasarkan Pasal 260 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Nasional. Pemerintah daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pada Tanggal 27 November 2024 Kota Tarakan telah melaksanakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota serentak. Berdasarkan hasil pilkada, ditetapkan pasangan dr. H. Khairul, M.Kes dan Ibnu Saud Is sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan Periode 2025-2029 yang secara resmi dilantik oleh Presiden Republik Indonesia pada Kamis, 20 Februari 2025. Prosesi pelantikan berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, bersamaan dengan pelantikan 961 kepala daerah lainnya dari seluruh Indonesia, yang terdiri dari gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 264 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih berkewajiban menyusun RPJMD dan menetapkannya dalam bentuk Perda paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik, Dokumen RPJMD



merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Dengan demikian, visi dan misi serta program prioritas kepala daerah terpilih menjiwai seluruh muatan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029 dan harus dioperasionalkan oleh seluruh perangkat daerah sesuai kewenangannya.

Dalam penyusunan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029, Pemerintah Kota Tarakan menerapkan beberapa pendekatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pendekatan perencanaan pembangunan Daerah yang dimaksud, meliputi:

1. Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
2. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
3. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menterjemahkan visi dan misi kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
4. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, daerah kabupaten/kota, daerah provinsi, hingga nasional.

RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029 memperhatikan pemenuhan pendekatan substansi penyusunan dokumen perencanaan, antara lain:

- 1) Pendekatan Holistik-Tematik: dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa seluruh unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu

- kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
- 2) Pendekatan Integratif: dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
 - 3) Pendekatan Spasial: dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Gambar 1.1

**Proses Penyusunan, Pelaksanaan Serta Pengendalian dan Evaluasi
Rencana Pembangunan Daerah**



*Sumber: Hasil analisis/telaah berdasarkan tahapan dalam
Permendagri No. 86 Tahun 2017*

Berdasarkan Gambar 1.1 diatas, maka proses penting dalam penyusunan RPJMD setelah diperoleh rumusan isu-isu strategis yaitu tahap merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan. Hal ini merupakan perencanaan strategik yang membutuhkan proses berulang-ulang untuk menghasilkan rumusan tujuan dan sasaran yang dilengkapi dengan indikator kinerja sebagai tolok ukur. Selanjutnya, tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, perlu dilaksanakan dengan berbagai upaya/cara yang dirumuskan dalam strategi dan arah kebijakan. Dengan strategi dan arah kebijakan yang dipilih, maka dapat disusun indikasi rencana program prioritas pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan.



Penyusunan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029 merupakan rangkaian yang berkesinambungan, mulai dari tahap persiapan sampai dengan penetapan Perda tentang RPJMD. Pada tahap persiapan telah dilakukan penyusunan Rancangan teknokratik RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029. Hasil dari Rancangan Teknokratik RPJMD menjadi salah satu input bagi penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Selanjutnya, Rancangan Awal disusun dan disempurnakan melalui hasil konsultasi publik, pembahasan dan kesepakatan dengan DPRD Kota Tarakan serta hasil konsultasi ke Gubernur Kalimantan Utara. Rancangan Awal yang telah disempurnakan selanjutnya menjadi dasar bagi perangkat daerah untuk menyempurnakan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Hasil dari penyempurnaan Renstra PD menjadi rancangan Renstra menjadi masukan untuk perumusan Rancangan RPJMD dan siap untuk dibahas dalam Musrenbang RPJMD. Selanjutnya Hasil musrenbang RPJMD digunakan untuk penyempurnaan menjadi rancangan Akhir RPJMD yang akan diajukan ke DPRD untuk dibahas dan disetujui menjadi perda RPJMD. Setelah disetujui, maka Ranperda tentang RPJMD dievaluasi oleh Gubernur. Hasil evaluasi Gubernur menjadi dasar penyempurnaan Ranperda tentang RPJMD, yang selanjutnya ditetapkan dengan Perda tentang RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029 menjadi dokumen yang sangat strategis, yang akan digunakan sebagai:

1. Media untuk mengimplementasikan janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat.
2. Penjabaran pelaksanaan RPJPD Kota Tarakan Tahun 2025-2045 periode/tahap pertama.
3. Pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun.
4. Pedoman penyusunan rencana kerja tahunan (RKPD) Kota Tarakan.



5. Instrumen pengendalian bagi satuan pengawas internal (SPI) dan Bappeda.
6. Instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun.
7. Pedoman penilaian keberhasilan Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan urusan Pemerintahan Daerah yang dimiliki.

Selanjutnya, RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029 yang disusun akan menjadi dasar bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029. Dengan demikian, tercipta keselarasan antara perencanaan strategik di RPJMD dengan perencanaan operasional di perangkat daerah, dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah, sekaligus sebagai perwujudan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Kota Tarakan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029, disusun atas dasar sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pentapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);



8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
20. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Untuk Mendukung Swasembada Pangan;



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029

21. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian dalam Rangka Percepatan Swasembada Pangan;
22. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer dan Pelayanan Kesehatan Lanjutan untuk Mendukung Implementasi Transformasi Kesehatan;
23. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Pembangunan dan Pengelolaan SMA Unggul Garuda dan Digitalisasi Pembelajaran;
24. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
25. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
26. Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Konektivitas Jalan Daerah untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Energi;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana



- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 30. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1691);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029

36. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
37. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
38. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
40. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
41. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
42. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2045;
43. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 1);

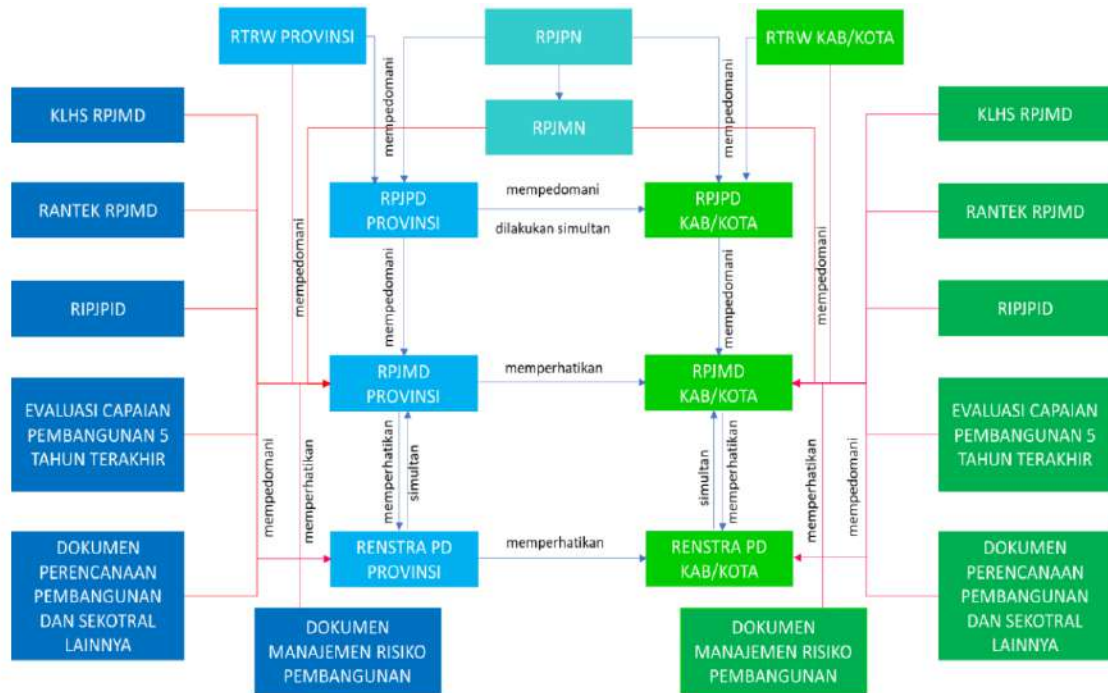


44. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 12);
45. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 60);
46. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2021 Nomor 64);
47. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2024 Nomor 81);
48. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 55);

1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Penyusunan Dokumen RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari dokumen perencanaan pembangunan lainnya dengan mempedomani RPJPD Kota Tarakan Tahun 2025-2045, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tarakan Tahun 2021-2041, RPJMN Tahun 2025-2029, dan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 serta memperhatikan RPJMD Daerah lain.

Gambar 1.2
Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya



*Sumber: Pedoman penyusunan RPJMD berdasarkan
Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025*

1.3.1. Hubungan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kota Tarakan Tahun 2025-2045

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tarakan Tahun 2025-2045 yang memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan Daerah selama 20 tahun ke depan merupakan pedoman bagi penyusunan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029.

RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari tahapan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD Kota Tarakan Tahun 2025-2045. Keterkaitan tersebut dapat dilihat dari visi dan misi Pembangunan RPJMD yang mendukung pada visi dan misi pembangunan RPJPD, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 1.1
Keselarasan Dokumen RPJMD dengan RPJPD Kota Tarakan

No	RPJPD Kota Tarakan Tahun 2025-2045	RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029
Visi		
	Kota Tarakan yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan	<i>Terwujudnya tarakan sebagai kota cerdas yang bertumpu pada sektor jasa, perdagangan, perikanan kelautan, dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan maju menuju masyarakat sejahtera.</i>
Misi		
1.	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.	Misi 1: Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
2.	Meningkatkan pemerataan pembangunan dan Pembangunan ekonomi yang berkeadilan.	Misi 2: Meningkatkan pemerataan pembangunan dan infrastruktur layanan dasar yang handal.
		Misi 3: Meningkatkan pembangunan ekonomi melalui dukungan kemudahan berusaha yang berkeadilan dan bertumpu pada sektor jasa, perdagangan, perikanan kelautan, ekonomi kreatif dan dan ekonomi kerakyatan (UMKM).
3.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif.	Misi 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif serta menjaga stabilitas ketertiban dan ketenraman kota.
4.	Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan.	Misi 5: Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tangguh menghadapi bencana.

*Sumber : RPJPD Kota Tarakan 2025-2045 dan
Ranwal RPJMD Kota Tarakan 2025-2029*

Dokumen RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029 merupakan pelaksanaan dari Sasaran Pokok RPJPD Kota Tarakan tahun 2025-2045 khususnya pada tahapan lima tahun pertama yaitu tahun 2025- 2029. Dengan demikian tujuan dan target pembangunan RPJMD tahun 2025-



2029 mengacu pada target RPJPD Kota Tarakan yang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2029. Berdasarkan pada pelaksanaannya, arah kebijakan pertama pembangunan (2025-2029) difokuskan pada penguatan modal dasar pembangunan dengan tema pembangunannya yaitu: **Penguatan Fondasi Modal Dasar Pembangunan Kota Tarakan** yang Fokus pada Penuntasan Pelayanan Dasar (Kesehatan, Pendidikan, Perlindungan Sosial, Budaya dan SDM), Pemanfaatan Infrastruktur dan Saranan Prasarana, Percepatan Pertumbuhan Perekonomian, Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang bertanggungjawab, Konservasi Lingkungan, dan Risiko Bencana, serta Penguatan Tata Kelola Pemerintahan.

Berdasarkan tema pembangunan periode pertama tersebut, maka arah kebijakan pembangunan Kota Tarakan, sebagai berikut:

1. Penguatan Sumber Daya Manusia, difokuskan pada penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial dan budaya, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif.
2. Upaya pemenuhan Sarana dan Prasarana dasar (air bersih, sanitasi, rumah layak huni, energi) serta infrastruktur penunjang perekonomian, difokuskan pada pemanfaatan infrastruktur dan sarana prasarana dalam rangka peningkatan wilayah potensi ekonomi.
3. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi, difokuskan pada percepatan pertumbuhan perekonomian industri dan UMKM, peningkatan kapasitas riset inovasi dan digitalisasi, dan peningkatan produktivitas tenaga kerja.
4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan, difokuskan pada penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas ASN berbasis Merit System, pondasi penataan regulasi, peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Kinerja birokrasi diharapkan menjadi kuat, bersih, adaptif, cepat, dan efektif dan efisien.



5. Pemantapan Ketahanan Alam dan Lingkungan, difokuskan pada optimalisasi peningkatan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana, meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan.

Berdasarkan Arah Kebijakan tersebut, maka terdapat enam Sasaran Pokok yang perlu mendapat perhatian, yaitu;

1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat. Dengan arah Pembangunan Kesehatan untuk Semua.
2. Meningkatnya Kualitas Pendidikan secara merata. Dengan arah Pembangunan Pendidikan Berkualitas yang Merata
3. Meningkatnya Perlindungan sosial yang adaptif. Dengan arah Pembangunan Perlindungan Sosial yang Adaptif, Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju, dan Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif.
4. Meningkatnya produktivitas ekonomi, infrastruktur, daya saing daerah, inovasi, dan stabilitas ekonomi makro. Dengan arah Pembangunan Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi, Transformasi Digital, dan Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi.
5. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif yang menegakan supremasi hukum yang berkeadilan. Dengan arah Pembangunan Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif, dan Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial.
6. Meningkatnya kualitas lingkungan dan ketahanan daerah yang berkelanjutan Dengan arah Pembangunan Lingkungan Hidup Berkualitas, dan Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan.



1.3.2. Hubungan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029

Penyusunan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029 mempedomani RPJMN sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Mempedomani RPJMN Tahun 2025-2029 dilakukan melalui penyelarasan sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan sasaran, agenda pembangunan, strategi, arah pengembangan wilayah, dan program strategis nasional dengan memperhatikan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Daerah.

RPJMN yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang memuat strategi Pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian, kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang menggambarkan perekonomian secara menyeluruh dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita. 8 Asta Cita tersebut terdiri dari:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,



mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan. Alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

1.3.3. Hubungan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029 dengan RTRW Kota Tarakan Tahun 2021-2041

Penyusunan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029 berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tarakan 2021-2041, yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2021-2041. Berpedoman pada RTRW Kota Tarakan Tahun 2021-2041 dimaksudkan untuk menyelaraskan sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan jangka menengah daerah Kota Tarakan dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola pemanfaatan ruang wilayah.

Penyelarasan RPJMD Kota Tarakan sesuai dengan tujuan penataan ruang Kota Tarakan yaitu Terwujudnya Ruang Wilayah Kota Tarakan sebagai pengembangan kegiatan minapolitan serta sentra perdagangan dan jasa, industri dan pariwisata berskala regional yang nyaman dan



berkelanjutan. Kebijakan penataan ruang wilayah Kota Tarakan untuk menjabarkan tujuan penataan ruang wilayah, meliputi :

1. perencanaan pembangunan dengan pemerataan pelayanan dalam skala regional dan skala kota;
2. perencanaan sarana dan prasarana permukiman secara inklusif, berkelanjutan, terpadu dan merata;
3. pelestarian kawasan lindung;
4. pengembangan kawasan budidaya;
5. pengembangan kawasan perbatasan negara sebagai fungsi pertahanan dan keamanan serta ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat;
6. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan perekonomian kota yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional dan internasional;
7. pengendalian kawasan yang berkepadatan tinggi; dan
8. pemantapan kawasan untuk penyelamatan lingkungan hidup.

Rencana struktur ruang wilayah kota adalah rencana susunan pusat-pusat pelayanan (rencana sistem perkotaan wilayah kota dalam wilayah pelayanannya) dan sistem jaringan prasarana wilayah kota yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala kota dan mengintegrasikan wilayah kota. Sistem pusat-pusat pelayanan kegiatan kota tersebut di atas dapat berupa pusat perekonomian, rencana kota baru, simpul ekonomi baru, dan/atau koridor ekonomi baru yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan ruang, keberlanjutan pembangunan, dan ketahanan masyarakat. Selanjutnya Rencana pola ruang wilayah kota adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kota yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budi daya kota. Rencana pola ruang wilayah Kota Tarakan terbagi menjadi rencana kawasan peruntukan lindung dan rencana kawasan peruntukan budidaya. Kawasan lindung kota adalah kawasan yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kota, yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kota, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut



ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kota. Kawasan peruntukan lindung di Kota Tarakan terdiri atas :

- a. badan air;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. ruang terbuka hijau;
- e. kawasan cagar budaya; dan
- f. kawasan ekosistem mangrove.

Kawasan peruntukan budi daya kota adalah kawasan di wilayah kota yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Secara umum, kawasan budidaya yang terdapat di Kota Tarakan meliputi badan jalan, kawasan perkebunan rakyat, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan pertambangan dan energi, kawasan peruntukan industri, Kawasan pariwisata, kawasan permukiman, kawasan perdagangan dan jasa, Kawasan perkantoran, kawasan transportasi, dan kawasan pertahanan dan keamanan.

1.3.4. Hubungan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029 dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029

Salah satu dokumen yang ditelaah dalam penyusunan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029 yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS adalah kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak Pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa



antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan (dalam Renstra-PD).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017. Secara nasional telah ditetapkan Rencana Aksi Nasional Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berlanjutan (RAN TPB), dan terdapat amanah untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berlanjutan (RAD TPB). Selanjutnya, TPB juga termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2018 tentang Kajian Lingkungan Hidup Daerah (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai faktor yang dianalisis untuk melihat capaian pembangunan.

TPB jika dianalisis akan menunjukkan bagaimana kinerja perangkat daerah melaksanakan tupoksinya, dengan indikator yang terarah dan terukur serta melihat masing-masing kewenangan pada setiap tingkatan (Nasional, Provinsi dan Kabupaten Kota). Berdasarkan lampiran Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, masing-masing tingkatan pemerintahan memiliki jumlah indikator yang berbeda.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 5-11 memberikan arahan bagaimana pengkajian tujuan pembangunan berkelanjutan dilakukan, diawali dengan identifikasi, pengumpulan data dan analisis capaian pembangunan berkelanjutan yang menghasilkan gambaran capaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Capaian tersebut menjadi dasar perumusan skenario pembangunan berkelanjutan yang berisi alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Alternatif proyeksi tersebut menjadi dasar dalam merumuskan isu strategis, permasalahan dan sasaran strategis daerah. Implementasi TPB di Indonesia untuk pencapaian 17 goals dengan mengembangkan indikator TPB sebanyak 169 target dan 319 indikator yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Pemerintah Kota Tarakan turut berperan aktif dalam mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable*



Development Goals (SDGs). Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang terbagi dalam Tujuan 1 sampai dengan Tujuan 17 dari TPB/SDGs dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tujuan 1: Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimanapun
- b. Tujuan 2: Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan Dan Gizi Yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan
- c. Tujuan 3: Menjamin Kehidupan Yang Sehat Dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia
- d. Tujuan 4: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Untuk Semua
- e. Tujuan 5: Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan
- f. Tujuan 6: Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua
- g. Tujuan 7: Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern Untuk Semua
- h. Tujuan 8: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua
- i. Tujuan 9: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi
- j. Tujuan 10: Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarneegara
- k. Tujuan 11: Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan
- l. Tujuan 12: Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan
- m. Tujuan 13: Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya



- n. Tujuan 14: Melestarikan dan Memanfaatkan secara berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudra untuk Pembangunan Berkelanjutan
- o. Tujuan 15: Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati
- p. Tujuan 16: Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan
- q. Tujuan 17: Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan

1.3.5. Hubungan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029

Penyusunan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029 mempedomani RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Mempedomani RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 dilakukan dengan cara menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, dan program pembangunan daerah jangka menengah daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2029 dengan arah serta prioritas pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Utara periode 2025-2029 yaitu “Terwujudnya Fondasi Transformasi Kalimantan Utara yang Kokoh Sebagai Beranda Depan NKRI yang Maju, Makmur, dan Berkelanjutan. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi yang terdiri dari:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial yang Inklusif dan Berkeadilan.
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan.
3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola yang Kolaboratif dan Inovatif.



4. Memantapkan Supremasi Hukum dan Stabilitas Daerah Sebagai Beranda Depan NKRI.
5. Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi.
6. Memantapkan Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan.
7. Memantapkan Sarana dan Prasarana Berkualitas dan Ramah Lingkungan.
8. Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan Kalimantan Utara untuk Mengawal Indonesia Emas.

1.3.6. Hubungan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029 dengan RKPD, Renstra-PD dan Renja-PD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). Renstra-PD merupakan rencana kerja lima tahunan yang menjabarkan perencanaan kerja dan kinerja tahunan perangkat Daerah untuk menunjang pencapaian visi, misi dan sasaran pembangunan jangka menengah sebagaimana termuat dalam RPJMD serta penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota. Penjabaran rencana tahunan perangkat daerah termuat dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

Selanjutnya, RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai perencanaan tahunan daerah. RKPD menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Renja-PD.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029 adalah menjabarkan visi, misi, dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi seluruh pihak baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mewujudkan visi



pembangunan Kota Tarakan Tahun 2025-2029. Selain itu penyusunan RPJMD ini juga akan memberikan arah pembangunan jangka menengah Kota Tarakan lima tahun kedepan yang holistik-tematik, integratif dan berbasis spasial berdasarkan capaian pembangunan, permasalahan dan isu strategis pembangunan, kemampuan keuangan Daerah, dan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), serta menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tarakan.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan rancangan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029, yaitu:

1. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah terpilih dalam agenda pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.
2. Merumuskan permasalahan pembangunan daerah berdasarkan capaian kinerja pembangunan daerah beberapa tahun terakhir.
3. Merumuskan isu-isu strategis pembangunan lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan aspek internal dan eksternal Kota Tarakan.
4. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Tarakan lima tahun kedepan.
5. Memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD.
6. Memberikan pedoman penyusunan RKPD setiap tahun selama Tahun 2025-2029.
7. Menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
8. Menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Tarakan dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
9. Memungkinkan terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.



1.5. Sistematika Penulisan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029

Sistematika Penulisan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini disajikan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Merumuskan latar belakang penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya RPJMD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis RPJMD serta tanggal pelantikan dan masa bakti/periodisasi kepala daerah.

1.2. Dasar Hukum

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya (RPJPD Kota Tarakan Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029, RTRW, KLHS, dan Rencana Sektoral) yang disertai dengan gambar keterkaitannya.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029.

1.5. Sistematika Penulisan

Mengemukakan sistematika penyusunan dokumen RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029 terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab.



BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan data-data dan informasi dengan pendekatan 4 (empat) aspek pembangunan disertai dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik, antara lain: hasil evaluasi capaian pembangunan daerah 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Pada bagian ini dijelaskan kondisi umum geografis yang meliputi Posisi dan Peran Strategis Daerah, Potensi Sumber Daya Alam, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan, Lingkungan Hidup Berkualitas, Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim, dan Demografi.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Pada bagian ini dijelaskan kondisi umum kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari capaian indikator kinerja pembangunan daerah aspek kesejahteraan Masyarakat yaitu Kesejahteraan Ekonomi, Kesehatan untuk Semua, Pendidikan Berkualitas yang Merata, Perlindungan Sosial yang Adaptif, Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju, Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif.

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

Pada bagian ini dijelaskan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari upaya menunjukkan daya saing daerah yang meliputi Daya Saing Sumber Daya Manusia, Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi, Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru, Transformasi Digital, Integrasi Ekonomi Domestik dan Global, Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, dan Stabilitas Ekonomi Makro.

2.4. Aspek Pelayanan Umum

Pada bagian ini dijelaskan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan yang meliputi Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif, Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi



Substansial, Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan, Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah.

2.5. Gambaran Keuangan Daerah

Pada bagian ini dijelaskan kondisi keuangan daerah yang meliputi penjelasan tentang realisasi APBD tahun Anggaran 2020-2024 yang telah diaudit oleh BPK, dan Proyeksi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026-2030 yang disusun berdasarkan kinerja keuangan tahun 2020-2024.

2.6. Permasalahan dan Isu Strategis

Pada bagian ini dijelaskan kondisi permasalahan yang dirumuskan dari aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, dan pelayanan umum, ataupun hasil penjangkaran aspirasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Perumusan permasalahan yang disajikan dalam subbab ini berupa permasalahan yang bersifat dominan dan Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung. Isu strategis ini dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain: RPJMN 2025-2029, laporan resmi dari lembaga pemerintah/lembaga luar negeri, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, ataupun hasil penjangkaran aspirasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan yang telah menjadi visi dan misi pembangunan daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2029. Visi dan misi kemudian dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang disertai dengan indikator kinerja dan targetnya, serta Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan.



BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini akan menguraikan mengenai program Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030. Perlu penegasan secara eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode 2030-2034 serta Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah yang diukur melalui indikator kinerja Daerah (IKD) Daerah.

BAB VI PENUTUP

Bab ini memuat hal-hal yang perlu untuk dilaksanakan dan diperhatikan untuk pelaksanaan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029 secara terpadu dan berkesinambungan.



BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

Gambaran umum daerah Kota Tarakan akan memberikan gambaran tentang kondisi capaian pembangunan Kota Tarakan pada periode pembangunan sebelumnya. Gambaran umum tersebut merupakan acuan awal penyusunan rencana pembangunan daerah melalui pemetaan secara obyektif kondisi daerah dari aspek geografis dan demografi, kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, pelayanan umum, Gambaran keuangan daerah, serta permasalahan dan isu strategis daerah.

Analisis gambaran umum daerah memberikan pemahaman awal sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah yang dilakukan selama ini dan mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang perlu ditingkatkan pencapaian untuk pembangunan daerah untuk tahun 2025-2029.

Bumi Paguntaka, begitulah sebutan Kota Tarakan. Berlandaskan pada semboyan “Tarakan Kota BAIS” (Bersih, Aman, Indah, Sehat dan Sejahtera), Kota Tarakan berusaha menjadikan dirinya sebagai kota modern dengan visi Bumi Paguntaka, begitulah sebutan Kota Tarakan. Kota “Tarakan” menurut cerita rakyat berasal dari bahasa tidung (suku/kaum nelayan) yang terdiri dari 2 kata yaitu kata “Tarak” (bertemu/tempat singgah) dan “Ngakan” (makan) yang secara harfiah dapat diartikan sebagai “tempat para nelayan untuk istirahat makan, bertemu serta melakukan barter hasil tangkapan dengan nelayan lain”. Wilayah yang pada awalnya adalah perkampungan kecil para nelayan ini kemudian berkembang menjadi kota setelah ditemukan dan dieksploitasinya sumber minyak bumi pada tahun 1896 oleh perusahaan perminyakan milik Pemerintah Hindia Belanda Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM).

Seiring dengan meningkatnya aktivitas eksploitasi minyak bumi di Pulau Tarakan, maka mulailah berdatangan penduduk baik dari daerah sekitar pulau maupun dari luar daerah baik sebagai tenaga kerja yang

dibawa oleh Belanda maupun mereka yang mengadu nasib karena terpicat untuk mencari rezeki.

Sebelum menjadi sebuah kota, Tarakan adalah sebuah kecamatan bagian dari Kabupaten Bulungan. Letak dan posisi yang strategis telah mampu menjadikan kecamatan Tarakan sebagai salah satu sentra Industri di wilayah Kalimantan Timur bagian utara (sekarang Kalimantan Utara) sehingga pemerintah perlu untuk meningkatkan statusnya menjadi Kota Administratif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1981. Pada perkembangan selanjutnya, status Kota Administratif kembali ditingkatkan menjadi Kotamadya berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 yang peresmian dilakukan langsung oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 15 Desember 1997, sekaligus menandai tanggal tersebut sebagai Hari Jadi Kota Tarakan. Dengan adanya perkembangan dan pemekaran wilayah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 23 Tahun 1999, maka Kota Tarakan yang sebelumnya terdiri dari 3 kecamatan dimekarkan menjadi 4 kecamatan yang terdiri dari 20 kelurahan. Di samping itu, berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, status desa yang ada di Kota Tarakan seluruhnya berubah menjadi kelurahan. Undang-undang tersebut juga mengubah penyebutan “Kotamadya Tarakan” menjadi “Kota Tarakan”.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Posisi dan Peran Strategis Kota Tarakan

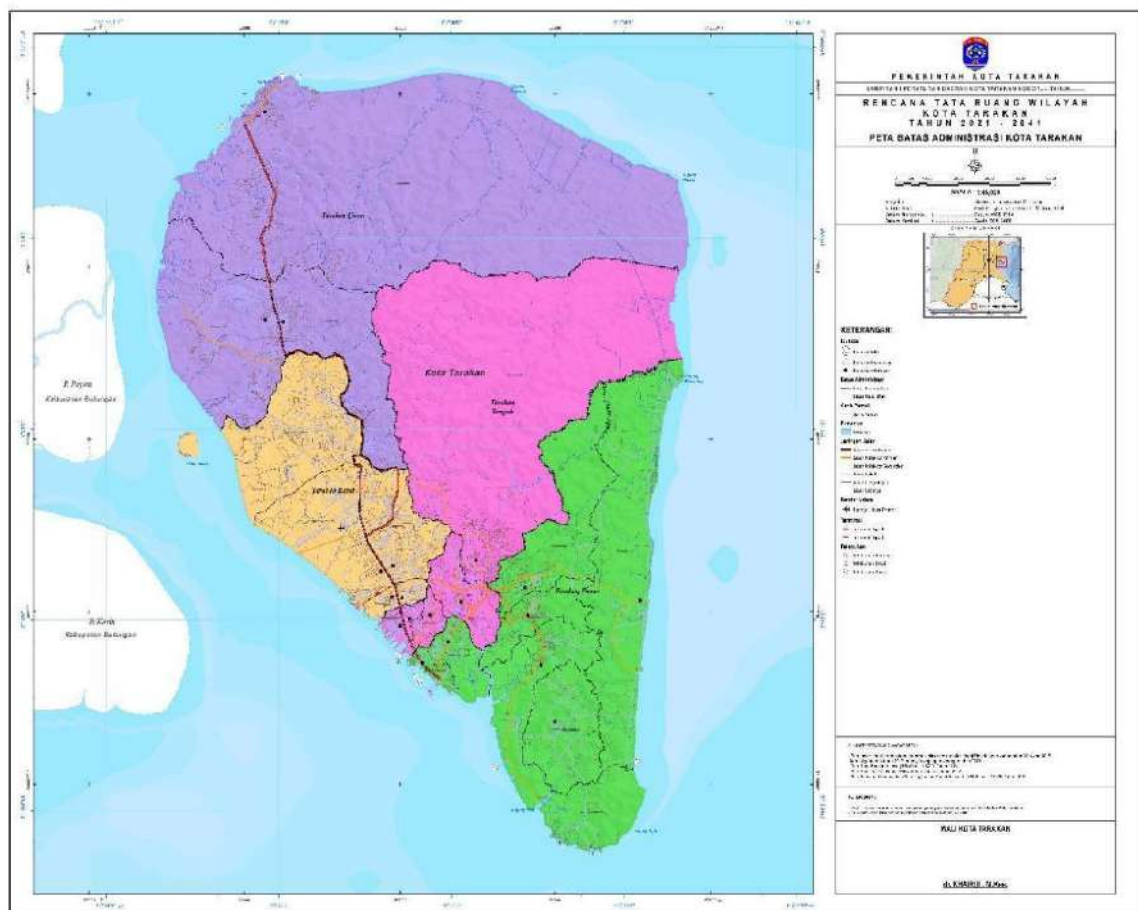
a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Tarakan terdiri dari 2 (dua) pulau yaitu Pulau Tarakan dan Pulau Sadau dengan luas wilayah daratan seluas $\pm 250,80$ Km². Secara administratif pemerintahan, wilayah Kota Tarakan terbagi ke dalam 4 Kecamatan yaitu Tarakan Timur, Tarakan Tengah, Tarakan Barat, dan Tarakan Utara, serta 20 Kelurahan yaitu Kelurahan Pantai Amal, Mamburungan, Mamburungan Timur, Kampung Enam, Kampung Empat, Lingkas, Gunung Lingkas, Sebengkok, Pamusian, Kampung Satu, Selumit, Selumit Pantai, Karang Anyar, Karang Anyar Pantai, Karang

Harapan, Karang Rejo, Karang Balik, Juata Kerikil, Juata Permai, Juata Laut, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bulungan
- Sebelah Timur : Laut Sulawesi
- Sebelah Barat : Kabupaten Bulungan

Gambar 2.1
Peta Adminitratif Kota Tarakan



Sumber: DPUPR Kota Tarakan, 2025



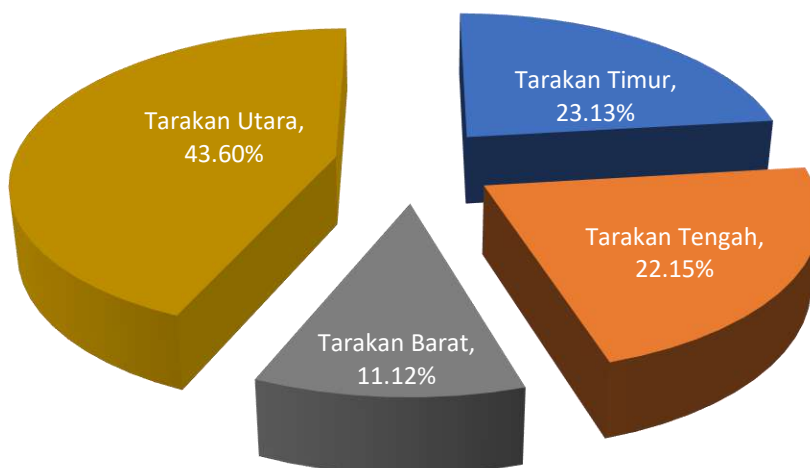
Tabel 2.1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Tarakan

No	Kecamatan	Wilayah (Kilometer persegi)		Kelurahan
		Daratan	Lautan	
1	Tarakan Timur	58,01	-	7 Kelurahan: Kelurahan Pantai Amal, Mamburungan, Mamburungan Timur, Kampung Enam, Kampung Empat, Lingkass, Gunung Lingkass,
2	Tarakan Tengah	55,54	-	5 Kelurahan: Sebengkong, Pamusian, Kampung Satu, Selumit, Selumit Pantai
3	Tarakan Barat	27,89	-	5 Kelurahan: Karang Anyar, Karang Anyar Pantai, Karang Harapan, Karang Rejo, Karang Balik
4	Tarakan Utara	109,36	-	3 kelurahan: Juata Kerikil, Juata Permai, Juata Laut
Tarakan		250,80	-	20 kelurahan

Sumber: Kota Tarakan Dalam Angka 2025, diolah

Kecamatan Tarakan Utara merupakan kecamatan dengan wilayah daratan terluas di Kota Tarakan dengan luas 109,36 Km² atau sekitar 43,60 persen terhadap luas wilayah daratan Kota Tarakan. Sedangkan wilayah terkecil di Kota Tarakan adalah Kecamatan Tarakan Barat yaitu seluas 27,89 Km² atau 11,12 persen terhadap luas wilayah daratan Kota Tarakan.

Gambar 2.2
Persentase Luas Daratan



Sumber: Kota Tarakan Dalam Angka 2025, diolah

b. Letak dan Kondisi Geografis

Kota Tarakan secara geografis terletak pada 3°14'30" Lintang Utara – 3°26'37" Lintang Utara dan 117°30'50" Bujur Timur – 117°40'12" Bujur Timur. Kota Tarakan berada di sebuah pulau kecil yang memiliki posisi strategis dimana selama ini berfungsi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah utara Kalimantan dan pintu gerbang utama bagi Provinsi Kalimantan Utara sekaligus menjadi pusat transit perdagangan antara Indonesia-Malaysia-Filipina. Selain itu, karena letaknya yang strategis ini pula, Kota Tarakan menjadi salah satu bagian dari Kota Segitiga Pertumbuhan yang selama ini dirintis dalam konteks BIMP-EAGA bersama dengan Tawau (Malaysia) dan Tawitawi. Segitiga pertumbuhan tersebut diharapkan menjadi kutub pertumbuhan ekonomi sehingga menjadi motor penggerak perekonomian daerah sekitar khususnya Kabupaten Nunukan, Bulungan, Malinau, dan Tana Tidung.

Dalam RTRW Nasional, Kota Tarakan ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) untuk mendukung wilayah hinterland-nya yang kaya akan hasil hutan, pertanian, dan perkebunan. Kota Tarakan dapat dijadikan sebagai pusat industri pengolahan hasil pertanian dan kehutanan serta pendistribusian barang dan jasa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012, wilayah Provinsi Kalimantan Timur

mengalami pemekaran menjadi 2 (dua) provinsi dimana 5 (lima) kabupaten/kota di wilayah utara pecah menjadi Provinsi Kalimantan Utara. Kelima daerah pembentuk Provinsi Kalimantan Utara tersebut adalah Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung.

c. Topografi

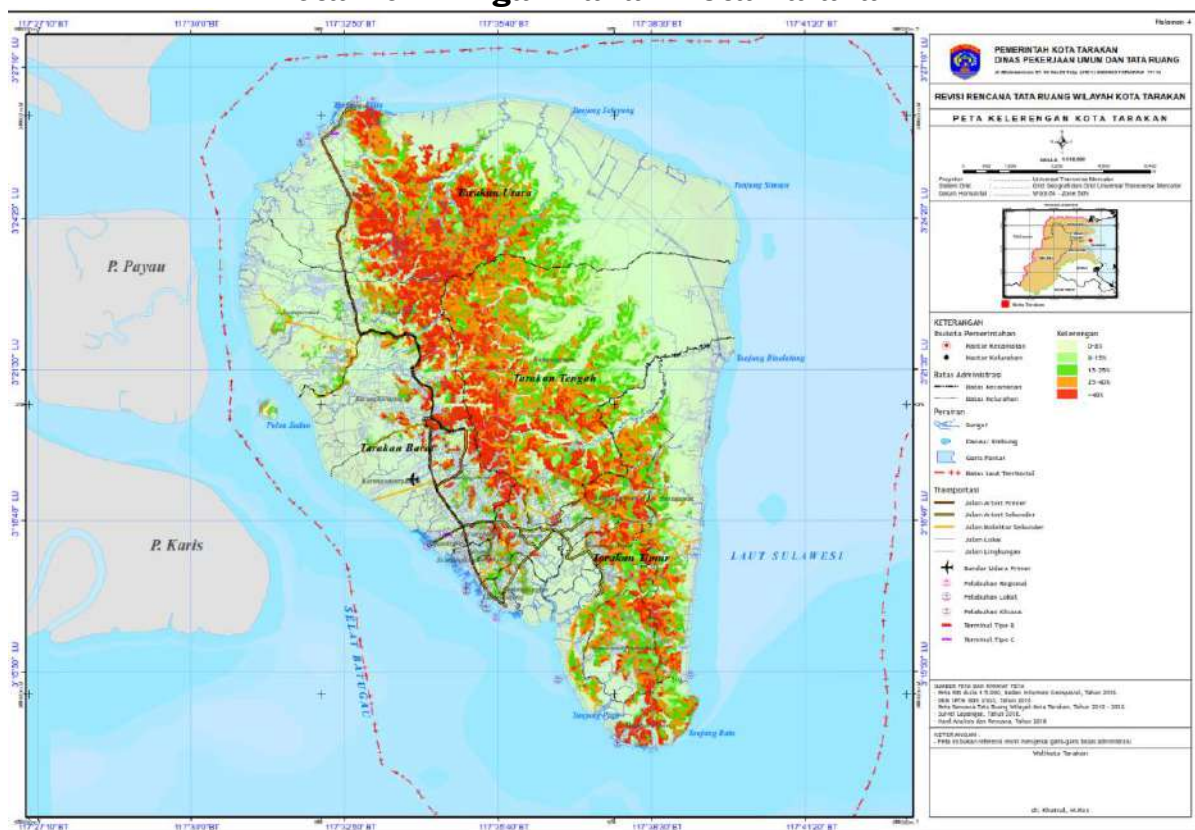
Wilayah Tarakan didominasi daerah dataran dengan diselingi daerah bergelombang hingga berbukit di bagian tengah pulau. Distribusi terbesar merupakan daerah landai (0-2% dan 2,1 -15%) dengan jumlah 179,13 Km² (71,43%) yang sebagian besar berada pada Kecamatan Tarakan Utara (77,66 Km²). Kemiringan lahan curam umumnya hanya berada pada kecamatan Tarakan Timur (3,22 Km²) dan Kecamatan Tarakan Utara (10,65 Km²).

Tabel 2.2
Luas dan Penyebaran Masing-masing Kemiringan Lahan

No	Kemiringan Kelas Lereng (%)	Luas Wilayah (Km ²)				Jumlah
		Tarakan Timur	Tarakan Tengah	Tarakan Barat	Tarakan Utara	
1	0 - 2	29,01	14,09	16,85	61,14	121,09 (48,28%)
2	2,1 - 15	1,98	31,72	7,82	16,52	58,04 (23,15%)
3	15,1 - 40	23,80	9,13	3,22	21,04	57,19 (22,80%)
4	> 40	3,22	0,60	0,00	10,65	14,47 (5,77%)
Jumlah		58,01	55,54	27,89	109,35	250,80 (100%)

Sumber: Kota Tarakan Dalam Angka 2025, diolah

Gambar 2.3
Peta Kemiringan Lahan Kota Tarakan



Sumber: RTRW Kota Tarakan Tahun 2021-2041

Berdasarkan elevasi (ketinggian dari permukaan laut), dataran di Kota Tarakan di masing-masing kecamatan, yaitu: Tarakan Timur (12,00 mdpl), Tarakan Tengah (15,00 mdpl), Tarakan Barat (28,00 mdpl), dan Tarakan Utara (17,00 mdpl)

Tabel 2.3
Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota Kota Menurut Kecamatan di Kota Tarakan, 2023

No	Kecamatan	Tinggi wilayah (mdpl)	Jarak ke Ibukota
1	Tarakan Timur	12,00	4,70
2	Tarakan Tengah	15,00	0,75
3	Tarakan Barat	28,00	3,61
4	Tarakan Utara	17,00	18,63

Sumber: Kota Tarakan Dalam Angka, 2025

d. Geologi

Kota Tarakan secara geologis memiliki orientasi fisiografi yang berhubungan dengan proses struktur yang terjadi serta jenis batuan yang menyusun kawasan Kota Tarakan. Sebagian besar Kota Tarakan terdiri dari unsur geologi berupa satuan (TPQS), yaitu batu pasir kuarsa, batu lempung, batu lanau, lignit dan konglomerat. Komposisi struktur geologi tersebut tersebar di Kota Tarakan seluas 16.058 Ha (64,03% dari luas daratan Kota Tarakan). Sedangkan sisanya berupa satuan (Qa), yaitu lumpur, lanau, pasir, kerikil, dan kerakal seluas 9.022 Ha (35,97% dari luas daratan Kota Tarakan).

Pulau Tarakan secara geologis terdiri dari 2 (dua) satuan besar, yaitu satuan wilayah perbukitan antiklin dan satuan wilayah daratan (terdiri atas dataran pantai, dataran banjir dan dataran sungai). Masing-masing satuan mempunyai karakteristik geologi yang berbeda, seperti bentang alam, jenis batuan, hidrogeologi, serta karakteristik dinamika bumi yang sering berkonotasi bencana alam. Kondisi perbukitan di Pulau Tarakan merupakan sebuah antiklin yang sumbunya memanjang arah Barat Laut – Tenggara dimana terdiri dari batu lempung dan lapisan tipis batubara berumur tersier yang berselang-seling satu dan lainnya. Di bagian dalam antiklin ditemukan cadangan minyak dan gas bumi.

e. Hidrologi

Banyaknya kawasan perbukitan di Kota Tarakan dengan intensitas curah hujan cukup tinggi menyebabkan seringnya dijumpai aliran sungai dan anaknya yang bermuara di pantai Timur dan Barat. Aliran sungai tersebut yang melewati daerah perkotaan, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai saluran pembuangan utama (primer) bagi aliran limpasan dan limbah domestik penduduk. Dalam perencanaan Dinas PU Pengairan digunakan sungai sebagai saluran pembuangan utama (primer), dapat diidentifikasi bahwa daerah layanan dari sistem drainase ini dibagi berdasarkan aliran sungai.

Gambar 2.4
Peta Daerah Aliran Sungai Kota Tarakan

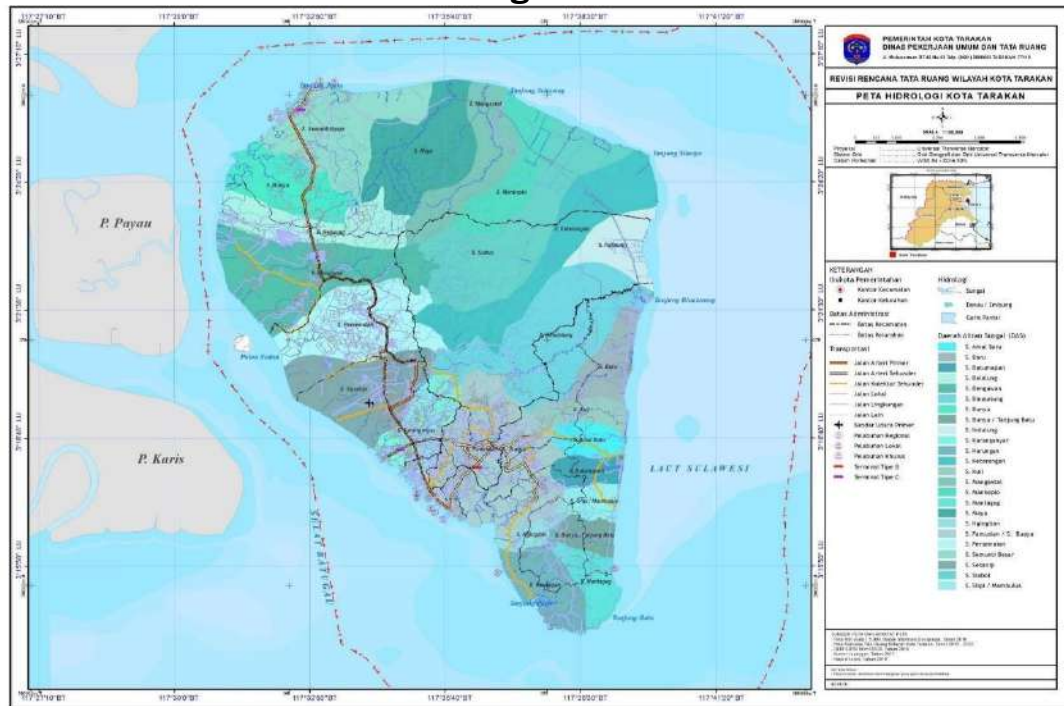


Sumber: DPUPR Kota Tarakan, 2025

Dalam memenuhi kebutuhan air Kota Tarakan selain digunakannya air permukaan yang berasal dari sungai, maka pengambilan air tanah di Pulau Kota Tarakan cukup potensial dalam memenuhi cadangan air minum bagi Kota Tarakan. Oleh karena itu, pemerintah Kota Tarakan memberikan wilayah-wilayah konservasi air tanah yang digunakan sebagai cadangan air minum, antara lain adalah :

- 1) Konservasi Mangrove yang berada menyebar di sepanjang pantai Pulau Tarakan.
- 2) Konservasi Mutlak yang berada relatif di kawasan Hutan Lindung (bagian Utara dan Tengah) Kota Tarakan.
- 3) Konservasi Pemanfaatan yang berada di bagian Barat dan Timur Kota Tarakan.
- 4) Konservasi Penyangga yang berada di antara konservasi mutlak dan pemanfaatan.

Gambar 2.5
Peta Hidrologi Kota Tarakan



Sumber: RTRW Kota Tarakan 2021-2041

f. Klimatologi

Kota Tarakan yang beriklim tropis mempunyai musim yang hampir sama dengan wilayah Indonesia pada umumnya, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan biasanya terjadi pada bulan Oktober sampai dengan bulan April, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan April sampai dengan bulan Oktober. Keadaan ini terus berlangsung setiap tahun yang diselingi musim peralihan pada bulan-bulan tertentu. Namun dalam tahun-tahun terakhir ini, keadaan musim di Kalimantan Utara termasuk Kota Tarakan kadang tidak menentu. Pada bulan-bulan yang seharusnya turun hujan terkadang tidak turun hujan sama sekali begitu juga sebaliknya.

Suhu udara di suatu tempat antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat tersebut terhadap permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Secara umum, Kota Tarakan beriklim panas dengan rata-rata suhu udara pada tahun 2024 adalah 28,20°C, dengan suhu udara maksimum pada 31,20°C dan suhu udara minimum pada 27,00°C. Rata-rata kelembaban udara di Kota Tarakan pada tahun 2024 adalah 85,30

persen dengan kelembaban udara maksimum pada 94,10 persen dan kelembaban udara minimum pada 77,10 persen. Kondisi tekanan udara di Kota Tarakan pada tahun 2024 adalah 1.009,8 mb dengan kecepatan angin 3,2 knot dan penyinaran matahari mencapai 67,8 persen. Untuk kondisi hujan, rata-rata curah hujan di Kota Tarakan pada tahun 2024 adalah 4.274,7 mm3 dengan rata-rata jumlah hari hujan pada tahun 2024 adalah 281 hari.

Data Curah Hujan Menurut Bulan
di Stasiun Meteorologi Juwata kota Tarakan Tahun 2024

Bulan	Jumlah Curah Hujan	Jumlah Hari Hujan	Penyinaran Matahari
	mm/bulan	hari	jam
Januari	191.00	22	5.3
Februari	238.40	22	5.6
Maret	310.90	19	5.6
April	343.90	23	5.1
Mei	530.80	22	5.8
Juni	432.60	30	4.7
Juli	316.20	21	5.5
Agustus	330.90	27	5.5
September	212.75	18	5.2
Oktober	456.00	25	5.9
November	420.20	24	6.7
Desember	491.00	28	4.3

Sumber : Kota Tarakan Dalam Angka Tahun 2025

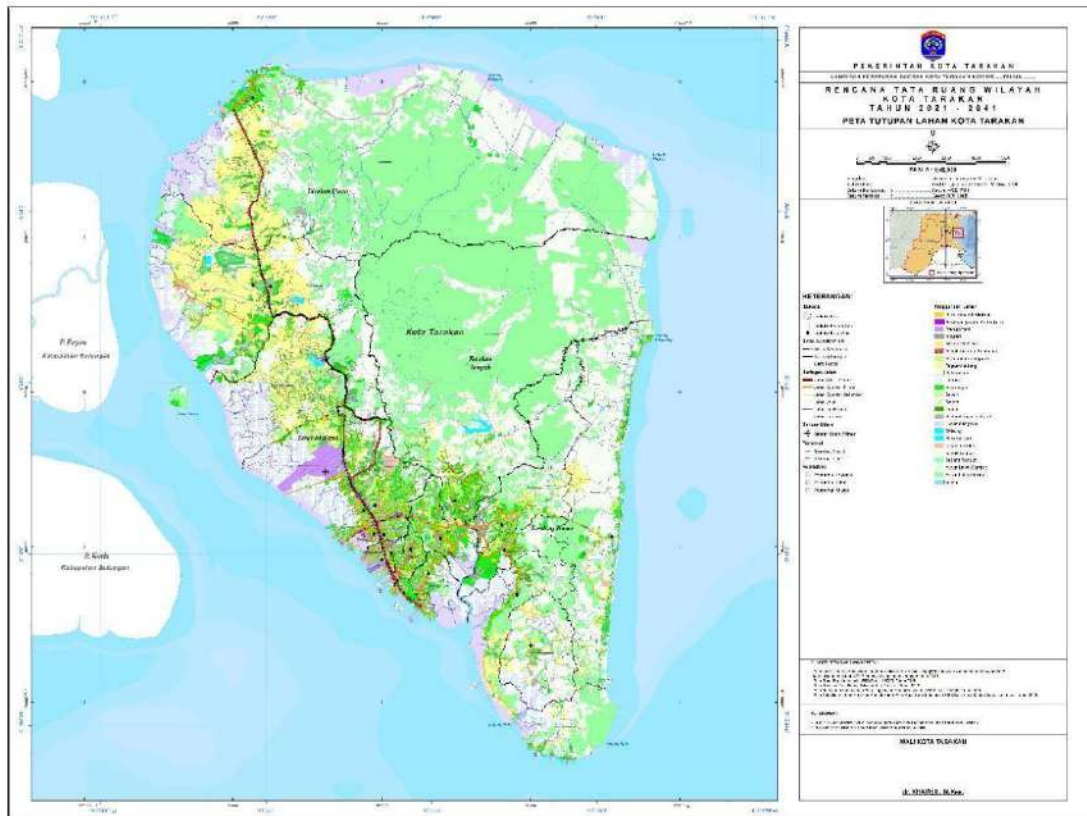
g. Penggunaan Lahan Eksisting

Secara spasial, penggunaan lahan eksisting Kota Tarakan terpusat di bagian barat dan tengah Kota Tarakan dengan sumbu perkembangan utara-selatan. Berkembangnya daerah ini terutama didukung oleh

kemudahan aksesibilitas berupa pelabuhan, baik pelabuhan penumpang dan barang maupun pelabuhan minyak. Selain itu, sebagian besar penduduk di wilayah pantai barat ini memiliki ketergantungan yang besar terhadap keberadaan pelabuhan tersebut karena adanya keterkaitan aktivitas, sehingga perkembangan daerah ini memiliki sinergi yang kuat dengan aktivitas penduduk setempat. Kawasan Pantai Barat Tarakan juga merupakan pusat berbagai kegiatan ekonomi informal, pusat kegiatan perdagangan, dan perkantoran non pemerintahan. Permukiman penduduk di kawasan pantai barat telah berkembang sebagai perkampungan padat dan tidak terencana. Permukiman ini berkembang di atas tanah atau rawa pasang surut yang telah dikeringkan namun kurang ditunjang dengan penyediaan infrastruktur yang memadai.

Sebaliknya permukiman di kawasan tengah berkembang lebih terencana yang ditunjang oleh fasilitas sosial seperti rumah sakit, sekolah, lapangan terbuka, dan perkantoran pemerintahan. Meskipun demikian, pada perkembangannya tumbuh pula permukiman baru di pinggiran secara tidak terencana ke arah timur dan selatan, diantaranya telah merambah ke kaki perbukitan. Selain itu, perkembangan permukiman di kota Tarakan juga telah menyebar di ujung utara pulau dengan basis kegiatan perikanan dan industri pengolahan kayu. Kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi terletak di tengah pulau dengan tiga lokasi konsesi. Sedangkan kegiatan industri pengolahan kayu tersebar di pantai utara hingga selatan yang memiliki akses langsung ke laut pada masing-masing dermaga.

Gambar 2.6
Peta Penggunaan Lahan Kota Tarakan



Sumber: RTRW Kota Tarakan 2021-2041

Alokasi kawasan lindung Kota Tarakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan adalah seluas 9,720.30 Ha (38,90%), sedangkan kawasan budidaya sebesar 15.265,72 Ha (61,10%). Rencana detail pola tata ruang sesuai dengan Revisi RTRW Kota Tarakan dapat dilihat berdasarkan tabel berikut ini:



**Tabel 2.4
Rencana Pola Ruang Kota Tarakan Tahun 2021-2041**

NO	KAWASAN		KODE	RENCANA 2021-2041		
				LUAS (M2)	LUAS (HA)	(%)
1	Kawasan Lindung					
1.1	Badan Air			1,573,106.79	157.31	0.63
1.2	Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	Kawasan Hutan Lindung	HL	69,126,019.68	6,912.60	27.67
1.3	Kawasan Perlindungan Setempat		PS	5,839,664.00	583.97	2.34
1.4	Ruang Terbuka Hijau	Rimba Kota	RTH-1	10,160,005.22	1,016.00	4.07
		Taman Kota	RTH-2	1,156,464.86	115.65	0.46
		Taman Kecamatan	RTH-3	1,834,874.46	183.49	0.73
		Taman Kelurahan	RTH-4	495,074.53	49.51	0.20
		Pemakaman	RTH-7	678,810.66	67.88	0.27
1.5	Ekosistem Mangrove	Ekosistem Mangrove	EM	6,275,968.43	627.60	2.51
1.6	Kawasan Cagar Budaya	Kawasan Cagar Budaya	CB	63,053.03	6.31	0.03
	Jumlah Kawasan Lindung			97,203,041.66	9,720.30	38.90
2	Kawasan Budidaya					
2.1	Badan Jalan			922,175.98	92.22	0.37
2.2	Kawasan Perkebunan Rakyat	Kawasan Perkebunan Rakyat	KR	33,940,557.71	3,394.06	13.58
2.3	Kawasan Pertanian	Pertanian Holtikultura	P-2	243,590.48	24.36	0.10
		Pertanian Tanaman Pangan	P-1	122,386.16	12.24	0.05
		Peternakan	P-4	602,030.54	60.20	0.24
2.4	Kawasan Perikanan	Perikanan Budidaya	IK-2	4,752,996.11	475.30	1.90
2.5	Kawasan Pertambangan Dan Energi	Kawasan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi	MG	4,111,758.40	411.18	1.65
		Kawasan Pembangkit Tenaga Listrik	PTL	91,234.58	9.12	0.04
2.6	Kawasan Peruntukan Industri		KPI	33,659,365.48	3,365.94	13.47
2.7	Kawasan Pariwisata		W	2,664,981.82	266.50	1.07



NO	KAWASAN		KODE	RENCANA_2021-2041		
				LUAS (M2)	LUAS (HA)	(%)
2.8	Kawasan Pemukiman	Kawasan Perumahan	R	55,576,863.13	5,557.69	22.24
		Kawasan Fasilitas Umum Dan Fasilitas Sosial	FUS	1,769,716.87	176.97	0.71
		Kawasan Infrastruktur Perkotaan	IR	493,926.84	49.39	0.20
2.9	Kawasan Perdagangan Jasa		K	5,488,188.55	548.82	2.20
2.1	Kawasan Perkantoran		KT	2,295,574.40	229.56	0.92
2.11	Kawasan Transportasi		TR	2,822,352.89	282.24	1.13
2.12	Kawasan Pertahanan Keamanan		HK	3,099,507.25	309.95	1.24
	Jumlah Kawasan Budidaya			152,657,207.19	15,265.72	61.10
	Total Luas Kawasan Lindung + Kawasan Budidaya			249,860,248.86	24,986.02	100.00

Sumber : RTRW Kota Tarakan Tahun 2021-2041

Tabel 2.5
Rencana Penyediaan RTH Kota Tarakan Tahun 2021-2041

NO	URAIAN	LUAS (HA)		(%)
1	LUAS WILAYAH		24,986.02	
2	PEMBAGI UNTUK RTH			
	Badan Air	157.31		
	Hutan Lindung	6,912.60		
	Perkebunan Rakyat	3,394.06		
	Pertanian Tanaman Pangan	12.24		
	Pertanian Hortikultura	24.36		
	JUMLAH PEMBAGI UNTUK RTH		10,500.57	
3	LUAS PEMBAGI RTH (L.WILAYAH - L. PEMBAGI RTH)		14,485.46	
4	RENCANA RTH KOTA TARAKAN			
	Kawasan Perlindungan Setempat	583.97		
	Rimba Kota	1,016.00		
	Taman Kota	115.65		
	Taman Kecamatan	183.49		
	Taman Kelurahan	49.51		
	Pemukaman	67.88		
	Ekosistem Mangrove	627.60		



NO	URAIAN	LUAS (HA)		(%)
	JUMLAH RENCANA RTH KOTA TARAKAN		2,644.09	18.25
	KEWAJIBAN RTH KOTA TARAKAN		2,897.09	20
	KEKURANGAN RTH KOTA TARAKAN		253.01	1.75

Sumber: RTRW Kota Tarakan 2021-2041

Pembangunan berbasis wilayah adalah pembangunan yang bertujuan untuk mengembangkan wilayah. Infrastruktur yang direncanakan untuk dibangun adalah karena kebutuhan pengembangan wilayah tersebut. Pengembangan wilayah diperlukan karena kondisi wilayah yang berbeda-beda karena alasan ekonomi dan potensi setiap daerah yang berbeda-beda, seperti potensi sumber daya alam.

Berdasarkan Revisi RTRW Kota Tarakan 2021-2041 dapat dijelaskan bahwa Kota Tarakan memiliki karakteristik wilayah daerah pesisir dengan Total kawasan budidaya sebesar 15.265,72 ha dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan lain-lain dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah.

h. Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya

Alokasi kawasan lindung berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Kota Tarakan seluas 9.720,30 Ha. Dari kawasan tersebut terdapat hutan lindung seluas 6.912,60 Ha, kawasan perlindungan setempat seluas 583,97 ha, kawasan ruang terbuka hijau seluas 1.432,53 ha, kawasan ekosistem mangrove seluas 627,60 ha, kawasan cagar budaya seluas 6,31 ha.

Alokasi Kawasan budidaya seluas 15.265,72 ha. Dari Kawasan tersebut terdapat badan jalan seluas 92,22 ha, kawasan perkebunan rakyat seluas 3.394,06 ha, kawasan pertanian seluas 96,8 ha, kawasan perikanan seluas 475,30 ha, kawasan pertambangan dan energi seluas 420,30 ha, kawasan peruntukan industri seluas 3.365,94 ha, kawasan pariwisata seluas 266,50 ha, kawasan pemukiman seluas 5.784,05 ha, kawasan perdagangan dan jasa seluas 548,82 ha, kawasan perkantoran



seluas 229,56 ha, kawasan transportasi seluas 282,24 ha dan kawasan pertahanan keamanan seluas 309,95 ha.

i. Fungsi dan Kontribusi Kota Tarakan

Sebagai kota yang memiliki posisi strategis di Kalimantan Utara, Tarakan memiliki beberapa kontribusi penting terhadap wilayah sekitarnya maupun dalam skala yang lebih luas, antara lain:

- Pusat Perdagangan dan Jasa: Tarakan menjadi pusat ekonomi utama di Kalimantan Utara dengan aktivitas perdagangan yang berkembang pesat, baik untuk kebutuhan domestik maupun ekspor.
- Sektor Perikanan: Letaknya yang berbatasan langsung dengan Laut Sulawesi menjadikan Tarakan sebagai pusat perikanan yang menyuplai hasil laut ke berbagai daerah di Indonesia.
- Sumber Minyak dan Gas: Tarakan memiliki cadangan minyak bumi yang telah dieksploitasi sejak zaman kolonial, menjadikannya salah satu kota dengan sejarah industri migas tertua di Indonesia.
- Industri Pengolahan Kayu dan Perkebunan: Selain migas, Tarakan juga mendukung industri kayu dan perkebunan seperti kelapa sawit.
- Pelabuhan Internasional dan Domestik: Tarakan memiliki pelabuhan yang berperan sebagai pintu gerbang perdagangan dan distribusi barang ke Kalimantan Utara dan sekitarnya.
- Bandar Udara Internasional Juwata: Salah satu bandara terbesar di Kalimantan yang melayani penerbangan domestik dan internasional, mempermudah konektivitas dengan wilayah lain.
- Jalur Transportasi Laut: Tarakan menjadi hub transportasi laut yang menghubungkan daerah-daerah terpencil di Kalimantan Utara dan sekitarnya.
- Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan: Tarakan memiliki ekosistem mangrove yang luas dan menjadi habitat bagi bekantan, spesies primata endemik Kalimantan.
- Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan: potensi minyak dan gas yang besar, pemerintah berupaya mengembangkan kebijakan eksploitasi yang tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

- Keanekaragaman Etnis dan Budaya: Kota Tarakan dihuni oleh berbagai suku seperti Tidung, Dayak, Bugis, Jawa, dan lainnya, menjadikannya pusat interaksi budaya di Kalimantan Utara.
- Sejarah Perang Dunia II: Tarakan memiliki nilai sejarah tinggi sebagai lokasi penting dalam Perang Dunia II, yang kini menjadi daya tarik wisata sejarah.

Kota Tarakan memiliki posisi geografis yang strategis dengan kontribusi penting dalam sektor ekonomi, transportasi, lingkungan, dan sosial budaya. Sebagai pusat ekonomi dan infrastruktur di Kalimantan Utara, Tarakan berperan dalam mendukung pertumbuhan regional serta menjaga keseimbangan lingkungan hidup.

2.1.2. Potensi Sumber Daya Alam Kota Tarakan

Kota Tarakan memiliki beragam sumber daya alam yang menjadi keunggulan komparatif daerah. Potensi ini dapat dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah beberapa potensi utama sumber daya alam Kota Tarakan:

a. Sumber Daya Perikanan dan Kelautan

Tarakan memiliki perairan yang kaya akan sumber daya ikan, kepiting bakau, udang, dan hasil laut lainnya, yang menjadi komoditas unggulan ekspor. Untuk itu perlu dioptimalkan peningkatan sektor perikanan budidaya (seperti tambak udang dan kepiting) guna mengurangi eksploitasi berlebihan dari laut, pengembangan industri pengolahan hasil laut untuk meningkatkan daya saing di pasar nasional dan internasional, dan penerapan prinsip perikanan berkelanjutan agar ekosistem laut tetap terjaga.



Tabel 2.6
Pemasaran Hasil Perikanan Kota Tarakan Tahun 2019-2023

No.	Tahun	Udang (Ton)	Ikan Bandeng (Ton)	Kepiting (Ton)	Rumput Laut (Ton)
1.	2019	10.358,69	7.247,63	2.212,55	21.753,26
2.	2020	10.374,79	7.546,75	2.211,54	26.445,92
3.	2021	12.383,85	11.466,19	4.585,56	29.490,54
4.	2022	10.914,00	15.737,82	6.142,34	30.119,94
5.	2023	11.032,15	17.319,93	6.436,58	30.802,10

b. Potensi Pertanian

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang mempunyai peran dalam ekonomi wilayah Kota Tarakan. Atas dasar tersebut, kegiatan pertanian di Tarakan harus didorong untuk berkembang dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Konsep pengembangan dan pembangunan pertanian dengan memanfaatkan sumber daya alam daerah secara berkelanjutan, yaitu dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial secara seimbang.

Dalam pembangunan pertanian sebagai pilar ekonomi masyarakat, maka harus memperhatikan atau menetapkan komoditas unggulan yang ramah lingkungan dan mempunyai nilai ekonomi tinggi. Pertanian tanaman pangan yang potensial untuk dikembangkan meliputi padi dan palawija (jagung, kacang-kacangan), ubi-ubian, dan hortikultura (sayuran dan buah-buahan). Beras merupakan bahan makanan pokok masyarakat, sehingga untuk dapat mencukupi kebutuhan beras secara aman, maka tanaman padi mendapat skala prioritas dalam pengembangan dan peningkatan produksi untuk dapat mengimbangi pertumbuhan penduduk agar tidak terjadi bahaya kelaparan. Namun demikian, Kota Tarakan sampai saat ini belum mampu swasembada beras dan masih harus mendatangkan beras dari luar wilayah terutama dari Pulau Jawa untuk mencukupi kebutuhan beras penduduk.



Tabel 2.7
Perkembangan Produksi Padi dan Beras Kota Tarakan
Tahun 2020-2024

No	Tahun	Produksi Padi (Ton)	Produksi Beras (Ton)
1.	2020	15	9
2.	2021	51	30
3.	2022	62	37
4.	2023	47	28
5.	2024	25	15

Lahan yang cocok di Tarakan adalah untuk pertanian hortikultura seperti sayur-mayur dan buah-buahan, yang berkembang sebagai salah satu komoditas unggulan. Untuk itu perlu dioptimalkan diversifikasi hasil pertanian dan penerapan teknologi pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas, penerapan pertanian berkelanjutan.

Tabel 2.8
Produksi Tanaman sayuran Kota Tarakan
Tahun 2020-2024

No	Hasil Produksi	2020	2021	2022	2023	2024
1	Bawang Daun (Kw)	6316	8140	9680	13820	15289
2	Bayam (Kw)	2	250	6316	8140	9680
3	Buncis (Kw)	6858	7085	24995	27795	31170
4	Cabai Rawit (Kw)	9483,6	26983	31756	40100	44610

c. Potensi Ekowisata dan Pariwisata Alam

Wisata bahari, seperti pantai dan ekowisata mangrove, yang menarik wisatawan domestik dan mancanegara, dan Wisata sejarah Perang Dunia II yang menjadi daya tarik bagi pecinta sejarah. Untuk itu perlu dioptimalkan pengembangan infrastruktur wisata yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alami, meningkatkan promosi dan kerja sama dengan sektor swasta untuk mengelola destinasi wisata berbasis alam secara profesional, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dalam sektor pariwisata.



Pantai Amal yang terletak di Kota Tarakan, merupakan salah satu kawasan pesisir yang menyimpan potensi luar biasa untuk dikembangkan sebagai destinasi ekowisata berkelanjutan. Dengan panorama alam yang indah, ombak yang relatif tenang, dan kekayaan budaya lokal seperti tradisi Iraw Tengkeyu, kawasan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Tidak hanya itu, hasil laut seperti kerang kapah menjadi kekhasan kuliner yang dapat menjadi identitas gastronomi wilayah. Namun demikian, potensi tersebut dihadapkan pada berbagai tantangan serius, mulai dari pencemaran lingkungan akibat aktivitas budidaya rumput laut yang menghasilkan limbah plastik, hingga minimnya keterlibatan pelaku UMKM lokal dalam sistem pengelolaan pariwisata yang terstruktur dan berkelanjutan.

Ekowisata bukan sekadar menikmati keindahan alam, melainkan turut mengambil bagian dalam menjaga kelestariannya. Prinsip-prinsip ini menjadi sangat relevan ketika diterapkan di Pantai Amal, di mana masyarakat pesisir memiliki keterikatan langsung dengan sumber daya alam yang ada. Budidaya rumput laut yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat, dapat diubah menjadi pengalaman wisata edukatif, yang tidak hanya memperluas nilai ekonomis dari aktivitas tersebut, tetapi juga meningkatkan kesadaran ekologis baik bagi pelaku maupun pengunjung.

Peluang pengembangan ekowisata Pantai Amal sangat terbuka. Aktivitas budidaya rumput laut dapat dikemas sebagai atraksi wisata edukasi yang melibatkan wisatawan secara langsung dalam proses pembibitan, penanaman, hingga panen. Masyarakat, khususnya petani rumput laut, dapat didorong untuk berperan sebagai pemandu wisata dan edukator lingkungan.

Produk khas seperti kerang kapah dapat diolah menjadi menu kuliner unik seperti sate kerang atau sup kerang khas Pantai Amal, yang kemudian menjadi bagian dari pengalaman wisata yang tidak terlupakan.

Dalam konteks ini, pelibatan UMKM menjadi krusial, tidak hanya dalam produksi kuliner, tetapi juga dalam pengembangan kerajinan tangan, pembuatan souvenir, dan pertunjukan seni pantai yang

menampilkan kearifan lokal.

Agar potensi ini dapat berkembang optimal, diperlukan strategi yang memadukan pelestarian lingkungan dengan pemberdayaan ekonomi lokal. Salah satu pendekatan yang relevan adalah menetapkan zona konservasi di kawasan budidaya rumput laut yang sekaligus berfungsi sebagai lokasi wisata edukatif.

Di sisi lain, pelaku UMKM perlu difasilitasi dalam bentuk pelatihan pengolahan produk turunan rumput laut seperti sabun, masker wajah, atau makanan ringan.

Digitalisasi UMKM juga menjadi kebutuhan mendesak agar produk lokal dapat dipasarkan melalui platform daring dan terhubung langsung dengan wisatawan. Kolaborasi antara universitas, pemerintah daerah, dan komunitas lokal dapat mendorong terciptanya ekosistem bisnis hijau berbasis masyarakat.

Pembangunan ekowisata di Pantai Amal memerlukan dukungan kebijakan yang bersifat lintas sektor. Pemerintah daerah perlu merancang tata ruang kawasan pantai yang mencakup zona konservasi, area edukasi wisata, dan pusat kegiatan ekonomi UMKM.

Kolaborasi antara Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi dan UMKM, akademisi, pelaku usaha, serta komunitas lokal harus diperkuat agar kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan nyata di lapangan. Transformasi dari kegiatan budidaya menjadi atraksi wisata akan mendorong pergeseran paradigma masyarakat dari sekadar penghasil komoditas menjadi pelaku aktif dalam ekosistem wisata berkelanjutan. Data wisatawan di Kota Tarakan menunjukkan peningkatan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara. Pada tahun 2024, tercatat sekitar 300 ribu wisatawan domestik dan 13 ribu wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Tarakan.

Potensi sumber daya alam Kota Tarakan yang mencakup perikanan, pertanian, dan ekowisata memberikan peluang besar untuk pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, potensi ini dapat terus dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan



masyarakat tanpa merusak lingkungan. Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi kunci dalam memaksimalkan manfaat sumber daya alam untuk masa depan Tarakan yang lebih baik.

2.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 mendefinisikan daya dukung lingkungan sebagai kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antar keduanya. Binder dan lopez (2000) mendefinisikan daya dukung sebagai jumlah maksimum populasi yang dapat didukung oleh suatu wilayah sesuai dengan kemampuan teknologi yang ada. Sedangkan daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya.

Merujuk pada definisi tersebut dan ketersediannya informasi yang relevan, pendekatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam kajian ini dilakukan dengan melihat ketersediaan air bersih dan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Tarakan.

Analisis ambang batas dan status DDLH penyedia air secara kuantitatif dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: perhitungan ketersediaan air, perhitungan kebutuhan air untuk lahan dan domestik, perhitungan ambang batas penduduk, serta penentuan status DDLH penyedia air di setiap grid. Daya dukung dan daya tampung air di Kota Tarakan merupakan agregasi nilai DDDTLH seluruh grid-grid pada wilayah yang telah dikaji jasa ekosistemnya/jasa lingkungannya, dan teridentifikasi bahwa untuk daya dukung dan daya tampung penyedia air “Belum Terlampaui”.

Tabel 2.9
Luasan Status Daya Dukung Air di Kota Tarakan

KECAMATAN	Terlampauai		Belum Terlampauai		TOTAL	
	(Ha)	%	(Ha)	%	(Ha)	%
Tarakan Timur	4,77	0,02	5.747,78	23,00	5.752,55	23,02
Tarakan Tengah	2,22	0,01	6.066,44	24,28	6.068,66	24,29
Tarakan Barat	0,03	0,00	2.933,68	11,74	2.933,71	11,74
Tarakan Utara	1,31	0,01	10.229,08	40,94	10.230,38	40,95
TOTAL	8,32	0,03	24.976,98	99,97	24.985,30	100,00

Status daya dukung air di Kota Tarakan menunjukkan bahwa 99,97% pada kondisi belum terlampauai dan 0,03% pada kondisi telah terlampauai.

Penentuan status DDLH indikatif jasa lingkungan penyedia pangan dilakukan melalui perhitungan ambang batas penduduk. Ambang batas penduduk adalah jumlah penduduk maksimal yang dapat dilayani oleh ketersediaan jasa lingkungan, dan status DDLH indikatif dapat diketahui dengan membandingkan antara ambang batas penduduk dengan jumlah penduduk pada waktu tertentu.

Perhitungan DDLH penyedia pangan dengan pendekatan kuantitatif dilakukan melalui perhitungan selisih dan perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan untuk masing-masing jasa ekosistem. Perhitungan DDLH penyedia pangan dilakukan pada peta dengan resolusi 30"x30" (± 0.9 km x 0.9 km) dalam bentuk grid, sehingga pada setiap luasan area tersebut, dapat diketahui jumlah kebutuhan pangan, ketersediaan pangan, ambang batas penduduk, dan status DDLH-nya.

Ambang batas penduduk diperoleh melalui pembagian ketersediaan bahan pangan atau energi pangan dengan kebutuhan energi pangan per kapita. Hasil perhitungan DDDLH penyedia pangan menunjukkan bahwa jika nilai Daya Dukung Daya Tampung pada grid ke-I bernilai positif, maka menunjukkan bahwa Daya Dukung Daya Tampung pada grid yang dihitung masih mampu mendukung kebutuhan pangan pada wilayah grid tersebut. Namun, jika nilai Daya Dukung Daya Tampung pada grid ke-I bernilai negatif, maka daya dukung dan daya tampung penyedia pangan pada wilayah grid telah melampaui ambang batasnya. Daya dukung dan daya tampung penyedia pangan di Kota Tarakan

merupakan agregasi nilai DDDTLH seluruh grid-grid pada wilayah yang telah dikaji jasa ekosistemnya/jasa lingkungannya, dan teridentifikasi bahwa untuk daya dukung dan daya tampung penyedia pangan “Belum Terlampaui”.

Tabel 2.10
Luasan Status Daya Dukung Pangan di Kota Tarakan

KECAMATAN	Terlampaui		Belum Terlampaui		TOTAL	
	(Ha)	%	(Ha)	%	(Ha)	%
Tarakan Timur	7,05	0,03	5.745,50	23,00	5.752,55	23,02
Tarakan Tengah	35,85	0,14	6.032,81	24,15	6.068,66	24,29
Tarakan Barat	21,13	0,08	2.912,58	11,66	2.933,71	11,74
Tarakan Utara	47,21	0,19	10.183,18	40,76	10.230,38	40,95
TOTAL	111,24	0,45	24.874,07	99,55	24.985,30	100,00

Status daya dukung pangan 99,55% pada kondisi belum terlampaui dan 0,45% pada kondisi terlampaui.

2.1.4. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

Kota Tarakan, sebagai salah satu pusat aktivitas di Provinsi Kalimantan Utara, menghadapi tantangan dalam memastikan ketahanan energi, air, dan pangan. Ketiga elemen ini saling terkait dan krusial untuk menjamin keberlangsungan hidup masyarakat serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Berikut adalah gambaran kondisi terkini berdasarkan indikator-indikator terkait:

a. Ketahanan Energi

Jumlah Pelanggan Listrik: Pada tahun 2024, Kota Tarakan memiliki 74.312 pelanggan listrik, yang merupakan 36,14% dari total pelanggan listrik di Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini menjadikan Tarakan sebagai kota dengan jumlah pelanggan listrik terbesar di provinsi tersebut.

Konsumsi Listrik Per Kapita : Pada tahun 2024 konsumsi listrik per kapita di Kota Tarakan sebesar 1.411 kWh/perkapita.

b. Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP): Pada tahun 2024, Kota Tarakan mencatat skor IKP sebesar 74,44, yang menunjukkan tingkat ketahanan pangan yang cukup baik dibandingkan beberapa kota lain di Indonesia.

Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (POU): Pada tahun 2024, prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan di Kota Tarakan mencapai 14,05%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 8,27%. Angka ini menunjukkan peningkatan dibanding tahun 2023 yang sebesar 12,82%. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (POU) atau Prevalence of Undernourishment (PoU) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang asupan energinya dari makanan kurang dari standar minimum yang diperlukan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Dengan kata lain, PoU menunjukkan persentase orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan energi mereka melalui makanan.

Diversifikasi Pangan Lokal: Upaya diversifikasi konsumsi pangan berbasis potensi lokal di Kota Tarakan menunjukkan bahwa produksi ubi kayu dan ubi jalar mengalami peningkatan, meskipun produksi padi cenderung menurun. Hal ini menandakan adanya potensi pengembangan pangan lokal non-beras untuk meningkatkan kemandirian pangan.

c. Ketahanan Air

Akses Air Minum Layak: Berdasarkan data BPS tahun 2023, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak adalah sebesar 99,91 persen, meningkat dibanding tahun 2022 yang sebesar 99,64 persen.

Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM): Perumda Air Minum Tirta Alam Kota Tarakan telah menyusun Rencana Bisnis (Rebis) untuk meningkatkan kapasitas pasokan air. Ada empat bidang usaha yang direncanakan akan dikembangkan yaitu pertama, pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan meningkatkan kapasitas beberapa Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) terpasang untuk memenuhi pasokan air minum. Kedua, optimalisasi SPAM dengan kegiatan utama peningkatan pemanfaatan Idle Capacity, Optimalisasi Jaringan perpipaan. Ketiga, rehabilitasi SPAM dengan kegiatan utama mengoptimalkan penggunaan meter SPAM, efisiensi energy dan penggantian meter pelanggan, dan keempat Non SPAM dengan mempersiapkan perencanaan teknis secara benar.



Rencana pengembangan SPAM regional antara Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan mencakup kapasitas sebesar 1.100 liter/detik dengan nilai investasi Rp1,72 triliun. Namun, hingga saat ini, beberapa dokumen perencanaan seperti feasibility study (FS) dan detail engineering design (DED) belum tersedia.

Kota Tarakan menunjukkan komitmen dalam meningkatkan ketahanan pangan, energi, dan air. Meskipun terdapat tantangan seperti tingginya prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan dan kebutuhan pengembangan infrastruktur air minum, upaya diversifikasi pangan lokal dan perencanaan SPAM regional menjadi langkah positif menuju kemandirian dan keberlanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta diperlukan untuk mewujudkan ketahanan yang holistik di ketiga sektor tersebut.

2.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas

Kota Tarakan, sebagai salah satu kota utama di Provinsi Kalimantan Utara, terus berupaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna mendukung kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan menjadi fokus utama dalam mencapai tujuan tersebut. Berikut adalah gambaran kondisi lingkungan hidup di Kota Tarakan berdasarkan beberapa indikator penting:

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan ukuran komprehensif yang mencakup kualitas air, udara, dan lahan. Pada tahun 2024, IKLH Kota Tarakan adalah 68,27, jika dibandingkan dengan tahun 2023 dimana IKLH Kota Tarakan tercatat sebesar 69,61, maka terjadi penurunan, dengan kategori kualitas lingkungan yang sedang.

Tabel 2.11

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Tarakan Tahun 2020-2024

TAHUN	IKA		IKU		IKL		IKLH	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
2024	55,12	54,44	91,77	89,51	56,16	52,73	70,19	68,27
2023	55,02	54,44	91,66	93,14	54,46	52,10	69,74	69,61
2022	54,92	53,33	91,55	93,24	52,76	52,81	69,28	69,38
2021	54,82	63,33	91,45	93,27	51,06	52,79	68,83	73,15
2020	44,00	45,56	87,00	93,42	55,50	55,30	61,50	67,07

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2025

Pencapaian IKLH selama 3 tahun terakhir 2020 – 2022 selalu melebihi target. Namun untuk pencapaian IKLH tahun 2023-2024 tidak memenuhi target yang ditetapkan. Tidak terpenuhinya target IKLH pada tahun 2023 dikarenakan komposit IKA dan IKL yang tidak memenuhi target, sedangkan untuk tahun 2024 tidak terpenuhinya target IKLH disebabkan karena semua komposit IKA, IKU, dan IKL tidak memenuhi target yang ditetapkan.

b. Akses Sanitasi Aman

Data spesifik mengenai proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi aman di Kota Tarakan pada tahun 2023 adalah 84,57 persen, meningkat dibanding tahun 2022 yang sebesar 83,95 persen. Upaya peningkatan akses sanitasi terus dilakukan oleh pemerintah daerah melalui berbagai program pembangunan infrastruktur sanitasi dan edukasi masyarakat.

c. Pengelolaan Sampah

Timbulan sampah terolah di Kota Tarakan pada tahun 2024 meningkat. Hingga akhir tahun, produksi TPA Hake Babu mencapai 160 ton per hari, naik 7 ton dari tahun sebelumnya. Ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah sampah yang diolah, meskipun ada kenaikan dalam timbulan sampah secara keseluruhan akibat bertambahnya jumlah penduduk.

Peningkatan timbulan sampah terolah di Kota Tarakan ini menunjukkan adanya peningkatan efisiensi dalam pengelolaan sampah. Meskipun volume sampah yang dihasilkan terus bertambah seiring pertumbuhan penduduk, fasilitas pengolahan sampah seperti TPA Hake Babu mampu menampung dan mengolah lebih banyak sampah dibandingkan tahun sebelumnya.

Kota Tarakan menghadapi berbagai tantangan dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup, terutama terkait pengelolaan sampah dan penurunan IKLH. Meskipun demikian, berbagai inisiatif telah dilakukan, termasuk peningkatan partisipasi masyarakat, penerapan regulasi, dan edukasi publik. Diperlukan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mewujudkan lingkungan hidup yang lebih berkualitas dan berkelanjutan di Kota Tarakan.

Tabel 2.12
Data Pengelolaan Sampah di Kota Tarakan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Penanganan Sampah	%	78,32	78,24	79,86	80,03	74,00
2.	Persentase Pengurangan Sampah	%	12,45	14,27	15,28	17,63	21,00
3.	Persentase Penanganan Limbah B3	%	90	100	93,74	86,96	100

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan 2025, diolah

2.1.6. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Kota Tarakan, sebagai bagian dari Provinsi Kalimantan Utara, menghadapi tantangan signifikan terkait bencana alam dan perubahan iklim. Resiliensi kota ini ditentukan oleh kemampuan masyarakat, infrastruktur, dan ekosistemnya untuk bertahan dan pulih dari dampak peristiwa ekstrem atau perubahan lingkungan. Berikut adalah penjelasan mengenai resiliensi Kota Tarakan berdasarkan beberapa indikator kunci:.

a. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif

Pemerintah Kota Tarakan berkomitmen menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara kumulatif melalui serangkaian langkah nyata yang terintegrasi dan berkelanjutan. Upaya ini diwujudkan melalui penanaman pohon mangrove di wilayah pesisir sebagai benteng alami terhadap abrasi dan peningkatan kapasitas serapan karbon, penghijauan oleh masyarakat, sekolah, dan kelompok sosial sebagai bentuk edukasi dan aksi kolektif, rehabilitasi lahan kritis untuk pemulihan ekosistem, pengendalian kebakaran hutan dan lahan guna mencegah pelepasan emisi yang masif, serta pengelolaan sampah berbasis komunitas yang mendorong prinsip ekonomi sirkular dan pengurangan limbah. Seluruh inisiatif ini diperkuat dengan pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) di tingkat kelurahan, yang menjadi platform strategis dalam menggerakkan partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga lingkungan, menerapkan efisiensi sumber daya, serta meningkatkan literasi iklim secara inklusif.

Melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dunia pendidikan, dan sektor swasta, Kota Tarakan menargetkan terciptanya ekosistem kelurahan yang rendah karbon, adaptif terhadap risiko iklim, dan berdaya saing dalam pembangunan hijau. ProKlim tidak hanya menjadi instrumen teknis, tetapi juga simbol komitmen lokal terhadap agenda global penanggulangan perubahan iklim. Dengan penguatan kelembagaan, dukungan regulasi, dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, setiap kelurahan di Kota Tarakan diharapkan mampu berkontribusi secara nyata dalam penurunan emisi GRK kumulatif, sekaligus menjadi model percontohan bagi transformasi menuju kota yang



berketahanan iklim dan berkelanjutan.

b. Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) untuk Kota Tarakan pada tahun 2024 adalah 90,60, menurun jika dibandingkan IRBI Kota Tarakan pada tahun 2023 yang sebesar 103,14. IRBI adalah alat analisis kebencanaan yang menunjukkan riwayat nyata bencana dan kerugian yang ditimbulkan di wilayah Indonesia. IRBI digunakan untuk mengukur tingkat risiko bencana di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Kota Tarakan. Risiko bencana di Tarakan dan Kalimantan Utara dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk potensi banjir, kebakaran hutan, dan bencana alam lainnya.

Kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana sangat penting di Tarakan. Upaya mitigasi, seperti pemantauan dini, peningkatan kapasitas tanggap bencana, dan koordinasi antar pihak terkait.

c. Indeks Ketahanan Daerah (IKD)

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) mencerminkan kapasitas suatu daerah dalam menghadapi dan mengelola risiko bencana. Pada tahun 2024 nilai IKD Kota Tarakan sebesar 0,70, meningkat dibanding tahun 2023, Dimana Kota Tarakan memiliki nilai IKD sebesar 0,61. Nilai ini menunjukkan tingkat ketahanan yang perlu ditingkatkan melalui kolaborasi berbagai sektor dalam penanggulangan bencana, termasuk TNI/Polri, Basarnas, BMKG, BAZNAS, relawan bencana, dan perwakilan kecamatan.

d. Upaya Peningkatan Resiliensi

Pemerintah Kota Tarakan secara aktif mengadakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam merespons ancaman bencana. Keterlibatan berbagai sektor dalam penanggulangan bencana diharapkan dapat meningkatkan IKD dan mengurangi IRBI.

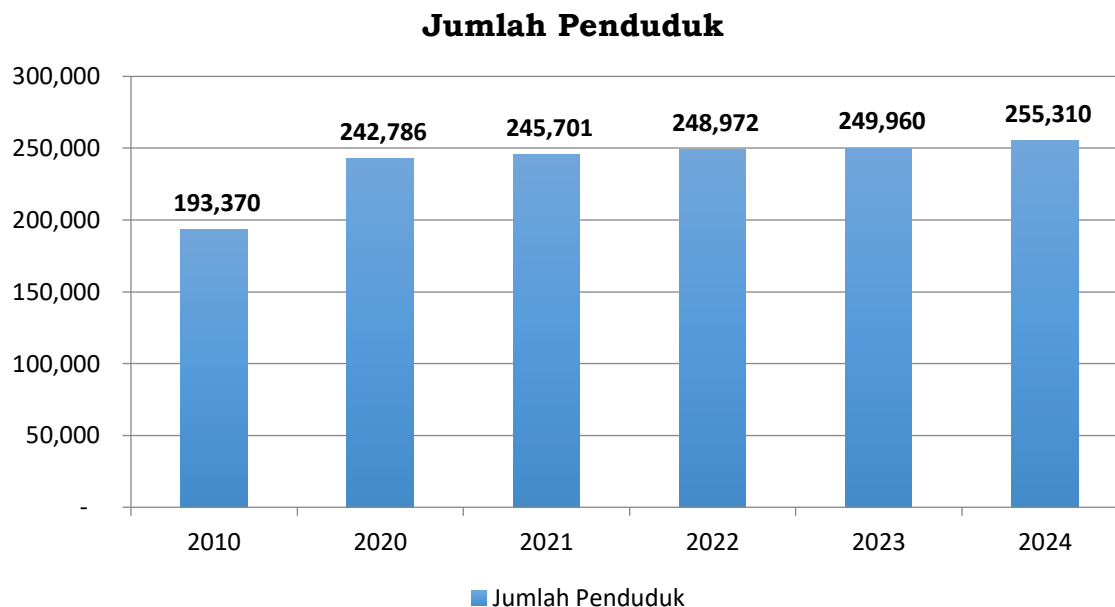
Kota Tarakan menghadapi tantangan dalam meningkatkan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim. Meskipun terdapat upaya signifikan dalam mengurangi emisi GRK dan meningkatkan kapasitas

penanggulangan bencana, nilai IRBI dan nilai IKD yang belum optimal menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci untuk meningkatkan resiliensi Kota Tarakan, memastikan keberlanjutan pembangunan, dan melindungi kesejahteraan masyarakat dari dampak perubahan iklim dan bencana alam.

2.1.7. Demografi

Kondisi demografis suatu daerah secara umum tercermin melalui jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, struktur penduduk, dan sebaran penduduk. Sensus Penduduk 2020 (SP2020) mencatat penduduk Kota Tarakan pada bulan September 2020 sebanyak 242.786 jiwa. Dibandingkan dengan hasil sensus sebelumnya, jumlah penduduk Kota Tarakan mengalami peningkatan. Dalam jangka waktu sepuluh tahun sejak tahun 2010, jumlah penduduk Kota Tarakan mengalami penambahan sekitar 49.416 jiwa. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2010-2020), laju pertumbuhan penduduk kota Tarakan mengalami penurunan, dari 5,14 % pertahun pada periode 2000-2010 menjadi sebesar 2,23 % pertahun pada periode 2010-2020. Sedangkan penduduk Kota Tarakan tahun 2024 sebanyak 255.310 jiwa yang terdiri atas 132.175 jiwa penduduk laki-laki dan 123.135 jiwa penduduk perempuan.

Gambar 2.7
Jumlah Penduduk (Jiwa) Kota Tarakan 2010,2020-2024



Sumber : Kota Tarakan Dalam Angka Tahun 2025, diolah

Tabel 2.13
Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Tarakan Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	Penduduk (ribu)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tarakan Timur	58,5	59,6	60,89	60,96	85,23
2	Tarakan Tengah	69,7	70,0	70,25	70,15	71,18
3	Tarakan Barat	81,8	82,4	83,18	83,49	62,38
4	Tarakan Utara	32,7	33,7	34,65	33,34	36,52
	Tarakan	242,8	245,7	248,97	249,96	255,31

Sumber : Kota Tarakan Dalam Angka Tahun 2025, diolah

Kepadatan penduduk di Kota Tarakan tahun 2024 mencapai 996,65 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 4 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Tarakan Barat dengan kepadatan sebesar 2.993,69 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Tarakan Utara sebesar 323,12 jiwa/Km².



Tabel 2.14
Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan
di Kota Tarakan Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tarakan Timur	1.009	1.028	1.049,58	1.051,23	1.051,23
2	Tarakan Tengah	1.256	1.260	1.265,00	1.263,02	1.263,02
3	Tarakan Barat	2.933	2.956	2.982,40	2.993,69	2.993,69
4	Tarakan Utara	299	308	316,57	323,12	323,12
	Tarakan	968	980	992,36	996,65	996,65

Sumber : Kota Tarakan Dalam Angka Tahun 2025, diolah

Sementara itu pada tahun 2024 besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2024 penduduk laki-laki terhadap penduduk Perempuan sebesar 107,27 yang berarti bahwa di antara 100 penduduk perempuan, terdapat 107 sampai 108 penduduk laki-laki di Kota Tarakan tahun 2024.

Tabel 2.15
Rasio Jenis Kelamin penduduk Kota Tarakan 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Laki-Laki (Jiwa)	125.720	127.365	128.895	129.365	132.175
2.	Perempuan (Jiwa)	116.460	118.336	120.077	120.595	123.135
3.	Rasio Jenis Kelamin	107,95	107,63	107,34	107,27	107,27

Sumber: BPS Kota Tarakan 2025, diolah

Proyeksi penduduk memberikan gambaran mengenai ukuran dan struktur umur penduduk di masa depan yang didasarkan pada asumsi tertentu baik ketika mengikuti tren dari masa lalu maupun ketika ada kebijakan yang diterapkan. Publikasi ini menampilkan hasil proyeksi penduduk Kota Tarakan untuk periode dua puluh tahun, yaitu 2020 hingga 2030. Proyeksi penduduk dilakukan menggunakan metode komponen kohort dengan dua pendekatan yaitu deterministik dan probabilistik. Proyeksi penduduk dengan pendekatan deterministik disajikan menurut kelompok umur, jenis kelamin, dan provinsi. Selain itu, pendekatan probabilistik digunakan sebagai quality assurance

penghitungan proyeksi dengan pendekatan deterministik. Skenario penghitungan yang dalam publikasi ini merupakan kombinasi dari dua asumsi *Total Fertility Rate* (TFR), tiga asumsi *Infant Mortality Rate* (IMR)/Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir dan satu asumsi migrasi yang disepakati bersama.

Penghitungan proyeksi penduduk Kota Tarakan yang disajikan dalam publikasi ini menggunakan skenario tren. Pemilihan skenario ini berdasarkan pada kajian akademis yang telah disepakati oleh semua pihak terkait.

Jumlah penduduk Kota Tarakan pada tahun 2023 sebesar 251,09 ribu orang. Pertumbuhan penduduk berlanjut sepanjang periode proyeksi. Jumlah penduduk Kota Tarakan diproyeksikan naik setiap periode yang mencapai 292,97 ribu jiwa selama 20 tahun ke depan. Pada tahun 2025, jumlah penduduk Kota Tarakan diproyeksikan sebanyak 256,67 ribu jiwa atau bertambah sebanyak 13,88 ribu jiwa jika dibandingkan tahun 2020 dengan laju pertumbuhan penduduk terhadap jumlah penduduk tahun 2020 sebesar 1,11%. Pada periode tahun 2030, jumlah penduduk diproyeksikan 269,18 ribu jiwa atau bertambah sebanyak 12,51 ribu jiwa jika dibandingkan tahun 2025 dengan laju pertumbuhan penduduk terhadap jumlah penduduk tahun 2025 sebesar 0,95%.

Tabel 2.16
Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Tarakan

Penduduk Tahun 2023 (ribu orang)	Proyeksi Penduduk (ribu orang)					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
251,09	256,67	259,34	261,93	264,42	266,85	269,18

Sumber: Proyeksi Penduduk BPS Kota Tarakan, diolah

Kepadatan penduduk di Kota Tarakan tahun 2020 mencapai 969 jiwa/km² dan pada tahun 2023 Kepadatan Penduduk di Kota Tarakan mencapai 1.002 jiwa/km². Pada tahun 2025, diproyeksikan Kepadatan Penduduk di Kota Tarakan mencapai 1.024 jiwa/km² dan pada tahun 2030 diproyeksikan Kepadatan Penduduk di Kota Tarakan adalah 1.074 jiwa/km².

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

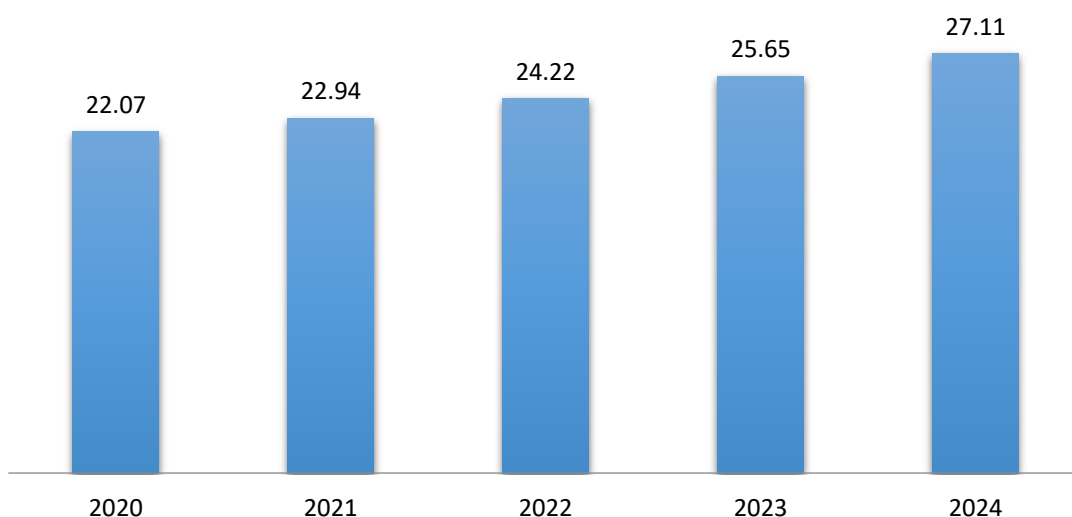
Pencapaian indikator kesejahteraan ekonomi difokuskan pada analisis terhadap perkembangan pertumbuhan ekonomi daerah, PDRB perkapita, indeks gini, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan indeks Pembangunan manusia.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro dapat dilihat dari besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHK) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

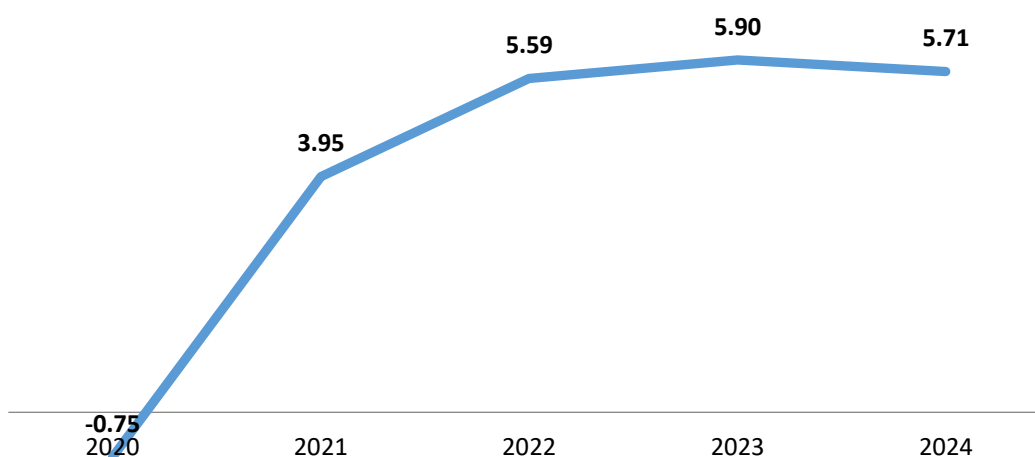
Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Tarakan pada tahun 2024 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi hampir di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kota Tarakan atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2024, mencapai 27,11 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 25,65 triliun rupiah pada tahun 2023. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2024, ekonomi Kota Tarakan tumbuh sebesar 5,71 persen, terjadi perlambatan jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yaitu 5,90 persen.

Gambar 2.8
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Kota Tarakan Tahun 2020-2024 (Triliun Rupiah)



Sumber : Kota Tarakan Dalam Angka 2025, diolah

Gambar 2.9
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Kota Tarakan Tahun 2020-2024 (%)



Sumber : Kota Tarakan Dalam Angka 2025, diolah



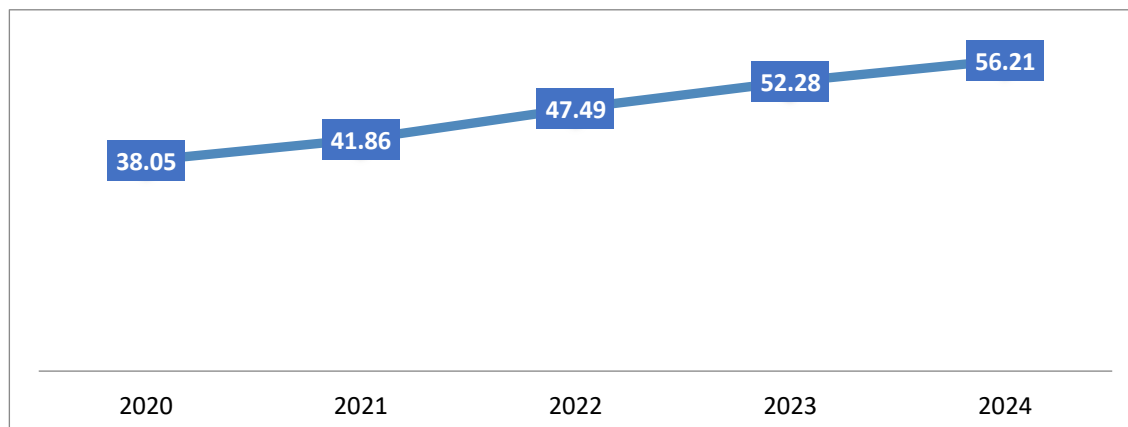
Tabel 2.17
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha di Kota Tarakan Tahun 2020-2024 (%)

Kategori/ Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,31	3,24	6,68	6,05	0,52
B. Pertambangan dan Penggalan	-6,11	4,50	2,98	1,54	0,05
C. Industri Pengolahan	-3,75	2,91	4,12	2,80	1,94
D. Pengadaan Listrik dan Gas	11,29	5,66	7,66	18,79	2,74
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,44	7,42	8,33	5,47	8,45
F. Konstruksi	0,20	-0,75	-2,58	9,34	9,07
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,36	9,56	8,32	7,25	9,51
H. Transportasi dan Pergudangan	-5,91	0,11	10,30	4,77	5,79
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-10,34	1,36	12,25	7,52	11,05
J. Informasi dan Komunikasi	6,74	6,34	8,08	5,76	4,44
K. Jasa Keuangan	0,60	7,06	9,41	11,68	6,15
L. Real Estate	0,43	3,11	5,79	3,75	5,95
M,N. Jasa Perusahaan	-1,83	2,30	6,94	4,92	5,64
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,52	2,54	4,27	1,55	4,49
P. Jasa Pendidikan	4,47	4,99	7,24	5,24	7,51
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,49	9,22	1,82	2,65	0,52
R,S,T,U. Jasa Lainnya	9,15	7,28	9,66	7,78	9,39
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	-0,75	3,95	5,59	5,90	5,71

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Tarakan , 2025

Nilai PDRB Kota Tarakan atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 mencapai 56,21 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi. Seiring usaha peningkatan pembangunan di Kota Tarakan, PDRB Kota Tarakan memperlihatkan perkembangan selama beberapa tahun terakhir.

Gambar 2.10
PDRB Kota Tarakan Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2020-2024 (Triliun Rupiah)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Tarakan , 2025

Selama lima tahun terakhir (2020-2024) struktur perekonomian Kota Tarakan didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya secara berurutan yaitu Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Transportasi dan Pergudangan; dan Industri Pengolahan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Tarakan. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Tarakan pada tahun 2024 dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu sebesar 24,99 persen (angka ini meningkat dari 24,08 persen di tahun 2023). Selanjutnya lapangan usaha Konstruksi sebesar 15,75 persen (meningkat dari 15,53 persen di tahun 2023), disusul oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 15,31 persen (naik dari 15,27 persen di tahun 2023). Berikutnya lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 10,30 persen dan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 10,22 persen dan Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Kota Tarakan mencapai 76,57 persen.

b. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita menggambarkan rata-rata produktivitas yang dihasilkan oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu daerah dan

dapat digunakan sebagai indikator dalam menentukan pencapaian tingkat kemakmuran di suatu daerah. Apabila nilai PDRB-nya besar dengan jumlah penduduk sedikit maka dapat dipastikan PDRB per kapita daerah tersebut akan besar, demikian pula sebaliknya.

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

Nilai PDRB per kapita Kota Tarakan atas dasar harga berlaku sejak tahun 2020 hingga 2024 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2020, PDRB per kapita tercatat sebesar 156,96 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2024 mencapai 221,38 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan oleh faktor inflasi. Naiknya harga komoditas beserta produksinya juga menjadi penyebab meningkatnya nilai PDRB Kota Tarakan.

Tabel 2.18
Perkembangan PDRB Per Kapita Kab/Kota di Kalimantan Utara
Tahun 2020-2024 (dalam juta rupiah)

Uraian	Kabupaten/ Kota	2020	2021	2022	2023*	2024**
PDRB PerKapita (ADHB)	Kota Tarakan	156,96	170,70	191,34	207,42	221,38
	Kab. Malinau	135,57	154,01	208,10	215,62	210,43
	Kab. Bulungan	123,79	131,81	155,55	161,83	160,71
	Kab. Tana Tidung	231,65	258,11	322,06	328,40	330,15
	Kab. Nunukan	132,69	147,67	196,09	204,58	192,21

Sumber: BPS, 2025

*) : Angka sementara

*)): Angka sangat sementara

Dilihat dari nilai PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku menurut kabupaten/Kota di Kalimantan Utara, jika diurutkan maka nilai PDRB per kapita tertinggi tahun 2024 yakni di Kab. Tana Tidung sebesar Rp 330,15

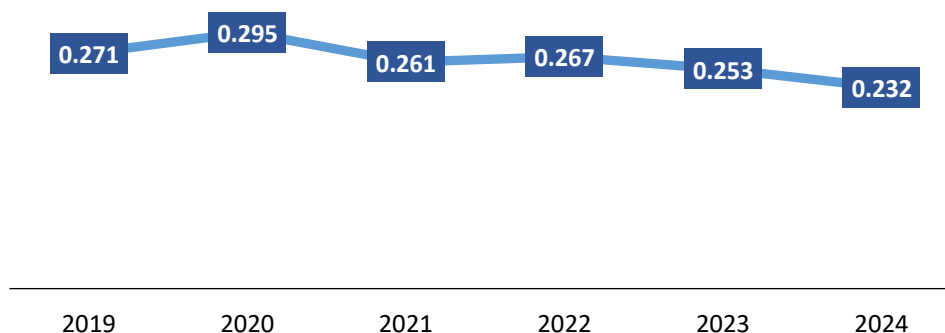
juta, Kota Tarakan sebesar 221,38 juta, dan Kab. Malinau sebesar Rp 210,432 juta. Sedangkan kabupaten/kota dengan PDRB per Kapita paling rendah adalah Kabupaten Bulungan sebesar Rp 160,71 juta dan Kabupaten Nunukan sebesar Rp 192,21 juta.

c. Gini Rasio

Indeks Gini atau koefisien gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Perubahan angka gini rasio mengindikasikan adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk yang digunakan untuk melihat apakah pemerataan pengeluaran penduduk semakin baik atau semakin buruk.

Secara umum dalam kurun waktu lima tahun terakhir, indeks gini Kota Tarakan berfluktuatif. Indeks gini Kota Tarakan pada tahun 2022 adalah 0,267 artinya distribusi pengeluaran penduduk masih kurang merata jika dibandingkan dengan indeks gini tahun 2021. Namun pada tahun 2024 Indeks Gini Kota Tarakan berada di angka 0,232 artinya distribusi pengeluaran di Kota Tarakan lebih baik dari tahun 2023. Secara umum, selama periode 2019-2024 ketimpangan distribusi pendapatan rumah tangga di Kota Tarakan berada dibawah angka 0,35 dengan kata lain pemerataan relatif tinggi atau merata.

Gambar 2.11
Indeks Gini/Gini Rasio Kota Tarakan Tahun 2019-2024



Sumber: BPS Kota Tarakan, 2025, diolah

c. Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan

Melalui indikator pemerataan pendapatan, diketahui bahwa terdapat penduduk dengan pendapatan terendah dan sebagian dari penduduk tersebut tergolong ke dalam kategori miskin karena pendapatan mereka berada di bawah garis kemiskinan. Penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan dapat ditegorikan menjadi dua, yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non-makanan (GKNM). Terdapat perbedaan dalam penentuan garis kemiskinan perkotaan dan perdesaan. GKM ditetapkan sebesar 2.100 kkalori per kapita per hari, sedangkan GKNM yaitu untuk sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Tabel 2.19
Data Kemiskinan Kota Tarakan Tahun 2020-2024

	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penduduk Miskin Kota Tarakan	%	6,24	6,71	6,30	6,10	5,56
Jumlah Penduduk Miskin Kota Tarakan	Jiwa	17.330	17.570	16.750	16.490	15.320
Garis Kemiskinan Kota Tarakan	Rp/Kap/Bulan	696.585	711.268	777.446	819.621	854.967
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks	0,77	1,01	0,73	0,79	0,50
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Indeks	0,15	0,23	0,13	0,19	0,08

Sumber: BPS Kota Tarakan, 2025, diolah

Sejak 2020, jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan yang kemudian mencapai puncak pada tahun 2021. Setelah periode tersebut, terjadi penurunan jumlah penduduk miskin secara bertahap. Pada tahun 2024, jumlah penduduk miskin di Kota Tarakan turun menjadi 16,32 ribu jiwa, mengalami penurunan sebesar 1.170 jiwa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Berbagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Tarakan dalam bentuk program-program pengentasan kemiskinan membuahkan hasil, ditunjukkan dengan menurunnya angka kemiskinan. Angka kemiskinan tahun 2024 sebesar 5,56 persen,



mengalami penurunan 0,54 poin dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 6,10 persen.

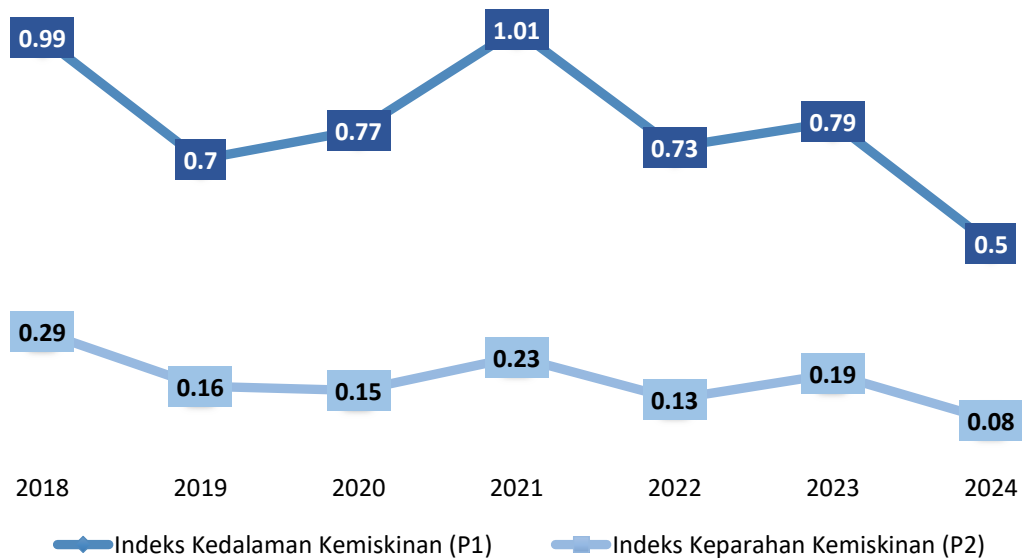
Garis kemiskinan di Kota Tarakan tahun 2020 hingga 2024 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2024, garis kemiskinan di Kota Tarakan adalah Rp 854.967,00/kapita/bulan. Penurunan angka kemiskinan juga disebabkan oleh peningkatan garis kemiskinan (GK) yang dibarengi dengan peningkatan pengeluaran konsumsi masyarakat, khususnya pada masyarakat yang sebelumnya berstatus miskin.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus dapat mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan tersebut.

Pada periode tahun 2022-2023, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Tarakan meningkat dari 0,73 pada tahun 2022 menjadi 0,79 pada tahun 2023. Namun turun Kembali di tahun 2024 sebesar 0,50. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kota Tarakan semakin mendekati garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan pada periode yang sama, yaitu dari 0,19 menjadi 0,08. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin di Kota Tarakan pada tahun 2024 semakin menyempit/rendah dibandingkan tahun 2023.

Gambar 2.12
Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Tarakan Tahun 2018-2024



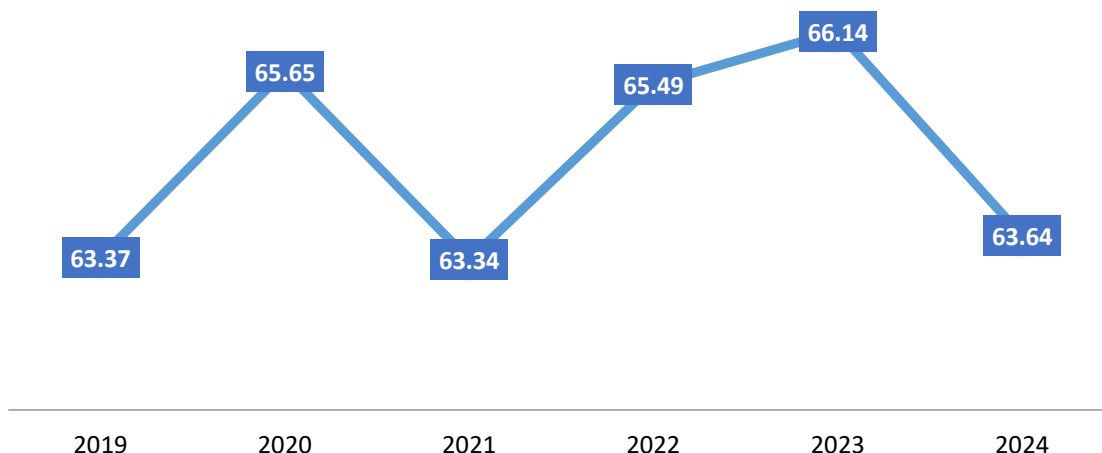
Sumber: BPS Kota Tarakan 2025, diolah

d. Tingkat Pengangguran Terbuka

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi sosial ekonomi. Salah satu sasaran dalam pembangunan adalah diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang seimbang dan memadai untuk dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahunnya.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan tingkat persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Gambar 2.13
TPAK Kota Tarakan Tahun 2019-2024

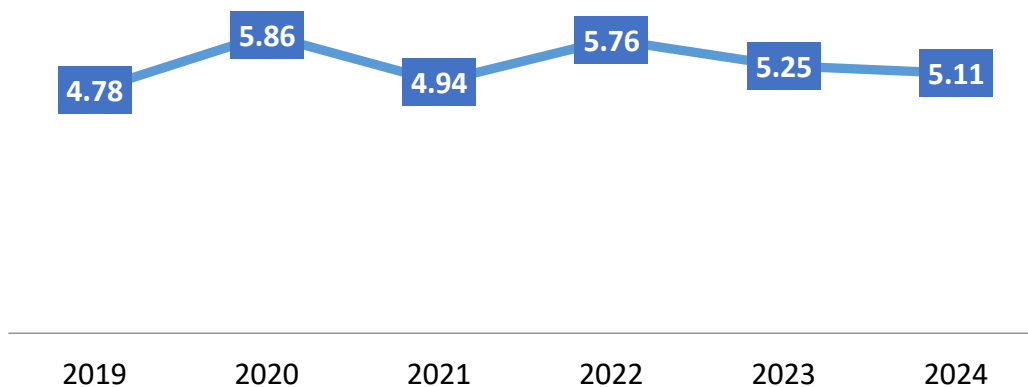


Sumber : Kota Tarakan Dalam Angka 2025, diolah

Dalam kurun waktu 2019-2024 TPAK di Kota Tarakan berfluktuatif. Pada tahun 2022 TPAK mengalami peningkatan sebesar 2,15 persen dari tahun sebelumnya menjadi 65,49 persen. Dan pada tahun 2023 TPAK mengalami peningkatan lagi sebesar 0,65 persen dari tahun 2022 menjadi 66,14 persen. Namun pada tahun 2023 menurun menjadi 63,64 persen. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja, sekitar 64 orang termasuk angkatan kerja. Atau dapat diartikan dari 1.000 orang penduduk usia kerja sekitar 636 orang diantaranya aktif secara ekonomi.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.

Gambar 2.14
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tarakan Tahun 2019-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tarakan 2025, diolah

Dalam kurun waktu 2019-2024 TPT Kota Tarakan berfluktuasi. TPT tahun 2024 di Kota Tarakan sebesar 5,11 persen, yang berarti bahwa dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 5 orang yang menganggur.

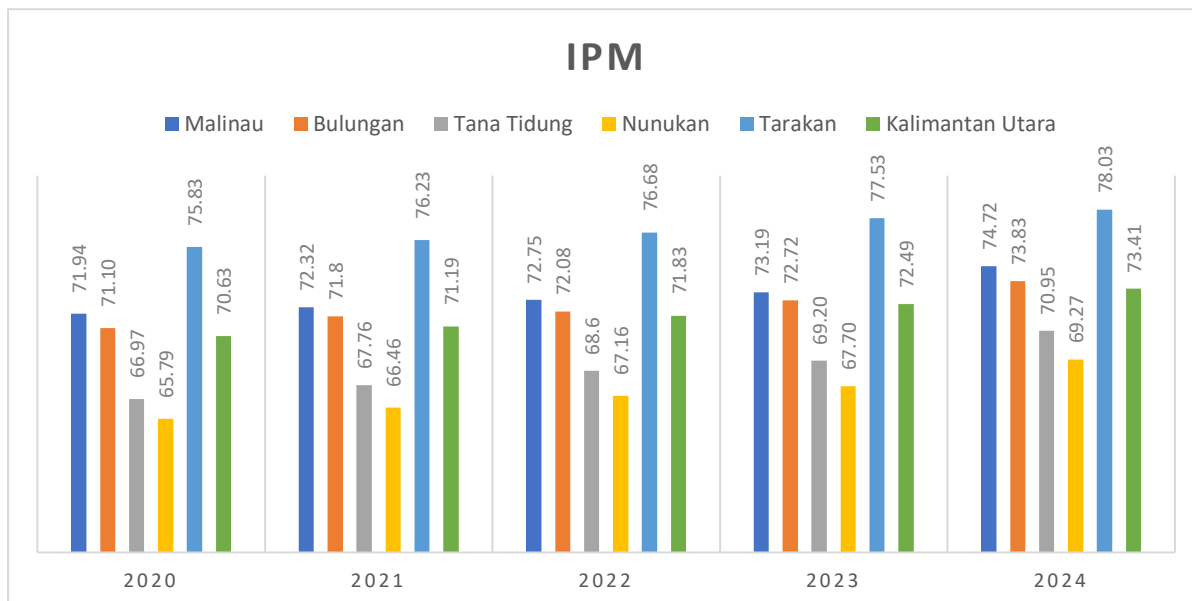
e. Indeks Pembangunan Manusia

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu (a) umur panjang dan hidup sehat; (b) pengetahuan; (c) standar hidup layak. Metode penghitungan IPM sekarang menggunakan rata-rata geometrik, dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia dan IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai

ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Gambar 2.15
Indeks Pembangunan Manusia Kota Tarakan Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara 2025, diolah

Tingkat IPM Kota Tarakan sejak tahun 2020-2024 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, IPM kota Tarakan sebesar 75,83 dan terus mengalami peningkatan menjadi 78,03 di tahun 2024. Peningkatan ini sejalan dengan meningkatnya seluruh komponen penyusun IPM yakni Indeks Pendidikan (Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah), Indeks Kesehatan (Usia Harapan Hidup), dan Standar Hidup Layak (Pengeluaran per Kapita disesuaikan), hal ini mengindikasikan keberhasilan pembangunan manusia di Kota Tarakan.

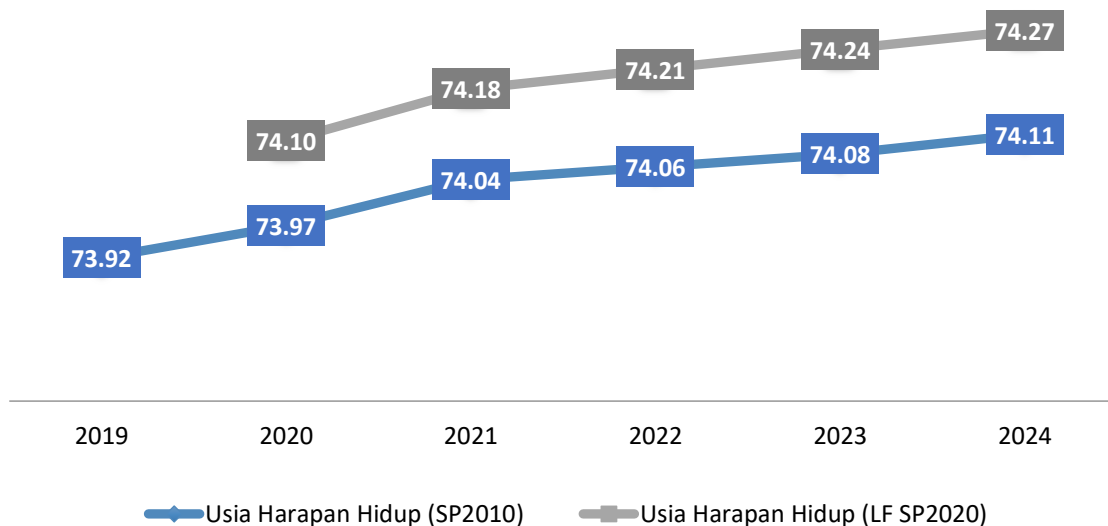
IPM Kota Tarakan masih tertinggi diantara kabupaten di wilayah Provinsi Kalimantan Utara dan lebih tinggi dari IPM Provinsi Kalimantan Utara. Capaian positif ini tidak menjadikan pemerintah kota “terlena” dalam pembangunan manusia karena peningkatan daya saing sumber daya manusia harus terus dilakukan agar memiliki nilai lebih dalam kancah nasional bahkan internasional.

2.2.2. Kesehatan untuk Semua

a. Angka Harapan Hidup

Angka Usia Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia dalam bidang kesehatan dimana angka tersebut mengindikasikan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka usia harapan hidup di Kota Tarakan dari tahun 2019-2024 mengalami peningkatan baik dengan penghitungan hasil SP2010 maupun LF SP2020. Angka usia harapan hidup saat lahir dengan perhitungan SP2010 tercatat di tahun 2024 sebesar 74,11 tahun. Artinya, bayi yang lahir pada tahun 2024 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 74,11 tahun, lebih lama 0,03 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir tahun sebelumnya. Sedangkan angka usia harapan hidup dengan penghitungan hasil LF SP2020 tercatat di tahun 2024 sebesar 74,27 tahun. Artinya, bayi yang lahir pada tahun 2024 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 74,27 tahun, lebih lama 0,03 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir tahun sebelumnya.

Gambar 2.16
Angka Usia Harapan Hidup Kota Tarakan Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kota Tarakan, 2024 diolah

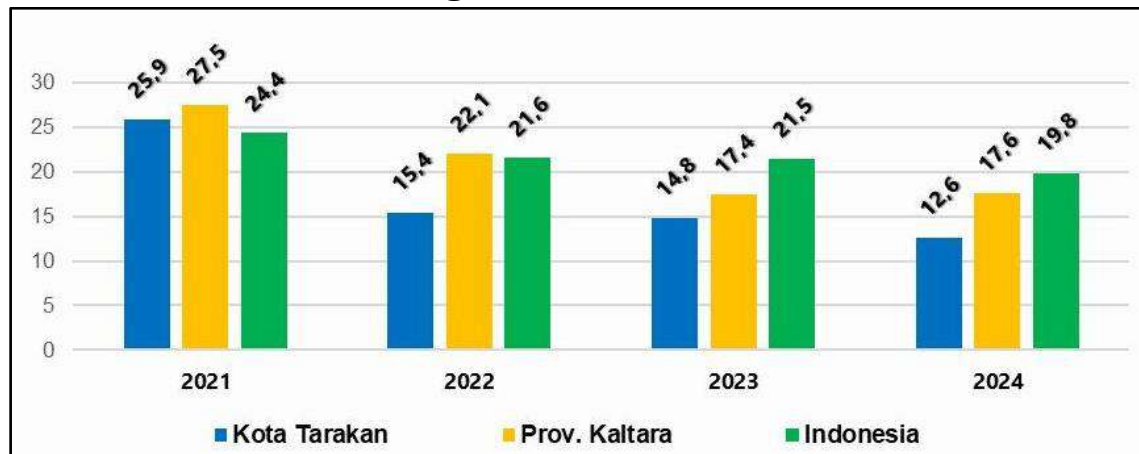
Angka usia harapan hidup tersebut dipengaruhi oleh kualitas kesehatan yang cenderung semakin baik ditunjang dengan kemudahan dan kesadaran penduduk dalam mengakses fasilitas kesehatan yang baik.

b. Prevalensi Balita Stunting

Berdasarkan pada data survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021-2024 angka prevalensi balita stunting Kota Tarakan mengalami penurunan dimana pada tahun 2021 angka prevalensi stunting sebesar 25,90 persen ,angka ini masih di bawah Provinsi Kalimantan Utara yaitu 27,5 persen namun masih diatas rata-rata Nasional yang sebesar 24,4 persen. Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Kota Tarakan dalam upaya percepatan penurunan stunting melalui pelaksanaan intervensi sensitif dan spesifik sehingga di tahun 2022 terjadi penurunan sebesar 10,5 poin sehingga angka prevalensi stunting menjadi 15,40 persen. Adapun hasil pengukuran Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023 angka prevalensi stunting Kota Tarakan menjadi 14,80 persen dan angka ini di bawah rata-rata Provinsi dan Nasional yaitu 21,5 persen. Sedangkan hasil pengukuran Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2024 angka

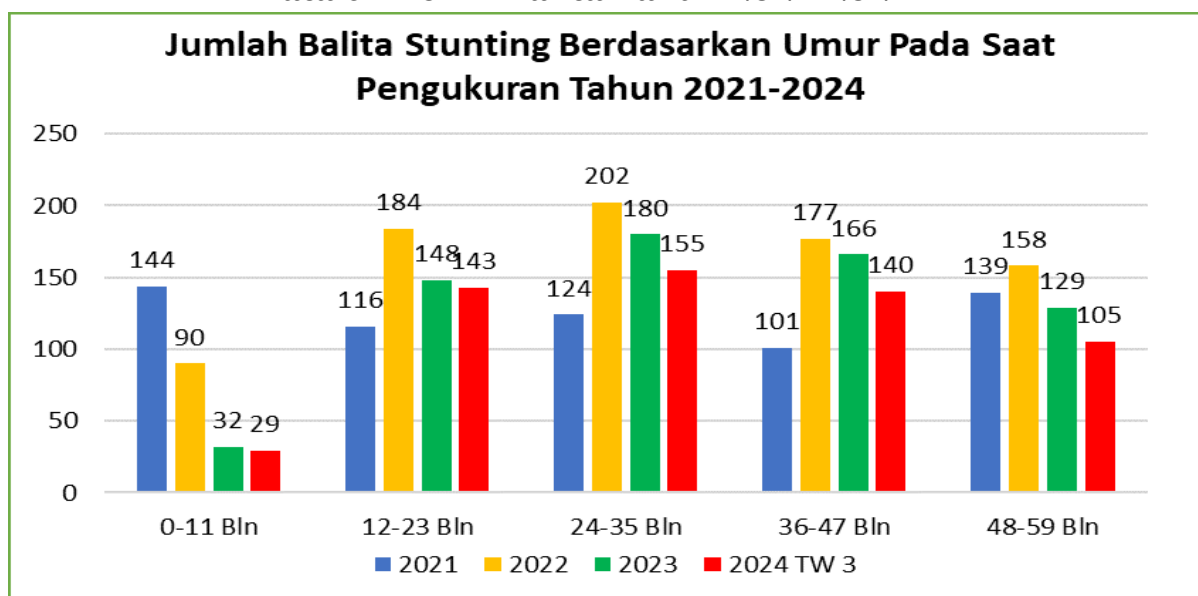
prevalensi stunting Kota Tarakan turun menjadi 12,60 persen dan angka ini masih di bawah rata-rata Provinsi dan Nasional yaitu 17,6 persen untuk rata-rata Provinsi dan 19,8 untuk rata-rata Nasional.

Gambar 2.17
Prevalensi Stunting Menurut SSGI Tahun 2021-2024



Berdasarkan pada data E-PPGBM prevalensi Balita Stunting menunjukkan perkembangan yang makin baik dari tahun 2021 dimana sejak Kota Tarakan ditetapkan sebagai Lokus Stunting dimana angka prevalensi stunting 8,19 persen atau sebanyak 624 Balita stunting, tahun 2022 angka prevalensi stunting sebesar 8,24 persen atau sebanyak 811 balita dan tahun 2023 turun menjadi 4,56 persen atau sebanyak 655 balita. Tahun 2024 angka prevalensi stunting Kembali turun menjadi 3,84 persen atau 534 balita dengan persentase jumlah balita yang di timbang dan diukur sebanyak 13.785 balita atau 96,88 persen.

Gambar 2.18
Data e-PPGBM Balita Tahun 2021-2024



Sejalan dengan penurunan angka prevalensi stunting dan jumlah balita stunting, berdasarkan pada data dari SIGA keluarga berisiko stunting di Kota Tarakan mengalami penurunan yang cukup signifikan di mana pada tahun 2021 tercatat ada 57,48 persen keluarga di Kota Tarakan yang masuk dalam kategori berisiko stunting dan turun menjadi 21,53 persen pada tahun 2024. Hal ini tidak terlepas dari upaya pencegahan dan penurunan stunting yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tarakan yang dilakukan secara konvegen dengan melibatkan lintas sektor dan lintas program melalui pelaksanaan intervensi sensitif dan spesifik.

Program pencegahan dan penanganan stunting termasuk keluarga berisiko stunting telah direncanakan dan dianggarkan sebesar Rp. 40.843.405.133,-. Adapun upaya yang telah dilakukan adalah Pemberian PMT bahan Lokal bagi Ibu Hamil KEK dan Balita Gizi Kurang, Pemberian PMT berupa Daging Ayam dan Telur bagi Balita Stunting, Gerakan Minum Tablet Tambah Darah (TTD) di sekolah, Pemeriksaan Antenatal care dengan menggunakan USG di Puskesmas, Kelas Ibu Hamil dan Kelas Balita, Pelayanan KB MKJP secara gratis, Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil dan Kelas Balita, Audit Kasus Stunting bagi Balita, Ibu Hamil dan Catin dan diseminasi kasus Audit Stunting, Lomba Inovasi Stunting, Publikasi

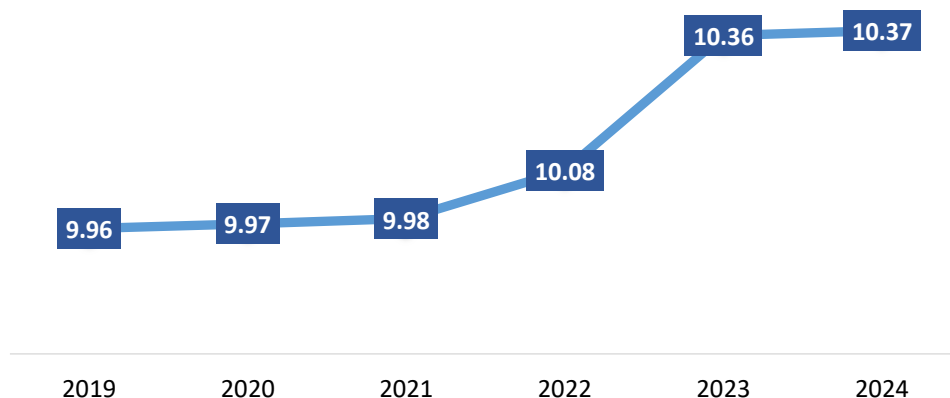
Stunting, Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin, Pengadaan BKB Kit, Penyediaan Pengelolaan air limbah domestik berupa IPAL (Karang Anyar Pantai), Septi Tank (Kampung Empat) dan Penyediaan sistem air minum (Kecamatan Tarakan Utara dan Tarakan Barat), Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Distribusi Air Minum dan Pengadaan Sambungan Rumah.

2.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

a. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka Rata-rata lama sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Angka RLS merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang telah ditamatkan. Angka ini mengindikasikan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk suatu wilayah dalam mengenyam pendidikan sekolah formal. Adapun cakupan penduduk yang dihitung dalam RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun, proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan ini mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP.

Gambar 2.19
Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota Tarakan Tahun 2019-2024



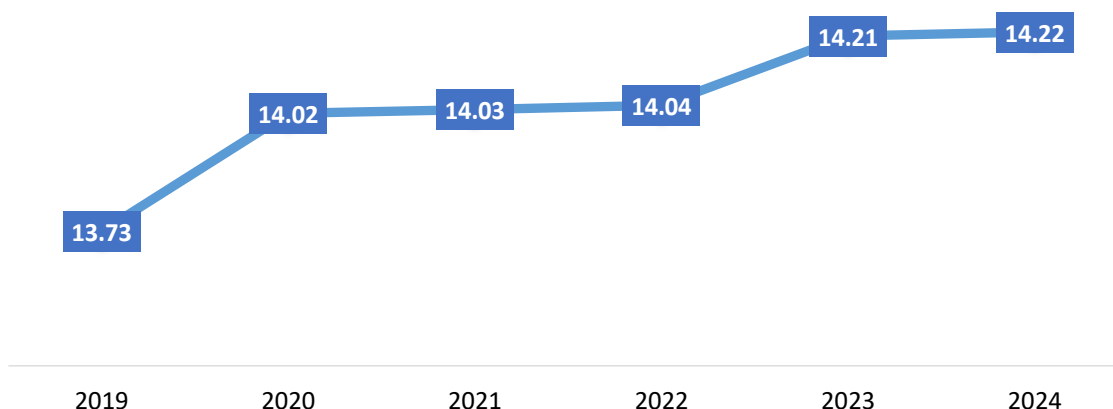
Sumber: BPS Kota Tarakan 2025, diolah

Capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) meningkat dari 9,96 tahun pada tahun 2019 menjadi 10,37 tahun di tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk Kota Tarakan yang berusia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal pada tahun 2024 berkisar selama 10 tahun atau setara dengan kelas 1 SMA. Sedangkan secara rata-rata Pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk Kota Tarakan adalah sampai jenjang SMP.

b. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka harapan lama sekolah merupakan salah satu indikator yang memperlihatkan kualitas pendidikan suatu wilayah. Indikator Harapan Lama Sekolah merupakan indikator yang menggantikan indikator sebelumnya yaitu Angka Melek Huruf yang sudah tidak digunakan lagi karena sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang Nilai HLS yang semakin tinggi, dapat menggambarkan bahwa rata-rata lamanya sekolah seseorang diharapkan akan semakin besar (semakin tinggi pendidikan yang ditempuh). HLS ini dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

Gambar 2.20
Angka Harapan Lama Sekolah Kota Tarakan 2019-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tarakan, 2025 diolah

Capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) meningkat dari 13,73 tahun pada tahun 2019 menjadi 14,22 tahun pada tahun 2024. Angka ini mempresentasikan bahwa lama sekolah yang diharapkan dapat dicapai oleh penduduk Kota Tarakan yang berusia 7 tahun ke atas pada tahun 2024 berkisar selama 14 tahun atau diharapkan dapat bersekolah hingga jenjang perguruan tinggi semester empat atau lima atau minimal jenjang Diploma II.

c. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Literasi, sebagai kemampuan memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi dalam berbagai bentuk, adalah fondasi untuk kemajuan individu dan masyarakat. Di era globalisasi dan digitalisasi, keberadaan literasi yang kuat menjadi lebih penting daripada sebelumnya. Untuk mengukur sejauh mana masyarakat suatu wilayah memiliki kemampuan literasi yang memadai, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) hadir sebagai alat evaluasi yang relevan dan strategis.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah instrument pengukuran tingkat pembangunan yang diperoleh dari unsur-unsur pembangun literasi masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Tarakan pada tahun 2021 adalah 19,61 dan 16,80. Berdasarkan BPS, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2023 sebesar 66,15 dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 69,17. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Tarakan menjadi yang tertinggi di provinsi Kalimantan Utara.



Tabel 2.20
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Tarakan
di Kalimantan Utara Tahun 2023-2024

Kabupaten/Kota	2023	2024
Kota Tarakan	66,15	69,17
Malinau	67,67	65,35
Bulungan	64,76	51,16
Tana Tidung	72,89	59,47
Nunukan	54,84	44,83
Kalimantan Utara	65,39	66,73

2.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial menjadi kunci dalam membangun masyarakat yang tangguh dan inklusif, sehingga semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk hidup yang lebih baik. Salah satu indikator yang mencerminkan perlindungan yakni cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja. Pemerintah Kota Tarakan telah menerapkan beberapa kebijakan dan program untuk meningkatkan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja. Kebijakan tersebut diantaranya Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.

Adanya regulasi tersebut diharapkan bisa meningkatkan cakupan kepesertaan dan memberikan kemanfaatan bagi perlindungan pekerja, baik pekerja formal, informal bahkan pekerja rentan.

Merujuk pada data cakupan kepesertaan BPJAMSOSTEK Provinsi Kaltara periode Juli 2023, masih terdapat pekerja segmen Bukan Penerima Upah (BPU) yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota yang belum terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan. Klaster pembagian pekerja rentan ini, meliputi 15.000 pekerja rentan di Kota Tarakan, 7.000 pekerja rentan di Kabupaten Bulungan, 5.000 pekerja rentan di Kabupaten Malinau, 5.000 pekerja rentan di Kabupaten Nunukan, dan 3.000 pekerja rentan di Kabupaten Tana Tidung.

Pekerja rentan yang dimaksud, yaitu tukang angkut, penjual tangkapan ikan, kuli bangunan, buruh bengkel, nelayan, paraji atau dukun beranak, pedagang kaki lima, pedagang kecil, pedagang keliling,

pembantu atau asisten rumah tangga, pekerja serabutan, penggiat agama, tukang jahit, petani/pekebun, peternak/buruh peternakan, sopir angkot, tabib, tukang batu, tukang cukur keliling, tukang kayu, tukang las/pandai besi, tukang sol sepatu, dan penggiat media.

Para pekerja rentan ini, nantinya akan dilindungi dengan jaminan sosial ketenagakerjaan. Nilai manfaat yang diterima dapat mencegah masyarakat pekerja dan keluarganya jatuh menjadi keluarga miskin baru atau bahkan miskin ekstrem, ketika mereka mengalami guncangan ekonomi akibat kecelakaan kerja ataupun krisis ekonomi.

Meskipun capaian kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan menunjukkan arah positif, perlindungan sosial yang adaptif tidak hanya terbatas pada aspek jaminan ketenagakerjaan, namun juga mencakup pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial yang merupakan layanan dasar yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah. SPM sosial mencakup rehabilitasi sosial dasar di luar panti (kewenangan kota), bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti lansia, anak terlantar, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.

2.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Konsep Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju mencerminkan upaya dalam menciptakan keseimbangan antara kehidupan beragama dan perkembangan budaya. Kehidupan beragama memberikan nilai manfaat nyata bagi masyarakat, sedangkan perkembangan budaya berupaya tetap berpijak pada kearifan lokal dan tetap terbuka terhadap dinamika global. Praktik keagamaan yang maslahat tidak hanya menekankan pada aspek ritual, tetapi juga mendorong kontribusi aktif terhadap pembangunan sosial, ekonomi, dan penguatan etika kolektif. Hal ini menjadi fondasi penting dalam membentuk masyarakat yang inklusif, toleran, dan harmonis.

Pada sisi lain, budaya yang maju menggambarkan masyarakat yang mampu melestarikan warisan lokal sembari beradaptasi dengan perkembangan zaman. Proses ini menumbuhkan identitas daerah yang kuat dan menciptakan modal sosial yang mendukung daya saing wilayah.



Integrasi antara nilai-nilai agama yang membawa maslahat dan budaya yang dinamis akan menghasilkan masyarakat yang berkarakter, adaptif, dan siap menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

Kedua nilai di atas menjadi acuan penting dalam merancang program dan kebijakan yang berorientasi pada penguatan kohesi sosial, pembangunan sumber daya manusia, dan pelestarian identitas lokal dalam konteks perencanaan jangka menengah di Kota Tarakan. Capaian dari sinergi ini dapat dilihat melalui indikator seperti Indeks Kota Toleran.

Indeks Kota Toleran adalah studi pengukuran kinerja kota, meliputi pemerintah kota dan elemen masyarakat dalam mengelola keberagaman, toleransi dan inklusi sosial. Pengukuran IKT mengombinasikan paradigma hak konstitusional warga sesuai jaminan konstitusi, hak asasi manusia sesuai standar hukum HAM internasional dan tata kelola pemerintahan yang inklusif.

Kombinasi ini ditujukan untuk memotret secara lebih komprehensif praktik dan promosi toleransi di masing-masing kota, baik yang dilakukan oleh pemerintah kota maupun elemen masyarakat secara umum.

Tabel 2.21
Indeks Kota Toleran Kota Tarakan Tahun 2020-2024

Tahun	Indeks Kota Toleran
2020	5,337
2021	5,687
2022	4,737
2023	5,107
2024	4,557

Selama lima tahun terakhir, Kota Tarakan menunjukkan komitmen yang konsisten dalam membangun masyarakat yang inklusif dan saling menghargai. Melalui Indeks Kota Toleran, dapat dilihat bagaimana upaya menjaga kerukunan dan keberagaman terus dijalankan, meskipun menghadapi tantangan yang wajar dalam proses pembangunan sosial.

Tahun 2020 menjadi titik awal yang menjanjikan dengan indeks sebesar 5.337, dan meningkat ke 5.687 di tahun 2021 merupakan sebuah pencapaian yang mencerminkan keberhasilan berbagai program toleransi dan dialog antar komunitas. Meskipun terjadi penurunan di tahun-tahun

berikutnya, yaitu 4.737 di 2022 dan 4.557 di 2024, hal ini justru menunjukkan bahwa Kota Tarakan adalah Kota yang terus belajar dan beradaptasi. Yang menarik, indeks sempat naik kembali ke 5.107 di tahun 2023, menandakan bahwa masyarakat dan pemerintah daerah mampu merespons tantangan dengan semangat kolaboratif dan perbaikan. Ini adalah bukti bahwa toleransi bukanlah tujuan akhir, melainkan proses berkelanjutan yang membutuhkan kerja sama, refleksi, dan inovasi. Fluktuasi indeks ini bukan pertanda kegagalan, melainkan cerminan dari dinamika sosial yang sehat. Kota Tarakan telah menunjukkan bahwa ia mampu bangkit, mengevaluasi, dan terus berupaya menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi semua warganya.

Dengan fondasi yang sudah dibangun, Kota Tarakan memiliki potensi besar untuk menjadi contoh kota toleran yang tangguh dan inspiratif di Indonesia.

2.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Pemberdayaan perempuan dan anak masih menjadi perhatian pemerintah daerah Kota Tarakan dalam rangka mewujudkan Kesenjangan dan Keadilan Gender. Kesenjangan dan keadilan gender dapat terjadi apabila porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis.

a. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. IDG diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang kesetaraan dan keadilan gender yang telah dicapai melalui berbagai program pembangunan serta dapat digunakan sebagai bahan dalam menentukan arah kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan keadilan gender. IDG dibentuk berdasarkan tiga komponen, yaitu keterwakilan perempuan dalam parlemen; perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi, kepemimpinan dan ketatalaksanaan; dan sumbangan pendapatan.



Tabel 2.22
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
di Kota Tarakan Tahun 2019 – 2024

IDG	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Tarakan	59,34	59,72	58,92	59,15	58,61	68,54
Provinsi Kalimantan Utara	61,48	64,31	61,70	61,92	58,86	67,83
Indonesia	75,24	75,57	76,26	76,59	76,90	77,62

Sumber: Badan Pusat Statistik 2025, diolah

Dalam kurun waktu 2019-2024 IDG Kota Tarakan berfluktuasi. Pada tahun 2024 IDG Kota Tarakan berada pada nilai 68,54 meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 58,61. Hal ini menunjukkan terjadi peningkatan partisipasi perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik.

b. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah penghitungan ukuran pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur Pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan, Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG.

Tabel 2.23
Indeks Pembangunan Gender (IPG)
di Kota Tarakan Tahun 2019 – 2024

IPG	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Tarakan	92,16	91,90	92,00	92,06	92,73	92,79
Provinsi Kalimantan Utara	87,00	86,67	87,30	87,85	88,46	88,77
Indonesia	91,07	91,06	91,27	91,63	91,85	91,85

Sumber: Badan Pusat Statistik 2025, diolah

Angka ini cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Utara dengan IPG sebesar 88,77 dan Nasional dengan IPG sebesar 91,85. Hal ini menunjukkan Pemerintah Kota Tarakan telah memperhatikan kebutuhan dasar perempuan seperti kesehatan,

pendidikan serta partisipasi perempuan dalam bidang pembangunan masyarakat. Nilai IPG yang semakin meningkat dan semakin mendekati angka 100 juga menunjukkan semakin kecil ketimpangan yang terjadi antara perempuan dengan laki-laki.

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Suatu daya saing merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

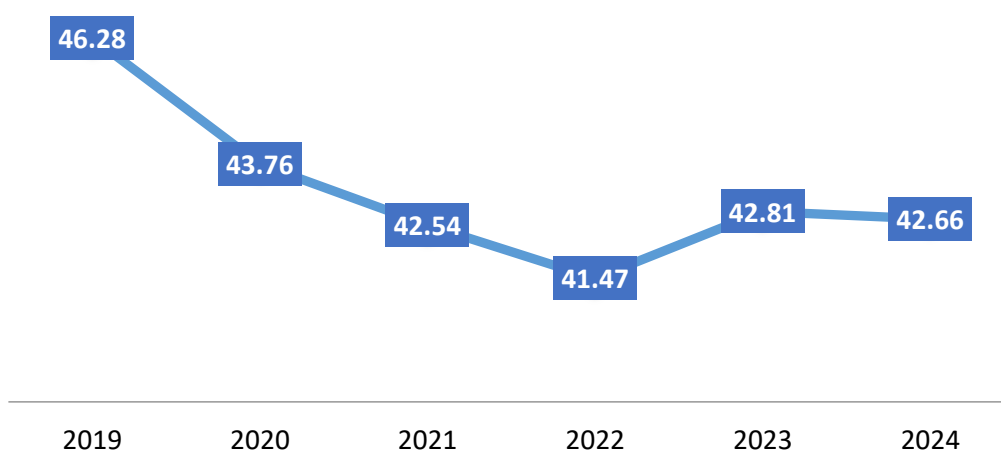
2.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15 -64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif.

Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Dalam Kurun waktu 2019-2022 rasio ketergantungan di Kota Tarakan relatif menurun, namun terjadi peningkatan di tahun 2023 dengan nilai 42,81. Selanjutnya turun Kembali ditahun 2024 yang sebesar 42,66. Artinya beban penduduk produktif untuk menanggung penduduk non produktif menurun. Pada tahun 2024, rasio ketergantungan di Kota Tarakan sebesar 42,66, artinya setiap 100 orang penduduk Kota Tarakan yang berusia kerja (usia produktif) menanggung sebanyak 42 sampai 43 orang yang belum atau tidak produktif.

Gambar 2.21
Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)
di Kota Tarakan Tahun 2019-2024



Sumber : Kota Tarakan Dalam Angka 2025, diolah

2.3.2. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Bagian ini menjelaskan kondisi tentang Iptek dan inovasi yang menjadi pendorong untuk tidak hanya menjaga, melainkan juga mempercepat keberlanjutan produktivitas sektor-sektor ekonomi dan memperkuat struktur ekonomi dalam jangka panjang. Untuk menggambarkan hal tersebut, digunakan indikator Rasio PDRB Industri Pengolahan, Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dan Indeks Inovasi Daerah.

a. PDRB Industri Pengolahan

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) adalah nilai seluruh barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam suatu wilayah selama periode waktu tertentu, biasanya satu tahun. Sektor industri pengolahan adalah

salah satu dari 17 lapangan usaha yang ada dalam PDRB, yang menggunakan pendekatan produksi. Sektor ini mencakup berbagai kegiatan seperti pengolahan makanan, minuman, tekstil, kayu, kimia, dan lain-lain. PDRB industri pengolahan memberikan gambaran tentang kontribusi sektor industri terhadap perekonomian suatu wilayah. Peningkatan PDRB industri pengolahan dapat mengindikasikan pertumbuhan ekonomi yang positif di daerah tersebut.

Secara keseluruhan, PDRB industri pengolahan merupakan indikator penting yang memberikan informasi tentang kinerja sektor industri dan memberikan gambaran tentang pertumbuhan ekonomi suatu daerah. PDRB industri pengolahan adalah nilai total produk domestik bruto yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan di suatu wilayah.

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) sektor industri pengolahan di Kota Tarakan pada tahun 2024 adalah 10,30%, menjadikannya salah satu dari lima sektor penyumbang terbesar PDRB kota Tarakan. Sektor industri pengolahan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Kota Tarakan. Berikut adalah data PDRB industri pengolahan di Kota Tarakan.

Tabel 2.24
PDRB Industri Pengolahan
Kota Tarakan Tahun 2020 – 2024

Lapangan Usaha Industri Pengolahan		
Tahun	Milyar Rp.	Persen
2020	4.251,43	11,17
2021	4.636,38	11,08
2022	5.236,18	11,09
2023	5.531,01	10,58
2024	5.789,44	10,30

Sumber : Kota Tarakan Dalam Angka 2025, diolah

b. PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

Produk domestik regional bruto (PDRB) penyediaan akomodasi dan makan minum adalah nilai total *output* ekonomi yang dihasilkan oleh



sektor penyediaan akomodasi serta makanan dan minuman di suatu wilayah dalam periode tertentu. Indikator ini berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita serta indikator makro ekonomi lainnya.

Nilai PDRB penyediaan akomodasi dan makan minum di Kota Tarakan menunjukkan tren yang meningkat sebesar 381,13 miliar rupiah pada tahun 2020 menjadi 512,79 di tahun 2024. Faktor penentu produk domestik regional bruto (PDRB) sektor akomodasi dan makan minum di Kota Tarakan dipengaruhi oleh beberapa variabel seperti pariwisata dan mobilitas penduduk, infrastruktur dan aksesibilitas, daya beli masyarakat, investasi dan kebijakan pemerintah, serta digitalisasi dan teknologi. Faktor-faktor ini harus mendapat intervensi kebijakan yang baik agar nilai PDRB akomodasi dan makan minum di Kota Tarakan bisa meningkat secara berkesinambungan. Berikut data PDRB penyediaan akomodasi dan makan minum di Kota Tarakan.

Tabel 2.25
PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum
Kota Tarakan Tahun 2020 – 2024

Lapangan Usaha Industri Pengolahan		
Tahun	Milyar Rp.	Persen
2020	381,13	2,12
2021	386,32	2,10
2022	429,47	2,12
2023	461,76	2,13
2024	512,79	2,26

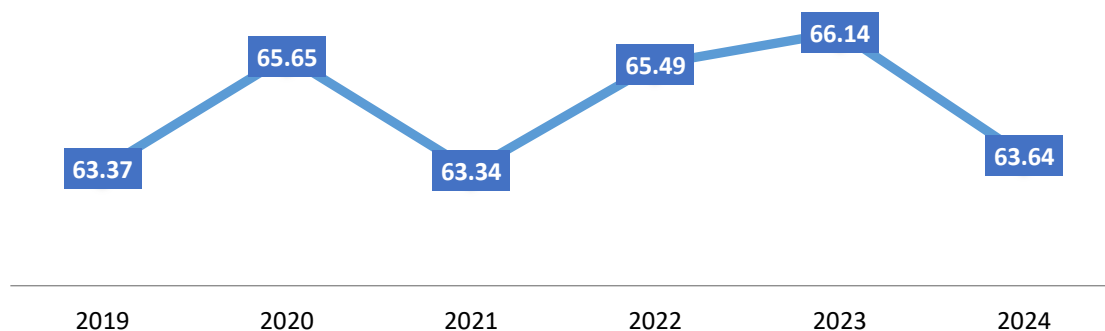
Sumber : Kota Tarakan Dalam Angka 2025, diolah

c. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi sosial ekonomi. Salah satu sasaran dalam pembangunan adalah diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang seimbang dan memadai untuk dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahunnya.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan tingkat persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Gambar 2.22
TPAK Kota Tarakan Tahun 2019-2024



Sumber : Kota Tarakan Dalam Angka 2025, diolah

Dalam kurun waktu 2019-2024 TPAK di Kota Tarakan berfluktuatif. Pada tahun 2022 TPAK mengalami peningkatan sebesar 2,15 persen dari tahun sebelumnya menjadi 65,49 persen. Dan pada tahun 2023 TPAK mengalami peningkatan lagi sebesar 0,65 persen dari tahun sebelumnya menjadi 66,14 persen dan pada tahun 2024 TPAK Kota Tarakan sebesar 63,64 persen. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja, sekitar 64 orang termasuk angkatan kerja atau dapat diartikan dari 1.000 orang penduduk usia kerja sekitar 636 orang diantaranya aktif secara ekonomi. TPAK di Kota Tarakan dipengaruhi oleh struktur demografi dan kependudukan, kondisi ekonomi dan peluang kerja, pendidikan dan keterampilan kerja, peran sektor informal dan wirausaha, faktor sosial dan gender serta kebijakan pemerintah dan program ketenagakerjaan. Faktor-faktor tersebut harus mendapat



intervensi kebijakan yang baik agar nilai TPAK di Kota Tarakan bisa meningkat secara berkesinambungan.

d. Indeks Inovasi Daerah

Indeks inovasi daerah (IID) merupakan sebuah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu berinovasi dalam mendukung pembangunan, meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan, serta memperkuat daya saing wilayahnya dalam berbagai sektor. Indeks ini mencerminkan kapasitas suatu daerah dalam menciptakan, mengembangkan, dan menerapkan berbagai bentuk inovasi, baik dalam aspek kebijakan, program, maupun layanan publik yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Melalui IID, dapat diketahui bagaimana pemerintah daerah beradaptasi terhadap tantangan pembangunan, mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, serta menghadirkan solusi inovatif untuk meningkatkan kualitas layanan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Berikut adalah data indeks inovasi daerah Kota Tarakan.

Tabel 2.26
Indeks Inovasi Daerah
Kota Tarakan Tahun 2020 – 2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Inovasi Daerah (IID)	307	30,37	46,44	38,20	44,43
Predikat IID	Kurang inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif

**) Mulai Tahun 2021 Indeks Inovasi Daerah berubah pengukuran yang sebelumnya Tahun 2019 dan 2020 masih dalam ribuan*

Sumber: Kementerian Dalam Negeri 2020-2024

Indeks Inovasi Daerah Kota Tarakan mengalami fluktuasi dari tahun 2021-2024. Pada tahun 2024 capaian indeks inovasi daerah Kota Tarakan mencapai 44,43 dengan predikat Inovatif. Meskipun indikator ini menunjukkan perkembangan positif, predikat inovasi daerah tetap stagnan di kategori "Inovatif" dan belum mengalami peningkatan ke tingkat yang lebih tinggi. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor utama, di antaranya minimnya inovasi baru yang berskala besar, yang

menyebabkan peningkatan skor tidak cukup signifikan untuk mendorong perubahan predikat. Selain itu, proses adaptasi dan implementasi inovasi masih belum optimal, baik dalam hal pemanfaatan teknologi, digitalisasi layanan publik, maupun efektivitas kebijakan inovatif yang diterapkan.

Faktor lainnya yang turut berkontribusi terhadap stagnasi ini meliputi keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang mendukung pengembangan inovasi, serta kurangnya sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga riset dalam menciptakan inovasi yang lebih berdampak luas. Selain itu, inovasi yang ada masih bersifat sektoral dan belum diadopsi secara menyeluruh di berbagai bidang pemerintahan maupun pelayanan publik. Oleh karena itu, untuk mendorong peningkatan predikat inovasi daerah, diperlukan strategi yang lebih komprehensif, termasuk penguatan ekosistem inovasi, peningkatan investasi dalam riset dan teknologi, serta percepatan adopsi kebijakan inovatif yang dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

2.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Bagian ini menjelaskan kondisi tentang penerapan ekonomi hijau dan biru dalam transformasi ekonomi yang ditujukan dalam rangka pertumbuhan ekonomi yang tinggi sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan agar berkelanjutan. Penjelasan ini dilengkapi dengan indikator Indeks Ekonomi Hijau dan Indeks Ekonomi Biru Indonesia.

a. Indeks Ekonomi Hijau

Penerapan ekonomi hijau dalam transformasi ekonomi ditujukan agar pertumbuhan ekonomi yang tinggi sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan. Penerapan ekonomi hijau diharapkan dapat menjadi sumber pertumbuhan baru melalui peningkatan peluang kerja, investasi hijau dan pengembangan produk-produk hijau.



Implementasi dari ekonomi hijau di Indonesia diukur menggunakan Indeks Ekonomi Hijau, yang merepresentasikan efektivitas transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau secara tangible, representatif, dan akurat. Indeks Ekonomi Hijau Indonesia memiliki seperangkat indikator multidimensi yang mencakup keterkaitan antara lingkungan, sosial, dan ekonomi sebagai tiga pilar utama pembangunan berkelanjutan.

Nilai Indeks Ekonomi Hijau merepresentasikan capaian dan progres transformasi ekonomi Indonesia relatif terhadap batas minimum dan maksimum yang menjadi acuan parameter pembangunan ekonomi hijau. Indeks Ekonomi Hijau Daerah terdiri dari 16 indikator terpilih dalam tiga pilar, yakni:

1. Pilar Ekonomi (6 indikator)
 - Intensitas emisi GRK (TonCO₂eq/Milyar Rupiah)
 - Intensitas energi final (BoE/Milyar Rupiah)
 - Pendapatan Domestik Regional Bruto per kapita (USD/kapita)
 - Produktivitas pertanian (ton/Ha/tahun)
 - Produktivitas tenaga kerja sektor industri (Juta Rupiah/orang), dan
 - Produktivitas tenaga kerja sektor jasa (Juta Rupiah/orang)
2. Pilar Sosial (4 indikator)
 - Rata-rata lama sekolah (tahun)
 - Angka Harapan Hidup (tahun)
 - Tingkat Kemiskinan (%)
 - Tingkat pengangguran terbuka (%)
3. Pilar Lingkungan (6 indikator)
 - Luas tutupan hutan dari luas daratan (%)
 - Bauran energi baru terbarukan dari sumber energi primer (%)
 - Kualitas air permukaan parameter BOD (mg/L)
 - Kualitas udara parameter NO₂ (ug/m³)
 - Penurunan emisi GRK kumulatif dari baseline (TonCo₂Eq)
 - Penurunan tutupan lahan gambut (%)

Langkah selanjutnya adalah menghitung nilai indeks ekonomi hijau. Pada tingkat provinsi, indeks ekonomi hijau dihitung dengan pembobotan dimana komposisi pilar lingkungan 50: pilar ekonomi 30: pilar sosial 20.

Dalam proses perhitungan indeks ekonomi hijau,

Dalam hal perhitungan capaian Indeks Ekonomi Hijau, Kementerian PPN/Bappenas sedang mengembangkan tool untuk dapat dimanfaatkan pemerintah daerah dalam melaporkan capaian Indeks Ekonomi Hijau Provinsi. Pemerintah Provinsi diharapkan dapat melaporkan capaian per indikator dalam indeks ekonomi hijau daerah setiap tahun. Apakah Indeks Ekonomi Hijau harus diturunkan ke tingkat Kabupaten/Kota?, dengan pertimbangan bahwa Indeks Ekonomi Hijau (IEH) merupakan indeks yang penghitungannya menggunakan lebih dari satu indikator dan tidak semua data penyusun indikator tersedia di tingkat Kabupaten/Kota, maka tidak disarankan untuk menurunkan angka target IEH tingkat Provinsi untuk menetapkan angka target IEH ke masing-masing Kabupaten/Kota. Namun, Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan tetap menentukan beragam upaya dan kebijakan dalam kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang berkontribusi, baik langsung maupun tidak langsung, dalam mendukung total indikator penyusun ketiga pilar dari IEH.

b. Indeks Ekonomi Biru

Indeks Ekonomi Biru (*Blue Economy Index*) adalah alat untuk mengukur dan mengevaluasi sejauh mana pemanfaatan sumber daya laut suatu negara atau wilayah dilakukan secara berkelanjutan. Ini mencakup berbagai sektor seperti perikanan, akuakultur, pariwisata bahari, energi terbarukan dari laut, dan transportasi laut, dengan tujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Indeks ini membantu mengukur sejauh mana praktik ekonomi biru diterapkan dalam berbagai sektor, memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya laut dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak merusak lingkungan. Dengan adanya indeks, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dalam penerapan ekonomi biru, sehingga dapat mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Indeks ini juga berfungsi sebagai alat evaluasi

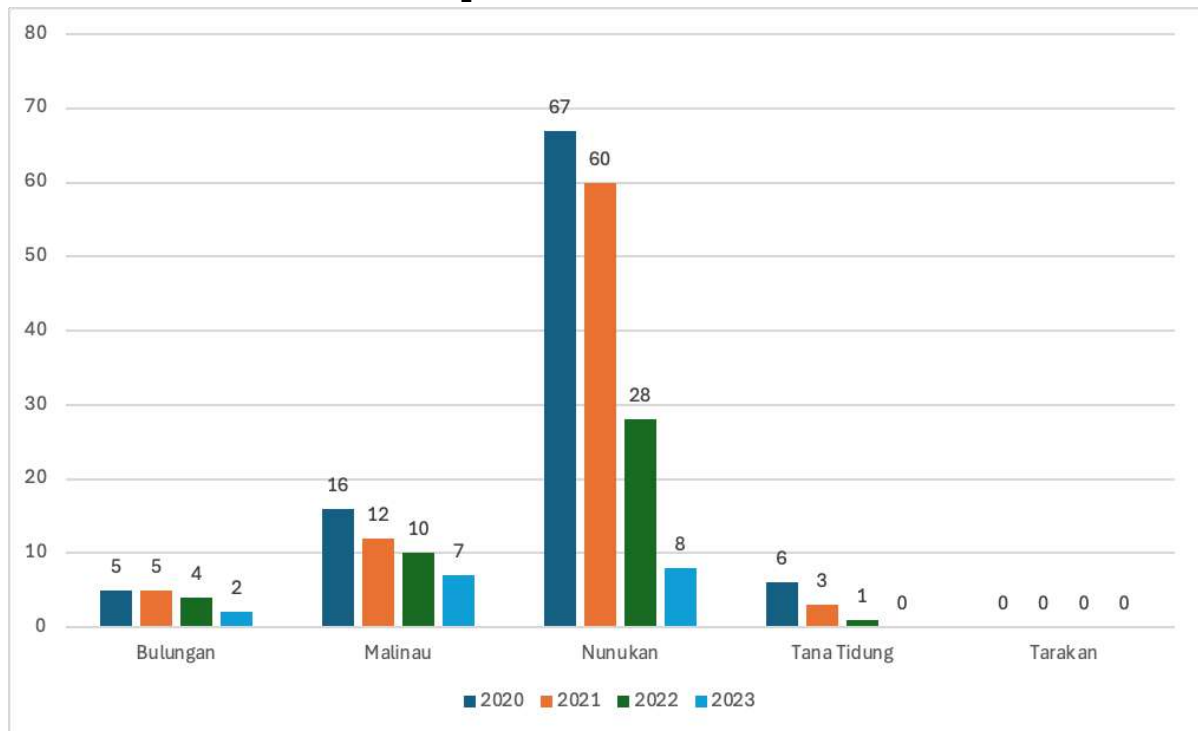


untuk mengukur kinerja ekonomi biru di berbagai tingkatan, baik nasional maupun lokal. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang potensi ekonomi laut dan tantangan yang dihadapi, negara-negara dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya laut untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ekonomi biru, yang diukur melalui indeks ini, berkontribusi pada pencapaian berbagai tujuan SDGs, terutama SDG 14 (Kehidupan di Bawah Air). Indeks Ekonomi Biru adalah alat penting untuk mengukur dan mendorong penerapan ekonomi biru yang berkelanjutan. Dengan mengukur berbagai faktor terkait pemanfaatan sumber daya laut, indeks ini membantu negara-negara seperti Indonesia untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan ramah lingkungan. Untuk saat ini, data indeks ekonomi biru belum tersedia di Kota Tarakan dan akan dihitung kemudian.

2.3.4. Transformasi Digital

Transformasi digital telah menjadi pengarusutamaan dalam pembangunan daerah yang meliputi pengembangan super platform, percepatan transformasi digital, dan mencetak talenta digital. Pengembangan transformasi digital bertujuan untuk mendukung aspek pelayanan kepada masyarakat dan tata kelola pemerintahan. Pembangunan teknologi informasi komunikasi berkaitan dengan ketersediaan layanan internet yang telah menjangkau kelurahan di Kota Tarakan. Semua kelurahan tidak ada lagi yang berada dalam zona blankspot internet. Desa dan kelurahan blankspot di Provinsi Kalimantan Utara dalam kurun waktu tahun 2020-2023 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.23
Desa/Kelurahan Blankspot di Kota Tarakan Tahun 2020-2023



Sumber: SDI Provinsi Kalimantan Utara

Berdasarkan gambar tersebut, jumlah kelurahan blankspot di Kota Tarakan sudah tidak ada lagi yang berada di zona blankspot sejak tahun 2020 hingga tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa layanan internet telah seluruh kelurahan. Jumlah desa/kelurahan blankspot tertinggi berada di Kabupaten Nunukan yaitu delapan desa/kelurahan, sedangkan Kota Tarakan telah bebas dari blankspot. Jangkauan layanan internet di desa dan kelurahan telah menjadi kebutuhan untuk mendukung pelayanan publik.

Dalam mendukung upaya pengembangan transformasi digital yang berkaitan dengan statistik telah diukur dengan Indeks Pembangunan Statistik melalui hasil penilaian EPSS pada tahun 2024. Indeks Pembangunan Statistik di Kota Tarakan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.27
Indeks Pembangunan Statistik Kota Tarakan Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Indeks	Predikat
Kota Tarakan	2,25	Cukup

Sumber: BPS Kota Tarakan, 2024



Berdasarkan data tersebut, Kota Tarakan memiliki Indeks Pembangunan Statistik 2,25 dengan predikat cukup, nilai indeks ini lebih rendah jika diandingkan dengan capaian IPS provinsi Kalimantan Utara. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan statistik di kota tersebut telah perlu untuk ditingkatkan.

Sebagai bagian dari strategi percepatan transformasi digital, Kota Tarakan telah menjalankan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat Dan Pemerintah Daerah Tahun 2023 Kota Tarakan berhasil meraih predikat Baik dengan skor indeks 2,92 dan pada tahun 2024 meningkat dengan skor indeks 3,11. Capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengintegrasikan sistem informasi, memperkuat tata kelola digital, serta meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Evaluasi ini juga menunjukkan bahwa Kota Tarakan telah berada pada tingkat kematangan yang baik dalam pelaksanaan SPBE.

Tabel 2.28
Indeks SPBE Kota Tarakan Tahun 2021-2024

Tahun	Indeks	Predikat
2021	2,20	Cukup
2022	2,11	Cukup
2023	2,92	Baik
2024	3,11	Baik

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan 2025, diolah

Berdasarkan data dari tabel diatas mengenai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Tarakan selama periode 2021 hingga 2024, terlihat adanya perkembangan yang signifikan dan positif dalam penerapan digitalisasi di lingkungan pemerintahan daerah.

Pada tahun 2021, Indeks SPBE Kota Tarakan tercatat sebesar 2,20 dengan predikat “Cukup”, yang menunjukkan bahwa penerapan sistem digital dalam tata kelola pemerintahan masih berada pada tahap awal pengembangan. Meskipun terjadi sedikit penurunan indeks menjadi 2,11 pada tahun 2022, predikat tetap berada pada kategori “Cukup”, yang dapat dimaknai sebagai fase konsolidasi dan evaluasi terhadap sistem yang telah berjalan.

Namun, lonjakan indeks yang terjadi pada tahun 2023 menjadi 2,92 dengan predikat “Baik”, menandai titik balik yang penting dalam transformasi digital pemerintahan. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan Pemerintah Kota Tarakan dalam memperkuat infrastruktur teknologi informasi, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, serta memperluas cakupan layanan publik berbasis elektronik. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2024, di mana indeks kembali meningkat menjadi 3,11, mempertahankan predikat “Baik” dan menunjukkan konsistensi dalam komitmen terhadap digitalisasi.

Secara keseluruhan, data tersebut mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Tarakan telah menunjukkan kemajuan yang nyata dan terukur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, efisien, dan transparan melalui pemanfaatan teknologi digital. Peningkatan indeks SPBE selama empat tahun terakhir menjadi bukti bahwa digitalisasi bukan hanya menjadi wacana, melainkan telah diimplementasikan secara strategis dan berkelanjutan demi meningkatkan kualitas pelayanan publik serta efektivitas birokrasi.

2.3.5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Bagian ini menjelaskan kondisi tentang integrasi ekonomi domestik dan global dalam mendorong peningkatan produktivitas perekonomian dalam negeri yang terintegrasi dan mendukung partisipasi dalam rantai pasok global. Penjelasan ini didukung oleh indikator Pembentukan Modal Tetap Bruto.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur nilai investasi yang



dilakukan dalam bentuk penambahan, perbaikan, atau penggantian aset tetap di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Aset tetap yang dimaksud mencakup barang-barang berumur panjang yang digunakan dalam proses produksi, seperti bangunan, infrastruktur, mesin-mesin industri, kendaraan operasional, serta peralatan lainnya yang berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas produksi dan efisiensi ekonomi. PMTB menjadi salah satu faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi, karena mencerminkan tingkat investasi yang dilakukan oleh sektor swasta maupun pemerintah dalam rangka memperkuat struktur ekonomi dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Semakin tinggi nilai PMTB, semakin besar pula potensi peningkatan produktivitas dan daya saing suatu daerah, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat.

Ekonomi Kota Tarakan mencatatkan pertumbuhan yang signifikan sepanjang tahun 2024, dengan laju pertumbuhan ekonomi mencapai 5,71 persen secara tahunan (c-to-c), tertinggi dibanding kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Utara. PDRB atas dasar harga konstan tahun 2024 tercatat sebesar Rp27,11 triliun.

Pertumbuhan tersebut ditopang oleh kinerja sektor tersier yang dominan, mencatat kenaikan 7,15 persen sepanjang tahun. Sektor ini berkontribusi hingga 59,97 persen terhadap struktur ekonomi kota. Aktivitas perdagangan, transportasi, jasa keuangan, dan pemerintahan sangat berperan dalam mengangkat sektor jasa. Dari sisi pengeluaran, komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 8,29 persen. PMTB mencerminkan peningkatan investasi fisik seperti pembangunan infrastruktur dan peralatan produksi. Kenaikan PMTB menunjukkan adanya ekspansi dari pelaku ekonomi, baik sektor swasta maupun pemerintah.

Secara spasial, Tarakan masih menjadi penopang utama ekonomi Kalimantan Utara. Dengan kontribusi sebesar 37,47 persen terhadap PDRB provinsi, Tarakan tumbuh paling tinggi dibanding daerah lainnya. Tarakan tidak hanya menjadi pusat aktivitas ekonomi, tetapi juga menjadi indikator utama arah pertumbuhan wilayah. Dalam konteks PDRB per

kapita, nilai yang dicapai Kota Tarakan tahun 2024 sebesar Rp221,39 juta. Nilai ini meningkat dari tahun sebelumnya dan mencerminkan daya beli serta produktivitas ekonomi masyarakat yang terus membaik.

2.3.6. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

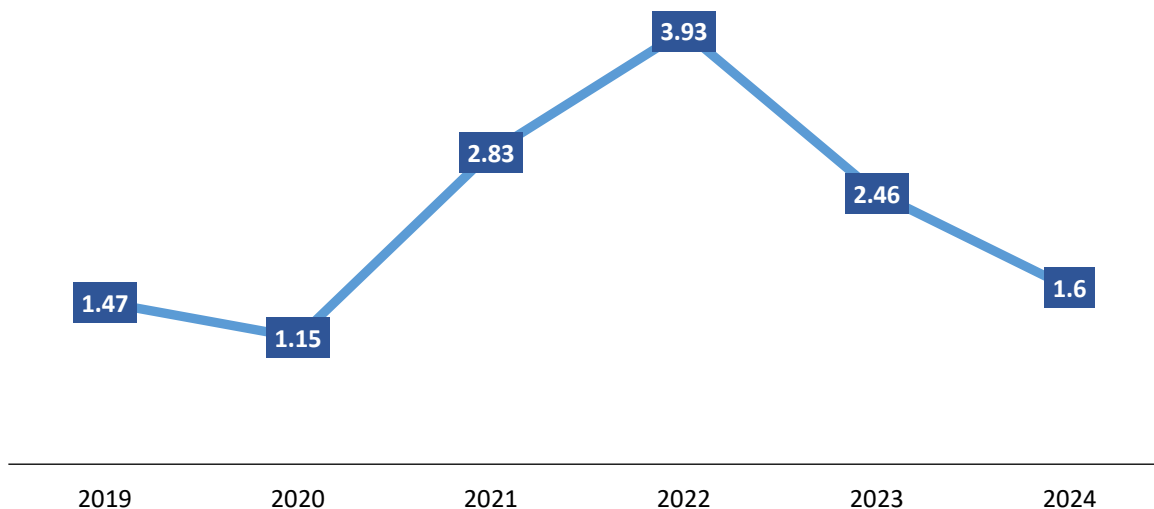
Perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi merujuk kepada kondisi terwujudnya integrasi antara kawasan perkotaan dengan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Kondisi ini memerlukan prasyarat berupa ketersediaan infrastruktur wilayah yang andal dan merata. Kualitas infrastruktur daerah di Kota Tarakan dapat diindikasikan melalui data indeks layanan infrastruktur. Indeks layanan infrastruktur menggambarkan kinerja penyediaan dan pembangunan infrastruktur yang mencakup ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, infrastruktur layanan dasar permukiman, dan kelistrikan. Pada tahun 2020 Indek Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Kota Tarakan adalah 78,00 dan pada tahun 2024 capaian IKLI Kota Tarakan adalah 80,17.

Selanjutnya adalah persentase Panjang jalan dalam kondisi mantap. Pada tahun 2020 persentase Panjang jalan dalam kondisi mantap Kota Tarakan adalah sebesar 60,21% dan terus meningkat, Dimana pada tahun 2024 kondisi jalan dalam kondisi mantap sebesar 70,58%.

2.3.7. Stabilitas Ekonomi Makro

Inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus, naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang sehingga infalsi dapat juga diartikan sebagai menurunnya nilai uang terhadap nilai barang dan jasa tertentu. Laju inflasi adalah suatu proses menurunnya nilai mata uang disertai dengan peningkatan harga barang secara umum dan terus menerus (*continue*) dalam periode tertentu. Kota Tarakan pada bulan Desember 2024 mengalami inflasi yoy sebesar 1,6 persen.

Gambar 2.24
Laju Inflasi Kota Tarakan Tahun 2019-2024



Sumber : Kota Tarakan Dalam Angka 2025, diolah

2.4. Aspek Pelayanan Umum

2.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif mengacu pada sistem peraturan dan cara pemerintah mengatur serta mengelola sumber daya dan masyarakat dengan cara yang jujur, transparan, dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, efisiensi, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat.

Aspek ini menjelaskan tentang kondisi tata kelola pemerintahan yang merupakan pengelolaan sektor publik yang efisien, efektif, akuntabel, didasarkan atas pertukaran informasi yang terbuka, transparan, serta mematuhi kerangka hukum. Adapun indikator yang digunakan dalam menggambarkan kinerja aspek pelayanan umum, antara lain adalah Indeks Reformasi Birokrasi dan Nilai SAKIP.

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan indikator paling makro yang memberikan penilaian dan evaluasi terhadap kinerja birokrasi di suatu instansi pemerintah. Pemenuhan indikator ini merupakan salah satu

upaya dalam mewujudkan good governance, di mana suatu pemerintah daerah dapat mencapai tingkat integritas dan kinerja yang tinggi. Semakin tinggi Indeks Reformasi Birokrasi, maka kinerja pemerintah daerah dianggap semakin efektif, efisien, serta bebas KKN. Berikut ini merupakan capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Tarakan.

Tabel 2.28
Indeks Reformasi Birokrasi Kota Tarakan Tahun 2020-2024

Tahun	Nilai	Predikat
2020	53,91	CC
2021	55,47	CC
2022	58,26	CC
2023	71,99	BB
2024	77,17	BB

Sumber: Sekretariat Daerah Tarakan, 2024.

Indeks Reformasi Birokrasi Kota Tarakan menunjukkan peningkatan setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan reformasi birokrasi di Kota Tarakan sudah berjalan optimal.

Akuntabilitas merupakan aspek penting dalam tata kelola pemerintahan guna memastikan kinerja yang bertanggung jawab untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat akuntabilitas suatu pemerintah daerah adalah Nilai SAKIP. Indikator ini meninjau empat aspek utama dalam tata kelola pemerintahan, yakni perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi. Semakin tinggi nilai SAKIP, maka semakin selaras antara apa yang direncanakan dan apa yang direalisasikan dalam bentuk capaian yang bertanggung jawab. Adapun capaian Nilai SAKIP Kota Tarakan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.29
Nilai SAKIP Kota Tarakan Tahun 2020-2024

Tahun	Nilai	Predikat
2020	62,67	B
2021	63,41	B
2022	65,13	B
2023	64,53	B
2024	64,89	B

Sumber: Sekretariat Daerah Tarakan, 2024.



Capaian Nilai SAKIP Kota Tarakan cenderung meningkat sejak tahun 2020 hingga tahun 2024. Namun masih dirasa belum optimal dengan target yang diharapkan yaitu predikat BB. Faktor pendukung capaian ini adalah pemilihan program dan kegiatan yang tepat menysasar sasaran yang telah ditetapkan. Hal tersebut juga didukung oleh konsistensi antar dokumen perencanaan dan APBD.

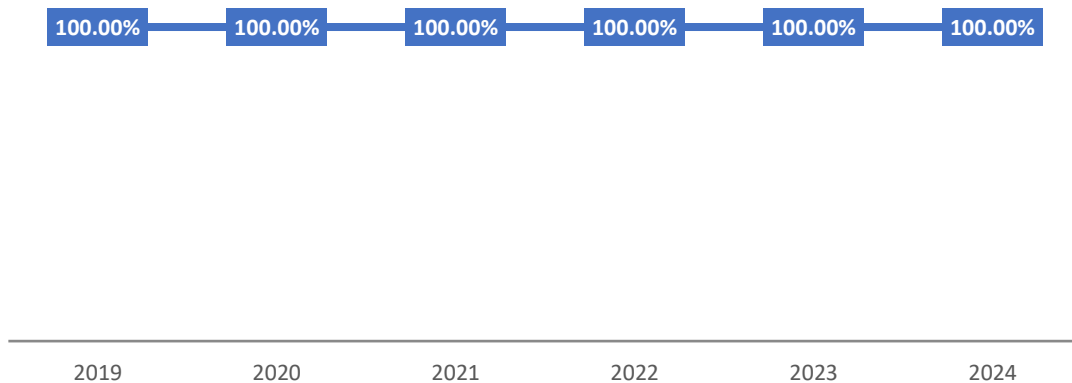
2.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas Pokok melaksanakan penegakan peraturan daerah, peraturan walikota, serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, Satpol PP berwenang:

- Melakukan tindakan penertiban nonyudisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- Melakukan tindakan penyelidikan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Dalam melaksanakan penegakan Perda, Satpol PP bertindak selaku koordinator Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah, dapat berkoordinasi dengan TNI, Polri, Kejaksaan, dan pengadilan yang berada di daerah provinsi/kabupaten/kota,” bunyi Pasal 8 ayat (2) PP ini. PP ini juga menegaskan, penyelenggaraan penegakan Perda dan Perkada oleh Satpol PP dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur dan kode etik.

Gambar 2.25
Persentase Penegakan PERDA Kota Tarakan Tahun 2019-2023



Sumber: Kantor Satpol PP dan PMK Kota Tarakan, 2024

2.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Menjelaskan tentang ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan nasional di berbagai bidang, mengembangkan dan memelihara hubungan antarnegara yang konstruktif serta meningkatkan kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di kawasan. Narasi mengenai sub bagian ini direpresentasikan melalui Indeks Daya Saing Daerah.

Indeks Daya Saing Daerah atau IDSD merupakan instrumen pengukuran daya saing yang merepresentasikan tingkat produktivitas pada provinsi dan kabupaten/kota. Konsep IDSD menggabungkan level makro pada institusi publik dengan level mikro pada perusahaan/industri. Penggabungan perspektif makro-mikro memiliki tiga faktor daya saing, yaitu faktor ketersediaan kebutuhan fundamental (*basic requirement factors*), faktor penguat efisiensi (*efficiency enhancers*), dan faktor inovasi dan kecanggihan (*innovation and sophistication factors*). Faktor daya saing tersebut dimasukkan pada 12 pilar Indeks Daya Saing Daerah. 12 pilar tersebut dielaborasi oleh pengukuran IDSD, yaitu lingkungan pendukung (institusi, infrastruktur, adopsi TK, dan stabilitas ekonomi makro), sumber daya manusia (kesehatan dan keterampilan),

pasar (pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, dan ukuran pasar), dan ekosistem inovasi (dinamisme bisnis dan kapabilitas inovasi). Pengukuran IDSD distandarisasi dengan rentang skor 0 hingga 5 pada seluruh indikator.

IDSD Kota Tarakan mengalami peningkatan sebesar 0,08 poin pada tahun 2023, dan mengalami peningkatan sebesar 0,42 poin pada tahun 2024 yakni berada pada angka 3,91. Capaian ini menjadi yang tertinggi di provinsi Kalimantan Utara.

Penilaian Indeks Daya Saing Daerah oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional mulai tahun 2022 menggunakan metode berbeda dengan tahun sebelumnya setelah adanya adaptasi terhadap kerangka pengukuran GCI (*Global Competitiveness Indeks*).

Tabel 2.30
Indeks Daya Saing Kota Tarakan Tahun 2022-2024

Kabupaten/Kota	2022	2023	2024
Kota Tarakan	3,41	3,49	3,91
Bulungan	2,87	3,23	3,53
Malinau	2,59	2,8	3,06
Nunukan	2,86	2,82	3,28
Tana Tidung	-	2,76	3,03

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional 2025, Diolah

Capaian skor IDSD Kota Tarakan mengalami tren peningkatan selama tahun 2022 hingga 2024. Pencapaian skor IDSD yang cukup baik di tingkat kabupaten/kota ini mengindikasikan adanya tren positif dalam tingkat produktivitas daerah.

2.4.4. Kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah

Kinerja urusan pemerintahan daerah Kota Tarakan diukur dengan melihat capaian Indikator Kinerja Kunci. IKK merupakan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Pemerintah Kota Tarakan memiliki IKK sebanyak 38 indikator. Berikut capaian IKK Kota Tarakan.



Tabel 2.31
Capaian Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci	2020	2021	2022	2023	2024	2024	Capaian Kinerja (Persen)
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	target	Realisasi	
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,83	76,30	76,75	77,61	79,13	78,03	98,61
Usia Harapan Hidup	73,97	74,18	74,21	74,24	74,62	74,27	99,53
Harapan Lama sekolah	14,02	14,03	14,04	14,21	14,17	14,22	100,35
Rata-Rata Lama Sekolah	9,97	9,98	10,08	10,36	10	10,37	103,70
Pengeluaran Rata-rata Perkapita	1,713,021	1,725,412	1,652,721	1,733,250	2,100,000	1,625,127	77,39
Indeks Reformasi Birokrasi	53,91	55,47	58,26	71,99	61,00	77,17	126,51
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00
Nilai SAKIP	62.67/B	63.41/B	65.13/B	64.53/B	72,00/BB	64,89 (B)	90,13
Indeks Profesionalitas ASN	49,28	49,36	53,36	61,19	70	80,32	114,74
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,91	85,5	86,81	86,74	85,25	87,73	102,91
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	78,00	n/a	n/a	79,96	81,50	80,17	98,37
Persentase Ruang Terbuka Hijau	50,40%	52,96%	55,56%	58,24%	60,63%	60,78%	100,25
Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air Minum	86,52%	86,80%	92,08%	98,99%	95,96%	82,71%	86,19
Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	72,63%	74,31%	74,29%	74,12%	73,11%	76,17%	104,19
Persentase Penambahan Bangunan Pemerintah dan Fasilitas Umum	16,67%	60,60%	110,61%	257,58%	100,00%	466,67%	466,67
Persentase Bangunan dan Lingkungan yang Tertata	21,12%	63,50%	59,01%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00
Persentase Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap	60,21%	65,97%	67,38%	69,57%	65,94%	70,58%	107,04
Persentase pembinaan jasa konstruksi	20,00%	22,79%	24,28%	85,00%	20,00%	100,00%	500,00
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	82,49%	85,66%	89,54%	90,55%	98,35%	91,51%	93,05
Rasio Panjang Jalan Dibagi Jumlah Kendaraan	1,32	1,30	1,22	1,19	1,23	1,11	110,81
Persentase Pemeliharaan Pelabuhan	NA	n/a	29,00%	58,00%	100,00%	80,00%	80,00



Indikator Kinerja Kunci	2020	2021	2022	2023	2024	2024	Capaian Kinerja (Persen)
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	target	Realisasi	
Persentase Rumah untuk MBR yang terbangun dan terenovasi	20,00%	51,35%	66,52%	97,61%	100,00%	100,00%	100,00
Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh	74,96%	49,17%	42,75%	17,43%	6,87%	9,37%	136,39
Gini Rasio	0,295	0,261	0,267	0,253	0,28	0,232	120,69
Angka Kemiskinan	6,24	6,71	6,30	6,10	5,25	5,56	94,42
Tingkat Pengangguran Terbuka	5,84	4,94	5,76	5,25	5,64	5,11	110,37
Laju pertumbuhan ekonomi	-0,78	3,99	5,59	5,9	6,53	5,71	89,92
Tingkat Inflasi	1,15	2,83	3,93	2,46	3,00	1,60	187,50
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,07	73,15	69,38	69,61	70,19	68,27	97,26
Indeks Kualitas Air	45,56	63,33	53,33	54,44	55,12	54,44	98,77
Indeks Kualitas Udara	93,42	93,27	93,24	93,14	91,77	89,51	97,54
Indeks Tutupan Lahan	55,3	52,79	52,81	52,1	56,16	52,73	93,89
Persentase sampah yang dikelola	90,77%	92,51%	95,14%	97,66%	98,00%	97,90%	99,90
Persentase Luas genangan banjir	0,230%	0,156%	0,116%	0,110%	0,096%	0,10010%	96,00
Persentase pelayanan Kebencanaan	n.a	90,17%	100%	100,00%	100%	100%	100,00
Persentase pelayanan bencana kebakaran	92%	91,00%	100%	100,00%	100%	100,00%	100,00
Indeks Kota Toleran	5,337	5,687	4,737	5,107	5,45	4,557	83,61
Persentase pelanggaran K3 yang tertangani	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00

Maksimal capaian adalah 120%, maka capaian IKK Kota Tarakan sampai Tahun 2024 adalah : $3.848,94 : 38 = 101,29\%$

2.5. Gambaran Keuangan Daerah

Bab ini akan membahas gambaran pengelolaan keuangan daerah yang berisi penjelasan tentang kinerja pengelolaan keuangan di masa lalu, perilaku data dan informasi pertanggungjawaban keuangan daerah, dan bagaimana proyeksi ketersediaan dana pembangunan pada periodesasi RPJMD mendatang. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah, hal ini sangat penting dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Untuk memahami tingkat kemampuan keuangan daerah, maka perlu dicermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

2.5.1. Realisasi APBD 2020-2024

Kondisi keuangan daerah menjadi faktor yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam lingkup mikro gambaran keuangan daerah meliputi analisis pengelolaan keuangan daerah baik dari segi pendapatan maupun belanja daerah. Berbagai literatur dan best practice mengemukakan bahwa manajemen pembelanjaan pemerintah daerah adalah instrumen kunci dari kebijakan pemerintah daerah, karena itu disarankan kepada otoritas penganggaran untuk mencermati adanya hubungan integral dan keseimbangan antara *“revenue dan expenditure”*. Hal ini penting untuk menjaga terciptanya keberlanjutan fiskal (*fiscal sustainability*) daerah serta perspektif pembangunan yang berorientasi jangka menengah dan panjang.

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah dijabarkan dalam suatu APBD, maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 tahun sebelumnya. Pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029 memberikan gambaran mengenai arah kebijakan keuangan dengan melihat potensi keuangan yang dimiliki dan



kebutuhan terhadap pendanaan pembangunan. Dalam penjabarannya gambaran pengelolaan keuangan daerah akan dituangkan dalam APBD. Arah kebijakan keuangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Tarakan mengandung makna bahwa :

1. Arah belanja APBD Kota Tarakan digunakan sepenuhnya untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis jangka menengah lima tahunan.
2. Untuk menjamin ketersediaan dana, maka kebijakan pendapatan diarahkan untuk mendapatkan berbagai sumber pendapatan yang berkelanjutan dengan jumlah yang memadai.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang antara lain menyebutkan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Atas dasar ini, maka semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD, dan selanjutnya APBD tersebut akan dipakai sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran daerah yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan serta kemampuan keuangan daerah, oleh karena itu prinsip pengelolaan ini akan tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah, struktur pendapatan dan struktur belanja daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi dasar pengelolaan keuangan daerah yang merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan dan belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Dalam sistem pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 23 Ayat (3) bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain:, bahwa APBD mempunyai fungsi berikut ini:

1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;
2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;
3. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
4. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;
5. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggarandaerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan
6. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaranpemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Gambaran kinerja keuangan daerah masa lalu dapat ditunjukkan dengan menganalisis pertumbuhan dan proporsi komponen APBD berupa: pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah selama periode tersebut, kemudian pertumbuhan dan rasio neraca daerah, disamping itu juga dengan pendekatan rasio-rasio keuangan daerah yang sering digunakan dalam analisis keuangan daerah, seperti kemandirian keuangan, solvabilitas operasional, solvabilitas jangka pendek, sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.



Untuk memperoleh gambaran keuangan daerah Tarakan digunakan data kinerja tahun 2020-2024. Penggunaan periode waktu ini diharapkan dapat memberikan gambaran perkembangan pengelolaan keuangan dan kemampuan kinerja keuangan Pemerintah secara lebih riil. Kondisi keuangan Pemerintah Kota Tarakan selama 5 (Lima) tahun terakhir menunjukkan kinerja yang semakin baik, Salah satu yang menunjukkan hal tersebut adalah opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah diperoleh Kota Tarakan selama 4 (empat) kali berturut-turut sejak tahun 2020.

Pendapatan daerah merupakan tolok ukur kemampuan keuangan daerah sebagai pijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah. pemerintah daerah agar secara bertahap mampu melepaskan ketergantungannya kepada pemerintah pusat dengan cara memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah sebagai modal utama pembangunan daerah. Daerah yang tidak mampu mencapai nilai PAD-nya minimal 25 persen dari nilai APBD-nya akan sulit berkembang, bahkan diindikasikan akan mengalami kebangkrutan. Pada kenyataannya angka minimal tersebut sangat sulit diwujudkan karena minimnya potensi PAD masing-masing daerah. Untuk menutup semua kebutuhan belanja Pemerintah Kota harus mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatannya, semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu menutup semua kebutuhan belanja. Analisis terhadap kinerja keuangan masa lalu mencakup kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah. Untuk itu perlu diketahui kemampuan pendanaan pembangunan pemerintahan daerah selama ini.

Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) sebagai salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah diukur melalui kontribusi realisasi PAD terhadap APBD. Kestinambungan penyelenggaraan pembangunan di masa datang ditentukan sejauh mana kemandirian pembiayaan tersedia untuk melaksanakan pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai DOFD menunjukkan semakin kuat

kemandirian pembiayaan pembangunan. Adapun klasifikasi DOFD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.32
Skala interval Otonomi Fiskal

No	Derajat Otonomi Fiskal (DOF) (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
1	0,00-10,00	Sangat Kurang
2	10,01-20,00	Kurang
3	20,01-30,00	Sedang
4	30,01-40,00	Cukup
5	40,01-50,00	Baik
6	>50	Sangat Baik

Sumber: Litbang Mendagri, 1991; Wulandari, 2001

Tabel 2.33
Derajat Otonomi Fiskal Daerah
Kota Tarakan, Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah)

	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata
1. Pendapatan	924.448	1.064.701	1.096.423	1.161.911	1.284.464	1.106.389
2. PAD	107.850	150.230	142.854	174.950	205.150	156.206
Persentase	11.67	14.11	13.03	15.06	15.97	13,97

Sumber: BPKPAD Kota Tarakan, 2025 (diolah)

Kemandirian keuangan daerah Kota Tarakan berdasarkan DOFD dalam 5 (Lima) tahun terakhir (2020-2024) mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 DOFD Kota Tarakan hanya mencapai angka 11,67% yang berarti masuk dalam kategori kurang. Memasuki tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 DOFD Kota Tarakan masing-masing sebesar 14,11% dan 13,03%, dengan kategori masih kurang, Kemudian ditahun 2023 naik menjadi 15,06% dan tahun 2024 naik lagi menjadi 15,97%. Fluktuasi tersebut disebabkan karena terjadinya kenaikan dan penurunan PAD dalam lima tahun terakhir terutama pada komponen Pendapatan Pajak Daerah. Jika dilihat berdasarkan klasifikasinya, rata-rata nilai DOFD Kota Tarakan yang sebesar 13,97% masih masuk kategori kurang karena nilai DOF nya antara 10,01%-20,00%. Agar tingkat kemandirian fiskal ke depan bisa meningkat dan masuk kategori sedang, maka Pemerintah Kota Tarakan harus menggali sumber-sumber keuangan daerahnya dengan



cara yang lebih kreatif dan inovatif dalam sehingga penerimaannya perlahan tidak tergantung kepada pemerintah pusat maupun provinsi.



Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Tarakan Tahun 2025-2029

Tabel 2.34
Realisasi APBD Kota Tarakan Tahun 2020-2024

Kode Akun	Uraian	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
5.1.1	PENDAPATAN	924.448.557.055,66	1.064.701.502.962,04	1.096.423.300.213,83	1.161.911.937.167,63	1.284.464.896.452,21
5.1.1.1	Pendapatan Asli Daerah	107.850.263.520,68	150.230.724.396,44	142.854.001.021,83	174.950.040.888,63	205.150.776.692,21
5.1.1.2	Pendapatan Transfer	691.910.393.097,00	759.681.960.014,00	949.859.329.012,00	983.549.492.817,00	1.079.314.119.760,00
5.1.1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	124.687.900.437,98	42.110.952.220,00	3.709.970.180,00	3.412.403.462,00	0,00
5.1.2	BELANJA DAERAH	990.158.020.064,64	971.765.198.844,15	1.098.635.335.157,23	1.265.517.497.630,33	1.271.345.838.376,68
5.1.2.1	Belanja Operasi	703.025.132.440,35	725.725.911.681,38	790.055.382.536,73	868.710.123.387,81	963.247.367.161,54
5.1.2.2	Belanja Modal	278.417.973.827,00	241.614.289.899,77	304.460.318.615,50	396.040.018.311,52	307.874.591.715,14
5.1.2.3	Belanja Tidak Terduga	299.824.170	8.714.913.797	4.424.997.263,00	767.355.931,00	223.879.500,00
5.1.2.4	Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3	PEMBIAYAAN					
5.1.3.1	Penerimaan Pembiayaan	160.831.703.932	76.817.140.923,45	154.698.876.041,34	146.487.097.097,94	39.881.536.635,24
5.1.3.2	Pengeluaran Pembiayaan	18.305.100.000	15.039.569.000	5.999.744.000,00	3.000.000.000,00	1.999.256.800,00
	PEMBIAYAAN NETTO	142.526.603.932	61.762.571.923,45	148.699.132.041,34	143.487.097.097,94	37.882.279.835,24
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	76.817.140.923,02	154.698.876.041,34	146.487.097.097,94	39.881.536.635,24	51.001.337.910,77

Sumber: LRA AUDITED BPKPAD, 2025 diolah



a. Pendapatan Daerah

Sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- b. Pendapatan transfer yang berasal dari Dana Perimbangan, Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, dan Pemerintah Daerah Lainnya.

Secara lebih rinci rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kota Tarakan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:



Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Tarakan Tahun 2025-2029

Tabel 2.35
Realisasi Pendapatan Daerah Kota Tarakan Tahun 2020-2024

Kode Akun	Uraian	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
5.1.1	PENDAPATAN	924.448.557.055,66	1.064.701.502.962,04	1.096.423.300.213,83	1.161.911.937.167,63	1.284.464.896.452,21
5.1.1.1	Pendapatan Asli Daerah	107.850.263.520,68	150.230.724.396,44	142.854.001.021,83	174.950.040.888,63	205.150.776.692,21
	Pajak Daerah	44.531.775.486,03	58.914.840.092,14	74.225.687.913,98	86.660.296.194,72	98.648.559.407,53
	Retribusi Daerah	10.880.768.187,70	10.647.994.451,00	11.782.248.604,00	12.859.825.298,00	15.931.691.889,70
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.923.987.753,67	7.520.524.710,10	11.674.895.911,44	10.314.517.461,15	15.602.103.335,97
	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	49.513.732.093,28	73.147.365.143,20	45.171.168.592,41	65.115.401.934,76	74.968.422.059,01
5.1.1.2	Pendapatan Transfer	691.910.393.097,00	759.681.960.014,00	949.859.329.012,00	983.549.492.817,00	1.079.314.119.760,00
	Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan)	691.910.393.097,00	759.681.960.014,00	829.408.504.458,00	826.798.441.545,00	975.291.580.718,00
	Dana Bagi Hasil Pajak	76.811.427.829,00	163.366.489.408,00	109.040.101.813,00	113.268.524.011,00	110.926.534.000,00
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	102.068.871.954,00	71.598.392.232,00	168.688.513.437,00	160.311.500.604,00	282.028.581.380,00
	Alokasi Umum (DAU)	425.960.694.000,00	422.740.624.000,00	420.765.642.777,00	438.566.142.648,00	475.029.013.000,00
	Dana Dana Alokasi Khusus (DAK)	87.069.399.413,00	101.976.454.374,00	130.914.246.431,00	114.652.274.282,00	107.307.452.338,00
	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	14.163.265.000,00	20.142.449.000,00	15.199.717.000,00	23.343.638.000,00	6.607.594.000,00
	Dana penyesuaian	14.163.265.000,00	20.142.449.000,00	15.199.717.000,00	23.343.638.000,00	6.607.594.000,00
	Transfer Pemerintah Provinsi	57.852.521.828,50	77.039.290.283,96	60.880.607.390,00	78.987.935.132,00	71.235.038.148,00

**Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Tarakan Tahun 2025-2029**



Kode Akun	Uraian	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	57.852.521.828,50	77.039.290.283,96	60.880.607.390,00	78.987.935.132,00	71.235.038.148,00
	Bantuan Keuangan	13.891.681.550,37	15.496.127.047,64	44.370.500.164,00	54.419.478.140,00	26.179.906.894,00
	Bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi lainnya	13.891.681.550,37	15.496.127.047,64	44.370.500.164,00	54.419.478.140,00	26.179.906.894,00
5.1.1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	124.687.900.437,98	42.110.952.220,00	3.709.970.180,00	3.412.403.462,00	0,00
	Pendapatan Lainnya	124.687.900.437,98	42.110.952.220,00	3.709.970.180,00	3.412.403.462,00	0,00

Sumber: LRA AUDITED 2020 s.d 2024 BPKPAD, diolah

Realisasi Pendapatan daerah Kota Tarakan tahun 2020-2024 sudah menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Jika dilihat dari komponen Pendapatan Daerah dalam kurun waktu 2020-2024 terlihat bahwa sumber pendapatan mengalami peningkatan.

Jika dibandingkan dengan komponen Pendapatan Daerah lainnya, PAD merupakan komponen yang mengalami peningkatan positif selama lima tahun terakhir, karena adanya peningkatan dari Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pemerintah Kota Tarakan sedang berupaya untuk terus meningkatkan kemandirian keuangan daerah dengan menggenjot dua sumber PAD yaitu pajak dan retribusi daerah.

b. Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu belanja daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pembangunan berdasarkan pembagian kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.



Tabel 2.36
Realisasi Belanja Daerah Kota Tarakan Tahun 2020-2024

No	URAIAN	REALISASI				
		2020	2021	2022	2023	2024
5.1.2	BELANJA DAERAH	990.158.020.064,64	971.765.198.844,15	1.098.635.335.157,23	1.265.517.497.630,33	1.271.345.838.376,68
5.1.2.1	BELANJA OPERASI	703.025.132.440,35	725.725.911.681,38	790.055.382.536,73	868.710.123.387,81	963.247.367.161,54
	Belanja Pegawai	399.245.759.007,69	394.790.833.930,00	393.493.532.742,00	398.818.594.574,00	440.355.806.870,00
	Belanja Barang dan Jasa	221.458.660.749,75	261.495.779.417,38	290.512.269.697,73	325.517.556.206,81	353.588.944.803,57
	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Hibah	80.465.785.421,91	67.796.873.759,00	103.350.896.815,00	141.649.793.597,00	164.745.043.401,97
	Belanja Bantuan Sosial	1.824.927.261,00	1.642.424.575,00	2.698.683.282,00	2.724.179.010,00	4.557.572.086,00
5.1.2.2	BELANJA MODAL	278.417.973.827,00	241.614.289.899,77	304.460.318.615,50	396.040.018.311,52	307.874.591.715,14
	Belanja Tanah	12.410.961.300,00	5.962.138.796,00	17.696.124.410,00	6.911.585.555,00	3.517.441.266,00
	Belanja Peralatan dan Mesian	40.208.061.560,00	40.304.763.046,00	21.710.281.361,00	17.801.793.264,00	53.762.258.658,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	110.503.135.843,00	78.055.124.951,77	130.819.677.660,94	226.664.480.433,52	54.193.152.010,71
	Belanja Jalan Jaringan. Irigasi dan jaringan	114.617.050.124,00	117.129.052.606,00	127.848.419.209,56	139.194.648.564,00	193.413.536.165,43
	Belanja Aset tetap lainnya	26.730.000,00	39.899.000,00	6.153.261.974,00	4.653.750.495,00	436.246.075,00
	Belanja aset lainnya	128.415.000,00	651.995.000,00	123.311.500,00	813.760.000,00	2.551.957.540,00



Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Tarakan Tahun 2025-2029

No	URAIAN	REALISASI				
		2020	2021	2022	2023	2024
5.1.2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	299.824.170	8.714.913.797	4.424.997.263,00	767.355.931,00	223.879.500,00
	Belanja Tidak Terduga	299.824.170,00	8.714.913.797	4.424.997.263,00	767.355.931,00	223.879.500,00
5.1.2.4	TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : LRA audited BPKPAD, 2025 diolah



Dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir mulai tahun 2020-2025 realisasi belanja daerah kota Tarakan mengalami peningkatan dari Rp. 990,158 milyar ditahun 2020 menjadi Rp. 1.271,345 milyar ditahun 2024.

c. Pembiayaan

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dengan kata lain pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Dalam lima tahun terakhir dari tahun 2019-2023 perkembangan pembiayaan daerah fluktuatif. Dengan kata lain penerimaan pembiayaan, nilainya lebih besar dibandingkan pengeluaran pembiayaan. Nilai pembiayaan (netto) daerah pada tahun 2020 sebesar Rp. 142,526 miliar dan menurun pada tahun 2021 sebesar Rp. 61,762 miliar, tahun 2022 meningkat menjadi Rp. 154,698 miliar dan tahun 2023 menurun kembali menjadi Rp. 146,487 miliar. Selanjutnya pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi Rp. 39,881 miliar

Seluruh penerimaan pembiayaan daerah di Kota Tarakan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sedangkan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.



Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Tarakan Tahun 2025-2029

Tabel 2.37
Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Tarakan Tahun 2020-2024

No	URAIAN	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
5.1.3	PEMBIAYAAN					
5.1.3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	160.831.703.932	76.817.140.923,45	154.698.876.041,34	146.487.097.097,94	39.881.536.635,24
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	160.831.703.932	76.817.140.923,45	154.698.876.041,34	146.487.097.097,94	39.881.536.635,24
	Koreksi SILPA	0,00	(15.000.000,00)		0,00	0,00
5.1.3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	18.305.100.000	15.039.569.000	5.999.744.000,00	3.000.000.000,00	1.999.256.800,00
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah kepada BUMD	18.305.100.000	15.039.569.000	5.999.744.000,00	3.000.000.000,00	1.999.256.800,00
5.1.4	PEMBIAYAAN NETTO	142.526.603.932	61.762.571.923,45	148.699.132.041,34	143.487.097.097,94	337.882.279.835,24

Sumber: LRA AUDITED BPKPAD, 2025 diolah



d. Neraca Daerah

Standar Akuntansi Pemerintahan Tahun 2020 mendefinisikan neraca sebagai laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu, yang terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024, total aset di Kota Tarakan menunjukkan kecenderungan meningkat, yang ditandai dengan pada tahun 2020, total aset di Kota Tarakan ini tercatat sebesar Rp. 6,060 triliun dan dalam perkembangannya hingga tahun 2024 bertumbuh menjadi Rp. 6,191 triliun. Hal ini mencerminkan kemampuan daerah dalam menjaga dan meningkatkan kapasitas keuangan untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah.



Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Tarakan Tahun 2025-2029

Tabel 2.38
Neraca Daerah Kota Tarakan Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Neraca Daerah (Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	ASET					
1.1	Aset Lancar	294.959.790.160,26	263.514.207.881,08	285.379.819.608,69	168.828.025.038,35	254.897.308.378,78
1.2	Investasi Jangka Panjang	391.930.739.543,38	2.887.099.803,03	2.945.890.303,03	373.569.250.060,31	405.122.612.125,70
1.3	Aset Tetap	5.024.657.289.819,41	5.086.684.092.571,90	5.008.410.791.889,86	5.100.238.936.700,73	5.040.091.445.742,71
1.4	Properti Investasi	0,00	0,00	137.034.260.551,42	215.463.314.770,25	274.837.136.970,09
1.5	Aset Lainnya	349.435.113.811,75	238.636.263.657,83	193.724.114.284,63	410.161.126.484,23	216.491.491.663,56
TOTAL ASET		6.060.982.933.334,80	5.981.306.692.270,88	6.015.368.817.124,80	6.266.260.653.053,87	6.191.439.994.880,84
2	KEWAJIBAN					
2.1	Kewajiban Jangka Pendek	323.712.516.162,03	382.415.319.536,83	135.455.149.637,75	78.299.978.064,07	51.235.972.922,58
2.2	Kewajiban Jangka Panjang	175.535.000,00	175.535.000,00	193.288.924.655,28	139.161.519.561,00	109.976.573.943,00
TOTAL KEWAJIBAN		323.888.051.162,03	382.590.854.536,83	328.744.074.293,03	217.461.497.625,07	161.212.546.865,58
3	TOTAL EKUITAS	5.737.094.882.172,77	5.598.715.837.734,05	5.686.624.742.831,77	6.048.799.155.428,80	6.030.227.448.015,26
3.1	Ekuitas	5.737.094.882.172,77	5.598.715.837.734,05	5.686.624.742.831,77	6.048.799.155.428,80	6.030.227.448.015,26
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS		6.060.982.933.334,80	5.981.306.692.270,88	6.015.368.817.124,80	6.266.260.653.053,86	6.191.439.994.880,84

Sumber: LRA AUDITED BPKPAD, 2025 diolah



Aset diklasifikasikan dalam aset lancar dan non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Sementara itu, aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintahan atau yang digunakan masyarakat umum. Selanjutnya, kewajiban menurut Standar Akuntansi Pemerintahan Tahun 2020 adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Berdasarkan laporan neraca daerah, secara umum terjadi fluktuasi yang cukup signifikan. Terakhir, ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan dalam ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan. Dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024, besaran ekuitas dana Kota Tarakan pada tahun 2020 ekuitas dana di Kota Tarakan tercatat sebesar Rp. 5,737 triliun, yang kemudian berfluktuasi sampai dengan tahun 2024 hingga besarnya menjadi Rp. 6,030 triliun.

Secara keseluruhan, neraca keuangan Pemerintah Kota Tarakan dalam periode 2020–2024 menunjukkan kinerja keuangan yang cukup positif. Pertumbuhan aset yang sejalan dengan peningkatan ekuitas dan penurunan kewajiban menandakan adanya tata kelola keuangan yang cermat dan berorientasi pada keberlanjutan fiskal.

2.5.2. Proyeksi Keuangan Daerah 2026-2030

Kemandirian pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan yang bersifat Desentralisasi Fiskal secara bertanggungjawab merupakan salah satu bentuk terjemahan dari pelaksanaan otonomi daerah. Dalam penjabaran yang lain dapat dijelaskan bahwa pajak dan retribusi yang telah diserahkan menjadi urusan pemerintah daerah sebagai bagian dari kebijakan desentralisasi fiskal baik provinsi maupun kabupaten/kota

harus dikelola dan ditingkatkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Kemudian lebih lanjut dijelaskan bahwa Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah.

Sumber-sumber pendapatan daerah dimaksud terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain sumber pendapatan yang sah. Pendapatan asli daerah diperoleh dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah diharapkan memberikan penguatan *local taxing power* dengan tetap menjaga perekonomian dan kemudahan berusaha di daerah. Kemandirian daerah dicerminkan oleh besarnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, penyederhanaan jenis retribusi dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Pendapatan Daerah yang diproyeksikan pada tahun anggaran 2024, Pemerintah Kota Tarakan melakukan berbagai upaya reformasi perpajakan yang terus dilakukan untuk meningkatkan kemandirian dalam pembangunan daerah. Strategi untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan antara lain melalui kerjasama dengan berbagai pihak antara



lain BPD Kaltimara, BRI, BPN, KPP Pratama maupun pihak lain seperti market place dan e-commerce dalam hal pemungutan dan pembayaran pajak/retribusi daerah, perluasan basis pajak baru, melakukan pengawasan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pemasangan alat perekam transaksi elektronik/tapping box, memperbarui Zona Nilai Tanah (ZNT) dan melakukan kegiatan cleansing data dan pemuktahiran PBB. Langkah tersebut akan dilakukan dalam rangka untuk memperbaiki administrasi dan pelayanan kepada masyarakat serta membantu meringankan beban masyarakat ditengah kondisi perekonomian yang sangat fluktuatif. Disisi lain, Pemerintah Kota Tarakan juga mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti keberlangsungan dunia usaha terutama UMKM yang banyak berkembang, daya beli masyarakat, dan peningkatan kualitas pelayanan perpajakan. Faktor eksternal lainnya seperti pendapatan transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi yang juga berpotensi memengaruhi dinamika perekonomian Kota Tarakan ke depan.

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan daerah dan menjamin seluruh penerimaan daerah dapat diterima di kas daerah dan dicatat sesuai dengan sistem akuntansi Pemerintah Daerah, maka dalam melaksanakan fungsi pengelolaan penerimaan daerah harus mengedepankan prinsip kehati-hatian, kecermatan dan ketepatan.

Prinsip penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD), dilakukan secara terukur dengan memperhitungkan potensi maupun trend realisasi PAD pada tahun-tahun sebelumnya dan tahun berjalan. Pemungutan dan penyetoran pendapatan asli daerah diupayakan tidak memberatkan para wajib pajak, baik masyarakat maupun dunia usaha serta tetap berada pada koridor peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Upaya-upaya dimaksud ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan serta penyetoran pajak dan retribusi daerah baik secara aplikasi e-mobile perbankan maupun lewat e-commerce, melakukan penyuluhan yang humanis dan berkelanjutan, pemuktahiran data wajib pajak yang aktif dan tidak aktif, pengendalian dan pengawasan



yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.

Penyusunan proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2030 dilakukan dengan memerhatikan asumsi dasar ekonomi makro yang diselaraskan dengan asumsi dasar pada APBN dan APBD Provinsi Kalimantan Utara. Kondisi perekonomian Kota Tarakan di tahun 2025-2030 diasumsikan akan tetap searah dengan kondisi di tingkat Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional.

Proyeksi pendapatan daerah dilakukan dengan menggunakan data historis lima tahun terakhir. Adapun perhitungan proyeksi dilakukan pada masing-masing komponen pada Pendapatan Asli Daerah maupun Pendapatan Transfer. Dengan memperhatikan asumsi tersebut maka pendapatan daerah Kota Tarakan tahun 2025-2030 diproyeksikan sebagai berikut :



Tabel 2.39
Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan Tahun 2025–2030

NO	JENIS PENDAPATAN DAERAH	Perda 2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	PENDAPATAN DAERAH	1.152.995.228.204,00	1.358.710.790.934,43	1.430.091.384.971,43	1.367.689.844.045,43	1.145.624.263.032,43	1.158.437.444.588,43
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	257.819.877.204,00	246.507.509.004,00	247.910.009.004,00	249.382.634.004,00	250.928.890.254,00	252.552.459.316,00
4.1.1	Pajak Daerah	144.635.000.000,00	144.635.000.000,00	146.037.500.000,00	147.510.125.000,00	149.056.381.250,00	150.679.950.312,00
4.1.2	Retribusi Daerah	18.833.928.526,00	16.360.300.326,00	16.360.300.326,00	16.360.300.326,00	16.360.300.326,00	16.360.300.326,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	16.203.957.872,00	16.203.957.872,00	16.203.957.872,00	16.203.957.872,00	16.203.957.872,00	16.203.957.872,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	78.146.990.806,00	69.308.250.806,00	69.308.250.806,00	69.308.250.806,00	69.308.250.806,00	69.308.250.806,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	895.175.351.000,00	1.112.203.281.930,43	1.182.181.375.967,43	1.118.307.210.041,43	894.695.372.778,43	905.884.985.272,43
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	806.102.351.000,00	1.021.130.281.930,43	1.091.108.375.967,43	1.027.234.210.041,43	803.622.372.778,43	814.811.985.272,43
4.2.1.1	Dana Perimbangan	806.102.351.000,00	1.021.130.281.930,43	1.091.108.375.967,43	1.027.234.210.041,43	803.622.372.778,43	814.811.985.272,43
4.2.1.1.1	Dana Transfer Umum	697.589.320.000,00	697.589.320.000,00	697.589.320.000,00	697.589.320.000,00	697.589.320.000,00	668.352.008.000,00
4.2.1.1.1.1	Dana Bagi Hasil	209.124.245.000,00	209.124.245.000,00	209.124.245.000,00	209.124.245.000,00	209.124.245.000,00	200.124.245.000,00
4.2.1.1.1.2	Dana Alokasi Umum	488.465.075.000,00	488.465.075.000,00	488.465.075.000,00	488.465.075.000,00	488.465.075.000,00	468.227.763.000,00
4.2.1.1.2	Dana Transfer Khusus	108.513.031.000,00	323.540.961.930,43	393.519.055.967,43	329.644.890.041,43	106.033.052.778,43	146.459.977.272,43
4.2.1.1.2.1	Dana Alokasi Khusus Fisik	599.948.000,00	165.627.878.930,43	235.605.972.967,43	171.731.807.041,43	9.017.477.347,43	2.267.089.841,43
4.2.1.1.2.2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	107.913.083.000,00	157.913.083.000,00	157.913.083.000,00	157.913.083.000,00	97.015.575.431,00	144.192.887.431,00
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah	-	-	-	-	-	-
4.2.2	Transfer Antar-Daerah	89.073.000.000,00	91.073.000.000,00	91.073.000.000,00	91.073.000.000,00	91.073.000.000,00	91.073.000.000,00
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	65.820.000.000,00	67.820.000.000,00	67.820.000.000,00	67.820.000.000,00	67.820.000.000,00	67.820.000.000,00
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	23.253.000.000,00	23.253.000.000,00	23.253.000.000,00	23.253.000.000,00	23.253.000.000,00	23.253.000.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-	-	-	-
4.3.1	Hibah	-	-	-	-	-	-
4.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-



Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029

NO	JENIS PENDAPATAN DAERAH	Perda 2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.3.3	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	-	-	-	-	-	-
5	BELANJA DAERAH	1.176.463.228.204,00	1.382.178.790.934,43	1.453.559.384.971,43	1.391.157.844.045,43	1.169.092.263.032,43	1.181.905.444.588,43
5.1	BELANJA OPERASI	1.026.891.989.074,11	1.038.107.249.074,11	1.038.107.249.074,11	1.038.107.249.074,11	1.038.107.249.074,11	1.038.107.249.074,11
5.1.1	Belanja Pegawai	548.033.675.989,66	548.033.675.989,66	548.033.675.989,66	548.033.675.989,66	548.033.675.989,66	548.033.675.989,66
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	371.873.175.263,60	383.088.435.263,60	383.088.435.263,60	383.088.435.263,60	383.088.435.263,60	383.088.435.263,60
5.1.3	Belanja Bunga						
5.1.4	Belanja Subsidi			-	-	-	-
5.1.5	Belanja Hibah	102.597.234.320,85	102.597.234.320,85	102.597.234.320,85	102.597.234.320,85	102.597.234.320,85	102.597.234.320,85
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	4.387.903.500,00	4.387.903.500,00	4.387.903.500,00	4.387.903.500,00	4.387.903.500,00	4.387.903.500,00
5.2	BELANJA MODAL	144.571.239.129,89	339.071.541.860,32	410.452.135.897,32	348.050.594.971,32	125.985.013.958,32	138.798.195.514,32
5.2.1	Belanja Tanah	3.665.000.000,00	-	-	-	-	-
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	33.843.370.324,00	33.843.370.324,00	33.843.370.324,00	33.843.370.324,00	33.843.370.324,00	33.843.370.324,00
5.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	18.451.104.935,26	174.685.633.879,69	246.066.227.916,69	183.664.686.990,69	12.496.613.546,69	17.369.795.102,69
5.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	80.542.537.656,63	130.542.537.656,63	130.542.537.656,63	130.542.537.656,63	79.645.030.087,63	87.585.030.087,63
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	3.603.493.800,00	-	-	-	-	-
5.2.6	Belanja Aset Lainnya	4.465.732.414,00	-	-	-	-	-
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-	-	-
5.4.1	Belanja Bagi Hasil						
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan						
	SURPLUS/(DEFISIT)	(23.468.000.000,00)	(23.468.000.000,00)	(23.468.000.000,00)	(23.468.000.000,00)	(23.468.000.000,00)	(23.468.000.000,00)
6	PEMBIAYAAN DAERAH						
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	25.468.000.000,00	25.468.000.000,00	25.468.000.000,00	25.468.000.000,00	25.468.000.000,00	25.468.000.000,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	25.468.000.000,00	25.468.000.000,00	25.468.000.000,00	25.468.000.000,00	25.468.000.000,00	25.468.000.000,00

**Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Tarakan Tahun 2025-2029**



NO	JENIS PENDAPATAN DAERAH	Perda 2025	2026	2027	2028	2029	2030
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
6.1.5	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang / Bunga	-	-	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	23.468.000.000,00	23.468.000.000,00	23.468.000.000,00	23.468.000.000,00	23.468.000.000,00	23.468.000.000,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	-	-	-	-	-	-

Sumber : BPKPAD 2025, data diolah

Berbagai upaya peningkatan kinerja akan terus ditempuh untuk mencapai target pendapatan di tahun 2025-2030, yaitu melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pada semua sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat, serta memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Pendapatan Daerah diharapkan dapat lebih meningkat, dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya. Untuk tahun 2025 sampai dengan tahun 2030, dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah yaitu sebagai berikut:

1. Komponen Pendapatan Asli Daerah selaku representasi kinerja riil pemerintah daerah dalam menggali pendapatan daerah secara mandiri. Strategi peningkatan pendapatan yang dijalankan adalah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi meliputi:
 - a. Menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;
 - b. Melakukan penyesuaian terhadap potensi Retribusi Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
 - c. Optimalisasi Retribusi Daerah : Melakukan penyesuaian tarif Pajak Daerah dengan berlakunya Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Perhitungan ulang struktur dan besaran tarif retribusi);
 - d. Peningkatan Pelayanan : Sarana dan Prasarana pelayanan pembayaran Pemberian Reward dan Punishment, Kemudahan Pembayaran melalui kerjasama dengan penyedia aplikasi digital (Gopay, OVO, dan lainnya), Meningkatkan pelayanan dalam upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi melalui Sosialisasi pajak daerah kepada WP dengan memanfaatkan Media Massa, media cetak, dan tatap muka, Selanjutnya Melakukan Pendekatan pelayanan kepada masyarakat serta perluasan dan pengembangan layanan untuk



- mempermudah pembayaran pajak oleh masyarakat/Wajib Pajak;
- e. Melakukan peningkatan kompetensi pegawai di bidang Pajak Daerah melalui pengiriman Bimtek Pajak Daerah, Penguatan kelembagaan BUMD dalam mengembangkan potensi usaha;
 - f. Melaksanakan evaluasi kinerja BUMD sehingga imbal balik keuntungan deviden sebanding dengan besarnya penyertaan modal;
 - g. Peningkatan koordinasi sinergis dan kerjasama antar Perangkat Daerah pengelola pendapatan di lingkungan Pemerintah serta Meningkatkan peran dan fungsi UPTD penghasil PAD di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan;
 - h. Menggali sumber-sumber pendapatan alternatif lainnya;
 - i. Melakukan kajian secara holistic untuk seluruh potensi pendapatan daerah di seluruh lingkup perangkat daerah;
 - j. Pendekatan pelayanan kepada masyarakat serta perluasan dan pengembangan layanan untuk mempermudah pembayaran pajak oleh masyarakat/Wajib Pajak;
 - k. Optimalisasi penanganan pemungutan piutang pajak dan retribusi melalui inventarisasi dan penagihan piutang pajak dan retribusi daerah dengan melibatkan Instansi Vertikal, SKPD dan bekoordinasi dengan pemerintah Provins Kalimantan Utara;
 - l. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai langkah Pengendalian dan Pengawasan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - m. Upaya penyesuaian dividen dari Perusda/BUMD melalui hasil evaluasi dan monitoring terhadap kinerja BUMD.
2. Komponen Pendapatan Transfer memiliki peran strategis dalam menyusun pendapatan daerah terkait Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, dana Alokasi Umum (DAU), dana Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID). Oleh karena itu strategi yang dijalankan terutama melalui peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam pengelolaan pendapatan transfer.
- b. Peningkatan jumlah Dana Bagi Hasil Bukan Pajak ketika terjadi penurunan melalui koordinasi dengan Kemendagri dan Kemenkeu.
- c. Peningkatan dana insentif fiskal melalui Peningkatan prestasi dan kinerja perangkat daerah serta inovasi daerah.
- d. Optimalisasi Pemanfaatan Aset melalui :
 - 1) Perbaikan tata kelola (penatausahaan, pengamanan, sertifikasi) asset daerah.
 - 2) Identifikasi dan inventarisasi asset berdasarkan penggunaannya.
 - 3) Revitalisasi asset daerah dan Meningkatkan promosi asset daerah

Kebijakan pengalokasian belanja daerah memprioritaskan pada belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai (gaji dan tunjangan), belanja transfer, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pada periode ini Pemerintah Kota Tarakan akan menggunakan prinsip *money follow program* dalam mengalokasikan pagu indikatif belanja langsung OPD yang artinya program dan kegiatan strategis menjadi prioritas yang mendapatkan anggaran terlebih dahulu.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, maka pagu indikatif bagi belanja langsung setiap OPD, disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap OPD, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Perencanaan pagu indikatif belanja langsung OPD diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efektif dan efisien.



Rencana penggunaan kapasitas keuangan daerah Tahun 2025 sampai dengan 2030 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Rencana penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tarakan selama 5 tahun yang akan datang, dipergunakan untuk membiayai 3 kelompok prioritas sebagai berikut :

1. Prioritas Pertama : Untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar; untuk membiayai belanja wajib yang ketentuannya diatur didalam peraturan perundang-undangan, antara lain :
 - a) Belanja Fungsi Pendidikan, bahwa anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBD berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b) Belanja Fungsi Kesehatan, bahwa anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10 persen dari APBD sesuai Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - c) Belanja Infrastruktur, penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, diarahkan penggunaannya untuk mencapai target belanja infrastruktur daerah minimal 25 persen, sesuai Peraturan MenKeu RI;
 - d) Belanja Moda Transportasi, besarnya 10 persen dari Pajak Kendaraan Bermotor sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - e) Belanja Yang Bersumber Dari Pajak Rokok, 70 persen untuk BBH Kab/Kota, 30 persen hak Provinsi dengan komposisi : 50 persen specific grant dan 50 persen block grant, dari yang 50 persen specific grant, 75 persen untuk iuran JKN. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat;

Sedangkan Belanja Mengikat (*Mandatory Expenditure*), digunakan untuk sebagai berikut : Belanja Pegawai; Belanja JKN, yang bersumber dari Pajak Rokok; Belanja DAK BOS; Belanja Operasional Kantor; dan Belanja Fungsional (RS dan UPT OPD yang melaksanakan PPK BLUD), juga untuk memenuhi belanja yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan lainnya seperti Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Belanja Tidak Terduga

2. Prioritas Kedua untuk memenuhi belanja dalam rangka menjalankan Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah Kota Tarakan.
3. Prioritas Ketiga untuk membiayai prioritas penyelenggaraan Pemerintah Daerah lainnya.

2.6. Permasalahan dan Isu Strategis

2.6.1. Permasalahan

Permasalahan merupakan kesenjangan atau gap yang terjadi antara kinerja yang dicapai saat ini dengan rencana atau standar yang ada, serta apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang dengan kondisi riil yang terjadi saat ini. Gap yang terjadi dipengaruhi oleh faktor penyebab baik faktor yang mendorong keberhasilan maupun kegagalan yang harus dilakukan analisis dalam rangka menyusun perencanaan selanjutnya. Permasalahan pembangunan di Kota Tarakan ditunjukkan dengan kondisi permasalahan pada masing-masing urusan pembangunan.

Permasalahan pembangunan merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan target kinerja yang direncanakan dan/atau kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan disusun. Permasalahan pembangunan pada umumnya timbul dari kekuatan daerah yang dimiliki belum didayagunakan secara optimal, kelemahan daerah yang ada belum diatasi, peluang yang terbuka belum dimanfaatkan, dan ancaman yang ada belum disiapkan antisipasinya.



Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja pembangunan daerah.

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan hasil analisis gambaran umum daerah.

a. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

- Pertumbuhan ekonomi yang walaupun tumbuh 5,71% ditahun 2024; lebih baik dari pertumbuhan ekonomi nasional dan kaltara, namun belum mampu mengembalikan Tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi di tahun 2018 yang tumbuh 7,50% dan 2019 yang tumbuh 7,68%.
- PDRB perkapita Kota Tarakan masih perlu untuk ditingkatkan.
- Indeks gini Kota Tarakan walaupun dalam kategori rendah, namun masih terus harus diturunkan agar kesenjangan pendapatan penduduk dapat diperkecil.
- Penduduk miskin dan penduduk miskin ekstrem kota Tarakan belum memenuhi target capaian persentase kemiskinan yang diinginkan yaitu 5% dan 0% ditahun 2024.
- Indeks Pembangunan Manusia termasuk kategori tinggi (78,03 di tahun 2024), namun indeks Pendidikan dan indeks pengeluaran perkapita belum memberikan daya ungkit yang besar pada peningkatan IPM yang di targetkan.
- Laju inflasi Kota Tarakan telah dapat dikendalikan rendah dan stabil di angka $2,5 \pm 1$ di tahun 2024, namun sebagai kota yang bukan penghasil, Kota Tarakan rentan akan kelancaran distribusi pasokan bahan pangan.
- Rata-rata lama sekolah di Kota Tarakan masih sebesar 10,37 Tahun pada tahun 2024, yang artinya bahwa penduduk Kota Tarakan yang berusia 25 Tahun ke atas dalam menjalani Pendidikan formal pada tahun 2023 setara dengan kelas 1 SMA.
- Prevelensi stunting Kota Tarakan, walaupun sudah mampu menurunkan Tingkat prevelensi stunting sebesar 14,8 namun

dirasakan sinergitas dan kolaborasi antar stakeholder belum optimal.

- Angka pengangguran Kota Tarakan masih di atas provinsi Kaltara yaitu 5,11persen ditahun 2024.
- Gedung kesenian yang khusus untuk pegelaran seni belum ada.
- Rendahnya persentase kelompok kesenian yang aktif.
- Gedung olahraga sudah memadai, namun lapangan olahraga masyarakat masih sangat minim, seperti lapangan sepak bola.

b. Aspek Pelayanan Umum

1) Urusan Pendidikan

- Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dalam 5 tahun terakhir cakupannya dibawah 30%.
- Rendahnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) bagi penduduk usia 13-15 tahun.

2) Urusan Kesehatan

- Belum optimalnya penanganan dan pelayanan kesehatan terhadap kematian bayi, balita, dan ibu melahirkan di Kota Tarakan. Hal ini ditandai dengan peningkatan kasus kematian bayi di tahun 2022-2024.
- Kinerja pelayanan penderita hipertensi masih rendah.
- Belum optimalnya pelayanan Kesehatan pada penderita Diabetes Militus, Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ).

3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Belum optimalnya proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap.
- Belum optimalnya kapasitas drainase dalam menghadapi hujan dengan kapasitas deras.
- Overloaded TPA Aki Balak dalam menampung kapasitas sampah Kota Tarakan.
- Masih ada masyarakat yang kesulitan akses sanitasi layak dan Kota Tarakan yang didominasi wilayah pesisir Pantai masih sulit



menaikkan capaian akses sanitasi aman.

- 4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - Kawasan kumuh di Kota Tarakan masih relatif luas yang didominasi oleh infrastruktur wilayah yang tidak memadai. Untuk itu pengurangan Kawasan kumuh masih perlu intervensi kebijakan secara bertahap dan berkelanjutan.
 - Jumlah rumah tidak layak huni masih relatif banyak.
- 5) Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
 - Pelanggaran K3 dan Pelanggaran Perda masih terjadi.
 - Potensi tidak terpenuhinya tingkat waktu tanggap daerah layanan manajemen kebakaran karena Lokasi PMK yang belum mewakili disemua wilayah kecamatan.
- 6) Urusan Sosial
 - Belum optimalnya layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditandai dengan belum optimalnya operator data DTKS di tingkat kelurahan setiap triwulan.
- 7) Urusan Tenaga Kerja
 - Rasio pencari kerja yang ditempatkan (atau serapan tenaga kerja) tahun 2019-2024 cenderung rendah.
- 8) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - Proporsi kursi yang diduduki Perempuan di DPRD belum 20%.
 - Jumlah kejadian KDRT selama 5 tahun terakhir cenderung tinggi.
 - Masih adanya kasus kekerasan pada perempuan dan anak.
- 9) Urusan Pangan
 - Kebutuhan pokok pangan masih tergantung pada daerah luar pulau Tarakan.
- 10) Urusan Lingkungan Hidup
 - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Tarakan pada tahun 2024 masih dalam kategori sedang, sedangkan tahun 2021 IKLH Tarakan sudah masuk kategori baik.
 - Persentase timbulan sampah cenderung meningkat, Hal ini

menunjukkan belum optimalnya pengelolaan sampah di tingkat tingkat kelurahan. Armada pengangkut sampah yang tidak dapat mengangkut seluruh sampah dan total timbulan sampah melebihi kapasitas TPS dan TPA. TPA Aki Balak over kapasitas, selain itu belum dilakukan pemrosesan akhir sampah di TPA.

11) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Angka kepemilikan dokumen kependudukan setiap tahunnya meningkat baik KK, KTPel maupun KIA. Namun pada tahun 2024 untuk penduduk yang berKTP Kota Tarakan belum mencapai 100%.
- Meskipun jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran terus meningkat dalam 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024) namun capaian masih banyak penduduk yang belum memiliki akta kelahiran yang perlu segera untuk dilayani.

12) Urusan Pertanahan

- Belum optimalnya pengelolaan asset tanah di Kota Tarakan yang ditandai dengan pensertifikatan lahan yang dimiliki oleh pemerintah Kota Tarakan.

13) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Masih belum optimalnya posyandu dalam meningkatkan jumlah sasaran pelayanan pada balita.
- Pendampingan keluarga stunting yang belum optimal.

14) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- Persentase pemakaian alat kontrasepsi pada tahun 2024 masih rendah, hal ini menunjukkan bahwa pengendalian kelahiran penduduk belum optimal, sehingga perlu dilakukan peningkatan pemberdayaan dan ketahanan keluarga.

15) Urusan Perhubungan

- Belum optimalnya pelayanan transportasi yang terintegrasi, kinerja pelayanan angkutan umum, pengawasan dan pengendalian lalu lintas jalan, dan pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi. Tingginya kebutuhan



transportasi moda darat dan tingkat kesadaran dari masyarakat dalam berlalu lintas masih rendah.

16) Urusan Komunikasi dan Informatika

- Belum maksimalnya penyelenggaraan informasi publik yang ditandai dengan pengumpulan data dari produsen data yang terlambat dari batas waktu, kurangnya kemitraan antara masyarakat dan pemerintah dalam mendiseminisasikan, serta data sektoral belum dimanfaatkan sebagai evaluasi Pembangunan.
- Belum tersedianya persandian antar perangkat daerah dan tingkat keamanan persandian belum kuat.
- Penyebarluasan informasi publik untuk mengakses informasi kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

17) Urusan Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah

- Pemberdayaan koperasi dan UMKM masih belum optimal, hal ini ditandai dengan rasio koperasi aktif yang masih rendah ditahun 2024.

18) Urusan Penanaman Modal

- Belum optimalnya realisasi investasi yang dimana realisasi PMA dan PMDN walaupun cenderung meningkat namun persentase kenaikan investasinya dibanding tahun sebelumnya cenderung menurun.
- Rasio ketepatan waktu perizinan masih sering terlambat dari target yang diakibatkan ketidaklengkapan syarat adminsitratif dan gangguan system informasi (OSS dan Si Cantik). Untuk itu sosialisasi, diseminasi kemudahan syarat administrasi dan skema pelayanan manual dirasa perlu untuk disiapkan.

19) Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

- Masih minimnya prestasi olahraga tingkat nasional dan internasional yang disebabkan oleh iklim pelatihan atlet belum terstruktur

- Daya saing pemuda belum optimal yang ditunjukkan oleh hanya 1 persen pemuda di Kota Tarakan yang merupakan wirausahawan.

20) Urusan Statistik

- Data yang ditampilkan di laman satu data tidak sepenuhnya ditemukan, banyak data yang kosong. Beberapa konfirmasi hasil analisis data sektoral yang tidak ditanggapi. Data sektoral dan publikasi statistik yang dihasilkan oleh produsen data belum seluruhnya terinput dalam portal data.

21) Urusan Kebudayaan

- Pengembangan potensi kebudayaan belum optimal. Belum memiliki gedung kesenian Proyek pembangunan pariwisata masih terus dilaksanakan pada tahap III.
- Belum semua kekayaan budaya Kota Tarakan dilestarikan.

22) Urusan Perpustakaan dan Kearsipan

- Belum optimalnya pembangunan literasi Masyarakat, sarana dan prasarana belum optimal sesuai standar ditandai dengan kompetensi SDM perpustakaan masih terbatas serta promosi layanan perpustakaan masih belum massif serta meningkatnya tren literasi secara daring dan sebaran perpustakaan masih kurang merata
- Jumlah pengunjung mulai membaik pasca pandemi covid-19, namun belum menyamai Tingkat kunjungan ke perpustakaan sebelum pandemi covid-19.
- Belum optimalnya pengelolaan arsip secara baku.

23) Urusan Pariwisata

- Jumlah kunjungan wisatawan cenderung meningkat dalam tiga tahun terakhir, namun lama kunjungan wisata masih dibawah 2 hari.
- Pengembangan sektor pariwisata yang belum optimal, area dengan fokus wisata yaitu Pantai Ratu Intan Amal yang juga banyak mengalami kendala sosial.
- Kondisi fasilitas Sarana dan Prasarana Pariwisata yang



berkualitas pada tahun 2024 belum terpenuhi semua. Untuk menarik minat wisatawan ke depan kondisi saran dan prasarana masih perlu ditingkatkan;

24) Urusan Pertanian

- Rendahnya kapasitas pelaku usaha sektor pertanian yang ditandai dengan kurangnya sarana dan teknologi yang mendukung pertanian.
- Penurunan angka hasil komoditas sektor pertanian menjadikan problematika krusial dan faktor penyumbang inflasi beberapa tahun belakang ini pada tanaman (Pangan, Hortikultur, Perkebunan).
- Perkiraan akan terjadinya perang global, kekacauan cuaca dan iklim yang ekstrim, transformasi lahan tanam ke pemukiman, harus dimitigasi dalam rangka mengambil langkah untuk mengantisipasi kelangkaan bahan pangan.

25) Urusan Perdagangan

- Sektor perdagangan berkontribusi 5 terbesar dalam PDRB, tetapi laju pertumbuhan fluktuatif cenderung melambat.
- Masih rendahnya peminatan para pelaku usaha yang menginvasi pasar global (*export lokal end of produk*).

26) Urusan Perindustrian

- Masih rendahnya industri yang mengajukan ijin usaha industri dikarenakan kesadaran pelaku usaha untuk mengajukan permohonan;
- Masih banyaknya IKM dan produk IKM yang belum bersertifikasi.

27) Urusan Kelautan dan Perikanan

- Pendapatan pelaku usaha perikanan masih rendah. Belum terintegrasinya rantai pemasaran produk perikanan dan kurangnya pengetahuan pembudidaya ikan dan pola pembinaan untuk meningkatkan nilai tambah produk perikanan bagi nelayan kurang sehingga produktivitas kurang belum optimalnya pemasaran produk

- Besarnya porsi biaya dan tingginya harga pakan, karena sebagian besar bahan baku pakan masih impor dan kenaikan harga ikan tidak seimbang dengan kenaikan harga pakan.
- Skala usaha pembudidaya ikan didominasi oleh pembudidaya skala kecil sehingga porsi biaya tetap yang dikeluarkan menjadi besar sehingga biaya produksi menjadi tidak efisien sedangkan akses untuk permodalan bagi pengembangan usaha perikanan budidaya terbatas berdampak pada daya saing produk rendah.

28) Urusan Perencanaan

- Belum optimalnya konsistensi penjabaran dokumen perencanaan yang ditandai dengan koordinasi antar instansi masih kurang maksimal.
- Belum maksimalnya kualitas proses penyusunan dokumen perencanaan dan sinkronisasi penganggaran. Meskipun seluruh dokumen perencanaan telah disusun sesuai tahapan namun masih terdapat hasil rekomendasi pengendalian yang ditindaklanjuti.

29) Urusan Penelitian dan Pengembangan

- Skor inovasi daerah Kota Tarakan masih dalam kategori cukup.

30) Urusan Keuangan

- Pengelolaan pendapatan daerah belum optimal di mana kontribusi PAD terhadap pendapatan baru mencapai 15%.

31) Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

- Rendahnya Indeks Profesionalitas ASN yang ditandai dengan penurunan persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan dalam 5 tahun terakhir.

32) Urusan Pengawasan

- Belum optimalnya tindak lanjut temuan BPK yang ditandai dengan belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK.



33) Urusan Sekretariat Dewan

- Belum optimalnya penyelenggaraan kinerja, tugas, dan fungsi DPRD yang ditandai dengan belum maksimalnya penyusunan dan pembahasan raperda.

34) Urusan Sekretariat Daerah

- Maturitas UKPBJ belum optimal dan Standarisasi LPSE belum merata.

35) Urusan Pemerintahan Umum (Kesbangpol)

- Pembinaan masyarakat terhadap ideologi pancasila dan wasbang masih kurang.
- Presentase ormas yang terbina belum optimal.

2.6.2. Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan atau menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan di daerah. Hal ini dikarenakan isu strategis memiliki dampak yang signifikan bagi daerah. Sebuah isu strategis memiliki karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah atau panjang, dan memiliki peranan dalam menentukan pencapaian tujuan pembangunan pemerintah daerah di masa mendatang.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan melalui identifikasi berbagai isu internasional, nasional, dan regional. Isu strategis yang diambil oleh Pemerintah Kota Tarakan berasal dari permasalahan pembangunan yang diprioritaskan untuk diselesaikan maupun dari dunia internasional, nasional maupun regional. Berikut ini disajikan isu strategis daerah yang memiliki pengaruh pada 5 (lima) tahun mendatang.

Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber antara lain: (1) isu strategis dinamika internasional, nasional dan regional yang berpengaruh terhadap Kota Tarakan, (2) Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah jangka panjang Kota Tarakan, serta (3) Isu strategis yang bersumber dari analisis situasi dan kondisi pemerintahan umum saat ini serta kemungkinan di masa mendatang.

a. Isu Global

Terdapat 10 Megatrend global yang akan dihadapi menuju 2045. Megatrend global memiliki dua sisi yaitu memberikan potensi kemajuan bagi kondisi sosial ekonomi global, tetapi di sisi lain juga memberikan disrupsi. Perubahan-perubahan tersebut meliputi:

1. Perkembangan demografi global;
2. Geopolitik dan geoekonomi;
3. Perkembangan teknologi;
4. Peningkatan urbanisasi dunia;
5. Konstelasi perdagangan global;
6. Tata kelola keuangan global;
7. Pertumbuhan kelas menengah atau middle class;
8. Peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam;
9. Perubahan iklim;
10. Pemanfaatan luar angkasa atau spesies ekonomi.

b. Isu Strategis RPJP Nasional Tahun 2025-2045

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 sebagai arahan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Selama dua dekade terakhir, Indonesia telah mencapai kemajuan pembangunan yang signifikan dalam dinamika global sebagai negara berkembang dan tantangan kedepannya adalah menjadi negara maju. Isu dan tantangan pembangunan ke depan, yaitu:

1. Rendahnya tingkat produktivitas di tengah peningkatan persaingan global;
2. Kualitas dan kuantitas SDM dalam penelitian belum memadai;
3. Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah;
4. Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata;
5. Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut;
6. Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi;
7. Produktivitas tenaga kerja Indonesia relatif tertinggal;



8. Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip berkelanjutan;
9. Rendahnya penggunaan EBT dan efisiensi energi;
10. Kualitas pendidikan yang masih rendah;
11. Belum meratanya akses jaminan social;
12. Disharmoni regulasi dan kelembagaan instansi yang terfragmentasi;
13. Belum meratanya kualitas pelayanan publik;
14. Tingginya laju kehilangan dan rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati.

Dari isu strategis diatas, maka dalam RPJPN 2025-2045 dirumuskan visi “Indonesia Emas 2045: Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Lima sasaran utama Visi Indonesia 2045, yaitu: (1) pendapatan per kapita setara negara maju; (2) kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang; (3) kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional mengikat; (4) daya saing sumber daya manusia meningkat; serta (5) intensitas emisi GRK menuju net zero emission. Lima sasaran tersebut diwujudkan melalui 17 arah (tujuan), 8 misi (agenda), dan 45 indikator utama pembangunan.

c. Isu Strategis RPJPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2045

Pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2045, Isu strategis yang ditetapkan adalah:

1. Akselerasi Hilirisasi Industri Hasil SDA

Provinsi Kalimantan Utara memiliki sumber daya alam yang melimpah dengan komoditas unggulan seperti kelapa sawit, karet, rumput laut, batu bara serta komoditas hasil alam lainnya. Kontribusi sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan terhadap perekonomian daerah mencapai 14,06 persen sedangkan sektor pertambangan dan penggalian mencapai 36,42 persen pada tahun 2022. Tingginya produksi di kedua sektor tersebut sayangnya belum sepenuhnya diolah untuk menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi. Kontribusi industri pengolahan di Provinsi

Kalimantan Utara baru mencapai 7,77 persen dengan pertumbuhan sebesar 7,1 persen pada tahun 2022. Potensi sumber daya alam yang terdapat di Provinsi Kalimantan Utara perlu diolah seoptimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Transformasi Ekonomi Hijau, Biru dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan

Provinsi Kalimantan Utara memiliki potensi pengembangan ekonomi hijau dan biru berkat karakteristik daerah yang didominasi oleh hutan dan berada di wilayah perairan yang cukup luas. Kondisi tersebut menjadikan Provinsi Kalimantan Utara memiliki potensi untuk menerapkan ekonomi hijau dan biru sekaligus menjadi tempat pengembangan sumber energi baru terbarukan. Penerapan ekonomi hijau dan biru masuk ke dalam agenda transformasi ekonomi yang dirumuskan di tingkat nasional. Penerapan ekonomi hijau dan biru ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa mengesampingkan aspek sosial dan lingkungan.

3. Kesejahteraan dan Pemerataan Pembangunan Wilayah

Kesejahteraan merupakan tujuan utama pembangunan. Kesejahteraan masyarakat di suatu daerah menjadi cermin bagi keberhasilan pembangunan di daerah tersebut. Kesejahteraan Masyarakat umumnya diukur dengan menggunakan indikator Tingkat kemiskinan atau PDRB per kapita. Indikator makro ekonomi tersebut dipengaruhi oleh hampir semua urusan pemerintahan, mulai dari rumpun sumber daya manusia, ekonomi, lingkungan dan infrastruktur hingga tata kelola pemerintahan. Kemiskinan berhubungan dengan berbagai faktor indikatif seperti pengangguran, pendapatan petani, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, akses terhadap infrastruktur, tata Kelola pemerintahan dan berbagai faktor yang bersifat multidimensional lainnya. Tingkat kemiskinan dapat diturunkan jika diintervensi dengan kebijakan yang inovatif dan kolaboratif. Pemerataan pembangunan



wilayah juga menjadi perhatian utama dalam perencanaan pembangunan jangka panjang Provinsi Kalimantan Utara ke depan.

Pemerataan pembangunan daerah umumnya dinilai dari sebaran produk domestik bruto antar kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Utara. Sebaran pemerataan produk domestik bruto tersebut dapat dicermati dengan melihat indikator indeks williamson Provinsi Kalimantan Utara dan faktor-faktor penentu yang menjadi pembentuk indikator tersebut.

4. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM

Isu strategis peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing didasarkan pada capaian pembangunan Provinsi Kalimantan Utara. Salah satunya dilihat dari capaian indeks pembangunan manusia (IPM).

Selama delapan tahun (2015-2022), IPM Provinsi Kalimantan Utara naik 3,07 poin menjadi 71,83. Capaian tersebut menempati urutan ke-21 di level nasional dan menempati urutan ketiga di Pulau Kalimantan. Meskipun mengalami peningkatan, namun dilihat dari komponen pembentuk IPM seperti AHH, HLS, dan pengeluaran perkapita masih dibawah rata-rata nasional. Selain itu, pemenuhan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan terutama di wilayah 3TP (tertinggal, terdepan, terluar dan perbatasan) masih belum optimal. Dengan demikian, masih banyaknya persoalan pada pelayanan dasar pendidikan maupun kesehatan di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan bahwa pembangunan kualitas dan daya saing SDM masih belum optimal. Upaya peningkatan kualitas dan daya saing SDM perlu mendapat perhatian lebih pada periode pembangunan kedepan. Hal tersebut karena berpengaruh terhadap kemajuan daerah secara umum.

5. Inklusi Sosial dan Kesenjangan Gender

Inklusi sosial dan kesetaraan gender bertujuan untuk memberdayakan kelompok rentan dan perempuan. Proses pemberdayaan tersebut memastikan bahwa kebutuhan dan hak-hak dasar mereka tidak terabaikan dan dapat dilindungi. Kelompok rentan mengalami

stigmatisasi, diskriminasi, dan marginalisasi baik secara formal (melalui hukum, kebijakan, program) maupun informal (melalui praktik sosial budaya). Kelompok-kelompok ini menjalani perjuangan untuk pemenuhan hak asasi manusia mereka, termasuk dalam akses pendidikan, layanan kesehatan dan sosial, perumahan yang layak, pekerjaan, dan upah yang setara.

Upaya perwujudan inklusi sosial dan kesetaraan gender di Provinsi Kalimantan Utara masih perlu dioptimalkan pada periode berikutnya. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa capaian diantaranya persentase kemiskinan yang cukup fluktuatif selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2022, persentase penduduk miskin Provinsi Kalimantan Utara 6,86% dan indeks gini 0,270.

6. Penguatan Ketahanan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim

Tripble Planetary Criysis yang mencakup perubahan iklim, pencemaran dan kerusakan lingkungan dan kehilangan keanekaragaman hayati menjadi isu global yang mempengaruhi kestabilan permukaan bumi. Ketiga isu tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain, sehingga dalam implementasi adaptasinya, diperlukan upaya yang komprehensif dan holistik. Banjir, tanah longsor, kekeringan, gelombang laut, potensi tsunami dan gempa merupakan serangkaian ancaman kebencanaan di Provinsi Kalimantan Utara yang juga sekaligus, pada beberapa ancaman kebencanaan tersebut, merupakan dampak dari perubahan iklim global. Kondisi tersebut menjadi bukti bahwa antara kebencanaan dan perubahan iklim memiliki keterhubungan. Implementasi dengan fokus penguatan ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim merupakan diantara bagian penting dalam kehidupan masyarakat global yang tertuang dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB). Mandatori tersebut khususnya terdapat pada poin ke-11, ke-13 dan ke-15. Poin tersebut terfokus pada upaya menghadirkan kota dan permukiman yang berkelanjutan, penanganan perubahan iklim, melindungi dan memulihkan ekosistem secara berkelanjutan. Provinsi Kalimantan Utara diharapkan dapat mengoptimalkan implementasi ketiga tujuan



pembangunan berkelanjutan tersebut, yang dapat ditempuh dengan pencapaian terhadap indikator- indikator yang terdapat di dalamnya.

7. Penguatan Tata Kelola Lingkungan Hidup

Penguatan tata kelola lingkungan hidup mencakup pengaturan dan pengelolaan aspek jasa lingkungan dan sumber daya alam di Provinsi Kalimantan Utara, dengan harapan dapat menghindarkan pada ancaman degradasi lingkungan, sehingga dapat merasakan kebermanfaatan lingkungan secara berkelanjutan. Terdapatnya potensi sumber daya alam, khususnya sektor tambang dan hutan, mengharuskan pengaturan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Utara perlu untuk semakin diperkuat. Termasuk di dalamnya, juga mencakup pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam di Provinsi Kalimantan Utara. Optimalisasi upaya tersebut diharapkan dapat menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam di Provinsi Kalimantan Utara.

8. Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah

Isu konektivitas dan aksesibilitas wilayah menjadi permasalahan utama tingginya biaya logistik serta mahalanya biaya pembangunan daerah perbatasan dan daerah pedalaman di Kalimantan Utara. Ketersediaan dan kualitas jalan daerah yang masih rendah menjadi faktor penyumbang utama permasalahan konektivitas dan aksesibilitas wilayah. Pemenuhan jalan kondisi mantap di Provinsi Kalimantan Utara masih belum merata, jalan mantap berdasarkan kewenangan nasional mencapai 86 persen; provinsi 65,88 persen; kabupaten 55,55 persen. Di samping itu, masih banyak jalan yang belum dilengkapi dengan penerangan jalan yang memadai. Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasana transportasi yang belum optimal seperti pelabuhan, dermaga dan terminal juga turut menjadi penyebab belum optimalnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah. Pemerataan jaringan teknologi, informasi, dan komunikasi juga menjadi agenda penting yang perlu menjadi perhatian terutama dalam mendukung transformasi digital menuju Indonesia Emas 2045.

9. Infrastruktur Dasar Permukiman

Penyediaan infrastruktur dasar permukiman di Kalimantan Utara juga masih menjadi permasalahan yang cukup mendasar. Secara umum, permasalahan infrastruktur dasar permukiman di Provinsi Kalimantan Utara meliputi belum optimalnya akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak. Akses rumah tangga terhadap air minum layak masih berada pada angka 89,96 persen pada tahun 2022, sedangkan akses terhadap sanitasi layak berada pada 82,22 persen. Padahal pada tahun 2030, tujuan pembangunan berkelanjutan menargetkan akses terhadap air minum dan sanitasi layak mencapai 100%. Di samping itu, akses rumah tangga terhadap listrik juga belum optimal. Berdasarkan data BPS, 94,16 persen rumah tangga di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2022 telah menggunakan listrik PLN, 5,16 persen menggunakan Listrik nonPLN, dan 0,68 persen rumah tangga menggunakan bukan listrik sebagai sumber penerangan. Penataan kawasan kumuh dan akses terhadap rumah layak huni juga perlu menjadi perhatian.

Keterbatasan akses masyarakat dengan penghasilan menengah ke bawah untuk mendapatkan rumah layak huni juga menjadi permasalahan di Provinsi Kalimantan Utara. Akselerasi Pembangunan dan pemerataan infrastruktur dasar permukiman menjadi upaya yang sangat penting dalam mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera.

10. Tata Kelola Perbatasan

Tata kelola perbatasan tetap menjadi isu strategis ke depan mengingat Kalimantan Utara memiliki perbatasan langsung dengan negara lain. Tata Kelola perbatasan ke depan diarahkan pada transformasi dari pendekatan hard border ke soft border. Pendekatan soft border menghendaki bahwa pengelolaan perbatasan tidak hanya didominasi oleh satu pihak (rezim) saja, namun di dalamnya ada keragaman dan keterlibatan banyak pihak, seperti pusat, provinsi, kab/kota, dan negara lain yang berbatasan, swasta, dan aktor-aktor internasional. Dengan kata lain, tata kelola lintas batas merupakan konstestasi antar berbagai aktor dan berkaitan dengan politik lokal. Sehingga hal tersebut harus



dipertimbangkan dalam setiap perumusan kebijakan Pembangunan Kawasan perbatasan. Penguatan koordinasi dan kolaborasi dalam pengelolaan perbatasan menjadi faktor yang sangat penting terutama terkait dengan Pembangunan kawasan perbatasan, baik antara pemerintah daerah maupun antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga. Setiap pembangunan kawasan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal diperbatasan khususnya. Oleh karena itu, setiap kebijakan pembangunan Kawasan yang dijalankan tidak boleh mengesampingkan kondisi sosial budaya yang telah lama hidup di tengah masyarakat perbatasan. Selain itu, penguatan pengawasan pelaksanaan pembangunan harus dilakukan secara optimal terutama dalam mendukung kedaulatan negara sesuai dengan kewenangan provinsi karena praktik lintas batas menyisahkan persoalan seperti penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, dan sebagainya.

11. Penguatan Tata Kelola yang Responsif Berbasis Digital

Tata kelola pemerintahan masih menjadi salah satu masalah pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini didasarkan pada tuntutan reformasi birokrasi untuk menciptakan pelayanan yang tidak hanya berdampak secara internal, namun juga bagi pihak eksternal seperti masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam konteks Provinsi Kalimantan Utara, terdapat dua aspek yang perlu mendapatkan perhatian khusus, yaitu responsivitas dan digitalisasi. Kedua aspek ini datang dari pendekatan perencanaan jangka panjang yang berbasis masalah dan visi.

Sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, letak geografis Provinsi Kalimantan Utara menuntut perwujudan tata kelola yang menghasilkan pelayanan masyarakat secara cepat dan tanggap. Responsivitas birokrasi Pemerintah Kalimantan Utara perlu dioptimalkan dengan memperhatikan lintas yurisdiksi mulai dari pemerintah pusat hingga daerah perbatasan. Kondisi ini mengangkat urgensi isu mengebai daya tanggap pemerintah dalam melayani publik. Secara kontekstual, urgensi ini dipengaruhi oleh beberapa permasalahan yang kompleks seperti tumpang tindih

kewenangan pusat-daerah, kepemimpinan sektor publik yang masih lemah, hingga mengutamakan kepentingan masyarakat yang bersengketa di wilayah perbatasan. Perolehan informasi mengenai masalah yang dihadapi publik, kemampuan untuk menjustifikasi kebijakan, serta penyelarasan keputusan pemerintah dengan seluruh pemangku kebijakan merupakan beberapa hal penting dalam mengaktualisasi tata kelola pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang responsif. Tata kelola yang responsif, salah satunya, didorong oleh penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Upaya digitalisasi merupakan langkah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas melalui penyampaian layanan publik dan pembuatan kebijakan berbasis digital. Berdasarkan data capaian yang tersedia, Provinsi Kalimantan Utara masih tergolong pada predikat kurang dengan nilai Indeks SPBE sebesar 1,98 pada tahun 2022. Capaian ini mengindikasikan bahwa sektor digitalisasi tata kelola merupakan salah satu isu strategis yang memerlukan perbaikan dalam pelaksanaannya. Secara mendetail, kelemahan implementasi SPBE Provinsi Kalimantan Utara terletak pada perencanaan strategis, penerapan manajemen, serta audit TIK. Untuk mendukung proses digitalisasi tata kelola secara berkelanjutan, diperlukan adanya upaya khusus terkait perumusan rencana induk provinsi pintar (smart province), keterpaduan kebijakan e-government, dan peningkatan semangat integrasi antara pemerintah pusat dan provinsi. Upaya ini juga menyasar pada dampak yang diberikan melalui pelayanan publik, seperti kemungkinan indikasi lambatnya pelayanan dan prosedur yang berbelit-belit. Dengan demikian, upaya perbaikan yang lebih komprehensif harus dilakukan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat Provinsi Kalimantan Utara.

d. Telaah RPJMN Tahun 2025-2029

Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengusung Visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Visi itu akan diwujudkan dengan 8 misi yang disebut Asta Cita. 8 misi atau Asta Cita yang berisikan tentang



pengokohan ideologi hingga demokrasi. Ada juga soal pemantapan sistem pertahanan negara dan mendorong kemandirian bangsa lewat swasembada pangan hingga ekonomi kreatif.

Prabowo-Gibran juga berjanji memperkuat pembangunan SDM, melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi demi negeri, meningkatkan lapangan kerja hingga soal reformasi politik, hukum dan birokrasi.

Berikut Asta Cita Prabowo-Gibran :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

17 program prioritas yang akan dijalankan oleh Prabowo-Gibran:

1. Swasembada Pangan, Energi, dan Air

Prabowo menekankan pentingnya kemandirian dalam produksi pangan, dengan target memperluas lahan panen hingga 4 juta hektare pada 2029. Tata kelola air yang baik juga ditekankan, untuk memastikan ketersediaan air saat musim kemarau dan mengurangi risiko bencana saat musim hujan. Di bidang energi, mereka yakin Indonesia dapat menjadi pemasok utama energi hijau dunia melalui pengembangan biodiesel, bioavtur, dan energi terbarukan.

2. Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara

Pemerintahan Prabowo-Gibran berkomitmen memperkuat sistem penerimaan negara, sejalan dengan amanat Pasal 23A UUD 1945, guna mendukung pembiayaan pembangunan berkelanjutan.

3. Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi

Reformasi politik akan difokuskan pada pemberantasan politik uang dan peningkatan akses politik yang adil. Di bidang hukum, penegakan prinsip kesetaraan dihadapan hukum dan kepastian hukum. Reformasi birokrasi dilakukan dengan memperkuat digitalisasi dan sistem satu data terpadu.

4. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Korupsi dipandang sebagai penghambat pembangunan, sehingga pemerintahan ini akan fokus pada upaya pemulihan keuangan negara dan pemberantasan korupsi yang menyeluruh.

5. Pemberantasan Kemiskinan

Pemerintahan Prabowo-Gibran menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam dua tahun pertama, dan pengurangan kemiskinan relatif hingga di bawah 6% pada akhir masa jabatan.

6. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba

Pemerintahan Prabowo-Gibran akan memperkuat langkah-langkah pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan pendekatan menyeluruh, termasuk meningkatkan kesadaran dari tingkat keluarga.



7. Pelayanan Kesehatan untuk Semua
Program BPJS Kesehatan akan diperkuat dengan dukungan penyediaan obat yang memadai untuk seluruh rakyat.
8. Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi
Dana riset dan inovasi akan ditingkatkan hingga 2% dari PDB, disertai kebijakan yang mendukung investasi di bidang pendidikan, sains, teknologi, dan digitalisasi.
9. Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara
Keamanan nasional diprioritaskan untuk menciptakan kondisi yang kondusif dan memperkuat hubungan internasional yang sehat.
10. Kesetaraan Gender dan Perlindungan Kelompok Rentan
Pemerintah akan memperkuat kebijakan yang melindungi hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, termasuk akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik.
11. Pelestarian Lingkungan Hidup
Prabowo-Gibran akan mempercepat upaya pencapaian target net zero emission dan pengurangan jejak karbon, serta mempromosikan penggunaan teknologi bioplastik.
12. Ketersediaan Pupuk dan Benih bagi Petani
Ketersediaan dan akses pupuk, benih, dan pestisida untuk petani akan dijamin guna mendukung swasembada pangan.
13. Rumah Murah dan Sanitasi bagi Masyarakat
Pemerintahan ini akan membangun atau merenovasi 40 rumah per desa/kelurahan per tahun, dengan target tiga juta rumah dalam masa jabatan.
14. Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM
Pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM akan menjadi prioritas, termasuk melalui program kredit usaha untuk sektor pertanian, perikanan, dan startup millennial. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) juga akan diteruskan.
15. Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis SDA dan Maritim
Hilirisasi nikel dan sumber daya lainnya akan dilanjutkan untuk membuka lapangan kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi

berkelanjutan.

16. Kerukunan Antarumat Beragama dan Kebebasan Beribadah

Pemerintahan akan memastikan kerukunan antarumat beragama dan kebebasan beribadah, serta memperhatikan perawatan rumah ibadah.

17. Pelestarian Seni Budaya dan Peningkatan Ekonomi Kreatif

Pelestarian seni budaya, penguatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga menjadi bagian penting dari agenda nasional mereka, dengan dukungan dana abadi kebudayaan. (*)

Pembangunan nasional selalu menjadi fokus utama dalam menciptakan perubahan yang signifikan bagi masyarakat. Setiap periode pemerintahan memiliki strategi tersendiri untuk mencapai kemajuan yang lebih cepat dan merata. Dalam lima tahun ke depan, pemerintah telah merancang berbagai langkah jelas yang tidak hanya bersifat jangka panjang, tetapi juga dapat memberikan dampak nyata dalam waktu singkat. Salah satu strategi utama yang dirancang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 adalah 8 *Quick Wins* Pembangunan Nasional.

Program ini bertujuan untuk menangani permasalahan mendesak dengan solusi yang cepat, tepat, dan terukur. Dari peningkatan layanan kesehatan hingga pembangunan infrastruktur, setiap inisiatif dalam program ini dirancang untuk memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus memperkuat fondasi pembangunan jangka panjang. Dengan adanya 8 *Quick Wins*, pemerintah ingin memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kualitas hidup masyarakat dapat meningkat lebih cepat. Delapan program hasil terbaik cepat ditujukan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional. Visualisasi uraian delapan program hasil terbaik cepat dijabarkan sebagai berikut:



1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.
2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten.
3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian, dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.
4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, serta memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak.
5. Menambah dan memberikan program kartu-kartu kesejahteraan serta memastikan bantuan sosial tepat sasaran.
6. Menaikkan gaji ASN (TNI/Polri, guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), serta pensiunan dan menghilangkan kemiskinan ekstrem.
7. Membangun dan melanjutkan infrastruktur desa dan kota, termasuk infrastruktur transportasi, teknologi, dan perumahan murah bersubsidi bagi masyarakat miskin, generasi muda, serta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
8. Menambah rasio penerimaan negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.

Program-program ini diharapkan mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat sekaligus membangun fondasi yang lebih kuat menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam dokumen RPJMN Tahun 2025-2029 dimuat tema dan arah kebijakan penguatan fondasi transformasi sebagai berikut:

1. Transformasi sosial: pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
2. Transformasi ekonomi: hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja.
3. Transformasi tata kelola: kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil.



4. Supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia: memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi.
5. Ketahanan sosial budaya dan ekologi: memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

Sementara tema dan arah kebijakan upaya transformatif super prioritas (*game changers*) adalah sebagai berikut:

1. Transformasi sosial melalui:
 - a. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).
 - b. Peningkatan partisipasi tinggi dan lulusan STEAM berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan.
 - c. Restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga pendidikan dan kesehatan seperti guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan.
 - d. Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan stunting, dan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberkulosis dan kusta).
 - e. Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi.
2. Tranformasi ekonomi melalui:
 - a. Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh industri.
 - b. Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggul, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta orientasi ekspor.
 - c. Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau.
 - d. Superplatform untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital.
 - e. Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi.



- f. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
3. Transformasi tata kelola melalui:
 - a. Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, transformasi manajemen ASN (terutama sistem penggajian tunggal dan pensiun), serta pemberantasan korupsi.
 - b. Penguatan integritas partai politik.
4. Supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia melalui:
 - a. Transformasi sistem penuntutan menuju *single prosecution system* dan transformasi lembaga kejaksaan sebagai *Advocat General*.
 - b. Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan value chain industri nasional.
 - c. Reformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko, penerapan aturan fiskal adaptif, reformasi APBN, serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal.
 - d. Reformasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran.
5. Ketahanan sosial budaya dan ekologi melalui:
 - a. Penguatan karakter dan jati diri bangsa.
 - b. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.
 - c. Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (food, energy, water).

e. Telaah RPJMD Provinsi Kaltara Tahun 2025-2029

Perumusan visi pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 didasarkan pada isu strategis pembangunan. Isu strategis RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 adalah:

1. Produktivitas Ekonomi Daerah yang Inklusif, Bernilai Tambah dan Berkelanjutan

Provinsi Kalimantan Utara memiliki sumber daya yang berlimpah dan telah dikenal dengan berbagai produk unggulan daerah. Potensi di wilayah Provinsi Kalimantan Utara meliputi sumber daya perikanan

dan kelautan, ekosistem mangrove dan gambut, juga kekayaan alam lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk pariwisata dan energi baru terbarukan. Meskipun kekayaan alam yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Utara berlimpah, pemanfaatan sumber daya alam tersebut masih terbatas pada sektor primer dengan nilai tambah yang rendah. Kondisi tersebut dapat dilihat dari tingginya kontribusi sektor primer terhadap perekonomian Provinsi Kalimantan Utara yang mencapai 43,51 persen pada tahun 2024, dimana 28,72 persen disumbang oleh sektor pertambangan dan penggalian.

Besarnya potensi alam yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Utara juga memiliki tantangan tersendiri dalam pengelolaannya. Perekonomian daerah yang bergantung pada sektor pertambangan dan penggalian yang identik dengan sumber daya alam tidak terbarukan membawa persoalan terkait keberlanjutan dan resiliensi perekonomian daerah ke depan. Oleh karena itu, perekonomian daerah perlu diarahkan pada pembangunan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam terbarukan yang dikelola dengan prinsip berkelanjutan. Peningkatan nilai tambah produk melalui proses pengolahan perlu didorong dengan berbagai kebijakan ekonomi yang mendukung masuk dan berkembangnya industri di berbagai bidang, baik industri kecil dan menengah maupun industri besar.

Pembangunan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara juga wajib menjamin inklusivitas bagi seluruh kelompok masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam agenda pembangunan melalui aktivitas produksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi masih perlu diperkuat. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui UMKM dan IKM perlu didorong lebih kuat mengingat pertumbuhan UMKM selama periode 2020-2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup tinggi. Berdasarkan potensi dan masalah yang teridentifikasi maka isu produktivitas ekonomi daerah yang inklusif, bernilai tambah, dan berkelanjutan perlu untuk diangkat sebagai isu strategis daerah.



2. Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru dan Penyediaan Energi Baru Terbarukan

Provinsi Kalimantan Utara memiliki potensi besar untuk mengembangkan transformasi ekonomi hijau yang berkelanjutan. Provinsi Kalimantan Utara memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, provinsi ini dapat mendorong sektor-sektor ramah lingkungan, seperti pertanian, perikanan, kehutanan lestari, pariwisata berbasis alam dan industri hijau. Upaya ini bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap industri ekstraktif yang berisiko merusak lingkungan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah.

Pengembangan ekonomi biru juga menjadi fokus strategis bagi Provinsi Kalimantan Utara. Letak Provinsi Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan laut memberikan peluang besar dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Pengelolaan yang tepat dan penerapan teknologi ramah lingkungan di sektor ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, tetapi juga menjaga kelestarian ekosistem laut.

Penyediaan energi baru dan terbarukan (EBT) merupakan bagian penting dari transformasi ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara. Potensi energi surya, air, dan bioenergi di wilayah ini sangat menjanjikan untuk dikembangkan sebagai alternatif energi yang bersih dan berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur EBT tidak hanya menunjang kebutuhan energi lokal, tetapi juga membuka peluang investasi dan penciptaan lapangan kerja hijau.

Integrasi antara pembangunan ekonomi hijau, ekonomi biru, dan pengembangan energi terbarukan di Provinsi Kalimantan Utara menjadi kesempatan besar bagi Provinsi Kalimantan Utara untuk menjadi model pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan ramah lingkungan.

3. SDM Berkualitas dan Kohesivitas Masyarakat

Provinsi Kalimantan Utara sebagai wilayah perbatasan Indonesia menghadapi tantangan pembangunan diantaranya peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan penguatan kohesivitas masyarakat. Dalam peningkatan kualitas SDM, Provinsi Kalimantan Utara masih menghadapi beberapa permasalahan seperti belum meratanya akses dan kualitas pendidikan, kurangnya tenaga pendidik dan fasilitas pendidikan yang memadai, kurangnya akses pelatihan vokasional, serta ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri lokal. Peningkatan SDM yang berkualitas menjadi hal mendesak mengingat kebutuhan tenaga kerja terampil disektor unggulan seperti industri, pertanian, dan pariwisata. Adapun strategi yang perlu diperhatikan dalam pembangunan kedepan diantaranya peningkatan kualitas pendidikan dasar hingga menengah, pengembangan pusat pelatihan vokasional, serta peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah, industri, dan lembaga pendidikan untuk program magang dan penempatan kerja. Pengembangan SDM yang berkualitas dilakukan sejalan dengan penguatan kohesivitas masyarakat. Kohesivitas masyarakat menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan harmoni sosial ditengah kemajemukan etnis, budaya, dan agama di Kalimantan Utara. Keagaman ini menjadi potensi sekaligus tantangan yang harus dijaga agar tidak menimbulkan gesekan/konflik sosial. Perlu upaya sistematis dalam membangun dialog antar komunitas, memperkuat nilai-nilai kebangsaan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Untuk itu, pelaksanaan forum lintas budaya perlu dilakukan secara rutin. Pelibatan tokoh adat, pemuda, perempuan dan stakeholder lainnya dalam seluruh proses pembangunan, serta mendorong kegiatan sosial bersama seperti gotong royong dan festival budaya. Dengan demikian, peningkatan SDM yang berkualitas dan kohesivitas masyarakat memerlukan sinergi seluruh elemen masyarakat dan pemerintah, sehingga dapat terwujud pembangunan yang lebih inklusif, harmonis, dan berdaya saing.



Dengan demikian, peningkatan SDM yang berkualitas dan kohesivitas masyarakat memerlukan sinergi seluruh elemen masyarakat dan pemerintah, sehingga dapat terwujud pembangunan yang lebih inklusif, harmonis, dan berdaya saing. Selain itu, untuk menjawab tantangan strategis terkait rendahnya kualitas SDM, akses pendidikan dan kesehatan yang masih terbatas, serta ketimpangan pelayanan antar wilayah, maka pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas utama. Upaya peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan dasar, menengah, dan vokasional harus terus diperkuat terutama di wilayah-wilayah terpencil dan perbatasan. Hal ini meliputi perluasan jangkauan layanan, penyediaan tenaga pendidik yang berkualitas, serta penguatan sarana dan prasarana pendidikan.

Demikian pula dalam sektor kesehatan, perlu dilakukan percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, khususnya pelayanan ibu dan anak, imunisasi, gizi, dan penanganan penyakit menular. Penguatan sistem layanan kesehatan dasar, penyediaan tenaga medis yang merata, serta fasilitas kesehatan yang memadai di seluruh wilayah akan berdampak langsung pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Dengan pendidikan yang lebih merata dan layanan kesehatan yang lebih inklusif, Kalimantan Utara dapat mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.

4. Konektivitas Wilayah dan Aksesibilitas Layanan Dasar yang Merata dan Berkeadilan

Upaya mewujudkan konektivitas wilayah dan aksesibilitas layanan dasar yang merata dan berkeadilan menjadi isu strategis bagi Provinsi Kalimantan Utara yang perlu untuk segera direspon. Beberapa wilayah di Kalimantan Utara terutama pedalaman dan perbatasan seperti Krayan, belum terhubung dengan jaringan jalan nasional dan provinsi secara memadai. Ruas jalan antar kabupaten dan penghubung ke

pusat-pusat pertumbuhan ekonomi sering kali dalam kondisi rusak atau belum terbangun. Proporsi jalan kewenangan provinsi dengan permukaan tanah mencapai lebih dari 70 persen selama 2020-2024. Di sisi lain, penambahan jalan dengan permukaan aspal dan beton juga berjalan sangat lambat. Minimnya jalan dan jembatan penghubung di atas sungai besar mengakibatkan transportasi air menjadi alternatif bagi masyarakat. Akses ke daerah-daerah seperti Krayan, Lumbis, dan sebagian wilayah Malinau hanya dapat ditempuh melalui jalur udara atau sungai. Terbatasnya prasarana transportasi yang memadai dan integrasi antar sarana transportasi darat, laut, dan udara masih belum berjalan optimal menjadikan biaya logistik menjadi mahal. Di masa mendatang pengembangan transportasi juga perlu untuk memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, ketahanan terhadap bencana, dan optimalisasi pemanfaatan sistem informasi berbasis digital. Lebih dari itu, akses internet dan jaringan seluler masih terbatas memperparah keterisolasian dan menghambat pendidikan, ekonomi digital, dan pelayanan publik.

Peningkatan konektivitas wilayah dan aksesibilitas layanan dasar dan merata menjadi agenda penting dalam pembangunan selama lima tahun ke depan. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah, memperkuat integrasi wilayah, serta memastikan seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang berada di daerah terpencil, tertinggal, dan perbatasan agar dapat mengakses pelayanan publik secara setara. Pemerataan pembangunan infrastruktur akan tetap diarahkan secara kontekstual dan adaptif, sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan spesifik masing-masing wilayah. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat berjalan secara berkeadilan dan berdampak langsung bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pembangunan infrastruktur akan mengoptimalkan ketersediaan aset (stok infrastruktur) yang terbangun untuk meningkatkan akses; menurunkan biaya produksi, biaya transportasi dan biaya logistik; menguatkan konektivitas dan rantai nilai komoditas; serta



mengembangkan pariwisata. Pembangunan infrastruktur diharapkan dapat memberikan dampak yang baik ke berbagai sektor pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara.

5. Tata Kelola Pemerintahan dan Tata Kelola Perbatasan yang Berkualitas

Kalimantan Utara sebagai salah satu provinsi baru di Indonesia yang dimekarkan pada tahun 2013 ini memiliki tantangan sekaligus peluang besar dalam memperkuat tata kelola pemerintahan. Kualitas birokrasi yang adaptif, akuntabel, dan transparan serta inovatif menjadi fondasi utama untuk mendukung percepatan pembangunan daerah. Dalam konteks ini, reformasi birokrasi perlu terus didorong melalui peningkatan kapasitas aparatur, digitalisasi layanan publik, serta penguatan sistem pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal dan terjangkau.

Kalimantan Utara secara geografis berbatasan langsung dengan Malaysia. Tata kelola perbatasan menjadi isu strategis yang harus dikelola secara serius, karena menyangkut aspek kedaulatan, keamanan, serta potensi ekonomi lintas negara. Penguatan infrastruktur perbatasan, peningkatan koordinasi antar- instansi, dan pengembangan kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru menjadi prioritas penting. Dengan pengelolaan yang tepat, wilayah perbatasan dapat menjadi gerbang kemajuan, bukan zona terluar yang terabaikan.

Kualitas tata kelola pemerintahan dan perbatasan yang baik juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat dan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan Kabupaten/Kota. Perencanaan pembangunan yang partisipatif dan berbasis data, serta penguatan peran desa dalam pembangunan wilayah perbatasan, akan memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi daerah. Melalui pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan, Kalimantan Utara dapat memanfaatkan posisinya secara strategis untuk mendorong

pemerataan pembangunan dan meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional maupun global.

f. Telaah RPJPD Kota Tarakan Tahun 2025-2045

Perumusan visi pembangunan Kota Tarakan Tahun 2025-2045 didasarkan pada isu strategis pembangunan. Isu strategis pembangunan Kota Tarakan yaitu: (1) Belum optimalnya kualitas dan daya saing Sumber daya manusia; (2) Belum optimalnya pemerataan pembangunan dan ekonomi; (3) belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif; (4) Belum optimalnya pengendalian lingkungan hidup.

Sasaran visi RPJPD secara eksplisit mengacu pada sasaran visi RPJPN dan RPJPD Provinsi Kalimantan Utara. Sasaran visi beserta indikatornya menjadi ukuran dan penanda bagi ketercapaian kondisi berdaya saing, maju, sejahtera dan berkelanjutan. Terdapat satu indikator sasaran visi yang merupakan penyesuaian dengan kebutuhan daerah, namun tetap mengacu pada visi RPJPN, yaitu Indeks Daya Saing Daerah sebagai penyesuaian dari indikator nasional Global Power Index.

Berdasarkan dari visi yang telah dirumuskan dan dijelaskan sebelumnya, Kota Tarakan memiliki 4 (empat) misi pembangunan. Misi pembangunan ini adalah upaya-upaya yang akan dilaksanakan daerah untuk mewujudkan visi daerah sampai dengan tahun 2045. Dalam misi (agenda) Pembangunan tersebut. Perumusan dan penjelasan misi RPJPD Kota Tarakan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, dan berdaya saing mengandung arti bahwa Manusia sebagai insan menjadi perhatian utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan membangun manusia sebagai insan seutuhnya akan menentukan keberhasilan membangun manusia pada sisi lainnya, yakni pelaku yang tangguh dalam membangun diri dan lingkungannya. Pengetahuan, keterampilan, dan keahlian harus ditegakkan di atas dasar etika moral dan akhlak yang baik.



Kemajuan Pembangunan yang merata salah satunya didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Dalam menghadapi Indonesia Emas 2045, sumber daya manusia menjadi modal penting yang kualitasnya perlu ditingkatkan melalui bidang Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan, dan Sosial.

Pembangunan Kota Tarakan dalam 20 tahun kedepan akan menghadapi beberapa perubahan besar yaitu perubahan struktur penduduk, kemajuan teknologi, perubahan iklim, pergeseran ekonomi, dan kemajuan budaya. Transformasi pembangunan manusia dan perlindungan sosial akan menjadi kunci penting dalam menangani perubahan tersebut sehingga masyarakat dapat menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan dan dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi.

Dalam mewujudkan misi pertama pembangunan ini maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mempromosikan keadilan sosial agar setiap orang memiliki kesempatan yang sama terhadap pemenuhan pelayanan kesehatan, gizi, pendidikan, perlindungan sosial, serta perlindungan dari kekerasan.
- b. Kesehatan untuk seluruh masyarakat dapat ditandai dengan meningkatnya usia harapan hidup masyarakat, menurunnya angka kematian ibu, menurunnya prevalensi stunting, meningkatnya kemampuan manajemen tuberculosis, menurunnya tingkat kemsikinan, meningkatnya cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, meningkatnya angka penyandang disabilitas bekerja di sektor formal.
- c. Pendidikan berkualitas yang merata dapat ditandai dengan meningkatnya angka harapan lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah, meningkatnya angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni (APM), literasi membaca.
- d. Identitas budaya ditandai dengan menguatnya nilai-nilai budaya masyarakat Tarakan sehingga mempunyai fungsi sentral dan mendasar sebagai landasan utama pelaksanaan pembangunan.

- e. Memantapkan ketahanan sosial dan keluarga.
- f. Membangun keluarga dan masyarakat yang inklusif bagi semua individu tanpa memandang latar belakang, identitas, disabilitas, status, dan gender.
- g. Gotong royong merupakan nilai luhur dan program pembangunan mewujudkan nilai tersebut dalam bentuk kerjasama dan saling mendukung. Gotong royong sangat penting bagi masyarakat terutama untuk menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan sehari-hari dan pembangunan kelurahan.
- h. Pemberdayaan masyarakat, peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha.
- i. Peningkatan lingkungan yang inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya.
- j. Peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja, antara lain melalui penerapan care economy, penguatan norma keluarga, pelayanan ketenagakerjaan yang merata dan inklusif, pemanfaatan teknologi digital, dan peningkatan keterampilan.

Berdasarkan pada pelaksanaan dan capaian kinerja pembangunan tahap sebelumnya, pada tahap arah kebijakan pertama pembangunan (2025-2029) difokuskan pada penguatan modal dasar pembangunan dengan tema pembangunannya yaitu: ***Penguatan Fondasi Modal Dasar Pembangunan Kota Tarakan*** yang Fokus pada Penuntasan Pelayanan Dasar (Kesehatan, Pendidikan, Perlindungan Sosial, Budaya dan SDM,), Pemanfaatan Infrastruktur dan Saranan Prasarana, Percepatan Pertumbuhan Perekonomian, Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang bertanggungjawab, Konservasi Lingkungan, dan Risiko Bencana; serta Penguatan Tata Kelola Pemerintahan.

Berdasarkan tema pembangunan periode pertama tersebut, maka arah kebijakan pembangunan Kota Tarakan, sebagai berikut:



1. Penguatan Sumber Daya Manusia, difokuskan pada penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial dan budaya, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif.
2. Upaya pemenuhan Sarana dan Prasarana dasar (air bersih, sanitasi, rumah layak huni, energi) serta infrastruktur penunjang perekonomian. Melalui Pembangunan infrastruktur dan Sarana Prasarana, yang difokuskan pada pemanfaatan infrastruktur dan sarana prasarana dalam rangka peningkatan wilayah potensi ekonomi.
3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan, difokuskan pada penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas ASN berbasis Merit System, pondasi penataan regulasi, peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Kinerja birokrasi diharapkan menjadi kuat, bersih, adaptif, cepat, dan efektif dan efisien.
4. Pemantapan Ketahanan Alam dan Lingkungan, difokuskan pada optimalisasi peningkatan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana, meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan; penguatan standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Perumusan isu strategis didapatkan berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan yang didapatkan serta telaah isu global, isu nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029, sasaran pokok RPJPD Kota Tarakan Tahun 2025-2045, kebijakan RTRW Kota Tarakan 2021-2041, serta hasil evaluasi RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024, dan Dokumen Perencanaan Terkait.



**Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Tarakan Tahun 2025-2029**

**Tabel 2.40
Isu Strategis Daerah Kota Tarakan Tahun 2025–2029**

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS RPJMD	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Infrastruktur Pendidikan dan Kesehatan yang memadai Letak strategis Tarakan sebagai Hub di Kalimantan Utara Jumlah Penduduk yang besar	Masih rendahnya kesejahteraan masyarakat yang inklusif	Pengembangan SDM	Perkembangan demografi global	Rendahnya kualitas sumber daya manusia Kebutuhan hidup tinggi pada usia produktif Pergeseran struktur kelas masyarakat	SDM Berkualitas dan Kohesivitas Masyarakat	Penguatan Daya Saing SDM dan Inklusi Sosial
Sumber daya alam yang melimpah, termasuk sumber daya perikanan dan kelautan Potensi pariwisata alam dan budaya	Masih rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur daerah	Prasarana Dasar	Perkembangan teknologi Peningkatan urbanisasi dunia		Konektivitas Wilayah dan Aksesibilitas Layanan Dasar yang Merata dan Berkeadilan	Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Dasar

**Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Tarakan Tahun 2025-2029**



Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS RPJMD	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Memiliki peran strategis sebagai pusat perdagangan dan jasa di Kalimantan Utara.	Belum meratanya pertumbuhan ekonomi	Pengembangan Ekonomi Wilayah	Konstelasi perdagangan global Pemanfaatan luar angkasa atau spesies ekonomi Pertumbuhan kelas menengah atau middle class Geopolitik dan geoekonomi	Geopolitik dan geoekonomi Rendahnya produktivitas	Produktivitas Ekonomi Daerah yang Inklusif, Bernilai Tambah dan Berkelanjutan	Peningkatan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi
	Masih rendahnya kualitas tata kelola pemerintahan	Kebijakan Publik Pemerintah dan Penegakan Hukum	Tata kelola keuangan global	Tata kelola dan akuntabilitas pemerintah	Tata Kelola Pemerintahan dan Tata Kelola Perbatasan yang Berkualitas	Penguatan Tata Kelola Pemerintah yang Adaptif dan Resonsif
	Belum terwujudnya lingkungan yang berkelanjutan dan belum kuatnya resiliensi terhadap bencana	Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup	Perubahan iklim Peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam	Krisis lingkungan	Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru dan Penyediaan Energi Baru Terbarukan	Penciptaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana



Dari Teknik menyimpulkan isu strategis diatas, maka isu strategis RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Daya Saing SDM dan Inklusi Sosial.
2. Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Dasar
3. Peningkatan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi
4. Penguatan Tata Kelola Pemerintah yang Adaptif dan Resonsif
5. Penciptaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana.

BAB III

VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

a. Visi dan Misi RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029

Visi daerah disusun sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat yang berkeadilan dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.

Gambaran cita-cita dan harapan pembangunan daerah di masa depan merupakan landasan dalam merumuskan visi pembangunan. Visi dan misi daerah harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita bersama masyarakat daerah atau stakeholder pembangunan daerah, yang merefleksikan kekuatan dan potensi khas daerah sekaligus menjawab permasalahan dan isu strategis daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang mencakup rentang waktu 5 (lima) tahun kedepan hanya dapat disusun apabila ‘wujud’ Kota Tarakan yang ingin dicapai dalam rentang waktu tersebut telah dirumuskan dengan jelas. Wujud yang ingin dicapai tersebut harus benar-benar mampu menjawab permasalahan strategis masyarakat sehubungan dengan perubahan dan perkembangan lingkungan eksternal baik dalam lingkup lokal maupun domestik dan global.

Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan terpilih merupakan Visi Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan. Visi ini akan menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Visi ini selanjutnya dijabarkan dalam Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029

Sebelum menjabarkan mengenai Visi RPJMD, terlebih dahulu akan ditelaah Visi Jangka Panjang Kota Tarakan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tarakan periode 2025-2045. Hal ini dimaksudkan agar terdapat kesinambungan pembangunan selama lima tahun ke depan. Adapun Visi RPJPD Kota Tarakan Tahun 2025-2045 adalah *“Kota Tarakan yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”*. Substansi Visi RPJPD Kota Tarakan diatas menjadi pijakan dalam penjabaran Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan terpilih, agar Sasaran Pokok RPJPD di tahun berkenaan dapat dijabarkan menjadi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah. Adapun Visi pembangunan Kota Tarakan dalam RPJMD Kota Tarakan tahun 2025-2029 adalah ***“Terwujudnya Tarakan Sebagai Kota Cerdas yang Bertumpu Pada Sektor Jasa, Perdagangan, Perikanan Kelautan, dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Maju Menuju Masyarakat Sejahtera”***.

Visi tersebut di atas memiliki substansi nilai (*value*) atau pokok-pokok visi yang penting sebagai pijakan untuk menjabarkan dalam Misi Pembangunan. Adapun pokok-pokok visi pembangunan dalam RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.1
Perumusan Penjelasan Visi Pembangunan
Kota Tarakan Tahun 2025-2029

No	Pokok-pokok Visi	Penjelasan
1	Kota Cerdas	Kota cerdas adalah kota yang memiliki kinerja baik dalam enam dimensi utama: ekonomi cerdas, mobilitas cerdas, lingkungan cerdas, masyarakat cerdas, kehidupan cerdas, dan pemerintahan cerdas, yang semuanya didukung oleh partisipasi warga yang aktif. (Giffinger <i>et al.</i> 2007). Artinya, Kota Tarakan akan diarahkan



No	Pokok-pokok Visi	Penjelasan
		menjadi kota yang: Mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam tata kelola pemerintah, Meningkatkan efisiensi layanan publik, Mendorong partisipasi aktif masyarakat, dan Menyediakan solusi inovatif terhadap tantangan kota seperti transportasi, sampah, pendidikan, dan kesehatan.
2	Sektor Jasa dan Perdagangan	Bertumpu pada Sektor Jasa dan Perdagangan dimaknai dengan Perekonomian Kota Tarakan dikembangkan melalui pelayanan jasa profesional dan kegiatan perdagangan antar daerah dan antar negara, Fasilitasi iklim investasi dan kemudahan berusaha, dan Peningkatan infrastruktur pasar, logistik, dan sistem distribusi barang.
3	Sektor Perikanan Kelautan	Bertumpu pada Sektor Perikanan Kelautan dimaknai dengan Perekonomian Kota Tarakan menekankan pada Pemanfaatan potensi laut dan pesisir secara berkelanjutan dan modern, Pengembangan sektor perikanan tangkap dan budidaya, dan Meningkatkan nilai tambah hasil laut melalui industri pengolahan.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Tarakan Tahun 2025-2029

No	Pokok-pokok Visi	Penjelasan
4	Sektor Ekonomi Kreatif	Bertumpu pada Sektor Ekonomi kreatif dimaknai dengan Perekonomian Kota Tarakan difokuskan pada Mendorong tumbuhnya sektor kreatif berbasis inovasi, seni, budaya, dan teknologi, Pengembangan UMKM kreatif seperti kuliner, fashion, desain, musik, dll, serta Memberdayakan pemuda dan komunitas dalam menciptakan produk kreatif lokal.
5	Berdaya Saing dan Maju	Berdaya Saing (<i>Competitive</i>) artinya, Kota Tarakan mampu bersaing dengan daerah lain dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, SDM, dan pelayanan publik. Adapun aspek yang Mendukung Daya Saing Kota Tarakan antara lain SDM yang Berkualitas, Iklim Investasi yang Kondusif, Produk Unggulan Lokal, Infrastruktur Digital dan Fisik yang Memadai. Sedangkan Maju (<i>Progressive</i>) mengandung arti bahwa Kota Tarakan mengalami perkembangan secara berkelanjutan di berbagai bidang, menuju standar kota modern. Ciri Kota yang Maju di Konteks Tarakan adalah Pemerintahan Digital (<i>e-Government</i>), Ekonomi Tumbuh Stabil, Infrastruktur

No	Pokok-pokok Visi	Penjelasan
		Berkembang, Masyarakat Sejahtera dan Inklusif. "Berdaya saing dan maju" bagi Kota Tarakan berarti menjadi kota modern yang mampu bersaing secara ekonomi dan pelayanan, sekaligus berkembang secara merata dengan memanfaatkan potensi daerah, teknologi, dan pemberdayaan masyarakat.
6	Menuju Masyarakat Sejahtera	Masyarakat sejahtera adalah kondisi di mana penduduk hidup dalam keadaan aman, damai, berkecukupan secara ekonomi, sehat, terdidik, dan memiliki akses terhadap layanan publik yang adil dan berkualitas. Frasa ini menandakan bahwa pemerintah Kota Tarakan sedang berproses membangun sistem dan layanan yang bisa mengangkat taraf hidup masyarakat. Bukan hanya soal ekonomi, tapi juga kualitas hidup secara menyeluruh. Komponen Utama Menuju Masyarakat Sejahtera meliputi Kesejahteraan Ekonomi yang tergambar pada Peningkatan pendapatan masyarakat melalui lapangan kerja, UMKM, dan kewirausahaan, Harga kebutuhan pokok yang stabil dan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029

No	Pokok-pokok Visi	Penjelasan
		terjangkau, angka kemiskinan, pengangguran turun; Kesehatan yang Baik melalui Akses layanan kesehatan yang mudah dan murah, Program pencegahan penyakit dan gizi seimbang, Infrastruktur kesehatan yang memadai; Pendidikan Berkualitas melalui Pendidikan yang inklusif dan terjangkau bagi semua kalangan, Peningkatan kualitas guru dan sarana belajar, Pendidikan vokasi untuk mendorong kemandirian ekonomi; Lingkungan Layak Huni melalui Pemukiman yang sehat, bersih, dan tertata, Infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan listrik tersedia merata, Ruang terbuka hijau untuk kualitas hidup Masyarakat; Keadilan Sosial dan Keamanan melalui Layanan publik yang adil tanpa diskriminasi, Jaminan sosial bagi masyarakat rentan, Keamanan dan ketertiban yang terjaga.

Visi sebagai kondisi ideal yang akan dicapai memerlukan sasaran, yakni rumusan kinerja dan indikator yang mencerminkan tercapainya visi. Sasaran Visi RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029 memiliki rumusan yang langsung mengacu sasaran visi RPJPD Kota Tarakan Tahun 2025-2045 pada periodisasi pertama serta memiliki indikator kinerja.

Dalam rangka mencapai visi Kota Tarakan yaitu *“Terwujudnya Tarakan Sebagai Kota Cerdas yang Bertumpu Pada Sektor Jasa, Perdagangan, Perikanan Kelautan, dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Maju Menuju Masyarakat Sejahtera”*. terdapat 5 Sasaran Visi Daerah Kota Tarakan yang juga selaras dengan Sasaran Visi Nasional dan Sasaran Visi Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Sasaran Visi Daerah Kota Tarakan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.2
Sasaran Visi RPJMD Kota Tarakan 2025-2029

Sasaran Visi/ Indikator	Baseline 2025	RPJMD I 2025-2029
1. Pendapatan perkapita daerah yang tinggi		
- PDRB perkapita (juta/kapita)	136 juta	186 juta
2. Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang		
- Tingkat kemiskinan (%)	5,40	4,18
- Indeks gini	0,250	0,240
- Pertumbuhan Ekonomi	6,09	6,49
3. Daya saing daerah yang tinggi		
- Indeks daya saing daerah (indeks)	3,45	3,59
4. Daya saing Sumber Daya Manusia yang meningkat		
- Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	78,41	80,41
5. Intensitas emisi GRK menurun menuju <i>net zero emission</i>		
- Penurunan intensitas emisi GRK (ton karbon dioksida ekuivalen (tCO ₂ e))	225,049.00	98,862.73
- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,06	70,40



Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Perumusan misi pembangunan mengacu pada visi Pembangunan Kota Tarakan Tahun 2025-2029.

Berdasarkan dari visi yang telah dirumuskan dan dijelaskan sebelumnya, Kota Tarakan memiliki 5 (lima) misi pembangunan. Misi pembangunan ini adalah upaya-upaya yang akan dilaksanakan daerah untuk mewujudkan visi daerah 2025-2029. Dalam misi (agenda) Pembangunan tersebut. Perumusan dan penjelasan misi RPJMD Kota Tarakan adalah sebagai berikut:

1. *Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.*

Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing berarti membangun masyarakat yang memiliki pengetahuan, keterampilan, karakter, dan kesehatan yang baik sehingga mereka mampu bersaing secara aktif dalam dunia kerja, usaha, maupun kehidupan sosial.

Kota Tarakan sedang berkembang menuju kota cerdas (*smart city*) dan pusat ekonomi berbasis jasa, perdagangan, kelautan, dan ekonomi kreatif. Semua sektor ini butuh SDM yang siap pakai, inovatif, dan adaptif terhadap teknologi.

Fokus Utama Pengembangan SDM di Tarakan:

1. Pendidikan Berkualitas dan Merata, melalui Peningkatan mutu guru dan fasilitas Pendidikan, Pemerataan akses pendidikan sampai ke daerah pesisir dan pulau kecil, Dukungan terhadap pendidikan vokasi dan keterampilan kerja.
2. Pelatihan dan Keterampilan Kerja, melalui Balai latihan kerja (BLK) untuk pelatihan keahlian praktis: nelayan, UMKM, pariwisata, TIK, dll, Program magang industri dan kerja sama dengan dunia usaha, Sertifikasi kompetensi untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal.

3. Literasi Digital dan Teknologi, melalui Pelatihan digital untuk masyarakat umum, guru, pelaku usaha, dan ASN, Dukungan terhadap startup lokal dan inovator muda di bidang teknologi, Edukasi penggunaan teknologi untuk pertanian, perikanan, dan bisnis.
4. Kesehatan Masyarakat, melalui Akses layanan kesehatan yang baik sebagai dasar SDM yang produktif, Program gizi, sanitasi, dan pengendalian penyakit untuk anak dan usia kerja.
5. Karakter dan Soft Skill, melalui Penanaman nilai integritas, etos kerja, disiplin, dan semangat gotong royong, Pendidikan karakter di sekolah dan pelatihan kepemudaan.

Adapun dampaknya Bagi Tarakan adalah Meningkatnya kualitas tenaga kerja lokal yang bisa mengisi posisi strategis di sektor jasa dan industri, Tumbuhnya wirausaha muda dan pelaku UMKM kreatif, Berkurangnya ketergantungan pada tenaga kerja dari luar daerah, Terwujudnya masyarakat yang mandiri, kreatif, dan siap bersaing di era global.

Akhirnya Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing di Kota Tarakan adalah kunci utama pembangunan berkelanjutan, agar kota ini tidak hanya tumbuh secara fisik dan ekonomi, tetapi juga kuat dari sisi manusianya.

Dalam mewujudkan misi pertama pembangunan ini maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mempromosikan keadilan sosial agar setiap orang memiliki kesempatan yang sama terhadap pemenuhan pelayanan kesehatan, gizi, pendidikan, perlindungan sosial, serta perlindungan dari kekerasan.
2. Kesehatan untuk seluruh masyarakat dapat ditandai dengan meningkatnya usia harapan hidup masyarakat, menurunnya angka kematian ibu, menurunnya prevalensi stunting, meningkatnya kemampuan manajemen tuberculosis, menurunnya tingkat kemiskinan, meningkatnya cakupan kepesertaan jaminan sosial



ketenagakerjaan, meningkatnya angka penyandang disabilitas bekerja di sektor formal.

3. Pendidikan berkualitas yang merata dapat ditandai dengan meningkatnya angka harapan lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah, meningkatnya angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni (APM), literasi membaca, meningkatnya persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi,
4. Identitas budaya ditandai dengan menguatnya nilai-nilai budaya masyarakat Tarakan sehingga mempunyai fungsi sentral dan mendasar sebagai landasan utama pelaksanaan pembangunan.
5. Memantapkan ketahanan sosial dan keluarga.
6. Membangun keluarga dan masyarakat yang inklusif bagi semua individu tanpa memandang latar belakang, identitas, disabilitas, status, dan gender.
7. Gotong royong merupakan nilai luhur dan program pembangunan mewujudkan nilai tersebut dalam bentuk kerjasama dan saling mendukung. Gotong royong sangat penting bagi masyarakat terutama untuk menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan sehari-hari dan pembangunan kelurahan.
8. Pemberdayaan masyarakat, peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha.
9. Peningkatan lingkungan yang inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya.
10. Peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja, antara lain melalui penerapan *care economy*, penguatan norma keluarga, pelayanan ketenagakerjaan yang merata dan inklusif, pemanfaatan teknologi digital, dan peningkatan keterampilan.



2. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan infrastruktur pelayanan dasar yang handal.

Misi kedua ini mencerminkan upaya pemerintah Kota Tarakan untuk memastikan pembangunan tidak hanya terpusat di wilayah tertentu, tapi merata hingga ke daerah pesisir, dan pulau-pulau kecil serta menyediakan infrastruktur dasar (seperti jalan, air bersih, listrik, sanitasi, pendidikan, dan kesehatan) secara merata dan berkualitas untuk semua masyarakat.

Adapun tujuan strategis dari misi kedua ini adalah untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah di Kota Tarakan, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar yang layak dan aman, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan kualitas hidup masyarakat, serta mewujudkan keadilan sosial melalui pembangunan yang inklusif.

Fokus Pembangunan dan Infrastruktur Pelayanan Dasar:

1. Transportasi dan Akses Jalan, melalui pembangunan dan perbaikan jalan lingkungan, jalan penghubung antar kelurahan/kecamatan, peningkatan akses ke daerah pesisir, transportasi umum yang terintegrasi dan ramah lingkungan.
2. Listrik dan Energi, melalui penyediaan listrik yang merata, pengembangan energi alternatif (misalnya tenaga surya) untuk daerah yang sulit dijangkau.
3. Air Bersih dan Sanitasi, melalui pembangunan sistem distribusi air bersih ke permukiman padat penduduk dan daerah yang belum terlayani, dan pengelolaan limbah dan sanitasi yang sehat dan ramah lingkungan.
4. Kesehatan, melalui pembangunan dan pemerataan fasilitas kesehatan (puskesmas, klinik, rumah sakit), dan penyediaan tenaga medis dan layanan kesehatan yang terjangkau di seluruh wilayah.



5. Pendidikan, melalui penyediaan sekolah berkualitas di semua kecamatan, dan peningkatan fasilitas pendidikan seperti perpustakaan, laboratorium, dan akses internet.
6. Digitalisasi dan Teknologi, melalui penguatan infrastruktur TIK untuk menunjang layanan publik digital (*smart city*), dan akses internet hingga ke daerah yang belum terjangkau.

Karena Tarakan terdiri dari wilayah daratan dan pesisir, pemerataan pembangunan sangat penting agar warga di wilayah terluar tidak tertinggal dalam hal akses dan layanan public, pembangunan mendorong pertumbuhan ekonomi di semua wilayah, bukan hanya di pusat kota, serta menjadi fondasi kuat untuk mendukung Kota Tarakan sebagai kota cerdas dan maju.

“Meningkatkan pemerataan pembangunan dan infrastruktur pelayanan dasar yang handal” di Kota Tarakan berarti membangun kota yang adil, inklusif, dan siap menghadapi tantangan masa depan, di mana setiap warga punya akses yang sama terhadap layanan dan fasilitas yang dibutuhkan untuk hidup sejahtera.

3. Meningkatkan pembangunan ekonomi melalui dukungan kemudahan berusaha yang berkeadilan dan bertumpu pada sektor Jasa, perdagangan, Perikanan Kelautan, Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Kerakyatan (UMKM).

Misi ketiga ini menunjukkan arah strategis pembangunan ekonomi Kota Tarakan yang fokus pada mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara adil dan inklusif, dengan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berusaha, dan mengembangkan sektor-sektor unggulan yang memiliki potensi besar di wilayah Tarakan, serta memberdayakan pelaku ekonomi lokal, terutama UMKM dan masyarakat kecil agar ikut terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi daerah.

Tujuan Pembangunan Ekonomi ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan Masyarakat, menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya, dan mnumbuhkan pelaku usaha lokal yang



tangguh dan berdaya saing, serta menjadikan Tarakan sebagai pusat ekonomi jasa dan perdagangan di wilayah Kalimantan Utara.

Misi ketiga ini akan dibangun melalui :

1. Kemudahan Berusaha yang Berkeadilan, melalui penyederhanaan izin usaha dan perizinan berbasis OSS (*Online Single Submission*), bantuan permodalan melalui koperasi, perbankan, dan program pemerintah, penyediaan ruang usaha yang merata (pasar, kios UMKM, area kuliner, dll), serta penguatan regulasi yang tidak diskriminatif, baik untuk usaha besar maupun kecil.
2. Pengembangan Sektor Unggulan Ekonomi Daerah, disektor jasa diharapkan dapat mewujudkan Tarakan sebagai pusat layanan pendidikan, kesehatan, transportasi, dan logistik di Kalimantan Utara, serta pengembangan jasa keuangan, transportasi laut dan udara, serta pariwisata. Di sektor perdagangan dilakukan melalui optimalisasi potensi perdagangan antar pulau dan ekspor ke negara tetangga (seperti Malaysia dan Brunei), pengembangan pasar modern dan tradisional, serta digitalisasi UMKM agar bisa bersaing di pasar online. Di sektor perikanan dan kelautan dilakukan melalui pemanfaatan sumber daya laut yang melimpah secara berkelanjutan, dukungan terhadap nelayan dalam bentuk alat tangkap modern, pelatihan, dan akses pasar, serta pengembangan industri pengolahan hasil laut. Di sektor ekonomi kreatif dilakukan melalui pemberdayaan anak muda dan komunitas lokal di bidang kuliner, fashion, seni, musik, dan digital, pelatihan dan promosi produk kreatif local, serta festival dan kegiatan budaya sebagai daya tarik ekonomi. Di sektor ekonomi kerakyatan/UMKM dilakukan melalui penguatan koperasi dan usaha kecil sebagai tulang punggung ekonomi lokal, akses pelatihan, promosi, dan pembiayaan untuk UMKM, serta penyediaan ruang usaha strategis dan pembinaan secara berkelanjutan.

Tarakan adalah kota strategis di kawasan perbatasan dengan potensi besar sebagai penghubung perdagangan regional. Dengan sumber



daya laut dan budaya lokal yang kaya, pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan dan sektor jasa menjadi fondasi untuk menciptakan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

Meningkatkan pembangunan ekonomi di Tarakan artinya memastikan semua lapisan masyarakat punya peluang untuk maju, usaha bisa tumbuh dengan mudah, dan sektor-sektor unggulan bisa dioptimalkan secara berkelanjutan, sehingga perekonomian kota semakin kuat, mandiri, dan merata.

4. *Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif serta menjaga stabilitas ketertiban dan ketentraman kota.*

Misi keempat ini menggambarkan komitmen Pemerintah Kota Tarakan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang modern, terbuka, cepat tanggap, dan mampu beradaptasi terhadap perubahan zaman serta kebutuhan masyarakat, dan menjaga kondisi kota yang aman, tertib, dan nyaman, sebagai fondasi penting untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan warga.

Tujuan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, menyediakan layanan publik yang efektif, efisien, dan berbasis teknologi. menciptakan suasana kota yang kondusif dan damai, bebas dari konflik sosial maupun kriminalitas, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengawasan.

Misi keempat ini akan dibangun melalui :

1. Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Responsif. Pemerintah yang adaptif tergambar dimana pemerintah harus mampu menyesuaikan kebijakan, program, dan sistem kerja dengan dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi yang berkembang, mendorong transformasi digital (*smart governance*) untuk meningkatkan efisiensi layanan. Responsif ditandai dengan pemerintah dengan cepat menanggapi keluhan, aspirasi, dan



kebutuhan Masyarakat, optimalisasi layanan pengaduan online, call center, dan aplikasi layanan publik, serta tanggap terhadap bencana, konflik sosial, serta situasi darurat lainnya.

2. Menjaga Stabilitas, Ketertiban, dan Ketentraman Kota

Menjaga stabilitas ditandai dengan terjaminnya kondisi sosial-politik daerah yang aman dan terkendali, terpeliharanya hubungan baik antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat.

Menjaga ketertiban dan ketentraman ditandai dengan penegakan peraturan daerah secara adil dan konsisten, pengelolaan lalu lintas, parkir, pasar, dan ruang publik agar tertib, upaya preventif terhadap gangguan keamanan dan sosial, penguatan sistem keamanan lingkungan (siskamling, CCTV, patroli), pendidikan warga tentang pentingnya toleransi, hidup rukun, dan kepedulian sosial.

5. *Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tangguh menghadapi bencana.*

Misi kelima ini mencerminkan tekad Pemerintah Kota Tarakan untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan mengelola sumber daya alam secara bijak dan berkelanjutan, serta Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan infrastruktur kota terhadap berbagai potensi bencana, baik bencana alam maupun non-alam.

Tujuan dari Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tangguh menghadapi bencana adalah untuk mencegah kerusakan lingkungan dan menurunkan risiko bencana, meningkatkan kualitas hidup masyarakat lewat lingkungan yang sehat dan aman, memastikan pembangunan berjalan tanpa merusak ekosistem, dan membangun kota yang tangguh, berdaya tahan, dan siap menghadapi perubahan iklim.

Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tangguh terhadap bencana di Kota Tarakan berarti menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam, sambil memastikan



kesiapan seluruh elemen kota menghadapi potensi bencana secara sistematis dan berkelanjutan.

b. Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Bab ini memuat tujuan dan sasaran pembangunan Kota Tarakan yang dirumuskan berdasarkan pendekatan teknokratik, yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah berdasarkan data dan informasi yang telah digali dan dianalisis pada bab-bab sebelumnya.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Perumusan tujuan pembangunan jangka menengah Kota Tarakan secara teknokratik ditempuh dengan menelaah arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Tarakan, kebijakan pembangunan jangka menengah nasional dan isu-isu strategis pembangunan Kota Tarakan yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya. Selanjutnya, tujuan tersebut dikolaborasi dengan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan terpilih untuk menghasilkan rumusan tujuan pembangunan Kota Tarakan sampai dengan Tahun 2030.

Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan ke sasaran. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah. Sasaran RPJMD selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi kepala daerah terpilih, sekurang-kurangnya berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kota Tarakan merupakan sarana untuk melaksanakan dan sekaligus upaya untuk mewujudkan sasaran pembangunan jangka panjang Kota Tarakan 2025-2045.

Dalam proses perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Tarakan, digunakan pendekatan holistik-tematik dan integratif.



Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan aspek pembangunan serta unsur penting dan strategik yang berperan dalam pencapaian visi dan misi. Sementara pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan untuk merumuskan sasaran pembangunan yang fokus dan terukur dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan.

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kota Tarakan Tahun 2025-2029 dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur. Dengan demikian, apa yang mau dicapai atau diubah dalam pembangunan lima tahun kedepan menjadi semakin jelas dan dapat diukur pencapaiannya.

Berdasarkan hasil perumusan, maka penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Kota Tarakan 2025-2029 terdiri dari tujuan dan sasaran pembangunan disertai dengan indikator dan target pembangunan setiap tahun selama 5 (lima) tahun.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029

Tabel 3.3

Rumusan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029

Visi : “Terwujudnya Tarakan Sebagai Kota Cerdas yang Bertumpu Pada Sektor Jasa, Perdagangan, Perikanan Kelautan, dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Maju Menuju Masyarakat Sejahtera”

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	Satuan	Kondisi 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Misi I : Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing									
Tujuan 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	78,03	78,41	78,91	79,41	79,91	80,41	80,91
S1. Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	74,27	74,30	74,66	75,01	75,37	75,72	76,08
S2. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,37	10,53	10,64	10,74	10,85	10,95	11,06
	Angka Harapan Lama sekolah	Tahun	14,22	14,41	14,54	14,67	14,79	14,92	15,05
S3. Meningkatnya kesetaraan gender dan kualitas keluarga	Indeks ketimpangan gender	Poin	0,352	0,351	0,35	0,34	0,32	0,31	0,30
	Indeks pembangunan keluarga	Poin	66,67	66,90	67,12	67,35	67,68	68,68	69,68
S4. Menurunnya angka kemiskinan	Angka kemiskinan	Persen	5,56	5,40	5,09	4,79	4,49	4,18	3,88
	Angka kemiskinan ekstrem	Persen	0,93	0,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Misi II : Meningkatkan pemerataan pembangunan dan infrastruktur pelayanan dasar yang handal									
Tujuan 2. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur daerah	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	Poin	80,17	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	86,00
S5. Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar daerah	Indeks Infrastruktur	Poin	66,31	67,15	68,13	69,08	70,04	71,18	72,16
S6. Meningkatnya layanan hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak terjangkau dan berkelanjutan	Persen	68,54	71,08	73,51	75,82	78,01	80,11	82,11

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029



TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	Satuan	Kondisi 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Misi III : Meningkatkan pembangunan ekonomi melalui dukungan kemudahan berusaha yang berkeadilan dan bertumpu pada sektor jasa, perdagangan, perikanan kelautan, ekonomi kreatif dan ekonomi kerakyatan (UMKM)									
Tujuan 3. Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi	Rasio gini	Poin	0,232	0,25	0,248	0,245	0,243	0,24	0,238
S7. Meningkatnya pertumbuhan dan stabilitas ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,71	6,09	6,19	6,29	6,39	6,49	6,59
	Tingkat inflasi	Persen	1,6	2,5 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1	2,0 ± 1	2,0 ± 1	2,0 ± 1
S8. Meningkatnya stabilitas ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Ketentraman dan ketertiban umum	Poin	83,00	85,00	87,00	89,00	91,00	93,00	95,00
S9. Menurunnya pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	5,11	4,90	4,69	4,47	4,28	4,09	4,04
Misi IV : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif serta menjaga stabilitas ketertiban dan ketentraman kota									
Tujuan 4. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	77,17	80	81	82	83	84	85
S10. Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	Poin	64,89	66,03	70,11	71,51	71,88	72,35	72,72
S11. Meningkatnya akuntabilitas keuangan	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
S12. Meningkatnya kualitas digitalisasi pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	Poin	4,08	4,08	4,09	4,09	4,09	4,10	4,10
	Indeks SPBE	Poin	3,21	3,00	3,12	3,25	3,37	3,50	3,62
Misi V : Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan Tangguh menghadapi bencana									
Tujuan 5. Terwujudnya lingkungan hidup berkelanjutan dan resiliensi terhadap bencana	Persentase Penurunan Emisi GRK	ton karbon dioksida ekuivalen (tCO2e)	-	225,049.00	236,699.24	199,601.85	115,993.74	98,862.73	172,844.67
	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Poin	90,60	90,10	89,60	89,10	88,60	88,10	87,60
S13. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	68,27	70,06	70,14	70,23	70,31	70,40	70,49
S14. Meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana daerah	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,70	0,712	0,724	0,736	0,748	0,760	0,772



3.2. Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan

a. Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kota Tarakan 2025-2029

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029. Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Beberapa langkah yang ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah Kota Tarakan antara lain:

1. Mengkaji sasaran pembangunan periode sebelumnya maupun periode pembangunan yang akan datang (periode lima tahunan);
2. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah (khususnya pemerintahan daerah);
3. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya;
4. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; serta
5. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memerhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran pembangunan.

Strategi pembangunan disusun berdasarkan *critical success factor* dari kondisi yang diharapkan di tahun akhir pelaksanaan RPJMD dari masing-masing tujuan dan sasaran pembangunan. Proses ini dilaksanakan untuk mengidentifikasi kebijakan lintas sektor dan bidang urusan mana yang memiliki kontribusi terhadap pencapaian kondisi akhir yang diinginkan. Hasil analisis tersebut disajikan dalam tabel berikut.



Tabel 3.4
Strategi Pembangunan Menurut Tujuan dan Sasaran

Tujuan/Sasaran RPJMD	Kondisi Yang Diharapkan Di Akhir RPJMD	Strategi (Critical Succes Factor)	Bidang Urusan Utama	Bidang Urusan Pendukung
Tujuan 1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia				
S1. Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	Angka harapan hidup yang terus meningkat Indikator : Angka Usia Harapan Hidup	1. Peningkatan pemenuhan SPM kesehatan	Kesehatan	Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Perumahan dan Permukiman, Pengendalian penduduk dan KB, Lingkungan Hidup, Pendidikan
		2. Peningkatan kualitas layanan kesehatan primer		
		3. Pemenuhan kebutuhan dokter melalui BLUD		
		4. Transformasi sistem kesehatan publik melalui digitalisasi dan inovasi layanan kesehatan		
		5. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya kesehatan		
		6. Peningkatan intensitas verifikasi dan validasi data PBI-JK		
Tujuan 1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia				
S2. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan lama sekolah yang terus meningkat Indikator : Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah	1. Peningkatan pemenuhan SPM pendidikan	Pendidikan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Kecamatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		2. Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang		
		3. Pemenuhan sarana prasarana pendidikan sesuai dengan standar nasional		
		4. Peningkatan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan		
		5. Peningkatan bantuan biaya pendidikan		
		6. Peningkatan intensitas literasi digital kepada masyarakat		
Tujuan 1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia				
S3. Meningkatnya kesetaraan gender dan kualitas keluarga	Menurunnya Indeks ketimpangan gender dan meningkatnya indeks pembangunan keluarga Indikator : Indeks ketimpangan gender dan Indeks	1. Penguatan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan KB Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat, Sosial, Kecamatan, Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM
		2. Peningkatan keterwakilan perempuan dalam parlemen dan jabatan publik		
		3. Kesetaraan upah dan peluang kerja, serta dukungan wirausaha perempuan		



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029

Tujuan/Sasaran RPJMD	Kondisi Yang Diharapkan Di Akhir RPJMD	Strategi (Critical Success Factor)	Bidang Urusan Utama	Bidang Urusan Pendukung
	pembangunan keluarga	4. Penegakan hukum terhadap kekerasan berbasis gender 5. Peningkatan akses dan layanan korban kekerasan dan perdagangan manusia 6. Advokasi dan koordinasi tentang pemenuhan hak anak kepada para stakeholder 7. Meningkatkan predikat Kota Layak Anak 8. Peningkatan peran kecamatan dalam memperluas partisipasi dan pemberdayaan masyarakat 9. Peningkatan peran kecamatan dalam memperluas partisipasi dan pemberdayaan masyarakat		
Tujuan 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia				
S4. Menurunnya angka kemiskinan	Menurunnya kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di kota Tarakan Indikator : Angka kemiskinan, kemiskinan ekstrem	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan daerah 2. Pemberian layanan perlindungan dan jaminan sosial yang tepat sasaran 3. Peningkatan peran dan penguatan kelembagaan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah 4. Pemenuhan jumlah dan peningkatan kapasitas PSM dan TKSK 5. Pemenuhan fasilitas shelter rehabilitasi sosial 6. Integrasi dan pemutakhiran berkala data terpadu social ekonomi nasional (DTSEN) 7. Pemberian pelayanan rehabilitasi sosial dasar sesuai dengan SPM 8. Penanganan korban bencana alam dan sosial sesuai dengan SPM 9. Peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga pemberdayaan kemasyarakatan (PKK, Posyantek dan lembaga lainnya)	Sosial, Pemberdayaan Masyarakat	Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman, Pangan, Pertanian, Perikanan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029



Tujuan/Sasaran RPJMD	Kondisi Yang Diharapkan Di Akhir RPJMD	Strategi (Critical Succes Factor)	Bidang Urusan Utama	Bidang Urusan Pendukung
Tujuan 2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur daerah				
S5. Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar daerah	Indeks Infrastruktur yang terus meningkat. Indikator : Indeks Infrastruktur	1. Perluasan program pembangunan infrastruktur dasar	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman, Perhubungan	PDAM, Lingkungan Hidup, Kecamatan
		2. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar		
		3. Penyediaan dan peningkatan akses pelayanan air minum		
		4. Penyediaan dan peningkatan akses pelayanan air limbah		
		5. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur bina marga		
		6. Pengawasan badan usaha angkutan umum		
		7. Peningkatan infrastruktur logistik		
		8. Pengembangan ruang kota yang diprioritaskan di sekitar sistem pusat pelayanan		
		9. Kelengkapan fasilitas publik di sekitar Kawasan permukiman		
Tujuan 2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur daerah				
S6. Meningkatnya layanan hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Rumah tangga dengan akses hunian layak terjangkau dan berkelanjutan yang meningkat Indikator : Persentase Rumah tangga dengan akses hunian layak terjangkau dan berkelanjutan	1. Perluasan program layanan hunian layak bagi masyarakat	Perumahan dan Permukiman, Pertanahan,	Perencanaan, Setda, Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Kecamatan, Lingkungan Hidup
		2. Pembangunan dan peningkatan kualitas jalan lingkungan		
		3. Penyusunan perda perumahan dan kawasan permukiman		
		4. Peningkatan kualitas data perumahan dan kawasan permukiman		
		5. Peningkatan dan pemeliharaan perumahan rakyat beserta sarana prasarannya		
		6. Peningkatan kualitas dan kuantitas Kawasan permukiman yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan		
		7. Pengembangan skema pembiayaan kepemilikan perumahan		
		8. Melakukan evaluasi tata ruang untuk mendukung penyelesaian permasalahan administrasi pertanahan masyarakat dan tertib pertanahan		



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029

Tujuan/Sasaran RPJMD	Kondisi Yang Diharapkan Di Akhir RPJMD	Strategi (Critical Success Factor)	Bidang Urusan Utama	Bidang Urusan Pendukung
Tujuan 3. Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi				
S7. Meningkatnya pertumbuhan dan stabilitas ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi meningkat dan inflasi terjaga Indikator : Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi	1. Percepatan dan peningkatan pertumbuhan UMKM dan IKM di sektor prioritas	Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Perindustrian, Pariwisata, Perikanan, Pertanian, Pangan, Penanaman Modal	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Perencanaan, Setda
		2. Modernisasi dan revitalisasi fasilitas, sarana dan prasarana pendukung pengembangan UMKM dan IKM di sektor prioritas		
		3. Peningkatan kapasitas SDM dan penguatan kelembagaan UMKM dan IKM di sektor prioritas		
		4. Penambahan jumlah event pariwisata dan peningkatan kerjasama/ kemitraan dengan masyarakat		
		5. Peningkatan jumlah dan kompetensi tenaga profesional dalam memfasilitasi pengembangan UMKM dan IKM		
		6. Peningkatan kualitas pengelolaan pasar		
		7. Pembentukan perda dan regulasi terkait dalam pengembangan sektor-sektor prioritas		
		8. Peningkatan produksi pertanian dan peternakan		
		9. Pengembangan perikanan budidaya dan tangkap		
		10. Peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan		
		11. Pengembangan peta potensi dan peluang investasi		
		12. Fasilitasi calon investor yang tertarik untuk berinvestasi		
		13. Pelaksanaan operasi pasar, pemantauan, dan pelaporan harga		
		14. Peningkatan pengawasan barang beredar, jasa, dan tertib niaga		
		15. Pengembangan pertanian perkotaan/ urban farming		

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029



Tujuan/Sasaran RPJMD	Kondisi Yang Diharapkan Di Akhir RPJMD	Strategi (Critical Succes Factor)	Bidang Urusan Utama	Bidang Urusan Pendukung
Tujuan 3. Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi				
S8. Meningkatnya stabilitas ketertiban dan ketentraman kota	Indeks ketentraman dan ketertiban terus meningkat Indikator : Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Pemenuhan jumlah dan peningkatan kompetensi SDM Satpol PP	Ketertiban dan Ketentraman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.	Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Kecamatan, Babinsa, Babinkantibmas
		2. Pemenuhan jumlah sarana dan prasarana patroli		
		3. Mengkampanyekan kesadaran hukum dan ketertiban (media sosial, spanduk, radio lokal).		
		4. Meningkatkan penerangan jalan umum yang memadai		
		5. Mengurangi titik rawan kejahatan		
		6. Penataan PKL dan tempat parkir untuk mencegah konflik sosial.		
		7. Meningkatkan Sinergi Satpol PP, Polisi, Linmas, dan Babinsa.		
		8. Meningkatkan layanan aduan 24 jam berbasis aplikasi atau call center.		
		9. Melakukan tindakan tegas atas pelanggaran Perda		
		10. Penertiban bangunan liar, parkir liar, dan pelanggaran izin usaha		
		11. Mengintegrasikan CCTV warga dengan Command Center kota.		
Tujuan 3. Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi				
S9. Menurunnya pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka terus menurun. Indikator : Tingkat Pengangguran Terbuka	1. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan perusahaan dalam perekrutan tenaga kerja lokal	Tenaga Kerja, Perindustrian, Penanaman Modal, Koperasi dan UKM,	Perdagangan, Pemberdayaan Masyarakat
		2. Menjaga kondusivitas iklim investasi		
		3. Penyelenggaraan pameran investasi dan penambahan jumlah job fair		
		4. Penambahan jumlah tenaga instruktur		
		5. Peningkatan keterampilan untuk menghadapi perubahan teknologi dan digitalisasi		
		6. Penguatan kapasitas pusat pelatihan kerja daerah		



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029

Tujuan/Sasaran RPJMD	Kondisi Yang Diharapkan Di Akhir RPJMD	Strategi (Critical Success Factor)	Bidang Urusan Utama	Bidang Urusan Pendukung
		7. Sertifikasi tenaga kerja sesuai dengan standar industri 8. Perlindungan dalam bentuk asuransi kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan kecelakaan kerja 9. Peningkatan dialog antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha untuk menciptakan kebijakan yang berkeadilan 10. Penciptaan lapangan kerja memanfaatkan perkembangan teknologi 11. Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan koperasi 12. Pelatihan keterampilan dan manajemen bisnis bagi pelaku UMKM 13. Pendampingan dan mentoring pelaku UMKM 14. Penjaminan pemerintah agar UMKM lebih mudah mendapatkan kredit usaha 15. Pengembangan marketplace lokal dalam pemasaran produk UMKM		
Tujuan 4. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan				
S10. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai akuntabilitas kinerja terus meningkat Indikator : Nilai SAKIP	1. Peningkatan efisiensi dan efektivitas perencanaan dan anggaran serta pengelolaan manajemen dan administrasi pemerintahan 2. Integrasi penyusunan rencana pembangunan dan peningkatan perencanaan pembangunan berbasis bukti 3. Penguatan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan secara efektif dan efisien 4. Peningkatan pengawasan dan pembinaan sistem pengendalian internal 5. Pengembangan sistem penilaian kinerja	Perencanaan, Setda, Pengawasan, Keuangan daerah, Kepegawaian	Seluruh Perangkat Daerah
Tujuan 4. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan				
S11. Meningkatnya akuntabilitas keuangan pemerintah daerah	Nilai akuntabilitas keuangan terus meningkat dan opini BPK dapat dipertahankan	1. Peningkatan pengawasan dan pembinaan sistem pengendalian internal 2. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah		

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029



Tujuan/Sasaran RPJMD	Kondisi Yang Diharapkan Di Akhir RPJMD	Strategi (Critical Success Factor)	Bidang Urusan Utama	Bidang Urusan Pendukung
	Indikator : Opini BPK	3. Penguatan sistem informasi pengadaan barang/jasa 4. Pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah yang akuntabel dan transparan 5. Percepatan penyelesaian rekomendasi temuan hasil pengawasan APIP dan penyelesaian hasil pemeriksaan eksternal 6. Peningkatan kualitas dan efektivitas penataan peraturan perundang-undangan, penyusunan kebijakan daerah dan advokasi hukum	Keuangan daerah Perencanaan, Pengawasan, Setda.	Seluruh Perangkat Daerah
Tujuan 4. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan				
S12. Meningkatnya kualitas digitalisasi pelayanan publik	Indeks pelayanan publik dan indeks SPBE terus meningkat Indikator : Indeks Pelayanan Publik dan Indeks SPBE	1. Peningkatan kualitas pengelolaan dan layanan informasi dan komunikasi publik 2. Peningkatan cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil 3. Penyajian dan analisis profil kependudukan 4. Pelaksanaan program pengelolaan kecamatan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. 5. Pengembangan layanan berbasis digital 6. Peningkatan manajemen keamanan informasi dan jaringan 7. Peningkatan manajemen keamanan informasi dan jaringan 8. Peningkatan dukungan data statistik dalam proses perencanaan pembangunan 9. Pelayanan dan pemanfaatan arsip autentik	Setda, Komunikasi dan Informatika, Perencanaan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Kecamatan, Statistik	Seluruh Perangkat Daerah



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029

Tujuan/Sasaran RPJMD	Kondisi Yang Diharapkan Di Akhir RPJMD	Strategi (Critical Succes Factor)	Bidang Urusan Utama	Bidang Urusan Pendukung
		10. Pengelolaan data dan informasi kearsipan vital pemerintah dan masyarakat		
Tujuan 5. Terwujudnya lingkungan hidup berkelanjutan dan resiliensi terhadap bencana				
S13. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup IKLH dalam kondisi baik Indikator : Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	1. Peningkatan ketaatan pengelolaan lingkungan yang dilaksanakan oleh kegiatan usaha	Lingkungan hidup	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman, Kecamatan, Perencanaan
		2. Peningkatan keterlibatan dan peran serta masyarakat		
		3. Peningkatan keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup		
		4. Peningkatan pengawasan, pengendalian dan penegakan aturan terkait lingkungan		
Tujuan 5. Terwujudnya lingkungan hidup berkelanjutan dan resiliensi terhadap bencana				
S14. Meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana daerah	Indeks ketahan daerah terus meningkat Indikator : Indeks Ketahanan Daerah	1. Peningkatan kinerja penanggulangan bencana	Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Komunikasi dan Informatika
		2. Pengurangan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan seluruh stakeholders dalam menghadapi bencana		
		3. Pengoptimalan perangkat kebijakan di bidang penanganan kebakaran dan penyelamatan		
		4. Penyusunan peraturan turunan dari perda penanggulangan bencana		
		5. Pemenuhan jumlah dan peningkatan kompetensi SDM kebencanaan		
		6. Pemenuhan sarana dan prasarana kebencanaan		
		7. Penyusunan dokumen rencana kontijensi untuk seluruh ancaman bencana		
		8. Penyediaan Sistem Peringatan Dini (SPD)		

Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD. Arah kebijakan ini akan memberikan



panduan kepada pemerintah daerah agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan namun tetap selaras dengan pengaturan waktu. Penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD.

Di samping itu, arah kebijakan juga dimaksudkan untuk memberikan jawaban atas permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan kewilayahan. Analisis permasalahan dan isu-isu strategis kewilayahan akan menjadi basis utama rumusan arah kebijakan pembangunan kewilayahan untuk memberikan prioritas terkait pemerataan pembangunan dan penciptaan daerah-daerah unggulan. Untuk selanjutnya, fokus kebijakan kewilayahan harus dipedomani bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota termasuk Perangkat Daerah yang terlibat di dalamnya.

Arah kebijakan pembangunan RPJMD Kota Tarakan 2025-2029 dilandasi dari tahapan pembangunan pada RPJPD Kota Tarakan 2025-2045, yaitu **Penguatan Fondasi Modal Dasar Pembangunan Kota Tarakan** yang Fokus pada Penuntasan Pelayanan Dasar (Kesehatan, Pendidikan, Perlindungan Sosial, Budaya dan SDM), Pemanfaatan Infrastruktur dan Sarana Prasarana, Percepatan Pertumbuhan Perekonomian, Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang bertanggungjawab, Konservasi Lingkungan, dan Risiko Bencana, serta Penguatan Tata Kelola Pemerintahan.

Berdasarkan tema pembangunan periode pertama tersebut, maka arah kebijakan pembangunan Kota Tarakan, sebagai berikut:

1. Penguatan Sumber Daya Manusia, difokuskan pada penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan



- perlindungan sosial dan budaya, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif.
2. Upaya pemenuhan Sarana dan Prasarana dasar (air bersih, sanitasi, rumah layak huni, energi) serta infrastruktur penunjang perekonomian. Melalui Pembangunan infrastruktur dan Sarana Prasarana, yang difokuskan pada pemanfaatan infrastruktur dan sarana prasarana dalam rangka peningkatan wilayah potensi ekonomi.
 3. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi, difokuskan pada percepatan pertumbuhan perekonomian industri dan UMKM, peningkatan kapasitas riset inovasi dan digitalisasi, dan peningkatan produktivitas tenaga kerja.
 4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan, difokuskan pada penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas ASN berbasis Merit System, pondasi penataan regulasi, peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Kinerja birokrasi diharapkan menjadi kuat, bersih, adaptif, cepat, dan efektif dan efisien.
 5. Pemantapan Ketahanan Alam dan Lingkungan, difokuskan pada optimalisasi peningkatan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana, meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan; penguatan standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Untuk mencapai target pembangunan tersebut, arah kebijakan pembangunan Kota Tarakan ditajamkan melalui beberapa pendekatan yaitu; penentuan tahapan pembangunan per tahun selama periode 2025-2029, penjabaran aspek fundamental dari setiap Misi untuk diintegrasikan sebagai rekomendasi kebijakan prioritas untuk setiap Tujuan, penelaahan arah kebijakan rekomendasi KLHS, dan perencanaan pengembangan wilayah.

Tahapan pembangunan adalah serangkaian langkah atau fase yang dilakukan dalam suatu proses pembangunan, baik itu pembangunan ekonomi, infrastruktur, maupun sosial dalam rangka memantapkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Tarakan periode 2025-2029. Pentahapan dilaksanakan atas pertimbangan waktu pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang mengakselerasi prioritas pembangunan Kota Tarakan serta mendukung pembangunan nasional. Prioritas pembangunan dalam RPJMD 2025-2029, sesuai dengan tahap pertama RPJPD 2025-2029 yaitu penguatan fondasi modal dasar pembangunan Kota Tarakan. Tahapan pembangunan pertahun tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Tema pembangunan tahun 2026

Pembangunan pada tahun 2026 diselenggarakan dengan arah kebijakan yaitu Peningkatan Daya Saing Daerah yang Didukung oleh Kualitas Sumber Daya Manusia, Ekonomi Inklusif dan Infrastruktur Berkelanjutan Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Responsif.

2. Tema pembangunan tahun 2027

Pembangunan pada tahun 2027 diselenggarakan dengan dengan arah kebijakan yaitu Percepatan pengembangan Kota Cerdas yang Berdaya Saing dan Maju menuju Masyarakat Sejahtera.

3. Tema pembangunan tahun 2028

Pembangunan pada tahun 2028 diselenggarakan dengan dengan arah kebijakan yaitu Pengembangan Kota Cerdas yang Berdaya Saing dan Maju menuju Masyarakat Sejahtera.

4. Tema pembangunan tahun 2029

Pembangunan pada tahun 2029 diselenggarakan dengan dengan arah kebijakan yaitu Pemantapan Kota Cerdas yang Berdaya Saing dan Maju menuju Masyarakat Sejahtera.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029

5. Tema pembangunan tahun 2030

Pembangunan pada tahun 2030 diselenggarakan dengan dengan arah kebijakan yaitu Terwujudnya Kota Cerdas yang Berdaya Saing dan Maju menuju Masyarakat Sejahtera.

Tabel 3.5
Penahapan Pembangunan RPJMD

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Peningkatan Daya Saing Daerah yang Didukung oleh Kualitas Sumber Daya Manusia, Ekonomi Inklusif dan Infrastruktur Berkelanjutan Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Responsif	Percepatan pengembangan Kota Cerdas yang Berdaya Saing dan Maju menuju Masyarakat Sejahtera	Pengembangan Kota Cerdas yang Berdaya Saing dan Maju menuju Masyarakat Sejahtera	Pemantapan Kota Cerdas yang Berdaya Saing dan Maju menuju Masyarakat Sejahtera	Terwujudnya Kota Cerdas yang Berdaya Saing dan Maju menuju Masyarakat Sejahtera

Sistem perwilayahan Kota Tarakan, terbagi berdasarkan hirarki berjenjang dari skala pelayanan regional hingga skala pelayanan lokal. Pusat kota mempunyai skala pelayanan regional dalam wilayah Kota Tarakan, yang harus mampu melayani kebutuhan masyarakat Kota Tarakan dan mendukung kegiatan skala regional pada hirarki di atasnya. Deliniasi untuk penentuan pusat kota berdasarkan dominasi kegiatan. Berdasarkan kondisi eksisting dan hasil analisa, perkembangan Kota Tarakan diarahkan ke bagian Utara Kota Tarakan. Dengan demikian, Kota Tarakan perlu adanya pusat pelayanan kota baru yang ditumbuhkan untuk pemerataan pelayanan dan perkembangan kota. Terdapat 2 Pusat Pelayanan Kota (PPK) Tarakan, yaitu:



- a. Kawasan perdagangan jasa regional di Kecamatan Tarakan Tengah dan Kecamatan Tarakan Timur, sebagai kawasan pelayanan kegiatan perekonomian regional; dan
- b. Kawasan perkantoran di Kecamatan Tarakan Utara, sebagai kawasan pelayanan kegiatan administrasi skala kota.

Untuk Kota Tarakan, pusat kota terdapat di Kecamatan Tarakan Tengah dan Tarakan Timur dengan deliniasi wilayah meliputi :

- a. Kelurahan Selumit Pantai,
- b. Kelurahan Selumit,
- c. Kelurahan Sebengkok,
- d. Kelurahan Gunung Lingkas dan
- e. Kelurahan Lingkas Ujung.

Dominasi kegiatan untuk pusat kota sebagai arahan fungsi utama adalah:

- a. Perdagangan jasa
- b. Industri
- c. Transportasi
- d. RTH

Dengan demikian, kegiatan perdagangan jasa untuk skala regional terkonsentrasi di Kecamatan Tarakan Tengah dan Kecamatan Tarakan Timur dengan fungsi kawasan pelayanan kegiatan perekonomian regional. Pusat kota yang mempunyai skala pelayanan kota yang mampu melayani kebutuhan masyarakat Kota Tarakan. Pusat pelayanan kota ini terdapat di Kecamatan Tarakan Utara dengan deliniasi wilayah meliputi:

- a. Kelurahan Juata Permai
- b. Kelurahan Juata Laut

Dominasi kegiatan dengan arahan fungsi utama adalah:

- a. Perkantoran
- b. Industri
- c. Transportasi
- d. Permukiman

Dengan demikian, kegiatan administrasi skala kota terkonsentrasi di Kecamatan Tarakan Utara dengan fungsi kawasan perkantoran.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029

Strategi sebagai pentahapan pembangunan dan lokus pembangunan kewilayahan, diperkuat dengan arah kebijakan pada setiap misi RPJMD. Arah kebijakan merupakan rincian agenda pembangunan dari setiap misi. Arah kebijakan disusun berbasis pada pemetaan masalah, rumusan strategi dan keselarasan dengan arah kebijakan nasional. Arah kebijakan setiap misi RPJMD sebagai berikut:

Tabel 3.6
Arah Kebijakan Setiap Misi RPJMD Kota Tarakan

No	Misi	Arah Kebijakan	Ket
1	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Gizi untuk Peningkatan SDM	
		Peningkatan Akses Pendidikan Berkualitas dan Merata	
		Pemberdayaan Ekonomi dan Pengurangan Kesenjangan Sosial	
		Mendorong Keterlibatan Perempuan dan Kelompok Rentan	
2	Meningkatkan pemerataan pembangunan dan infrastruktur pelayanan dasar yang handal	Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur	
		Penguatan Infrastruktur Pelayanan Dasar yang Handal	
		Pemeliharaan dan Pengelolaan Infrastruktur yang Berkelanjutan	
		Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan Pengawasan Infrastruktur	
		Pengembangan Infrastruktur yang Ramah Lingkungan	
3	Meningkatkan pembangunan ekonomi melalui dukungan kemudahan berusaha yang berkeadilan dan bertumpu pada sektor jasa, perdagangan, perikanan kelautan, ekonomi kreatif dan ekonomi kerakyatan (UMKM)	Kemudahan Berusaha dan Peningkatan Iklim Usaha	
		Pemberdayaan dan Dukungan untuk UMKM dan Ekonomi Kerakyatan	
		Pengembangan Sektor Jasa dan Perdagangan	
		Pembangunan Sektor Perikanan dan Kelautan	
		Pengembangan Ekonomi Kreatif	



No	Misi	Arah Kebijakan	Ket
		Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja dan Kewirausahaan	
		Pembangunan Infrastruktur untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi	
		Penyuluhan dan Promosi untuk Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah	
4	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif serta menjaga stabilitas ketertiban dan ketentraman kota	Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Tata Kelola Pemerintahan	
		Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Tata Kelola Pemerintahan	
		Peningkatan Responsivitas Terhadap Isu Sosial dan Keamanan	
		Pengelolaan Ketertiban Umum dan Penegakan Hukum	
		Peningkatan Koordinasi Antara Pemerintah Kota dan Pusat	
		Pemantauan, Evaluasi, dan Transparansi Kebijakan	
5	Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tangguh menghadapi bencana	Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan	
		Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dan Polusi	
		Meningkatkan Ketangguhan dan Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana	
		Peningkatan Kemitraan dengan Masyarakat dan Sektor Swasta	
		Penerapan Kebijakan Adaptasi Perubahan Iklim	
		Kebijakan dan Regulasi yang Mendukung Lingkungan Hidup Berkelanjutan	

b. Program-Program Prioritas Daerah pada RPJMD 2025-2029

Program prioritas pembangunan merujuk pada serangkaian kebijakan, proyek, atau kegiatan yang dianggap sangat penting dan mendesak untuk dilaksanakan dalam periode tertentu, guna mencapai



tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Program ini biasanya ditentukan berdasarkan analisis kebutuhan, potensi daerah, dan tantangan yang dihadapi dalam konteks pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Pentingnya program prioritas adalah untuk memastikan bahwa sumber daya yang terbatas, baik itu anggaran, tenaga kerja, maupun waktu, dapat digunakan secara efisien dan efektif. Program ini juga bertujuan untuk memberikan dampak yang maksimal bagi masyarakat dan menciptakan perubahan positif yang signifikan.

Program prioritas pembangunan biasanya berasal dari beberapa sumber utama, yang antara lain meliputi pertama, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) yaitu dokumen perencanaan yang menggambarkan arah kebijakan pembangunan nasional dalam periode lima tahun. Kedua, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBN adalah sumber utama pendanaan bagi program-program pembangunan nasional yang mencakup sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain sedangkan APBD digunakan untuk mendanai program-program prioritas di tingkat daerah yang mencakup pembangunan daerah, peningkatan layanan publik, dan penanggulangan masalah lokal. Ketiga, Kebijakan Pemerintah Pusat atau Daerah. Pemerintah pusat atau daerah sering kali menetapkan kebijakan dan program prioritas berdasarkan situasi terkini, misalnya penanganan pandemi, krisis ekonomi, atau bencana alam. Kebijakan ini kemudian menjadi panduan untuk merumuskan program prioritas pembangunan. Keempat, Hasil Evaluasi dan Pemantauan Pembangunan, dimana Program prioritas dapat ditentukan berdasarkan hasil evaluasi dari program-program sebelumnya. Misalnya, jika ada sektor yang tidak tercapai sesuai target, maka akan diangkat sebagai program prioritas pada periode berikutnya. Kelima, Kebutuhan dan Aspirasi Masyarakat dimana Program prioritas juga bisa didasarkan pada analisis kebutuhan masyarakat, yang dapat diperoleh melalui survei, forum musyawarah, atau pengaduan publik. Program-program ini biasanya menasar masalah

yang dianggap penting oleh masyarakat, seperti infrastruktur, kesehatan, atau pendidikan. Keenam, Sumber Daya Alam dan Potensi Daerah, dimana Keberadaan sumber daya alam atau potensi lokal dapat menentukan program prioritas pembangunan daerah. Misalnya, daerah dengan potensi wisata alam mungkin mengutamakan program pembangunan sektor pariwisata, sementara daerah yang kaya dengan hasil pertanian akan fokus pada program pertanian dan ketahanan pangan.

Program prioritas pembangunan adalah kebijakan atau proyek yang dipilih berdasarkan urgensi, potensi dampak, dan ketersediaan sumber daya. Sumber utama program prioritas berasal dari rencana pembangunan nasional, kebijakan pemerintah, anggaran publik, kebutuhan masyarakat, serta evaluasi hasil-hasil pembangunan sebelumnya. Program-program ini berfungsi untuk mengatasi masalah mendesak dan mewujudkan tujuan pembangunan yang lebih luas dalam jangka pendek maupun panjang.

Program prioritas memiliki sifat lintas sektor/*cross-cutting*, sehingga pelaksanaannya tidak hanya dijalankan oleh satu Perangkat Daerah. Perangkat Daerah yang menjadi penanggungjawab program prioritas memiliki peran sebagai koordinator dan tetap menjaga kolaborasi dengan perangkat daerah atau pemangku kepentingan lain. Program prioritas dirumuskan menggunakan metode cascading mulai dari tujuan, sasaran dan outcome. Dalam rangka membangun sinergi antara pendekatan politik dan teknokratik, program prioritas juga berupaya mengkerangkai program janji politik Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah dengan rumusan kinerja. Rumusan program prioritas RPJMD sebagai berikut:



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029

Tabel 3.7
Program Prioritas RPJMD Kota Tarakan 2025-2029

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
Visi:						
Terwujudnya Tarakan Sebagai Kota Cerdas yang Bertumpu Pada Sektor Jasa, Perdagangan, Perikanan Kelautan, dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Maju Menuju Masyarakat Sejahtera						
Misi 1: Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing						
	Tujuan 1: Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia			Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)		
		Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat		Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)		
			Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan dan minuman	Persentase pengawasan obat dan makanan pada masyarakat dan pelaku usaha yang dilakukan (%)	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	
			Meningkatnya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan Kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau	Cakupan imunisasi bayi lengkap (%)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
				Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ((%))		
				Indeks Pencapaian SPM (%)		
				Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))		
				Persentase Kelurahan Mencapai target STBM (%)		
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase kader kesehatan yang diberdayakan (%)	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kota Tarakan Tahun 2025-2029



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
			Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Fasyankes yang terpenuhi SDM kesehatan sesuai standar (%)	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
		Sasaran 2: Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan		Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)		
				Harapan Lama Sekolah (Tahun)		
			Meningkatnya pelayanan pendidikan	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) (%)	Program Pengelolaan Pendidikan	
				Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) (%)		
			Meningkatnya kualitas satuan pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	Program Pengembangan Kurikulum	
			Meningkatnya kualitas satuan pendidikan	Persentase sekolah yang memiliki ijin operasional (%)	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	
			Meningkatnya layanan perpustakaan	Persentase perpustakaan yang dibina	Program Pembinaan Perpustakaan	
			Meningkatnya pemahaman bahasa, sastra dan pengembangan kemampuan berbahasa	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (Persentase)	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian naskah kuno dan nasional	Persentase Masyarakat yang berperan dalam pelestarian naskah kuno dan nasional	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	
				Rasio siswa per guru PAUD (Indeks)		
			Meratanya kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	Rasio siswa per guru SD/ MI (Indeks)	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	
				Rasio siswa per guru SMP/ MTs (Indeks)		



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
		Sasaran 3: Meningkatnya layanan inklusi sosial dan kesetaraan gender		Indeks pembangunan keluarga (Indeks)		
				Indeks Ketimpangan Gender (IKG) ((%) Indeks)		
			Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga masyarakat yang aktif (%)	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	
			Meningkatnya kualitas dan efektifitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan	Cakupan PUG yang aktif (%)	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan kelurahan	Kategori kelurahan	Program Administrasi Pemerintahan Desa	
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga Berencana (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	
				Persentase masyarakat yang terpapar isi program KKBPK (%)		
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif (%)	Program Perlindungan Khusus Anak	
			Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	Program Perlindungan Perempuan	
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina (%)	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase PUSPAGA yang aktif	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
			Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Persentase pemenuhan indikator KLA	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	
			Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki data gender dan anak (%)	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	
			Terkendalnya pertambahan jumlah penduduk	Persentase keluarga yang terdata (%)	Program Pengendalian Penduduk	
				Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (<i>age specific fertility rate</i> /ASFR 15-19) (kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)		
		Sasaran 4: Menurunnya angka kemiskinan		Angka kemiskinan ekstrem (%)		
				Angka kemiskinan (%)		
			Meningkaatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang meningkat Kompetensinya dalam pelayanan sosial	Program Pemberdayaan Sosial	
			Meningkaatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar serta gelandangan pengemis terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	Program Rehabilitasi Sosial	
			Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	
			Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%)	Program Penanganan Bencana	
Misi 2:						
Meningkatkan pemerataan pembangunan dan infrastruktur pelayanan dasar yang handal						
	Tujuan 2: Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur daerah			Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) (%)		



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
		Sasaran 5: Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar daerah		Indeks Infrastruktur (%)		
			Berkurangnya titik kemacetan	Jumlah titik potensi kemacetan (Titik)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	
			Meningkatnya Kendaraan yang Melaksanakan Wajib Uji	Persentase Kendaraan yang Melaksanakan Wajib Uji (%)		
			Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana perlengkapan jalan	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota (Persentase)		
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase peningkatan layanan air minum melalui jaringan perpipaan (%)	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
			Meningkatnya Kapasitas Layanan Unit Air Baku	Rasio produksi unit air baku terhadap ketersediaan air baku (Rasio)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	
			Meningkatnya kinerja layanan drainase lingkungan	Persentase panjang drainase lingkungan dengan kondisi baik (%)	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	
			Meningkatnya layanan pengendalian banjir	Luas genangan yang tertangani (Hektar)		
			Meningkatnya kinerja pelayanan pengelolaan air limbah bagi masyarakat	Persentase peningkatan rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik (%)	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
			Meningkatnya kinerja penyelenggaraan jalan kota	Persentasi jalan dan jembatan dengan kondisi baik (%)	Program Penyelenggaraan Jalan	
			Meningkatnya pemenuhan fasilitas pengelolaan sampah	Persentase ketersediaan layanan pengolahan sampah (%)	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	
			Meningkatnya pemenuhan sarpras pelabuhan yang memadai	Persentase sarana prasarana pelabuhan dengan kondisi memadai (%)	Program Pengelolaan Pelayaran	

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Tarakan Tahun 2025-2029



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
		Sasaran 6: Meningkatnya layanan hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan		Rumah tangga dengan akses hunian layak terjangkau dan berkelanjutan (%)		
			Meningkatnya kawasan bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan yang sesuai rencana penataan bangunan dan lingkungan (%)	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Kepatuhan Pelaksanaan KKPR (%)	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
			Meningkatnya pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung yang memenuhi standar teknis	Persentase Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung yang memenuhi standar teknis (%)	Program Penataan Bangunan Gedung	
			Meningkatnya Tatakelola Taman Makam Pahlawan	Persentase layanan pengelolaan taman makam pahlawan (%)	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	
			Meningkatnya wilayah permukiman terlayani PSU dasar	Panjang jalan lingkungan yang layak (Meter)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	
				Persentase jalan lingkungan yang layak (%)		
				Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%)		
			Menurunnya Jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani (%)	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	
			Menurunnya Luas Kawasan Kumuh	Persentase Kawasan Kumuh Dibawah 10 Ha Di Kabupaten/Kota Ditangani (%)	Program Kawasan Permukiman	
			Pemenuhan Rumah Bagi Korban Bencana Dan Terdampak Program Pemerintah	Persentase Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Pemerintah Provinsi Memperoleh Program Daerah Yang Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni (%)	Program Pengembangan Perumahan	
				Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni (%)		



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
Misi 3:	Tujuan 3: Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi	Sasaran 7: Meningkatnya pertumbuhan dan stabilitas ekonomi		Rasio Gini (Indeks)		
Meningkatkan pembangunan ekonomi melalui dukungan kemudahan berusaha yang berkeadilan dan bertumpu pada sektor jasa, perdagangan, perikanan kelautan, ekonomi kreatif dan ekonomi kerakyatan (UMKM)				Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)		
				Tingkat Inflasi (%)		
			Meningkatnya aksesibilitas pangan	Persentase wilayah rentan Rawan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	
			Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM menjalin kemitraan	Program Pengembangan Umkm	
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara (%)	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	
				Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan nusantara (%)	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	
			Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase jumlah Cadangan pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	
			Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	
			Meningkatnya kapasitas UMKM	Pertumbuhan wirausaha	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
			Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan mutu keamanan pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	
			Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	
			Meningkatnya kesesuaian UTTP sesuai standar	Persentase penanganan pengaduan konsumen	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
			Meningkatnya aksesibilitas pangan	Persentase kelurahan yang tahan pangan	Penanganan Kerawanan Pangan	
			Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase koperasi aktif	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	
			Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	
			Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan volume usaha koperasi	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
			Meningkatnya kualitas SDM Perkoperasian	Persentase koperasi yang diberikan dukunganfasilitasi pelatihan	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	
			Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	
			Meningkatnya kapasitas UMKM	Rasio Kewirausahaan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkh)	
			Meningkatnya daya saing UMKM	Persentase kemitraan UMKM yang difasilitasi	Program Pengembangan Umkm	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	
			Meningkatnya Pengelolaan Izin Usaha Pertanian	Persentase izin usaha pertanian yang diterbitkn	Program Perizinan Usaha Pertanian	
			Meningkatnya pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
			Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase promosi produk local yang difasilitasi/dilaksanakan	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	
			Meningkatnya Pelaku Usaha yang berorientasi ekspor	volume ekspor	Program Pengembangan Ekspor	
			Meningkatnya kesesuaian UTPP sesuai standar	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTPP) bertanda tera sah yang berlaku	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	
			Meningkatnya Pelayanan Penyuluhan Pertanian	Persentase kelembagaan koperasi tani yang dibentuk dan beroperasi	Program Penyuluhan Pertanian	
			Meningkatnya pemanfaatan lahan pertanian	Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
			Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan	Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	
			Persentase pemasaran produk perikanan	Angka Konsumsi Ikan	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	
			Persentase Peningkatan Produksi perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	
			Persentase Produksi perikanan budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
		Sasaran 8: Meningkatnya stabilitas		Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum (Indeks)		

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kota Tarakan Tahun 2025-2029



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
		ketertiban dan ketentraman kota				
			Meningkatnya deteksi dini konflik sosial	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	
			Meningkatnya ketertiban lembaga politik	Persentase Pendidikan politik pada kader partai politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	
			Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
			Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	Program Penanggulangan Bencana	
			Meningkatnya masyarakat yang tereduksi perda/perkada	Capaian masyarakat yang tereduksi perda/perkada	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	
			Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI	Nilai PIP, Persentase keaktifan pembauran kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	
			Meningkatnya pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase kebijakan bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya Masyarakat yang dilaksanakan	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	
		Sasaran 9: Menurunnya pengangguran		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	Program Promosi Penanaman Modal	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
			Meningkatnya kepatuhan pelaku industri dalam menyampaikan data dan laporan industri melalui SIINAS	Persentase pelaku industri yang menyampaikan data dan laporan industri melalui SIINAS	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	
			Meningkatnya keterampilan/ kompetensi tenaga kerja lokal	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	
			Meningkatnya legalitas perizinan perusahaan industri	Persentase perusahaan industri berizin	Program Pengendalian Ijin Usaha Industri	
			Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang terserap	Program Penempatan Tenaga Kerja	
			Meningkatnya perusahaan yang memiliki dokumen tenaga kerja mikro	Persentase perusahaan yang melaporkan dokumen tenaga kerja mikro	Program Perencanaan Tenaga Kerja	
			Meningkatnya sentra industri	Persentase pertumbuhan sentra industri	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	
			Terciptanya kondisi hubungan kerja yang harmonis	Persentase perusahaan yang menerapkan hak-hak tenaga kerja	Program Hubungan Industrial	
			Terciptanya pengembangan iklim penanaman modal yang kondusif	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
			Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
Misi 4:	Tujuan 4: Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan	Sasaran 10: Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah				
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif serta menjaga stabilitas ketertiban dan ketentraman kota						
				Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)		
				Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)		
				Nilai SAKIP (Nilai)		

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
			Meningkatnya efektivitas evaluasi kinerja	Persentase tindaklanjut evaluasi SAKIP (%)	Program Penyelenggaraan Pengawasan	
			Meningkatnya kompetensi dan profesionalitas APIP	Persentase pelaksanaan PKPT sesuai rencana dan tepat waktu (%)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kualitas SAKIP perangkat daerah	Rata-rata nilai SAKIP perangkat daerah		
			Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja	LHE AKIP yang ditindaklanjuti		
			Meningkatnya layanan penjaminan mutu dan sertifikasi kompetensi	Persentase ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi (%)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			Meningkatnya kualitas Kajian kelibangan	Kebijakan Pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi Pembangunan	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	
			Meningkatnya kualitas monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pada bidang Infrastruktur, Kewilayahan, SDA dan Perekonomian	Persentase keselarasan RKPd dan Renja PD pada bidang Infrastruktur, Kewilayahan, SDA dan Perekonomian	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Meningkatnya Kajian Peraturan Perundang-undangan	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	
			Meningkatnya kualitas pembahasan APBD	Ketepatan penetapan perda APBD Tahun N		
			Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan		
			Meningkatnya Kualitas Persidangan	Persentase rapat-rapat DPRD		
			Meningkatnya Kualitas Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase pelaksanaan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat yang direncanakan dengan yang dilaksanakan		
			Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase keselarasan RPJMD dan RKPd	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
			Selarasnya dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan RPJMD dan RKPd		



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
			Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	Program Kepegawaian Daerah	
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional (Persentase)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian pemerintah kota	Persentase layanan administrasi kepegawaian terselesaikan tepat waktu sesuai SOP (%)	Program kepegawaian daerah	
			Meningkatnya pengembangan Karir ASN	Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya		
			Meningkatnya kualitas pengelolaan sistem informasi kepegawaian	Persentase data ASN yang diupdate (%)		
			Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)		
			Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase produk inovasi daerah yang dimanfaatkan	Program Riset Dan Inovasi Daerah	
			Meningkatnya Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan melalui media komunikasi publik pemerintah dan media massa mitra kerja pemerintah	Persentase Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan melalui media komunikasi publik pemerintah dan media massa mitra kerja pemerintah	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	
			Meningkatnya kualitas monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase keselarasan RKPD dan Renja PD pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Selarasnya dokumen perencanaan pembangunan daerah pada bidang Infrastruktur, Kewilayahan, SDA dan Perekonomian	Persentase keselarasan RKPD dan Renja PD pada bidang Infrastruktur, Kewilayahan, SDA dan Perekonomian	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
			Selarasnya dokumen perencanaan pembangunan pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase keselarasan RKPD dan Renja PD pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia		
			Meningkatnya kinerja layanan pengamanan aset tanah pemerintah daerah	Persentase luas aset tanah Pemerintah Kota yang bersengketa dan diselesaikan melalui mediasi (%)	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	
			Meningkatnya kinerja layanan pengamanan aset tanah pemerintah daerah	Persentase aset tanah pemda yang ditindaklanjuti pengamanannya (%)	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	
			Optimalisasi Pelayanan Penetapan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Persentase Penetapan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Program Penatagunaan Tanah	
			Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal Kelebihan dari Tanah Maksimum dan Tanah Absentee (%)	Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	
				Jumlah bidang tanah yang didistribusi (Bidang Tanah)		
				Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria (Kepala Keluarga)		
		Sasaran 11: Meningkatnya akuntabilitas keuangan pemerintah daerah				
			Meningkatnya efektivitas pemantauan tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan/Pengawasan auditor eksternal	Tindaklanjuti rekomendasi BPK tahun anggaran N-1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	
			Meningkatnya efektivitas pengendalian internal perangkat daerah	Persentase PD yang menerapkan manajemen risiko (%)	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
			Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengawasan dan Quality Assurance (QA) serta pelayanan konsultasi	Survey kepuasan pelaksanaan pengawasan dan QA serta pelayanan konsultasi (angka)	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	
			Meningkatnya efektivitas tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Keuangan APIP	Persentase tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Keuangan APIP oleh PD (%)	Program Penyelenggaraan Pengawasan	
			Persentase laporan BMD OPD yang tertib administrasi	Persentase penambahan nilai asset tetap	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
			Meningkatnya laporan keuangan OPD yang tertib administrasi	Persentase laporan keuangan OPD yang tertib administrasi	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	
			Persentase meningkatnya jumlah pengelolaan penerimaan Pajak	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
		Sasaran 12: Meningkatnya kualitas digitalisasi pelayanan publik		Indeks SPBE (Indeks)		
				Indeks pelayanan publik (%)		
			Meningkatnya komitmen PD dalam pembangunan Zona Integritas	Persentase PD yang berhasil diusulkan ke penilaian ZI Nasional (%)	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	
			Meningkatnya efektivitas pencegahan korupsi	Indeks MCP (<i>Monitoring Center for Prevention</i>) Area Intervensi APIP (Indeks)		
			Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan sekretariatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah dan kepatuhan penerapan kebijakan ketatalaksanaan	Persentase unit pelayanan publik dengan predikat IKM minimal B		
			Meningkatnya layanan kecamatan	Persentase layanan kecamatan terselesaikan tepat waktu sesuai SOP	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	
			Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan (%)	Program Pencatatan Sipil	

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Tarakan Tahun 2025-2029



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase dokumen administrasi kependudukan yang diterbitkan	Program Pendaftaran Penduduk	
			Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Ketersediaan Profil Kependudukan (%)	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	
			Meningkatnya pelayanan perizinan berusaha	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelajaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Program Pelayanan Penanaman Modal	
			Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Perangkat Daerah Yang Memanfaatkan Data Kependudukan (%)	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
			Meningkatnya Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan melalui media komunikasi publik pemerintah dan media massa mitra kerja pemerintah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	
			Persentase pengelolaan Arsip	Tingkat ketersediaan arsip	Program Pengelolaan Arsip	
			Persentase Pengelolaan Kearsipan Sesuai Standar	persentase pengelolaan kearsipan sesuai standar (%)	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	
			Persentase Penggunaan dan Pemanfaatan Arsip	Persentase penggunaan dan pemanfaatan arsip (%)	Program Perizinan Penggunaan Arsip	
Misi 5:						
Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan Tangguh menghadapi bencana						
	Tujuan 5: Terwujudnya lingkungan hidup berkelanjutan dan resiliensi terhadap bencana			Persentase Penurunan Emisi GRK (Persentase)		
				Indeks Risiko Bencana (Indeks)		
		Sasaran 13: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
			Meningkatnya kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Nilai Kampung Iklim (Poin)	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	
			Meningkatnya masyarakat yang mengelola lingkungan hidup	Persentase perusahaan yang mendapat predikat minimal biru dalam penilaian PROPER	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
				Persentase sekolah Adiwiyata		
			Meningkatnya partisipasi kelompok masyarakat peduli lingkungan	persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan yang aktif (%)	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
			Meningkatnya pemenuhan dokumen lingkungan hidup	Persentase dokumen lingkungan hidup yang disusun/ditetapkan sebagai peraturan daerah	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya pengelolaan limbah B3	Persentase limbah B3 yang terkelola	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	
			Meningkatnya pengelolaan sampah berbasis masyarakat	Proporsi Rumah Tangga dengan layanan pengumpulan sampah	Program Pengelolaan Persampahan	
				persentase sampah yang terkelola		
			Meningkatnya ruang terbuka hijau	Persentase peningkatan RTH	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	
			Menurunnya degradasi lahan	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Tarakan Tahun 2025-2029



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
			Optimalnya penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	
			Optimalnya status mutu badan air dan udara kawasan	Indeks pencemaran air sungai	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
				Rata-rata SO2	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
				Rata-rata NO2	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	
		Sasaran 14: Meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana daerah		Indeks Ketahanan Daerah (%)		
			Meningkatnya Pencegahan, Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase kejadian kebakaran yang ditangani	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	
				Capaian penyebaran informasi dan edukasi pencegahan kebakaran		
				Persentase Layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan jiwa (non kebakaran)		
			Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana		
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana		



BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. Program Perangkat Daerah

a. Daftar Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan di Kota Tarakan tahun 2025–2029 didukung dengan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah Kota Tarakan. Rencana program prioritas yang ditetapkan menjadi program prioritas perangkat daerah yang akan dijabarkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029 menjadi kegiatan dan sub kegiatan. Rencana program prioritas perangkat daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2025-2029 dijabarkan dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan urusan pemerintahan, dan unsur pemerintahan umum.

1) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Rencana program prioritas urusan pendidikan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja individu ASN Kota Tarakan dengan memperkuat internal akuntabilitas kinerja dan meningkatkan kualitas layanan perangkat daerah, melalui kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian perangkat daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029

Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

b. Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini diarahkan pada perluasan akses pemerataan dan mutu layanan pendidikan;

c. Program Pengembangan Kurikulum

Program ini diarahkan pada penguatan implementasi kurikulum adaptif berbasis karakter dan pengembangan *soft skill*.

d. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini diarahkan pada identifikasi kebutuhan dan pemerataan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan.

e. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

Program ini diarahkan pada pengawasan, pengendalian, dan pemerataan layanan pendidikan.

f. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra

Program ini diarahkan pada pengendalian penggunaan bahasa daerah dalam pembelajaran di Sekolah. Program ini dilakukan dalam rangka pencapaian indikator kinerja yaitu persentase penggunaan Bahasa Daerah Suku Tidung digunakan disekolah.

2. Kesehatan

Rencana program prioritas urusan kesehatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja individu ASN Kota Tarakan dengan memperkuat internal akuntabilitas kinerja dan meningkatkan kualitas layanan perangkat daerah, melalui kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian perangkat daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa



Penunjang Urusan Pemerintahan daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini diarahkan pada pemetaan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan dalam pemberian layanan prioritas untuk perluasan cakupan kesehatan semesta; peningkatan pemerataan akses pelayanan kesehatan; penguatan implementasi digitalisasi layanan di fasilitas kesehatan primer dan rujukan yang terhubung dengan sistem layanan Kota; peningkatan pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan warga lanjut usia sesuai standar; percepatan perbaikan gizi masyarakat; peningkatan dukungan dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular, tidak menular, serta kesehatan jiwa.

- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini diarahkan pada pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan, dan penguatan implementasi perencanaan kebutuhan dan pemenuhan sumber daya manusia kesehatan.

- d. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Program ini diarahkan pada peningkatan akses, kemandirian dan mutu kefarmasian serta alat kesehatan; serta pemenuhan obat dan bahan habis pakai.

- e. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dalam penanganan permasalahan kesehatan; memperkuat jejaring kemitraan dan peran serta masyarakat dalam upaya penyelenggaraan kesehatan; serta pelaksanaan komunikasi, informasi, edukasi (KIE) tentang perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka promotif preventif.

- f. Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan

Program ini diarahkan untuk pembinaan dan dukungan dalam rangka akreditasi pelayanan kesehatan kepada masyarakat.



3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana program prioritas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja individu ASN Kota Tarakan dengan memperkuat internal akuntabilitas kinerja dan meningkatkan kualitas layanan kesekretariatan DPUPR Kota Tarakan, melalui kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian perangkat daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

b. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dengan meningkatkan kapasitas layanan unit air baku melalui pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan sarana SDA yang menjadi kewenangan Kota, peningkatan bangunan perkuatan tebing untuk pencegahan longsor, penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi prasarana dan sarana sumber daya air (SDA).

c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dengan meningkatkan pemenuhan cakupan pelayanan air minum bagi masyarakat melalui kegiatan pembangunan, perluasan dan optimalisasi serta penyusunan rencana sistem penyediaan air minum (SPAM) Perkotaan.

Program ini juga merupakan nomenklatur program dari salah satu program unggulan Wali Kota, yaitu program nomor 7



program gratis pemasangan sambungan rumah air PDAM.

d. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

Program ini dimaksudkan meningkatkan kepuasan masyarakat melalui kegiatan pengembangan dan pengelolaan sampah melalui pembangunan dan optimalisasi sarana dan prasarana pengelolaan sampah dalam rangka meningkatkan pemenuhan fasilitas pengelolaan sampah untuk mencapai target indikator kinerja yaitu persentase ketersediaan layanan pengolahan sampah.

Program ini juga merupakan nomenklatur program dari salah satu program unggulan Wali Kota, yaitu program nomor 18 optimalisasi pengoperasian TPA Sampah Juata Kerikil dan TPS3R menuju Tarakan zero waste (bebas sampah).

e. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dengan meningkatkan kinerja pelayanan pengelolaan air limbah bagi masyarakat melalui kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik melalui penyediaan prasarana dan sarana tangki septik individual, pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat (SPALD-S), dan penyusunan rencana sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD), serta pembangunan dan pemeliharaan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT). Program ini juga merupakan program yang *tertagging* sebagai program untuk menjawab SPM urusan pekerjaan umum.

f. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Program ini dimaksudkan meningkatkan kepuasan masyarakat dengan mengendalikan banjir dan meningkatkan kinerja layanan drainase lingkungan melalui kegiatan pembangunan dan rehabilitasi sistem drainase perkotaan, optimalisasi sistem drainase lingkungan serta penyusunan rencana kebijakan strategis mengenai sistem drainase perkotaan.



Program ini juga merupakan nomenklatur program dari dua program unggulan Wali Kota, yaitu program nomor 5 program pemberdayaan rukun tetangga melalui dana alokasi khusus 50-200 juta per-RT pertahun untuk perbaikan infrastruktur drainase dan program nomor 11 program penuntasan masalah banjir.

g. Program Penataan Bangunan Gedung

Program ini dimaksudkan untuk mendukung dalam peningkatan layanan hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan dengan meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan gedung yang memenuhi standar teknis termasuk memberikan perizinan dalam membangun bagi masyarakat, melalui kegiatan pembangunan dan pemeliharaan bangunan strategis daerah dan kegiatan penyelenggaraan penerbitan izin persetujuan pembangunan bagi masyarakat.

Pembangunan dan pemeliharaan bangunan strategis daerah melalui pembangunan dan pemeliharaan kantor-kantor pelayanan publik yang dalam 5 tahun ini difokuskan pada wilayah pusat pemerintah baru di Kelurahan Juata Laut.

Program ini juga merupakan nomenklatur program dari salah satu program unggulan Wali Kota, yaitu program nomor 20 pembangunan kawasan terpadu pusat pemerintahan Kota Tarakan.

h. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Program ini dimaksudkan untuk mendukung dalam peningkatan layanan hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan dengan menyelenggarakan kawasan bangunan dan lingkungan yang tertata, dalam artian memiliki dokumen perencanaan tata bangunan dan lingkungan yang adaptif, penataan yang dilakukan sesuai dengan perencanaannya, serta terselenggaranya pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan.

i. Program Penyelenggaraan Jalan

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dengan meningkatkan kualitas penyelenggaraan jalan



kota yang meliputi kegiatan pengelolaan leger jalan, survey kondisi jalan/jembatan, pembangunan jalan, pembangunan jembatan, rekonstruksi jalan, pemeliharaan berkala jalan, rehabilitasi jembatan, pemeliharaan rutin jalan, dan penyusunan rencana kebijakan strategi pengembangan jaringan jalan.

Program ini juga merupakan nomenklatur program dari salah satu program unggulan Wali Kota, yaitu program nomor 12 program kuantitas dan kualitas infrastruktur jalan kota dan jembatan.

j. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas layanan infrastruktur perkotaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dengan meningkatkan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi, melalui kegiatan penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi, penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota, dan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

k. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program ini dimaksudkan untuk mendukung dalam peningkatan layanan hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan dengan meningkatkan pembangunan yang sesuai rencana tata ruang melalui kegiatan penetapan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana rinci tata ruang (RRTR) kabupaten/kota, kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah kabupaten/kota, kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota, serta koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rencana program prioritas urusan perumahan dan kawasan permukiman yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja individu ASN Kota Tarakan dengan memperkuat internal akuntabilitas kinerja dan meningkatkan kualitas layanan kesekretariatan DPRKPP Kota Tarakan, melalui kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian perangkat daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

b. Program Pengembangan Perumahan

Program ini dimaksudkan untuk mendukung dalam peningkatan layanan hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan dengan pemenuhan mutu pelayanan bagi korban bencana dan terdampak pemerintah, melalui kegiatan pendataan rumah masyarakat yang lokasinya merupakan area rawan bencana dan area yang bisa digunakan untuk melakukan relokasi korban bencana maupun yang terdampak program pemerintah. Selain itu, juga melalui kegiatan rehabilitasi rumah bagi korban bencana, fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota, dan kegiatan operasional dan pemeliharaan rumah susun yang merupakan aset pemerintah kabupaten/kota. Program ini juga merupakan program yang tertagging sebagai program untuk menjawab SPM urusan perumahan permukiman.

Kegiatan rehabilitasi dan fasilitasi korban rawan bencana dan relokasi program pemerintah diarahkan dengan upaya pemberian bantuan sebagai rumah tidak layak huni bagi korban bencana yang sesuai persyaratan, juga dengan memberikan bantuan subsidi sewa bagi masyarakat yang rumah tinggalnya terdampak



program relokasi pemerintah.

c. Program Kawasan Permukiman

Program ini dimaksudkan untuk mendukung dalam peningkatan layanan hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan dengan menurunkan luas kawasan kumuh, melalui kegiatan penyusunan dokumen kebijakan tentang PKP, survei lokasi kumuh, perbaikan rumah tidak layak huni, dan pelaksanaan pemugaran kawasan permukiman kumuh.

Program ini juga merupakan nomenklatur program dari salah satu program unggulan Wali Kota, yaitu program nomor 06 program pembangunan perumahan untuk masyarakat, melalui kebijakan berpenghasilan rendah (MBR) tanpa uang muka (DP 0%) atau bantuan perbaikan rumah tidak layak huni.

d. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Program ini dimaksudkan untuk mendukung dalam peningkatan layanan hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan dengan menurunkan jumlah unit rumah tidak layak huni, melalui kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni di luar kawasan permukiman kumuh yang ditargetkan 200 unit pertahun, dan pembangunan rumah baru layak huni di luar kawasan permukiman kumuh yang ditargetkan 9 unit pertahun. Kegiatan pembangunan rumah baru layak huni ini merupakan kegiatan untuk mengakomodir hasil rakortekrenbang provinsi dan program prioritas nasional serta harus mempertimbangkan kondisi keuangan daerah. Kedua kegiatan ini bertujuan untuk mencegah bertumbuhnya kumuh baru.

e. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Program ini dimaksudkan untuk mendukung dalam peningkatan layanan hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan dengan meningkatkan wilayah permukiman yang terlayani PSU dasar, melalui kegiatan perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum



di perumahan, dan juga verifikasi dan penyerahan PSU perumahan dari pengembang. Fokus utama dari kegiatan ini adalah rehabilitasi jalan lingkungan dan pemeliharaan makam yang menjadi bagian dari PSU permukiman.

Program ini juga merupakan nomenklatur program dari salah satu program unggulan Wali Kota, yaitu program nomor 05 Program pemberdayaan rukun tetangga melalui dana alokasi khusus 50-200 juta perRT pertahun untuk perbaikan infrastruktur berupa jalan lingkungan.

5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Rencana program prioritas urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja individu ASN Kota Tarakan dengan memperkuat internal akuntabilitas kinerja dan meningkatkan kualitas layanan perangkat daerah, melalui kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian perangkat daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- b. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas penegakan produk hukum daerah, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta meningkatkan pembinaan masyarakat dan satuan tugas perlindungan masyarakat (satgas linmas).

- c. Program Penanggulangan Bencana

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas masyarakat di daerah rawan bencana melalui kelurahan tangguh



bencana, pemasangan sistem peringatan dini (*early warning system*/EWS) di daerah rawan bencana, satuan pendidikan aman bencana (SPAB), unit layanan inklusi disabilitas, penyusunan kajian risiko bencana (KRB) dan rencana penanggulangan bencana (RPB), penyusunan rencana kontijensi (renkon); evakuasi dan pemenuhan logistik penyelamatan korban bencana; aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana; penghitungan kajian kebutuhan pasca bencana, serta rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (R3P).

d. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program ini diarahkan pada fasilitasi penyediaan dan pemutakhiran informasi daerah rawan kebakaran dan peta daerah rawan kebakaran dan upaya pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran.

6. Sosial

Rencana program prioritas urusan sosial yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja individu ASN Kota Tarakan dengan memperkuat internal akuntabilitas kinerja dan meningkatkan kualitas layanan perangkat daerah, melalui kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian perangkat daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.



b. Program Pemberdayaan Sosial

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas potensi sosial kesejahteraan sosial (PSKS), koordinasi/sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah, serta pengumpulan uang atau barang dalam Kota.

c. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Program ini diarahkan pada koordinasi dan fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah Kota untuk dipulangkan ke kelurahan asal.

d. Program Rehabilitasi Sosial

Program ini diarahkan pada rehabilitasi sosial dasar/pemenuhan kebutuhan dasar dalam panti untuk penyandang disabilitas telantar, anak telantar, warga lanjut usia (lansia) telantar, gelandangan dan pengemis, serta fasilitasi rujukan penanganan HIV/AIDS secara berjenjang.

e. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini diarahkan pada fasilitasi pengangkatan anak antar-warga negara Indonesia (WNI) dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal serta penyaluran bantuan sosial dan bantuan kelompok usaha bersama.

f. Program Penanganan Bencana

Program ini diarahkan pada penyediaan logistik pada masa tanggap darurat bagi korban bencana alam/sosial (pengungsi), penyediaan tempat penampungan, penanganan khusus bagi kelompok rentan, serta layanan psikososial.

g. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini diarahkan pada penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial, serta pemeliharaan dan pengamanan taman makam pahlawan.



2) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Rencana program prioritas urusan tenaga kerja yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja individu ASN Kota Tarakan dengan memperkuat internal akuntabilitas kinerja dan meningkatkan kualitas layanan perangkat daerah, melalui kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian perangkat daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

b. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada penyusunan rencana tenaga kerja, termasuk memfasilitasi kota dalam penyusunan rencana tenaga kerja.

c. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada pelaksanaan latihan kerja berdasarkan klaster kompetensi, seperti pelatihan dan sertifikasi di bidang industri, pelatihan kerja di bidang pertanian, pelatihan *housekeeping*, *tour guide*, *waiters*, barista, pelatihan SSW (*specified skilled worker*), pemagangan dalam dan luar negeri, dan konsultasi produktivitas pada perusahaan menengah.

d. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada pengelolaan informasi pasar kerja melalui bursa kerja, pelayanan berupa orientasi pra



pemberangkatan calon tenaga kerja; penyebarluasan informasi peluang, mekanisme, dan prosedur kerja; *job canvassing*; pemberdayaan tenaga kerja mandiri, perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) baik pra maupun purna penempatan di daerah, dan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA, dan lokasi kerja dalam satu daerah Kota.

e. Program Hubungan Industrial

Program ini diarahkan pada pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di satu daerah Kota melalui pembinaan pembentukan lembaga kerja sama (LKS) bipartit, peningkatan kapasitas serikat pekerja/serikat buruh, pembinaan kelembagaan hubungan industrial, serta koordinasi dan konsolidasi hubungan industrial; penetapan upah minimum Kota (UMK), serta pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana program prioritas urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja individu ASN Kota Tarakan dengan memperkuat internal akuntabilitas kinerja dan meningkatkan kualitas layanan perangkat daerah, melalui kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian perangkat daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan



Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

b. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini diarahkan pada pelebagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan Kota dan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kota.

c. Program Perlindungan Perempuan

Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Kota serta penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan.

d. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program ini diarahkan pada advokasi kebijakan dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga.

e. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Program ini diarahkan pada pengumpulan, pengolahan analisis, dan penyajian data gender dan anak.

f. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program ini diarahkan pada pelebagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah dan dunia usaha serta penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak.

g. Program Perlindungan Khusus Anak

Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Kota serta penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi anak korban kekerasan.



3. Pangan

Rencana program prioritas urusan pangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja individu ASN Kota Tarakan dengan memperkuat internal akuntabilitas kinerja dan meningkatkan kualitas layanan perangkat daerah, melalui kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian perangkat daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan pangan lokal berbasis umbi-umbian dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA) serta pelaksanaan pemantauan harga dan ketersediaan pangan, stabilisasi harga pangan, bantuan distribusi pangan.

c. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program ini diarahkan pada kegiatan penanganan kerawanan pangan dengan penanganan Kelurahan *stunting* dan pengembangan Kelurahan mandiri pangan melalui fasilitasi usaha produktif di lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan.



d. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program ini diarahkan pada kegiatan sertifikasi keamanan pangan, pembinaan *higiene* sanitasi, serta penyediaan dan kalibrasi alat uji keamanan mutu pangan.

4. Pertanahan

Rencana program prioritas urusan pertanahan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan dengan meningkatkan kinerja layanan pengamanan aset tanah pemerintah daerah, melalui kegiatan mediasi penyelesaian kasus pertanahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota. Fokus utama kegiatan mediasi ini adalah koordinasi penanganan kasus tanah dan inventarisasi kasus pertanahan pemerintah dengan masyarakat. Program ini digunakan untuk menjawab salah satu indikator kunci urusan pertanahan yaitu terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertipikat yang dilakukan melalui mediasi. Program ini juga merupakan nomenklatur program dari salah satu program unggulan Wali Kota, yaitu program nomor 13 program penuntasan masalah pertanahan.

b. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan dengan meningkatkan kinerja layanan pengamanan aset tanah pemerintah daerah, melalui kegiatan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Kegiatan ini berfokus pada koordinasi, santunan tanah dan ganti rugi tanah, serta yang paling utama adalah pengamanan tanah.

Program ini juga merupakan nomenklatur program dari salah satu program unggulan Wali Kota, yaitu program nomor 13



program penuntasan masalah pertanahan.

- c. Program Redistribusi Tanah dan ganti Rugi Tanah Kelebihan Maksimum dan tanah Absentee

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan aset tanah pemerintah yang berkepastian hukum dengan mewujudkan pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah, melalui koordinasi dan sinkronisasi penataan akses dalam pemanfaatan redistribusi tanah dalam 1 (satu) kabupaten/kota, serta koordinasi dalam rangka penataan aset reforma agraria.

- d. Program Penatagunaan Tanah

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan dengan meningkatkan kinerja layanan pengamanan aset tanah pemerintah daerah, melalui kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan penyelenggaraan konsolidasi tanah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. Fokus utama kegiatan koordinasi ini adalah koordinasi permohonan penunjukan lokasi (SPL) dan penerbitan dokumen surat keterangan penguasaan fisik bidang tanah (SKPFBT).

Program ini juga merupakan nomenklatur program dari salah satu program unggulan Wali Kota, yaitu program nomor 13 program penuntasan masalah pertanahan.

5. Lingkungan Hidup

Rencana program prioritas urusan lingkungan hidup yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja individu ASN Kota Tarakan dengan memperkuat internal akuntabilitas kinerja dan meningkatkan kualitas layanan perangkat daerah, melalui kegiatan Perencanaan,



Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian perangkat daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

b. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup seperti penyusunan dokumen indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH), dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup (DIKPLHD), serta fasilitasi dan validasi kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kota.

c. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Program ini diarahkan pada pengendalian dan pencemaran kualitas air dan udara melalui peningkatan pemantauan terhadap badan air dan kualitas udara, pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dalam rangka penguatan sinergi implementasi pembangunan rendah karbon dan peningkatan upaya adaptasi perubahan iklim di lokasi super prioritas kerentanan iklim.

d. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Program ini diarahkan pada pengelolaan keanekaragaman hayati melalui penanganan ruang terbuka hijau/RTH.

e. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

Program ini diarahkan pada pembinaan ke pelaku usaha/kegiatan terkait Pengelolaan limbah B3 dan sosialisasi pengelolaan limbah B3 bagi pelaku usaha dan aparat pemerintah.



- f. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diterbitkan melalui peningkatan pengawasan terhadap sumber pencemar air dan udara, serta fasilitasi penilaian / pemeriksaan dokumen lingkungan (analisis mengenai dampak lingkungan /AMDAL, upaya pengelolaan lingkungan-upaya pemantauan lingkungan/UKL-UPL, dokumen evaluasi lingkungan hidup / DELH, dokumen pengelolaan lingkungan hidup/DPLH, dan dokumen lingkungan lainnya).

- g. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH

Program ini diarahkan pada penyusunan dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak.

- h. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program ini diarahkan pada peningkatan edukasi masyarakat tentang pengelolaan lingkungan serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

- i. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
- Program ini diarahkan pada kegiatan pemberian penghargaan kepada masyarakat peduli lingkungan dengan indikator kinerja yaitu Persentase kenaikan Penghargaan Lingkungan Hidup yang diberikan untuk masyarakat.



- j. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
Program ini diarahkan pada penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).
- k. Program Pengelolaan Persampahan
Program ini diarahkan pada penyediaan prasarana dan sarana dan pengelolaan persampahan antara lain tempat pembuangan sampah terpadu (TPST).

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rencana program prioritas urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja individu ASN Kota Tarakan dengan memperkuat internal akuntabilitas kinerja dan meningkatkan kualitas layanan perangkat daerah, melalui kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian perangkat daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

b. Program Pendaftaran Penduduk

Program ini diarahkan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kota dalam koordinasi, bimbingan, supervisi, konsultasi dan pelaksanaan pendaftaran penduduk melalui bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparatur pendaftaran penduduk, rapat koordinasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (admindukcapil), sosialisasi kebijakan admindukcapil,



penyediaan portal pelayanan *online* admindukcapil dalam Kota, serta monitor ketersediaan blanko KTP-el di Kota.

c. Program Pencatatan Sipil

Program ini diarahkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kota dalam koordinasi, bimbingan, supervisi, dan konsultasi serta pelaksanaan pencatatan sipil di Kota antara lain melalui bimtek aparatur pencatatan sipil, rapat koordinasi pencatatan sipil, dan sosialisasi kebijakan pencatatan sipil.

d. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program ini diarahkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kota dalam koordinasi, pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota, dan penyajian data kependudukan berskala Kota melalui peningkatan aparatur dalam pengelolaan informasi administrasi kependudukan, peningkatan kualitas pengelolaan informasi administrasi kependudukan, peningkatan kualitas pelayanan adminduk dan pemanfaatan data, promosi pemanfaatan data kependudukan dan dukungan teknis kerusakan *server* di Kota.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

Rencana program prioritas urusan pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penataan Kelurahan

Program ini dilaksanakan dalam upaya mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.

b. Program Peningkatan Kerjasama Kelurahan

Program ini diarahkan pada inventarisasi data kerja sama Kelurahan, inventarisasi data kawasan perKelurahan, fasilitasi kerja sama antarKelurahan melalui fasilitasi kerja sama Kelurahan dan pengembangan kawasan perKelurahan, serta fasilitasi kerja sama antarkawasan perKelurahan di dalam Kota.



c. Program Administrasi Pemerintahan Kelurahan

Program ini diarahkan pada peningkatan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan melalui penguatan manajemen pemerintahan Kelurahan, peningkatan kapasitas aparatur dan lembaga Kelurahan, fasilitasi pembinaan pengelolaan keuangan dan aset Kelurahan, fasilitasi bantuan keuangan kepada pemerintah Kelurahan, fasilitasi penetapan batas Kelurahan, melakukan pembinaan pelaksanaan pemilihan kepala Kelurahan (pilkades) serentak, monitoring perkembangan Kelurahan, fasilitasi penyusunan produk hukum Kelurahan, serta fasilitasi penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.

d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini diarahkan pada upaya mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kelurahan, penguatan lembaga kemasyarakatan, penguatan sinergi peran pendamping masyarakat antar sektor, serta pengembangan badan usaha milik Kelurahan (BUM-Des) dan penguatan lembaga ekonomi masyarakat di Kelurahan.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rencana program prioritas urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengendalian Penduduk

Program ini diarahkan pada pemaduan dan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk serta pemetaan perkiraan pengendalian penduduk.

b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program ini diarahkan pada pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan dan peningkatan peran serta



organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan layanan dan pembinaan kepesertaan KB.

c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program ini diarahkan pada pengelolaan pelaksanaan program pembangunan keluarga serta pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi.

9. Perhubungan

Rencana program prioritas urusan perhubungan yang akan dilaksanakan adalah

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja individu ASN Kota Tarakan dengan memperkuat internal akuntabilitas kinerja dan meningkatkan kualitas layanan kesekretariatan DISHUB Kota Tarakan, melalui kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian perangkat daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

b. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dengan mengurangi titik kemacetan, meningkatkan kendaraan yang melaksanakan wajib uji dan meningkatkan pemenuhan sarana prasarana perlengkapan jalan. Kegiatan yang dilakukan untuk menjawab maksud dari program ini adalah mengatasi kemacetan di Kota Tarakan, menyediakan prasarana perlengkapan jalan yang layak, menyediakan fasilitas pendukung sarana jalan yang layak,



melaksanakan pengelolaan terminal penumpang kewenangan Kota Tarakan, menyelenggarakan koordinasi penertiban Parkir, melaksanakan wajib uji di Kota Tarakan, dan menyelenggarakan pelayanan angkutan umum atau menyediakan angkutan umum yang berizin.

c. Program Pengelolaan Pelayaran

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dengan meningkatkan pemenuhan sarana prasarana pelabuhan yang memadai, melalui kegiatan pemenuhan fasilitas pelayanan angkutan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan serta penyusunan dan penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau.

10. Komunikasi dan Informatika

Rencana program prioritas urusan komunikasi dan informatika yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja individu ASN Kota Tarakan dengan memperkuat internal akuntabilitas kinerja dan meningkatkan kualitas layanan perangkat daerah, melalui kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian perangkat daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

b. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program ini diarahkan pada pemenuhan kebutuhan akan layanan informasi dan komunikasi baik terutama antar



perangkat daerah melalui layanan jaringan intra, layanan pengaduan, dan layanan *data center*.

c. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program ini diarahkan pada upaya sinergi dan integrasi aplikasi seperti melalui pemakaian aplikasi berbagi pakai dan bimbingan pengembangan aplikasi yang terpadu untuk mendukung perwujudan *smart province*.

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Rencana program prioritas urusan koperasi, usaha kecil dan menengah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja individu ASN Kota Tarakan dengan memperkuat internal akuntabilitas kinerja dan meningkatkan kualitas layanan perangkat daerah, melalui kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian perangkat daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

b. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

Program ini diarahkan pada ijin usaha simpan pinjam yang terfasilitasi.

c. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas pengurus/pengelola koperasi dalam hal tata kelola dan akuntabilitas baik koperasi simpan pinjam maupun koperasi sektor riil, serta pemeriksaan dan pengawasan koperasi dalam rangka peningkatan kepatuhan koperasi dan kualitas



pengelolaan koperasi dalam aspek kesehatan koperasi bagi koperasi simpan pinjam serta unit simpan pinjam di Kota.

d. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program ini diarahkan pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian pengurus/pengelola koperasi melalui pelatihan teknis, kompetensi, manajerial, dan berjenjang.

e. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas kelembagaan, perluasan akses pembiayaan, penguatan faktor produksi, serta pengembangan jaringan pemasaran dan kerjasama antar koperasi dalam rangka peningkatan daya saing dan produktivitas koperasi.

f. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas usaha mikro kecil melalui layanan pendampingan usaha, kemitraan usaha, sertifikasi produk dan legalitas usaha, peningkatan literasi keuangan dalam perluasan akses pembiayaan serta penumbuhan jiwa wirausaha.

g. Program Pengembangan UMKM

Program ini diarahkan pada penguatan kapasitas produksi melalui penerapan sistem manajemen modern, peningkatan kualitas dan kapasitas produksi, peningkatan partisipasi UMKM dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta pengembangan akses pemasaran bagi produk-produk unggulan daerah lewat berbagai promosi dan pameran.

12. Penanaman Modal

Rencana program prioritas urusan penanaman modal yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas



kinerja individu ASN Kota Tarakan dengan memperkuat internal akuntabilitas kinerja dan meningkatkan kualitas layanan perangkat daerah, melalui kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian perangkat daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

b. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan kebijakan penanaman modal, penyusunan peta potensi dan peluang usaha yang berkualitas, dan dukungan kemudahan dan fasilitas untuk kemudahan berusaha.

c. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan promosi peluang dan potensi di Kota dengan dukungan strategi promosi yang menyesuaikan perkembangan dunia usaha, pengawalan kepeminatan berusaha hingga terjadi realisasi penanaman modal, dan memfasilitasi kemitraan antara pengusaha besar dan UMKM.

d. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu, pemantauan pemenuhan komitmen perizinan, fasilitasi penyelesaian pengaduan, peningkatan kapasitas SDM serta prasarana dan sarana pelayanan.

e. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan melakukan koordinasi dan sinkronisasi, pemantauan, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal, serta fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal.



- f. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada pengembangan aplikasi sistem informasi, pengelolaan data dan informasi, serta publikasi data dan informasi penanaman modal.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Rencana program prioritas urusan kepemudaan dan olahraga yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, diarahkan pada peningkatan kapasitas daya saing kepemudaan.
- b. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan, diarahkan pada peningkatan daya saing olahraga.

14. Statistik

Rencana program prioritas urusan statistik yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, yang diarahkan pada perwujudan *big data* melalui penerapan portal data menuju layanan data terbuka.

15. Persandian

Rencana program prioritas urusan persandian yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi, yang diarahkan pada ketangguhan layanan keamanan informasi pemerintah daerah melalui asesmen aplikasi, digital forensik, pemantapan kinerja tim *computer security response team* (CSRT), dan layanan *penetration testing* sertifikasi elektronik, kontra pengindraan, dan *jamming*.

16. Kebudayaan

Rencana program prioritas urusan kebudayaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas



kinerja individu ASN Kota Tarakan dengan memperkuat internal akuntabilitas kinerja dan meningkatkan kualitas layanan perangkat daerah, melalui kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian perangkat daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

b. Program Pengembangan Kebudayaan

Program ini diarahkan pada pengembangan kebudayaan melalui pelestarian seni, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan (OPK).

c. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, lembaga, serta organisasi kebudayaan dalam rangka pengembangan ekspresi budaya.

d. Program Pembinaan Sejarah, diarahkan pada pelestarian sejarah lokal.

e. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Program ini diarahkan pada peningkatan perlindungan, pengelolaan dan pemanfaatan cagar budaya.

f. Program Pengelolaan Permuseuman diarahkan pada peningkatan kualitas pengelolaan permuseuman.

17. Perpustakaan

Rencana program prioritas urusan perpustakaan yang akan dilaksanakan adalah Program Pembinaan Perpustakaan. Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas layanan perpustakaan kewenangan Kota sesuai standar nasional perpustakaan (SNP), peningkatan partisipasi satuan pendidikan menengah dan khusus serta masyarakat dalam pembudayaan gemar membaca, serta peningkatan kualitas layanan perpustakaan umum Kota.



18. Kearsipan

Rencana program prioritas urusan kearsipan yang akan dilaksanakan adalah Program Pengelolaan Arsip. Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan lembaga kearsipan daerah (LKD) Kota dan perangkat daerah.

3) Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Rencana program prioritas urusan kelautan dan perikanan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja individu ASN Kota Tarakan dengan memperkuat internal akuntabilitas kinerja dan meningkatkan kualitas layanan perangkat daerah, melalui kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian perangkat daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

b. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi sarana penangkapan ikan ramah lingkungan dan teknologi penangkapan ikan; rehabilitasi/pembangunan fasilitas pokok atau penunjang atau fungsional pelabuhan perikanan pantai; koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan sarana dan prasarana perikanan dan kenelayanan, inisiasi korporasi pelaku usaha perikanan, fasilitasi pemberdayaan usaha nelayan; peningkatan kapasitas nelayan dalam penanganan



ikan di atas kapal, asuransi nelayan, dan fasilitasi perizinan kapal perikanan.

c. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi prasarana dan sarana budi daya ikan, pendampingan sertifikasi CPIB (cara pembenihan ikan yang baik) dan CPPIB (cara pembuatan pakan ikan yang baik), penebaran ikan di perairan umum, rehabilitasi prasarana dan sarana loka budi daya; dan penanganan hama penyakit ikan.

d. Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Program ini diarahkan pada kegiatan operasi pengawasan penangkapan ikan, usaha budi daya perikanan, pelaku usaha pengolahan; dan pemberian stimulan usaha ekonomi bagi kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas).

e. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan peningkatan angka konsumsi ikan di Kota melalui kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan (gemarikan) kerja sama dengan *stakeholders*; pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran dengan pendampingan rekomendasi SKP (sertifikat kelayakan pengolahan), rekomendasi SNI (standar nasional Indonesia), dan sertifikat hasil uji (CAT/*certificate of analysis*); diversifikasi produk hasil kelautan dan perikanan; penguatan promosi produk hasil kelautan dan perikanan melalui jejaring pemasaran dan fasilitasi *e-commerce*.

2. Pariwisata

Rencana program prioritas urusan pariwisata yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini diarahkan pada kegiatan penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri, fasilitasi kegiatan pemasaran baik dalam dan



luar negeri, penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata baik dalam dan luar negeri, pengembangan daya Tarik wisata unggulan, penetapan kawasan strategis pariwisata Kota, perencanaan kawasan strategis pariwisata Kota, pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kota, pengembangan kawasan strategis pariwisata Kota, pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi prasarana dan sarana dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kota, pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kota, penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kota, penerbitan tanda usaha pariwisata dalam Kota, pengelolaan investasi pariwisata, serta pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata.

b. Program Pemasaran Pariwisata

Program ini diarahkan pada kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi, dan kawasan strategis Kota melalui penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata Kota baik dalam dan luar negeri antara lain dilakukan melalui fasilitasi *event* pariwisata baik dalam dan luar negeri bagi industri pariwisata Kota, penguatan promosi melalui media luar ruang, media digital, media elektronik, dan media cetak baik dalam dan luar negeri.

c. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjut melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata (kelompok sadar wisata atau pokdarwis, sadar wisata dan sapta pesona, kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif atau parekraf, temu mitra parekraf, temu bisnis pelaku ekonomi kreatif atau ekraf), pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif melalui



pelatihan/bimbingan teknis atau bimtek peningkatan kapasitas sumber daya manusia ekonomi kreatif, serta fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pelaku ekonomi kreatif.

3. Pertanian

Rencana program prioritas urusan pertanian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi produk pertanian, pembentukan korporasi, asuransi petani, pembentukan *food estate*, optimalisasi fungsi Kartu Tani sebagai *database* petani dan lahan, peningkatan ekonomi petani gurem dan buruh tani melalui pemanfaatan lahan bawah tegakan, revitalisasi BPP dan TPP, penyediaan alat mesin pertanian atau alsintan yang mendukung efisiensi usaha tani, dan peningkatan kapasitas *startup* wirausaha pertanian, peningkatan produksi ternak berkualitas, fasilitasi cara produksi pakan yang baik (CPPB), fasilitasi *good breeding practices* (GBP), dan fasilitasi *good farming practices* (GFP).

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi, dan pendampingan petani, pemberian stimulan ternak untuk penanggulangan kemiskinan, fasilitasi alat dan mesin pengolahan hasil produk ternak, dan fasilitasi inovasi peternakan.

c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis (PHMS), pengawasan obat hewan dan keamanan produk hewan, serta fasilitasi nomor kontrol veteriner (NKV).

d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian organisme pengganggu tanaman/OPT tanaman pangan, perkebunan,



dan hortikultura; pengawasan mutu, penyediaan, dan peredaran benih tanaman melalui perbanyakan benih padi, serta perbanyakan/pengembangan benih buah-buahan dan sayuran.

e. Program Penyuluhan Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan pendampingan dan penyuluhan kepada petani, peningkatan kapasitas kelompok dan pengembangan kemitraan usaha, serta peningkatan sumber daya manusia atau SDM penyuluh, pembentukan dan penguatan kelembagaan korporasi peternak, peningkatan kapasitas SDM peternak melalui sekolah usaha peternakan rakyat (*supra*).

4. Perdagangan

Rencana program prioritas urusan perdagangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Program ini diarahkan pada Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalaya, Penerbitan Tanda Daftar Gudang, fasilitasi Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri, dan Pembinaan Perizinan Usaha Perdagangan.

b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program ini diarahkan pada pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi Kota serta bimbingan teknik peningkatan kompetensi pelaku pasar rakyat, monitoring dan verifikasi pasar rakyat, sertifikasi SNI pasar rakyat, perluasan pemasaran produk UKM melalui *e-commerce*, fasilitasi pasar lelang komoditas agro secara *online* dan terpadu di daerah, dan kemitraan pemasaran komoditas agro, serta fasilitasi sertifikasi gudang sistem resi gudang (SRG).



- c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Program ini diarahkan pada pengendalian harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam Kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan melalui penyediaan informasi harga bahan kebutuhan pokok dan barang pokok penting, fasilitasi sembako murah, dan monitoring bahan penting, bahan berbahaya, serta minuman beralkohol.
- d. Program Pengembangan Ekspor
Program ini diarahkan pada penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan pada satu daerah Kota/kota dan penguatan ekspor Kota dengan pemberdayaan sumber daya produk substitusi impor, *export coaching program* (ECP), *coaching program for new exporters* (CPNE), pemetaan potensi Kelurahan ekspor, perluasan jejaring promosi dan kerjasama, penilaian eksportir tangguh dan forum informasi pasar, serta *one on one meeting* dengan atase perdagangan (Atdag)/ *Indonesian trade promotion center* (ITPC).
- f. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
Program ini diarahkan pada pelaksanaan perlindungan konsumen di seluruh daerah Kota/kota melalui pemberdayaan konsumen/edukasi konsumen, edukasi standarisasi industri dan fasilitasi bimbingan serta sertifikasi SNI/sistem manajemen mutu/lingkungan bagi pelaku usaha, fasilitasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/BPSK dan kelembagaan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat/LPKSM, pelaksanaan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di daerah Kota melalui pengawasan barang beredar/jasa, pengawasan perizinan bidang perdagangan dan diseminasi kebijakan pengawasan barang wajib SNI dan ketentuan lainnya, dan pelaksanaan pengujian



dan sertifikasi mutu produk di daerah Kota melalui pengembangan layanan kalibrasi, pengujian dan sertifikasi.

- g. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, Program ini diarahkan pada pelaksanaan promosi produk dalam negeri melalui fasilitasi promosi produk UKM/IKM Kota.

5. Perindustrian

Rencana program prioritas urusan perindustrian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan industri baik industri agro dan nonagro melalui peningkatan sumber daya manusia (SDM) dengan pelatihan berkelanjutan, fasilitasi sarana produksi bagi kelompok usaha industri, peningkatan pemasaran produk melalui pemasaran *online-offline* dan jejaring kemitraan, serta peningkatan mutu produk melalui pendampingan bagi industri kecil menengah (IKM).

- b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi penerbitan rekomendasi izin serta pengawasan terhadap usaha industri agro dan nonagro.

- c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Program ini diarahkan pada penyediaan informasi industri untuk izin usaha industri/IUI, izin perluasan usaha industri/IPUI, izin usaha kawasan industri/IUKI, dan izin perluasan kawasan industri/IPKI kewenangan Kota berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

4) Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Rencana program prioritas pada unsur pendukung urusan pemerintahan sekretariat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:



a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja individu ASN Kota Tarakan dengan memperkuat internal akuntabilitas kinerja dan meningkatkan kualitas layanan perangkat daerah, melalui kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian perangkat daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

b. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi kerja sama pemerintah; fasilitasi kerja sama lembaga, badan usaha, dan swasta; pemetaan potensi kerja sama daerah; evaluasi pelaksanaan kerja sama; pengelolaan administrasi kebijakan pemerintahan; fasilitasi penataan wilayah; fasilitasi pelaksanaan pemerintahan umum; fasilitasi administrasi kepala daerah; serta evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan, serta kegiatan fasilitasi pembinaan mental spiritual dengan pengelolaan prasarana dan sarana spiritual, dan fasilitasi kelembagaan bina spiritual; fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar melalui fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi, dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial; serta fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat nonpelayanan dasar melalui koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat bidang urusan non pelayanan dasar, kegiatan administrasi umum yang menunjang pelaksanaan kegiatan di lingkup sekretariat daerah, kegiatan fasilitasi penataan kelembagaan; fasilitasi



penyusunan analisis jabatan serta evaluasi jabatan dan analisis beban kerja; pengelolaan tata laksana pemerintahan diantaranya melalui penyusunan peta proses bisnis daerah dan fasilitasi penyusunan peta proses bisnis perangkat daerah; penyusunan standar kompetensi jabatan; fasilitasi peningkatan pelayanan publik; pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi; serta monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja, serta kegiatan fasilitasi penyusunan perundang-undangan melalui penataan produk hukum daerah agar sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan, dan fasilitasi bantuan hukum melalui kegiatan fasilitasi penyelesaian masalah hukum, penyelesaian masalah nonlitigasi dan hak asasi manusia atau HAM.

c. Program Perekonomian dan Pembangunan

Program ini diarahkan pada kegiatan kebijakan dan koordinasi perekonomian melalui fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan mikro, pengelolaan kebijakan dan koordinasi sumber daya alam, serta pengelolaan kebijakan dan koordinasi badan usaha milik daerah (BUMD) dan badan layanan umum daerah (BLUD); pengelolaan pengadaan barang dan jasa melalui pengelolaan strategi, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa; pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik melalui pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, pengembangan system informasi, dan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa; serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa melalui pembinaan sumber daya manusia, pembinaan kelembagaan, dan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa, serta kegiatan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah meliputi pengendalian APBD, APBN, dan wilayah; pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah meliputi analisis capaian



kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, dan fasilitasi perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah.

2. Sekretariat DPRD

Rencana program prioritas pada unsur pendukung urusan pemerintahan sekretariat DPRD yang akan dilaksanakan adalah Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD, pelaksanaan dan pengawasan kode etik, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kapasitas DPRD, fasilitasi tugas pimpinan DPRD, pembahasan kebijakan anggaran, penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat, serta pembahasan kerja sama daerah.

5) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Rencana program prioritas pada unsur perencanaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja individu ASN Kota Tarakan dengan memperkuat internal akuntabilitas kinerja dan meningkatkan kualitas layanan kesekretariatan Bappeda Litbang Kota Tarakan, melalui kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian perangkat daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.



b. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan pendanaan, pengendalian evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah, serta analisis data dan informasi bidang perencanaan pembangunan daerah.

c. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan

Program ini dimaksudkan untuk menjawab tantangan terhadap perencanaan yang masih belum merupakan jawaban atas permasalahan pembangunan yang ada di masyarakat, dengan menyelaraskan dokumen perencanaan pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pada bidang pada bidang pemerintahan, pembangunan manusia, infrastruktur, SDA dan perekonomian.

Untuk mewujudkan maksud tersebut diatas, dilakukan melalui kegiatan koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada bidang pemerintahan, pembangunan manusia, infrastruktur, SDA dan perekonomian.

2. Keuangan

Rencana program prioritas pada unsur keuangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja individu ASN Kota Tarakan dengan memperkuat internal akuntabilitas kinerja dan meningkatkan kualitas layanan perangkat daerah, melalui kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian perangkat daerah, Administrasi Umum Perangkat



Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini diarahkan pada penyusunan dokumen evaluasi APBD Kota, penyusunan dokumen belanja transfer dan belanja tidak terduga, penyusunan dokumen rencana anggaran daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pembinaan rencana anggaran Kota, pembinaan implementasi sistem informasi pemerintah daerah Kota dan perangkat daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, penyusunan dokumen manajemen kas, pembinaan manajemen kas Kota dan perangkat daerah, serta penyusunan dokumen laporan keuangan pemerintah daerah.

c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini diarahkan pada upaya peningkatan jumlah aset yang diamankan, peningkatan penyelesaian kasus/sengketa aset daerah, penyusunan laporan barang milik daerah tepat waktu, serta penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah sesuai peraturan perundangan-undangan.

d. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan pencapaian realisasi pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta retribusi daerah.

3. Kepegawaian

Rencana program prioritas unsur kepegawaian yang akan dilaksanakan adalah Program Kepegawaian Daerah yang diarahkan dalam rangka mewujudkan distribusi aparatur sipil negara atau ASN yang tepat dan akuntabel serta memberikan layanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi dengan system informasi melalui perencanaan pengadaan ASN sesuai kebutuhan



baik melalui rekrutmen CASN dan/atau fasilitasi mutasi pegawai negeri sipil atau PNS lintas instansi pemerintah yang transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel berdasarkan kualifikasi dan kompetensi dengan *asessment test*; promosi dan mutasi ASN yang objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan sesuai kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan rekam jejak pegawai berdasarkan system merit melalui *talent scouting* maupun seleksi terbuka; pengembangan kompetensi ASN melalui pendidikan dengan tugas/izin belajar; monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas ASN sesuai jabatan yang diduduki, memberikan pembinaan disiplin, perlindungan dan penghargaan yang layak bagi ASN, serta pengelolaan data kepegawaian dan layanan kepegawaian berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Rencana program prioritas unsur pendidikan dan pelatihan yang akan dilaksanakan adalah Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang diarahkan pada pengembangan kompetensi teknis dan manajerial yang komprehensif bagi ASN ditandai dengan penjaminan mutu dan tersertifikasi untuk mengurangi kesenjangan kompetensi ASN.

5. Penelitian dan Pengembangan

Rencana program prioritas unsur penelitian dan pengembangan yang akan dilaksanakan adalah Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, yang diarahkan pada kegiatan penyusunan kajian kebijakan pembangunan daerah, pelaksanaan riset dan inovasi, fasilitasi kerja sama dan kemitraan riset dan inovasi, serta fasilitasi pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur riset dan inovasi.

6) Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Rencana program prioritas pada unsur pengawasan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:



a. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini diarahkan dalam rangka pengawasan internal pemerintah pada kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kinerja perangkat daerah, akuntabilitas keuangan daerah, serta pengawasan dengan tujuan tertentu.

b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program ini diarahkan dalam rangka merumuskan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; melaksanakan pendampingan dan asistensi kepada perangkat daerah terkait reformasi birokrasi dan manajemen risiko, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

7) Unsur Pemerintahan Umum

Rencana program prioritas pada unsur pemerintahan umum yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Program ini diarahkan pada kegiatan edukasi pemahaman ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan kepada masyarakat dalam rangka mitigasi ekstremisme, terorisme, dan radikalisme serta pembentukan kader bela negara.

b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Program ini diarahkan pada kegiatan pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik.

c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.

d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya



Program ini diarahkan pada kegiatan edukasi kepada elemen masyarakat dalam rangka mitigasi potensi konflik yang disebabkan permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya.

- e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

Program ini diarahkan pada kegiatan edukasi tentang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial kepada masyarakat.

8) Unsur Kewilayahan

Rencana program prioritas pada unsur kewilayahan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja individu ASN Kota Tarakan dengan memperkuat internal akuntabilitas kinerja dan meningkatkan kualitas layanan perangkat daerah, melalui kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian perangkat daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan pada kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan, Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum, serta Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029

- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dan Kelurahan
Program ini diarahkan pada kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dan kelurahan, dan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan.
- d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Program ini diarahkan untuk kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.
- f. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kelurahan
Program ini diarahkan pada kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kelurahan.

b. Indikator Program, Target dan Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kota Tarakan menetapkan rangkaian program perangkat daerah sesuai dengan Urusan Konkuren (Urusan Wajib dan Urusan Pilihan) serta fungsi penunjang urusan di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan. Adapun penyusunan program perangkat daerah dalam bab ini merujuk pada (1) Muatan program sesuai janji politik Wali Kota dan Wakil Wali Kota, (2) Nomenklatur program yang mengacu kepada Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.



Selanjutnya, pencapaian target kinerja program (outcome) di masing-masing urusan sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kota Tarakan, tetapi juga dari sumber pendanaan lainnya (APBD Provinsi, APBN dan Sumber-sumber pendanaan lainnya). Namun demikian, pencantuman pendanaan di dalam Tabel Program Perangkat Daerah hanya yang bersumber dari APBD Kota Tarakan dan bersifat indikatif.

Tabel Program Perangkat Daerah Kota Tarakan beserta target dan pagu indikatifnya untuk tahun perencanaan 2025-2030 selengkapnya tergambar sebagai berikut.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029

Tabel 4.1
Indikator Program, Target dan Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					310,382,011,161.00		308,504,011,161.00		309,032,011,161.00		306,484,011,161.00		307,812,011,161.00
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					217,940,031,563.00		217,217,031,563.00		217,940,031,563.00		217,217,031,563.00		217,890,031,563.00
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	100	100	100	1,990,000,000.00	100	1,267,000,000.00	100	1,990,000,000.00	100	1,267,000,000.00	100	1,940,000,000.00
Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas	Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti	100	100	100	215,950,031,563.00	100	215,950,031,563.00	100	215,950,031,563.00	100	215,950,031,563.00	100	215,950,031,563.00
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					92,111,979,598.00		90,956,979,598.00		90,761,979,598.00		88,936,979,598.00		89,591,979,598.00
Meningkatnya partisipasi pendidikan formal	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	104,06	100	100	77,493,722,800.00	100	76,443,722,800.00	100	76,263,722,800.00	100	74,783,722,800.00	100	75,463,722,800.00
	Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A	97,82	98,02	98,02		98,02		98,42		98,62		98,82	
	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	100,92	100	100		100		100		100		100	
	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B	82,25	82,45	82,45		82,65		82,85		83,05		83,25	
	Angka Partisipasi Kasar PAUD	55,27	55,47	55,47		55,67		55,87		56,07		56,27	
	Angka Partisipasi Murni PAUD	45,13	45,33	45,33		45,5		45,73		45,93		46,13	
Meningkatnya partisipasi pendidikan kesetaraan	Angka putus sekolah SD/MI	0	0	0	5,715,419,998.00	0	5,715,419,998.00	0	5,615,419,998.00	0	5,615,419,998.00	0	5,615,419,998.00
	Angka putus sekolah SMP/MTs	0	0	0		0		0		0		0	
Meningkatnya manajemen satuan pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi	100	100	100	702,000,000.00	100	682,000,000.00	100	702,000,000.00	100	612,000,000.00	100	612,000,000.00
Meratanya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase guru PAUD yang berkualifikasi S1/D4	76,57	76,77	77,07	1,385,000,000.00	77,57	1,300,000,000.00	78,07	1,365,000,000.00	78,57	1,110,000,000.00	79,07	1,110,000,000.00
Meningkatnya kualitas lingkungan belajar	Presentase Rata-Rata Capaian Iklim Keamanan, Kebhinekaan dan Inklusivitas Pendidikan Anak Usia Dini	75.12	75.32	75.52	185,000,000.00	75.72	185,000,000.00	75.92	185,000,000.00	76.12	185,000,000.00	76.32	185,000,000.00
	Presentase Rata-Rata Capaian Iklim Keamanan, Kebhinekaan dan Inklusivitas Sekolah Dasar	68,85	71,64	74,43		77,22		80,01		82,80		83,00	

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	Presentase Rata-Rata Capaian Iklim Keamanan, Kebhinekaan dan Inklusivitas Sekolah Menengah Pertama	69,40	71,04	72,68		74,32		75,96		77,60		77,80	
Meningkatnya kualitas peserta didik	Persentase capaian proses belajar yang sesuai bagi pendidikan anak usia dini	67,48	68,90	69,10	6,630,836,800.00	69,30	6,630,836,800.00	69,50	6,630,836,800.00	69,70	6,630,836,800.00	69,90	6,605,836,800.00
	Persentase rata-rata capaian kemampuan Literasi Sekolah Dasar	64,84	67,35	69,85		72,35		74,85		77,35		79,85	
	Persentase rata-rata capaian kemampuan Literasi Kesetaraan	49,11	54,76	54,96		55,16		55,36		55,56		55,76	
	Persentase rata-rata capaian kemampuan Literasi Sekolah Menengah Pertama	78,32	79,42	80,52		81,62		82,72		83,82		84,92	
	Persentase rata-rata capaian kemampuan Numerasi Sekolah Dasar	52,29	55,19	58,09		60,99		63,89		66,79		69,69	
	Persentase rata-rata capaian kemampuan Numerasi Sekolah Kesetaraan	49,83	52,56	52,76		52,96		53,16		53,36		53,56	
	Persentase rata-rata capaian kemampuan Numerasi Sekolah Menengah Pertama	66,01	67,51	69,01		70,51		72,01		73,51		75,01	
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					100,000,000.00		100,000,000.00		100,000,000.00		100,000,000.00		100,000,000.00
Meningkatnya kualitas kurikulum muatan lokal	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal (bahasa daerah atau budaya lokal) dan/atau ekskul kesenian	0	20	20.2	100,000,000.00	20.4	100,000,000.00	20.6	100,000,000.00	20.8	100,000,000.00	21	100,000,000.00
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					100,000,000.00		100,000,000.00		100,000,000.00		100,000,000.00		100,000,000.00
Meratanya kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase PTK yang bersertifikat	100	100	100	100,000,000.00	100	100,000,000.00	100	100,000,000.00	100	100,000,000.00	100	100,000,000.00
	Persentase rata-rata capaian rasio siswa per guru	100	100	100		100		100		100		100	
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					100,000,000.00		100,000,000.00		100,000,000.00		100,000,000.00		100,000,000.00
Meningkatnya manajemen satuan pendidikan	Persentase sekolah yang memiliki ijin operasional (%)	100	100	100	100,000,000.00	100	100,000,000.00	100	100,000,000.00	100	100,000,000.00	100	100,000,000.00



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA					30,000,000.00		30,000,000.00		30,000,000.00		30,000,000.00		30,000,000.00
Terlestarikannya bahasa dan budaya daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (Persentase)	0	20	20.2	30,000,000.00	20.4	30,000,000.00	20.6	30,000,000.00	20.8	30,000,000.00	21	30,000,000.00
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					168,360,638,149.00		168,360,638,149.00		168,360,638,149.00		168,360,638,149.00		168,360,638,149.00
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					132,650,568,932.00		132,369,032,714.00		133,169,032,714.00		132,369,032,714.00		132,519,032,714.00
Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja	Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	129,376,068,932.00	100	129,240,532,714.00	100	129,240,532,714.00	100	129,240,532,714.00	100	129,240,532,714.00
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	0	70	71	3,274,500,000.00	72	3,128,500,000.00	73	3,928,500,000.00	73	3,128,500,000.00	74	3,278,500,000.00
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					31,833,976,834.00		32,151,224,461.00		31,111,798,461.00		32,108,838,175.00		31,892,277,175.00
Meningkatnya Masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	71.22	90	90	31,833,976,834.00	90	32,151,224,461.00	90	31,111,798,461.00	90	32,108,838,175.00	90	31,892,277,175.00
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	52.8	80	85		90		93		95		95	
	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). ((%))	100	100	100		100		100		100		100	
	Indeks Pencapaian SPM (%)	92.56	100	100		100		100		100		100	
	Persentase Kelurahan Mencapai target STBM (%)	5	20	30		35		40		45		50	
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					643,956,771.00		678,345,714.00		855,547,714.00		666,258,000.00		766,258,000.00
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Fasyankes yang terpenuhi SDM kesehatan sesuai standar (%)	0	0	18.18	643,956,771.00	18.18	678,345,714.00	18.18	855,547,714.00	36.36	666,258,000.00	36.36	766,258,000.00
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					169,624,612.00		232,909,260.00		235,159,260.00		237,409,260.00		239,659,260.00
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar (%)	100	100	100	169,624,612.00	100	232,909,260.00	100	235,159,260.00	100	237,409,260.00	100	239,659,260.00

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					3,062,511,000.00		2,929,126,000.00		2,989,100,000.00		2,979,100,000.00		2,943,411,000.00
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase kader kesehatan yang diberdayakan (%)	100	100	100	3,062,511,000.00	100	2,929,126,000.00	100	2,989,100,000.00	100	2,979,100,000.00	100	2,943,411,000.00
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					342,184,254,783.00		419,434,879,923.00		357,109,021,130.00		137,058,253,730.00		142,167,099,771.00
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					14,650,665,718.00		14,896,472,358.00		14,411,296,898.00		13,633,804,498.00		13,633,604,498.00
Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja	Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	10,707,837,918.00	100	10,707,837,918.00	100	10,707,837,918.00	100	10,707,837,918.00	100	10,707,837,918.00
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	84	85	86	3,942,827,800.00	87	4,188,634,440.00	88	3,703,458,980.00	89	2,925,966,580.00	90	2,925,766,580.00
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					12,100,000,000.00		17,600,000,000.00		21,450,000,000.00		22,280,000,000.00		23,180,000,000.00
Meningkatnya Kapasitas Layanan Unit Air Baku	Rasio produksi unit air baku terhadap ketersediaan air baku (Liter/Detik)	1.33	1.47	1.46	12,100,000,000.00	1.65	17,600,000,000.00	1.72	21,450,000,000.00	1.9	22,280,000,000.00	1.88	23,180,000,000.00
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					5,000,000,000.00		5,000,000,000.00		4,740,000,000.00		4,740,000,000.00		5,000,000,000.00
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase peningkatan layanan air minum melalui jaringan perpipaan (%)	0	7.17	11.88	5,000,000,000.00	16.59	5,000,000,000.00	21.29	4,740,000,000.00	26	4,740,000,000.00	30.71	5,000,000,000.00
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					10,299,000,000.00		12,032,000,000.00		10,699,000,000.00		5,000,000,000.00		5,100,000,000.00
Meningkatnya pemenuhan fasilitas pengelolaan sampah	Persentase ketersediaan layanan pengolahan sampah (%)	19.28	20.47	21.67	10,299,000,000.00	22.88	12,032,000,000.00	24.08	10,699,000,000.00	25.29	5,000,000,000.00	26.49	5,100,000,000.00
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					5,600,000,000.00		7,175,000,000.00		5,500,000,000.00		5,200,000,000.00		5,400,000,000.00
Meningkatnya kinerja pelayanan pengelolaan air limbah bagi masyarakat	Persentase peningkatan rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik (%)	0	3.42	4.1	5,600,000,000.00	8.2	7,175,000,000.00	12.3	5,500,000,000.00	16.4	5,200,000,000.00	20.49	5,400,000,000.00
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					52,959,605,626.00		58,432,321,126.00		52,180,029,460.00		28,482,635,710.00		31,617,158,730.00
Meningkatnya layanan pengendalian banjir	Luas genangan yang tertangani (Hektar)	101.41	104.86	114.36	47,159,605,626.00	122.55	54,207,321,126.00	130.07	46,380,029,460.00	132.59	23,482,635,710.00	135.23	25,617,158,730.00



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Meningkatnya kinerja layanan drainase lingkungan	Persentase panjang drainase lingkungan dengan kondisi baik (%)	75.77	78.98	79.95	5,800,000,000.00	80.65	4,225,000,000.00	81.62	5,800,000,000.00	82.45	5,000,000,000.00	83.45	6,000,000,000.00
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					149,195,752,813.00		199,036,252,813.00		156,045,752,813.00		10,244,252,813.00		10,724,252,813.00
Meningkatnya pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung yang memenuhi standar teknis	Persentase Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung yang memenuhi standar teknis (%)	466.67	54.48	21.88	149,195,752,813.00	39.06	199,036,252,813.00	59.38	156,045,752,813.00	79.69	10,244,252,813.00	100	10,724,252,813.00
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					25,310,000,000.00		30,810,000,000.00		24,355,000,000.00		1,675,000,000.00		1,175,000,000.00
Meningkatnya kawasan bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan yang sesuai rencana penataan bangunan dan lingkungan (%)	100	44.44	33.33	25,310,000,000.00	73.33	30,810,000,000.00	80	24,355,000,000.00	86.67	1,675,000,000.00	100	1,175,000,000.00
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					63,889,305,626.00		71,212,908,626.00		64,538,016,959.00		42,662,635,709.00		43,197,158,730.00
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan jalan kota	Persentasi jalan dan jembatan dengan kondisi sedang (%)	16.81	16.93	17.05	63,889,305,626.00	17.17	71,212,908,626.00	17.29	64,538,016,959.00	17.41	42,662,635,709.00	17.53	43,197,158,730.00
	Persentasi jalan dan jembatan dengan kondisi baik (%)	56.42	56.82	57.23		57.63		58.03		58.43		58.83	
	Persentasi jalan dan jembatan dengan kondisi rusak (%)	15.39	5.09	14.79		14.49		14.19		13.89		13.59	
	Persentasi jalan dan jembatan dengan kondisi rusak berat (%)	11.38	11.16	10.93		10.71		10.49		10.27		10.05	
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					950,000,000.00		1,000,000,000.00		1,000,000,000.00		1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi	Persentase proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi (%)	100	100	100	950,000,000.00	100	1,000,000,000.00	100	1,000,000,000.00	100	1,000,000,000.00	100	1,000,000,000.00
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					2,229,925,000.00		2,239,925,000.00		2,189,925,000.00		2,139,925,000.00		2,139,925,000.00
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Kepatuhan Pelaksanaan KKPR (%)	0	16.67	33.33	2,229,925,000.00	50	2,239,925,000.00	66.67	2,189,925,000.00	83.33	2,139,925,000.00	100	2,139,925,000.00

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					42,711,397,784.00		44,357,477,784.00		44,308,077,784.00		45,024,397,784.00		46,071,637,784.00
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8,795,581,784.00		8,795,581,784.00		8,710,581,784.00		8,710,581,784.00		8,710,581,784.00
Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja	Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	7,434,060,239.00	100	7,434,060,239.00	100	7,434,060,239.00	100	7,434,060,239.00	100	7,434,060,239.00
Meningkatnya layanan kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	0	0	90	1,361,521,545.00	90.1	1,361,521,545.00	90.2	1,276,521,545.00	90.3	1,276,521,545.00	90.4	1,276,521,545.00
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					1,075,576,000.00		725,576,000.00		725,576,000.00		725,576,000.00		725,576,000.00
Pemenuhan rumah bagi korban bencana dan terdampak program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	80.95	100	100	1,075,576,000.00	100	725,576,000.00	100	725,576,000.00	100	725,576,000.00	100	725,576,000.00
	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat Pemerintah provinsi memperoleh program Daerah yang fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (%)	0	100	100		100		100		100		100	
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					6,328,000,000.00		6,178,000,000.00		5,178,000,000.00		1,528,000,000.00		1,178,000,000.00
Menurunnya luas kawasan kumuh	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	41.66	16.26	29.73	6,328,000,000.00	43.08	6,178,000,000.00	57.04	5,178,000,000.00	71.25	1,528,000,000.00	100	1,178,000,000.00
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					5,870,000,000.00		5,470,000,000.00		5,870,000,000.00		5,470,000,000.00		5,470,000,000.00
Menurunnya Jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni	Persentase berkurangnya Jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (%)	2.4	2.52	2.78	5,870,000,000.00	3.03	5,470,000,000.00	3.29	5,870,000,000.00	3.54	5,470,000,000.00	3.79	5,470,000,000.00
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					20,642,240,000.00		23,188,320,000.00		23,823,920,000.00		28,590,240,000.00		29,987,480,000.00
Meningkatnya wilayah permukiman terlayani PSU dasar	Persentase jalan lingkungan yang layak (%)	22.86	26.76	30.66	20,642,240,000.00	34.56	23,188,320,000.00	38.46	23,823,920,000.00	42.36	28,590,240,000.00	46.26	29,987,480,000.00
	Panjang jalan lingkungan yang layak (Meter)	116535	136407	156282		176157		196037		215917		235797	
	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%)	5.1	5.62	6.1		6.57		7.04		7.66		7.96	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					3,861,078,028.00		2,214,998,028.00		2,264,398,028.00		1,678,078,028.00		500,838,028.00
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENKETA TANAH GARAPAN					25,000,000.00		25,000,000.00		25,000,000.00		25,000,000.00		25,000,000.00
Meningkatnya kinerja layanan pengamanan aset tanah pemerintah daerah	Persentase luas aset tanah Pemerintah Kota yang bersengketa dan diselesaikan melalui mediasi (%)	3.38	6.54	9.5	25,000,000.00	12.28	25,000,000.00	14.89	25,000,000.00	17.35	25,000,000.00	19.68	25,000,000.00
	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100	
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					3,791,078,028.00		2,144,998,028.00		2,194,398,028.00		1,608,078,028.00		430,838,028.00
Meningkatnya kinerja layanan pengamanan aset tanah pemerintah daerah	Persentase aset tanah pemda yang ditindaklanjuti pengamanannya (%)	76.58	77.58	78.77	3,791,078,028.00	79.67	2,144,998,028.00	86.28	2,194,398,028.00	87.39	1,608,078,028.00	90.01	430,838,028.00
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00
Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah	Jumlah bidang tanah yang didistribusi (Bidang Tanah)	0	0	12	10,000,000.00	12	10,000,000.00	12	10,000,000.00	12	10,000,000.00	12	10,000,000.00
	Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria (Kepala Keluarga)	0	0	17		17		17		17		17	
	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal Kelebihan dari Tanah Maksimum dan Tanah Absentee (%)	0	0	100		100		100		100		100	
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					35,000,000.00		35,000,000.00		35,000,000.00		35,000,000.00		35,000,000.00
Optimalisasi Pelayanan Penetapan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Persentase Penetapan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum	100	100	100	35,000,000.00	100	35,000,000.00	100	35,000,000.00	100	35,000,000.00	100	35,000,000.00
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					24,751,396,500.00		24,761,396,500.00		24,746,396,500.00		24,761,396,500.00		24,746,396,500.00

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kota Tarakan Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT													
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					22,056,396,500.00		22,056,396,500.00		22,056,396,500.00		22,056,396,500.00		22,056,396,500.00
Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti	100	100	100	20,476,116,000.00	100	20,476,116,000.00	100	20,476,116,000.00	100	20,476,116,000.00	100	20,476,116,000.00
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	-	0	100	1,580,280,500.00	100	1,580,280,500.00	100	1,580,280,500.00	100	1,580,280,500.00	100	1,580,280,500.00
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					770,000,000.00		750,000,000.00		765,000,000.00		750,000,000.00		765,000,000.00
Meningkatnya Kentretaman dan Ketertiban Umum	Persentase Kasus Pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang terselesaikan, Persentase Penanganan Perlindungan Masyarakat, Persentase Penegakan Peraturan daerah yang terselesaikan	100	100	100	505,000,000.00	100	505,000,000.00	100	505,000,000.00	100	505,000,000.00	100	505,000,000.00
Meningkatnya Perda dan Perkada	Capaian masyarakat yang teredukasi perda/perkada, Persentase Kepatuhan Terhadap Perda dan Perkada	100	100	100	265,000,000.00	100	245,000,000.00	100	260,000,000.00	100	245,000,000.00	100	260,000,000.00
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					1,855,000,000.00		1,885,000,000.00		1,855,000,000.00		1,885,000,000.00		1,855,000,000.00
Meningkatnya Pencegahan, Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran	Capaian penyebaran informasi dan edukasi pencegahan kebakaran, Persentase Layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan jiwa (non kebakaran), Persentase kejadian kebakaran yang ditangani	100	100	100	1,925,000,000.00	100	1,955,000,000.00	100	1,925,000,000.00	100	1,955,000,000.00	100	1,925,000,000.00
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					6,940,036,606.00		6,906,036,606.00		6,822,036,606.00		6,945,036,606.00		6,945,036,606.00



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5,412,036,606.00		5,418,036,606.00		5,537,036,606.00		5,410,036,606.00		5,410,036,606.00
Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja	Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti	100	100	100	4,857,636,606.00	100	4,857,636,606.00	100	4,857,636,606.00	100	4,857,636,606.00	100	4,857,636,606.00
Meningkatnya Kualitas layanan kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	n/a	n/a	78	554,400,000.00	78.5	560,400,000.00	79	679,400,000.00	79.5	552,400,000.00	80	552,400,000.00
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					1,528,000,000.00		1,488,000,000.00		1,285,000,000.00		1,535,000,000.00		1,535,000,000.00
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	n/a	n/a	100	1,179,000,000.00	100	1,069,000,000.00	100	866,000,000.00	100	1,116,000,000.00	100	1,116,000,000.00
Tertanganinya bencana	Persentase penanganan bencana	n/a	n/a	100	319,000,000.00	100	369,000,000.00	100	369,000,000.00	100	369,000,000.00	100	369,000,000.00
Terfasilitasinya penanganan pasca bencana	Persentase penanganan pasca bencana yang terfasilitasi	n/a	n/a	100	30,000,000.00	100	50,000,000.00	100	50,000,000.00	100	50,000,000.00	100	50,000,000.00
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					7,730,796,698.00		8,114,671,698.00		7,702,671,698.00		7,752,796,698.00		8,114,671,698.00
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5,890,147,158.00		6,046,022,158.00		5,840,022,158.00		5,890,147,158.00		6,046,022,158.00
Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja	Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	5,041,492,648.00	100	5,047,492,648.00	100	5,041,492,648.00	100	5,041,492,648.00	100	5,047,492,648.00
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	100	100	100	848,654,510.00	100	998,529,510.00	100	798,529,510.00	100	848,654,510.00	100	998,529,510.00
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					84,016,700.00		84,016,700.00		84,016,700.00		84,016,700.00		84,016,700.00
Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	100	100	100	84,016,700.00	100	84,016,700.00	100	84,016,700.00	100	84,016,700.00	100	84,016,700.00
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					266,865,840.00		286,865,840.00		286,865,840.00		286,865,840.00		286,865,840.00
Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar serta gelandangan pengemis terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	100	100	100	266,865,840.00	100	286,865,840.00	100	286,865,840.00	100	286,865,840.00	100	286,865,840.00
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				2000	1,297,777,000.00	2000	1,305,777,000.00	2000	1,299,777,000.00	2000	1,299,777,000.00	2000	1,305,777,000.00
Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	27,81	28	30	1,297,777,000.00	78	1,305,777,000.00	78	1,299,777,000.00	80	1,299,777,000.00	80	1,305,777,000.00

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					114,990,000.00		114,990,000.00		114,990,000.00		114,990,000.00		114,990,000.00
Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	114,990,000.00	100	114,990,000.00	100	114,990,000.00	100	114,990,000.00	100	114,990,000.00
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					77,000,000.00		277,000,000.00		77,000,000.00		77,000,000.00		277,000,000.00
Meningkatnya Tatakelola Taman Makam Pahlawan	Persentase layanan pengelolaan taman makam pahlawan (%)	100	100	100	77,000,000.00	100	277,000,000.00	100	77,000,000.00	100	77,000,000.00	100	277,000,000.00
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					4,081,287,000.00		4,081,287,000.00		4,081,287,000.00		4,081,287,000.00		4,081,287,000.00
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					61,087,100.00		61,087,100.00		61,087,100.00		61,087,100.00		61,087,100.00
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kategori kelurahan (I)	Berkembang	Berkembang	Berkembang	61,087,100.00	Cepat berkembang	61,087,100.00	Cepat berkembang	61,087,100.00	Cepat berkembang	61,087,100.00	Cepat berkembang	61,087,100.00
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					4,020,199,900.00		4,020,199,900.00		4,020,199,900.00		4,020,199,900.00		4,020,199,900.00
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan	Persentase lembaga masyarakat yang aktif (%)	100	100	100	4,020,199,900.00	100	4,020,199,900.00	100	4,020,199,900.00	100	4,020,199,900.00	100	4,020,199,900.00
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					5,511,963,820.00		5,450,104,620.00		5,450,104,620.00		5,450,104,620.00		5,465,104,620.00
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4,233,891,043.00		4,187,034,843.00		4,187,034,843.00		4,187,034,843.00		4,187,034,843.00
Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja	Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	3,733,931,021.00	100	3,733,931,021.00	100	3,733,931,021.00	100	3,733,931,021.00	100	3,733,931,021.00
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	100	100	100	499,960,022.00	100	453,103,822.00	100	453,103,822.00	100	453,103,822.00	100	453,103,822.00
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					124,832,000.00		124,832,000.00		124,832,000.00		124,832,000.00		124,832,000.00



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	10	10	11	124,832,000.00	12	124,832,000.00	13	124,832,000.00	14	124,832,000.00	15	124,832,000.00
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					269,820,690.00		269,820,690.00		269,820,690.00		269,820,690.00		269,820,690.00
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	100	269,820,690.00	100	269,820,690.00	100	269,820,690.00	100	269,820,690.00	100	269,820,690.00
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					45,463,680.00		45,463,680.00		45,463,680.00		45,463,680.00		45,463,680.00
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase PUSPAGA yang Aktif	25	25	25	45,463,680.00	50	45,463,680.00	75	45,463,680.00	100	45,463,680.00	100	45,463,680.00
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					5,454,400.00		5,451,400.00		5,451,400.00		5,451,400.00		5,451,400.00
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki data gender dan anak	0	100	100	5,454,400.00	100	5,451,400.00	100	5,451,400.00	100	5,451,400.00	100	5,451,400.00
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					416,000,000.00		416,000,000.00		416,000,000.00		416,000,000.00		416,000,000.00
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Skor Penilaian Mandiri Evaluasi KLA	854.56	855	855	416,000,000.00	860	416,000,000.00	870	416,000,000.00	880	416,000,000.00	890	416,000,000.00
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					416,502,007.00		401,502,007.00		401,502,007.00		401,502,007.00		416,502,007.00
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	100	100	100	416,502,007.00	100	401,502,007.00	100	401,502,007.00	100	401,502,007.00	100	416,502,007.00
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					766,048,300.00		766,048,300.00		766,048,300.00		766,048,300.00		766,048,300.00
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					127,499,700.00		127,499,700.00		127,499,700.00		127,499,700.00		127,499,700.00
Terkendalinya pertumbuhan jumlah penduduk	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	26	26	25	127,499,700.00	24	127,499,700.00	23	127,499,700.00	22	127,499,700.00	21	127,499,700.00

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	(Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)												
	Persentase keluarga yang terdata (%)	84.97	85.5	86		87		88		89		90	
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					400,632,350.00		400,632,350.00		400,632,350.00		400,632,350.00		400,632,350.00
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga Berencana (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	14.6	14	13.6	400,632,350.00	13	400,632,350.00	12.6	400,632,350.00	12	400,632,350.00	11.6	400,632,350.00
	Persentase masyarakat terpapar program Bangga Kencana (%)	60.4	61	61.15		61.5		62.15		62.5		63	
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					237,916,250.00		237,916,250.00		237,916,250.00		237,916,250.00		237,916,250.00
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina (%)	100	100	100	237,916,250.00	100	237,916,250.00	100	237,916,250.00	100	237,916,250.00	100	237,916,250.00
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					7,673,000,000.00		7,673,000,000.00		7,678,000,000.00		7,683,000,000.00		7,688,000,000.00
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7,273,000,000.00		7,273,000,000.00		7,273,000,000.00		7,273,000,000.00		7,273,000,000.00
Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	65.2	68	70	6,734,500,000.00	72	6,734,500,000.00	74	6,734,500,000.00	75	6,734,500,000.00	75	6,734,500,000.00
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	70	70	71	538,500,000.00	72	538,500,000.00	73	538,500,000.00	74	538,500,000.00	75	538,500,000.00
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					20,000,000.00		20,000,000.00		25,000,000.00		30,000,000.00		35,000,000.00
Meningkatnya kapasitas pelaku distribusi pangan daerah.	Persentase pelaku distribusi yang difasilitasi (%)	0	50	50	20,000,000.00	50	20,000,000.00	50	25,000,000.00	50	30,000,000.00	50	35,000,000.00
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					210,000,000.00		210,000,000.00		210,000,000.00		210,000,000.00		210,000,000.00
Meningkatnya ketersediaan bahan pangan strategis	Angka ketersediaan pangan strategis (Rasio)	116	125	130	95,000,000.00	135	95,000,000.00	140	95,000,000.00	145	95,000,000.00	150	95,000,000.00



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Meningkatnya Kecukupan Konsumsi energi dan protein masyarakat	Angka kecukupan energi (Angka)	0	0	1860	115,000,000.00	1862	115,000,000.00	1864	115,000,000.00	1866	115,000,000.00	1868	115,000,000.00
	Angka kecukupan protein (Angka)	0	0	62		63		64		65		66	
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					80,000,000.00		80,000,000.00		80,000,000.00		80,000,000.00		80,000,000.00
Meningkatnya aksesibilitas pangan	Presentase Kelurahan yang Tahan Pangan (%)	90	90	90	80,000,000.00	90	80,000,000.00	90	80,000,000.00	90	80,000,000.00	90	80,000,000.00
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					90,000,000.00		90,000,000.00		90,000,000.00		90,000,000.00		90,000,000.00
Meningkatnya keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	95	90	90	90,000,000.00	90	90,000,000.00	90	90,000,000.00	90	90,000,000.00	90	90,000,000.00
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					1,510,000,000.00		1,510,000,000.00		1,510,000,000.00		1,510,000,000.00		1,510,000,000.00
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					215,000,000.00		215,000,000.00		215,000,000.00		215,000,000.00		215,000,000.00
Meningkatnya produksi pertanian	Jumlah Produksi Pertanian (Tonase) (Angka)	89588	89590	90486	80,000,000.00	91391	80,000,000.00	92305	80,000,000.00	93228	80,000,000.00	94160	80,000,000.00
Meningkatnya produksi peternakan	Jumlah Produksi Daging (sapi, kerbau, domba, kambing, ayam, itik, babi) (Ton)	7917.817	8038.167	8160.347	135,000,000.00	8286.016	135,000,000.00	8414.449	135,000,000.00	8544.872	135,000,000.00	8677.317	135,000,000.00
	Jumlah Produksi Telur (Ton)	1768.758	1795.289	1822.218		1849.551		1877.294		1905.453		1934.034	
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					465,000,000.00		465,000,000.00		465,000,000.00		465,000,000.00		465,000,000.00
Meningkatnya pemanfaatan lahan pertanian	Persentase lahan pertanian yang dimanfaatkan (%)	75	75	75	465,000,000.00	75	465,000,000.00	75	465,000,000.00	75	465,000,000.00	75	465,000,000.00
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					275,000,000.00		275,000,000.00		275,000,000.00		275,000,000.00		275,000,000.00
Meningkatnya pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase kasus PHMS yang ditangani dibagi total kasus PHMS (%)	90	90	90	275,000,000.00	90	275,000,000.00	90	275,000,000.00	90	275,000,000.00	90	275,000,000.00
	Persentase pelaku usaha asal hewan yang mendapatkan pembinaan (%)	90	90	90		90		90		90		90	

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					25,000,000.00		25,000,000.00		25,000,000.00		25,000,000.00		25,000,000.00
Tertangani hama dan penyakit tanaman	Persentase laporan yang ditangani (%)	100	100	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					125,000,000.00		125,000,000.00		125,000,000.00		125,000,000.00		125,000,000.00
Meningkatnya Pengelolaan Izin Usaha Pertanian	Persentase Cakupan Layanan Usaha Pertanian (%)	95	95	95	125,000,000.00	95	125,000,000.00	95	125,000,000.00	95	125,000,000.00	95	125,000,000.00
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					405,000,000.00		405,000,000.00		405,000,000.00		405,000,000.00		405,000,000.00
Meningkatnya Pelayanan Penyuluhan Pertanian	Persentase Terbinanya Kelompok Petani dan Kelompok Wanita Tani (%)	35	50	50	405,000,000.00	50	405,000,000.00	50	405,000,000.00	50	405,000,000.00	50	405,000,000.00
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					32,440,919,141.85		32,815,044,676.85		33,605,192,146.85		32,510,692,146.85		32,458,127,846.85
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					22,322,915,079.85		22,281,649,086.85		22,281,649,086.85		22,231,649,086.85		22,231,649,086.85
Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja	Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti (%)	76.92	77.12	77.42	21,301,579,707.85	77.67	21,301,579,707.85	77.92	21,301,579,707.85	78.17	21,301,579,707.85	78.42	21,301,579,707.85
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	90.32	90.82	91.32	1,021,335,372.00	91.82	980,069,379.00	92.32	980,069,379.00	92.82	930,069,379.00	93.32	930,069,379.00
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					350,000,000.00		200,000,000.00		300,000,000.00		300,000,000.00		150,000,000.00
Meningkatnya pemenuhan dokumen lingkungan hidup	Persentase dokumen lingkungan hidup yang disusun/ditetapkan sebagai peraturan daerah (%)	100	14.29	28.57	350,000,000.00	42.86	200,000,000.00	71.43	300,000,000.00	85.71	300,000,000.00	100	150,000,000.00
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					830,919,200.00		1,388,828,000.00		1,800,500,000.00		861,000,000.00		870,500,000.00
Meningkatnya upaya pengendalian pencemaran lingkungan	Indeks pencemaran air sungai (Indeks)	4.26	4.15	4.04	434,070,090.00	3.93	521,828,000.00	3.87	1,348,000,000.00	3.71	388,000,000.00	3.6	377,000,000.00
	Rata - rata NO2 (Poin)	7.19	7.09	6.99		6.89		6.79		6.69		6.59	
	Rata - rata SO2 (Poin)	7.96	7.86	7.76		7.66		7.56		7.46		7.36	
Menurunnya degradasi lahan	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan (%)	0.8622	0.852	0.8418	216,849,110.00	0.8315	227,000,000.00	0.8211	232,500,000.00	0.8106	238,000,000.00	0.8001	243,500,000.00
Meningkatnya kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Nilai Kampung Iklim (Poin)	23.15	27.78	30.56	180,000,000.00	33.33	640,000,000.00	36.11	220,000,000.00	38.89	235,000,000.00	41.67	250,000,000.00



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					2,587,386,002.00		2,601,524,530.00		2,845,000,000.00		2,655,000,000.00		2,905,000,000.00
Meningkatnya ruang terbuka hijau	Persentase peningkatan RTH (%)	1.8	3	3	2,587,386,002.00	3	2,601,524,530.00	3	2,845,000,000.00	3	2,655,000,000.00	3	2,905,000,000.00
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					40,000,000.00		40,000,000.00		40,000,000.00		40,000,000.00		40,000,000.00
Meningkatnya pengelolaan limbah B3	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	52.7	54.6	56.3	40,000,000.00	58.4	40,000,000.00	60.2	40,000,000.00	62.3	40,000,000.00	64.3	40,000,000.00
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					110,000,000.00		120,000,000.00		143,000,000.00		148,000,000.00		164,000,000.00
Meningkatnya ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	38	40	42	110,000,000.00	45	120,000,000.00	46	143,000,000.00	48	148,000,000.00	50	164,000,000.00
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					110,000,000.00		110,000,000.00		110,000,000.00		110,000,000.00		110,000,000.00
Meningkatnya partisipasi kelompok masyarakat peduli lingkungan	persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan yang aktif (%)	100	75	77	110,000,000.00	79	110,000,000.00	81	110,000,000.00	83	110,000,000.00	85	110,000,000.00
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					120,000,000.00		120,000,000.00		120,000,000.00		120,000,000.00		120,000,000.00
Meningkatnya masyarakat yang mengelola lingkungan hidup	Persentase perusahaan yang mendapat predikat minimal biru dalam penilaian PROPER (%)	37.5	37.5	37.5	120,000,000.00	43.75	120,000,000.00	43.75	120,000,000.00	50	120,000,000.00	50	120,000,000.00
	Persentase sekolah Adiwiyata (%)	64.6	68.14	69.03		69.61		70.8		71.68		72.57	
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					74,000,000.00		74,000,000.00		86,000,000.00		86,000,000.00		86,000,000.00
Optimalnya penanganan pengaduan lingkungan hidup\	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	74,000,000.00	100	74,000,000.00	100	86,000,000.00	100	86,000,000.00	100	86,000,000.00

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					5,895,698,860.00		5,879,043,060.00		5,879,043,060.00		5,959,043,060.00		5,780,978,760.00
Meningkatnya pengelolaan sampah berbasis masyarakat	persentase sampah yang terkelola (%)	97.01	97.05	97.09	5,895,698,860.00	98.03	5,879,043,060.00	98.07	5,879,043,060.00	98.09	5,959,043,060.00	99.01	5,780,978,760.00
	Proporsi Rumah Tangga dengan layanan pengumpulan sampah (Persentase)	98.19	98.24	98.36		98.48		98.52		98.64		98.83	
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					6,797,234,924.00		6,797,234,924.00		6,797,234,924.00		6,797,234,924.00		6,797,234,924.00
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5,937,360,928.00		5,937,360,928.00		5,937,360,928.00		5,937,360,928.00		5,937,360,928.00
Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja	Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	5,433,570,368.00	100	5,412,070,368.00	100	5,433,570,368.00	100	5,433,570,368.00	100	5,433,570,368.00
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	100	100	100	503,790,560.00	100	525,290,560.00	100	503,790,560.00	100	503,790,560.00	100	503,790,560.00
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					670,408,141.00		670,408,141.00		670,408,141.00		670,408,141.00		670,408,141.00
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Dokumen Administrasi Kependudukan yang di terbitkan (%)	100	100	100	670,408,141.00	100	670,408,141.00	100	670,408,141.00	100	670,408,141.00	100	670,408,141.00
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					34,466,390.00		34,466,390.00		34,466,390.00		34,466,390.00		34,466,390.00
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan (%)	100	100	100	34,466,390.00	100	34,466,390.00	100	34,466,390.00	100	34,466,390.00	100	34,466,390.00
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					139,999,825.00		139,999,825.00		139,999,825.00		139,999,825.00		139,999,825.00
Meningkatnya kepuasan masyarakat	Nilai Rata-rata SKM	3.49	3.5	3.55	16,210,635.00	3.6	16,210,635.00	3.65	16,210,635.00	3.7	16,210,635.00	3.76	16,210,635.00
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Data Kependudukan (%)	80	80	80	123,789,190.00	80	123,789,190.00	80	123,789,190.00	80	123,789,190.00	80	123,789,190.00
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					14,999,640.00		14,999,640.00		14,999,640.00		14,999,640.00		14,999,640.00
Meningkatnya kualitas profil kendudukan	Cakupan Ketersediaan Profil Kependudukan (%)	100	100	100	14,999,640.00	100	14,999,640.00	100	14,999,640.00	100	14,999,640.00	100	14,999,640.00



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					37,064,741,670.00		35,164,538,362.00		34,273,214,139.00		35,504,197,976.00		37,495,202,221.00
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					17,519,641,660.00		16,140,604,952.00		15,949,280,729.00		16,017,797,966.00		16,893,268,811.00
Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja	Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	7,895,296,184.00	100	8,269,607,193.00	100	8,662,633,753.00	100	9,075,311,640.00	100	9,508,623,422.00
Meningkatnya layanan kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	80	80	80	9,624,345,476.00	80	7,870,997,759.00	80	7,286,646,976.00	80	6,942,486,326.00	80	7,384,645,389.00
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					16,145,100,010.00		16,357,933,410.00		15,627,433,410.00		16,759,400,010.00		15,644,433,410.00
Berkurangnya titik kemacetan	Jumlah titik potensi kemacetan (Titik)	8	5	4	581,195,010.00	3	692,028,410.00	2	587,528,410.00	1	602,495,010.00	0	587,528,410.00
Meningkatnya Kendaraan yang Melaksanakan Wajib Uji	Persentase Kendaraan yang Melaksanakan Wajib Uji (%)	76.54	49.39	56.44	969,405,000.00	63.5	1,159,405,000.00	70.55	425,405,000.00	77.61	945,405,000.00	84.66	425,405,000.00
Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana perlengkapan jalan	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota (Persentase)	0	24.49	26.34	14,594,500,000.00	27.86	14,506,500,000.00	29.36	14,614,500,000.00	30.88	15,211,500,000.00	32.39	14,631,500,000.00
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					3,400,000,000.00		2,666,000,000.00		2,696,500,000.00		2,727,000,000.00		4,957,500,000.00
Meningkatnya pemenuhan sarpras pelabuhan yang memadai	Persentase sarana prasarana pelabuhan dengan kondisi memadai (%)	15.08	21.52	29.42	3,400,000,000.00	47.68	2,666,000,000.00	65.14	2,696,500,000.00	82.55	2,727,000,000.00	100	4,957,500,000.00
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					6,728,928,094.00		6,728,928,094.00		6,728,928,094.00		6,728,928,094.00		6,728,928,094.00
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5,240,928,094.00		5,240,928,094.00		5,240,928,094.00		5,240,928,094.00		5,240,928,094.00
Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja	Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	5,240,928,094.00	100	5,240,928,094.00	100	5,240,928,094.00	100	5,240,928,094.00	100	5,240,928,094.00
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					488,000,000.00		488,000,000.00		488,000,000.00		488,000,000.00		488,000,000.00
Meningkatnya jumlah permohonan informasi yang ditanggapi secara tepat waktu dan sesuai ketentuan	Persentase Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan melalui media komunikasi publik pemerintah dan media massa mitra kerja pemerintah	100	100	100	488,000,000.00	100	488,000,000.00	100	488,000,000.00	100	488,000,000.00	100	488,000,000.00

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					1,000,000,000.00		1,000,000,000.00		1,000,000,000.00		1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase aplikasi layanan publik yang terrealisasi	100	100	100	1,000,000,000.00	100	1,000,000,000.00	100	1,000,000,000.00	100	1,000,000,000.00	100	1,000,000,000.00
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					40,000,000.00		40,000,000.00		40,000,000.00		40,000,000.00		40,000,000.00
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					40,000,000.00		40,000,000.00		40,000,000.00		40,000,000.00		40,000,000.00
Tercapainya kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan system statistik nasional (SSN)	Persentase data sektoral yang dipublikasikan	100	100	100	40,000,000.00	100	40,000,000.00	100	40,000,000.00	100	40,000,000.00	100	40,000,000.00
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00
Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Persentase OPD yang mematuhi regulasi terkait implementasi TTE sesuai peraturan yang berlaku	100	100	100	5,000,000.00	100	5,000,000.00	100	5,000,000.00	100	10,000,000.00	100	10,000,000.00
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					9,012,638,686.00		8,007,750,826.00		8,049,750,826.00		8,037,750,826.00		8,065,750,826.00
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7,413,950,826.00		6,683,950,826.00		6,695,950,826.00		6,683,950,826.00		6,695,950,826.00
Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja	Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	5,783,950,826.00	100	5,783,950,826.00	100	5,783,950,826.00	100	5,783,950,826.00	100	5,783,950,826.00
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	0	70	71	1,630,000,000.00	72	900,000,000.00	73	912,000,000.00	74	900,000,000.00	75	912,000,000.00
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					25,000,000.00		25,000,000.00		25,000,000.00		25,000,000.00		25,000,000.00
Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase)	60	69	70	25,000,000.00	72	25,000,000.00	75	25,000,000.00	80	25,000,000.00	82	25,000,000.00
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					35,000,000.00		35,000,000.00		35,000,000.00		35,000,000.00		35,000,000.00
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	36.36	30	31	35,000,000.00	32	35,000,000.00	33	35,000,000.00	35	35,000,000.00	36	35,000,000.00



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	44	37	63	10,000,000.00	66	10,000,000.00	69	10,000,000.00	70	10,000,000.00	72	10,000,000.00
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					126,000,000.00		126,000,000.00		126,000,000.00		126,000,000.00		126,000,000.00
Meningkatnya kualitas SDM Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	33.33	25	27	126,000,000.00	29	126,000,000.00	30	126,000,000.00	31	126,000,000.00	32	126,000,000.00
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					107,000,000.00		107,000,000.00		137,000,000.00		137,000,000.00		153,000,000.00
Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	9.1	9.1	9.2	107,000,000.00	9.3	107,000,000.00	9.4	137,000,000.00	9.5	137,000,000.00	9.6	153,000,000.00
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					1,195,687,860.00		920,800,000.00		920,800,000.00		920,800,000.00		920,800,000.00
Meningkatnya kapasitas UMKM	Rasio Kewirausahaan (Persentase)	4.06	4.47	4.88	1,195,687,860.00	5.29	920,800,000.00	5.7	920,800,000.00	6.11	920,800,000.00	6.52	920,800,000.00
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					100,000,000.00		100,000,000.00		100,000,000.00		100,000,000.00		100,000,000.00
Meningkatnya daya saing UMKM	Persentase kemitraan UMKM yang difasilitasi (%)	0.48	0.51	0.51	100,000,000.00	0.51	100,000,000.00	0.51	100,000,000.00	0.51	100,000,000.00	0.51	100,000,000.00
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					801,854,200.00		766,970,100.00		766,854,200.00		766,854,200.00		766,854,200.00
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					50,469,100.00		50,585,000.00		50,469,100.00		50,469,100.00		50,469,100.00
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	11.2	11.58	11.96	50,469,100.00	12.34	50,585,000.00	12.71	50,469,100.00	13.09	50,469,100.00	13.45	50,469,100.00
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					140,000,000.00		140,000,000.00		140,000,000.00		140,000,000.00		140,000,000.00
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	14	43	14	140,000,000.00	14	140,000,000.00	14	140,000,000.00	14	140,000,000.00	14	140,000,000.00
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					202,085,100.00		202,085,100.00		202,085,100.00		202,085,100.00		202,085,100.00
Terjaganya kestabilan harga bahan pokok	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	12.8	13.74	13.75	202,085,100.00	13.75	202,085,100.00	13.75	202,085,100.00	13.75	202,085,100.00	13.75	202,085,100.00

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					145,000,000.00		110,000,000.00		110,000,000.00		110,000,000.00		110,000,000.00
Meningkatnya volume ekspor	Volume ekspor (Angka)	12534.27	12596.94	12659.92	145,000,000.00	12723.22	110,000,000.00	12786.84	110,000,000.00	12850.77	110,000,000.00	12915.03	110,000,000.00
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					244,300,000.00		244,300,000.00		244,300,000.00		244,300,000.00		244,300,000.00
Meningkatnya kesesuaian UTTP sesuai standar	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	47.4	47.5	48	244,300,000.00	50	244,300,000.00	53	244,300,000.00	55	244,300,000.00	58	244,300,000.00
3.30.07 - PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					20,000,000.00		20,000,000.00		20,000,000.00		20,000,000.00		20,000,000.00
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	0.12	0.12	0.1	20,000,000.00	0.1	20,000,000.00	0.1	20,000,000.00	0.1	20,000,000.00	0.1	20,000,000.00
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					8,074,048,955.00		8,110,406,462.00		8,188,506,462.00		8,198,856,462.00		8,273,856,462.00
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6,811,573,798.00		6,807,931,305.00		6,866,031,305.00		6,876,381,305.00		6,946,381,305.00
Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja	Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	5,653,050,742.00	100	5,653,050,742.00	100	5,653,050,742.00	100	5,653,050,742.00	100	5,653,050,742.00
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	0	70	71	1,158,523,056.00	72	1,154,880,563.00	73	1,212,980,563.00	74	1,223,330,563.00	75	1,293,330,563.00
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					422,475,157.00		220,000,000.00		270,000,000.00		285,000,000.00		285,000,000.00
Terciptanya pengembangan iklim penanaman modal yang kondusif	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	108.33	15	15.15	422,475,157.00	15.32	220,000,000.00	15.5	270,000,000.00	15.69	285,000,000.00	15.93	285,000,000.00
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					190,000,000.00		266,237,579.00		265,000,000.00		265,000,000.00		265,000,000.00
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	1.16	1.17	1.57	190,000,000.00	1.74	266,237,579.00	1.78	265,000,000.00	1.79	265,000,000.00	1.83	265,000,000.00
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					300,000,000.00		350,000,000.00		325,000,000.00		325,000,000.00		325,000,000.00
Meningkatnya pelayanan perizinan berusaha	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelajaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) (%)	100	100	100	230,000,000.00	100	250,000,000.00	100	250,000,000.00	100	250,000,000.00	100	250,000,000.00



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Tertanganinya aduan penanaman modal	Persentase aduan yang difasilitasi (%)	100	100	100	70,000,000.00	100	100,000,000.00	100	75,000,000.00	100	75,000,000.00	100	75,000,000.00
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					270,000,000.00		386,237,578.00		382,475,157.00		367,475,157.00		372,475,157.00
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	5.95	6.49	6.89	270,000,000.00	7.05	386,237,578.00	7.21	382,475,157.00	7.38	367,475,157.00	7.75	372,475,157.00
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					80,000,000.00		80,000,000.00		80,000,000.00		80,000,000.00		80,000,000.00
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	100	100	100	80,000,000.00	100	80,000,000.00	100	80,000,000.00	100	80,000,000.00	100	80,000,000.00
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					3,420,000,000.00		860,000,000.00		860,000,000.00		860,000,000.00		3,420,000,000.00
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					380,000,000.00		380,000,000.00		380,000,000.00		380,000,000.00		380,000,000.00
Meningkatnya peran serta pemuda dalam ekonomi mandiri dan organisasi Kepemudaan dan Kemasyarakatan	Persentase Wirausaha Muda yang dibina (%)	0.08	0.15	0.31	380,000,000.00	0.38	380,000,000.00	0.46	380,000,000.00	0.54	380,000,000.00	0.61	380,000,000.00
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAAGAAN					2,960,000,000.00		400,000,000.00		400,000,000.00		400,000,000.00		2,960,000,000.00
Meningkatnya Prestasi Olahraga	Persentase peningkatan jumlah atlet berprestasi (%)	25	30	35	2,960,000,000.00	40	400,000,000.00	45	400,000,000.00	50	400,000,000.00	55	2,960,000,000.00
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					80,000,000.00		80,000,000.00		80,000,000.00		80,000,000.00		80,000,000.00
Meningkatnya Peran serta Pemuda dalam kepramukaan	Persentase pemuda yang mengikuti organisasi kepramukaan (%)	3.7	3.75	3.8	80,000,000.00	3.85	80,000,000.00	3.9	80,000,000.00	3.95	80,000,000.00	4	80,000,000.00
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					3,492,000,000.00		3,492,000,000.00		3,492,000,000.00		3,492,000,000.00		3,492,000,000.00
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					2,900,000,000.00		2,900,000,000.00		2,900,000,000.00		2,900,000,000.00		2,900,000,000.00
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan budaya per tahun (%)	35.45	35.84	36.23	2,900,000,000.00	36.62	2,900,000,000.00	37.01	2,900,000,000.00	37.4	2,900,000,000.00	37.79	2,900,000,000.00

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					90,000,000.00		90,000,000.00		90,000,000.00		90,000,000.00		90,000,000.00
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan (%)	11.11	18.52	25.93	90,000,000.00	33.33	90,000,000.00	40.74	90,000,000.00	48.15	90,000,000.00	55.56	90,000,000.00
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					105,000,000.00		105,000,000.00		105,000,000.00		105,000,000.00		105,000,000.00
Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap akses sejarah lokal (%)	2.34	2.92	3.12	105,000,000.00	3.31	105,000,000.00	3.51	105,000,000.00	3.9	105,000,000.00	4.29	105,000,000.00
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					192,000,000.00		192,000,000.00		192,000,000.00		192,000,000.00		192,000,000.00
Meningkatnya cagar budaya yang ditetapkan	Presentase cagar budaya yang ditetapkan (%)	4.05	6.76	9.46	192,000,000.00	12.16	192,000,000.00	14.86	192,000,000.00	17.57	192,000,000.00	20.27	192,000,000.00
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					205,000,000.00		205,000,000.00		205,000,000.00		205,000,000.00		205,000,000.00
Meningkatnya tata kelola museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (Persentase)	6.41	7.41	8.41	205,000,000.00	9.41	205,000,000.00	10.41	205,000,000.00	11.41	205,000,000.00	12.41	205,000,000.00
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					12,952,854,954.00		12,952,854,954.00		12,952,854,954.00		12,952,854,954.00		12,952,854,954.00
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11,793,854,954.00		11,793,854,954.00		11,793,854,954.00		11,793,854,954.00		11,793,854,954.00
Meningkatnya layanan kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	0	85	88.35	1,716,854,954.00	88.4	1,716,854,954.00	88.45	1,716,854,954.00	88.5	1,716,854,954.00	88.55	1,716,854,954.00
Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja	Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	10,077,000,000.00	100	10,077,000,000.00	100	10,077,000,000.00	100	10,077,000,000.00	100	10,077,000,000.00
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					414,000,000.00		414,000,000.00		414,000,000.00		414,000,000.00		414,000,000.00
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan Mancanegara (%)	-	3.06	3.67	414,000,000.00	4.18	414,000,000.00	4.32	414,000,000.00	4.73	414,000,000.00	5.08	414,000,000.00
	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan nusantara (%)	-	2.02	2.42		2.46		2.49		2.51		2.71	
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					280,000,000.00		280,000,000.00		280,000,000.00		280,000,000.00		280,000,000.00
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	2.3	2.48	2.67	280,000,000.00	2.76	280,000,000.00	2.84	280,000,000.00	3.07	280,000,000.00	3.13	280,000,000.00



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					225,000,000.00		225,000,000.00		225,000,000.00		225,000,000.00		225,000,000.00
Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	0.01	0.05	0.1	225,000,000.00	0.15	225,000,000.00	0.2	225,000,000.00	0.25	225,000,000.00	0.3	225,000,000.00
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					240,000,000.00		240,000,000.00		240,000,000.00		240,000,000.00		240,000,000.00
Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	0.87	0.89	0.91	240,000,000.00	0.93	240,000,000.00	0.95	240,000,000.00	0.97	240,000,000.00	0.99	240,000,000.00
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					4,882,561,784.00		4,840,609,314.00		4,860,205,884.00		4,846,398,084.00		4,838,998,004.00
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4,688,359,304.00		4,650,205,884.00		4,669,705,884.00		4,652,998,004.00		4,652,998,004.00
Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas	Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti	100	100	100	4,265,025,884.00	100	4,265,025,884.00	100	4,265,025,884.00	100	4,265,025,884.00	100	4,265,025,884.00
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	70	70	75	423,333,420.00	75	385,180,000.00	80	404,680,000.00	85	387,972,120.00	90	387,972,120.00
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					172,252,480.00		168,448,430.00		169,000,000.00		171,450,080.00		163,500,000.00
Meningkatnya frekuensi kunjungan perpustakaan	Persentase Pengunjung Perpustakaan	28.5	28.5	28.5	172,252,480.00	30	168,448,430.00	31.5	169,000,000.00	33	171,450,080.00	35	163,500,000.00
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					21,950,000.00		21,955,000.00		21,500,000.00		21,950,000.00		22,500,000.00
Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dialihmediakan			13.33	21,950,000.00	20	21,955,000.00	40	21,500,000.00	60	21,950,000.00	80	22,500,000.00
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					9,966,100.00		10,000,000.00		15,000,000.00		9,966,100.00		15,000,000.00
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					9,966,100.00		10,000,000.00		15,000,000.00		9,966,100.00		15,000,000.00
Meningkatnya penyelamatan dan perlindungan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip			10	9,966,100.00	20	10,000,000.00	40	15,000,000.00	60	9,966,100.00	80	15,000,000.00

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					7,386,267,241.00		7,386,267,241.00		7,386,267,241.00		7,386,267,241.00		7,386,267,241.00
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5,026,000,000.00		5,026,000,000.00		5,026,000,000.00		5,026,000,000.00		5,026,000,000.00
Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas	Nilai SAKIP (Nilai)	70	70	70	4,594,308,781.00	70	4,594,308,781.00	70	4,594,308,781.00	70	4,594,308,781.00	70	4,594,308,781.00
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	88	88.1	88.3	431,691,219.00	88.3	431,691,219.00	88.3	431,691,219.00	88.3	431,691,219.00	88.3	431,691,219.00
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					940,691,400.00		940,691,400.00		940,691,400.00		940,691,400.00		940,691,400.00
Meningkatnya Produksi perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%)	20917	4	4	940,691,400.00	4	940,691,400.00	4	940,691,400.00	4	940,691,400.00	4	940,691,400.00
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					892,151,433.00		892,151,433.00		892,151,433.00		892,151,433.00		892,151,433.00
Meningkatnya Produksi perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (%)	213453	3	3	892,151,433.00	3	892,151,433.00	3	892,151,433.00	3	892,151,433.00	3	892,151,433.00
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					75,000,000.00		75,000,000.00		75,000,000.00		75,000,000.00		75,000,000.00
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha perikanan	Persentase peningkatan kepatuhan pelaku usaha (%)	70	5	5	75,000,000.00	5	75,000,000.00	5	75,000,000.00	5	75,000,000.00	5	75,000,000.00
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					452,424,408.00		452,424,408.00		452,424,408.00		452,424,408.00		452,424,408.00
Meningkatnya produksi pengolahan dan pemasaran produk perikanan	Persentase peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran (%)	35866	5	5	452,424,408.00	5	452,424,408.00	5	452,424,408.00	5	452,424,408.00	5	452,424,408.00
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					7,536,159,726.10		7,536,159,726.10		7,536,159,726.10		7,566,159,726.10		7,536,159,726.10
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6,930,961,126.10		6,930,961,126.10		6,930,961,126.10		6,930,961,126.10		6,930,961,126.10
Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja	Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	5,840,396,030.10	100	5,840,396,030.10	100	5,840,396,030.10	100	5,840,396,030.10	100	5,840,396,030.10
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	0	70	70	1,090,565,096.00	71	1,090,565,096.00	72	1,090,565,096.00	73	1,090,565,096.00	74	1,090,565,096.00



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					26,200,800.00		26,200,800.00		26,200,800.00		56,200,800.00		26,200,800.00
Meningkatnya perusahaan yang memiliki dokumen tenaga kerja mikro	Persentase perusahaan yang melaporkan dokumen tenaga kerja mikro (%)	100	100	100	26,200,800.00	100	26,200,800.00	100	26,200,800.00	100	56,200,800.00	100	26,200,800.00
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					289,362,020.00		289,362,020.00		289,362,020.00		289,362,020.00		289,362,020.00
Meningkatnya keterampilan/kompetensi tenaga kerja lokal	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi (%)	95	95	95	289,362,020.00	95	289,362,020.00	95	289,362,020.00	95	289,362,020.00	95	289,362,020.00
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					137,756,980.00		137,756,980.00		137,756,980.00		137,756,980.00		137,756,980.00
Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang terserap (%)	24.5	24.5	24.5	137,756,980.00	24.5	137,756,980.00	24.5	137,756,980.00	24.5	137,756,980.00	24.5	137,756,980.00
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					151,878,800.00		151,878,800.00		151,878,800.00		151,878,800.00		151,878,800.00
Terciptanya kondisi hubungan kerja yang harmonis	Persentase perusahaan yang menerapkan hak- hak tenaga kerja (%)	80	80	80	151,878,800.00	80	151,878,800.00	80	151,878,800.00	80	151,878,800.00	80	151,878,800.00
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					266,222,140.00		266,222,140.00		266,222,140.00		266,222,140.00		266,222,140.00
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					248,265,440.00		248,265,440.00		248,265,440.00		248,265,440.00		248,265,440.00
Meningkatnya sentra industri	Persentase pertumbuhan sentra industri (%)	17	17.91	17.91	248,265,440.00	17.91	248,265,440.00	17.91	248,265,440.00	17.91	248,265,440.00	17.91	248,265,440.00
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					5,974,320.00		5,974,320.00		5,974,320.00		5,974,320.00		5,974,320.00
Meningkatnya legalitas perizinan perusahaan industri	Persentase perusahaan industri berizin (%)	90	90	90	5,974,320.00	90	5,974,320.00	90	5,974,320.00	90	5,974,320.00	90	5,974,320.00
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					11,982,380.00		11,982,380.00		11,982,380.00		11,982,380.00		11,982,380.00
Meningkatnya kepatuhan pelaku industri dalam menyampaikan data dan laporan industri melalui SIINAS	Persentase perusahaan yang melapor di SINAS (%)	85	85	85	11,982,380.00	85	11,982,380.00	85	11,982,380.00	85	11,982,380.00	85	11,982,380.00
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					51,405,779,913.00		49,803,133,656.00		49,620,986,856.00		49,710,986,856.00		51,283,442,856.00
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					34,430,779,913.00		32,778,133,656.00		32,545,133,656.00		32,625,133,656.00		33,987,589,656.00
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	-	90	93	15,023,652,257.00	96	13,353,462,000.00	99	13,105,462,000.00	100	13,085,462,000.00	100	14,435,462,000.00

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja	Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	18,562,127,656.00	100	18,564,671,656.00	100	18,564,671,656.00	100	18,564,671,656.00	100	18,562,127,656.00
Meningkatnya kualitas Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Organisasi sesuai tugas pokok dan fungsinya	Rata-rata capaian nilai tingkat kematangan organisasi (nilai)	33	34	36	50,000,000.00	37	60,000,000.00	39	65,000,000.00	43	65,000,000.00	46	65,000,000.00
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah dan kepatuhan penerapan kebijakan ketatalaksanaan	Persentase Unit Pelayanan Publik dengan Predikat IKM Minimal B (%)	100	100	100	120,000,000.00	100	120,000,000.00	100	120,000,000.00	100	120,000,000.00	100	120,000,000.00
Meningkatnya kualitas pelaporan SAKIP perangkat daerah	Rata-rata nilai komponen pelaporan SAKIP perangkat daerah	12,95	13,0	13,05	75,000,000.00	13,10	80,000,000.00	13,15	90,000,000.00	13,20	90,000,000.00	13,25	105,000,000.00
Meningkatnya kualitas layanan pimpinan	Indeks Kepuasan Layanan Pimpinan (%)	-	90	91	600,000,000.00	91	600,000,000.00	92	600,000,000.00	93	700,000,000.00	94	700,000,000.00
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					15,890,000,000.00		15,940,000,000.00		15,975,000,000.00		15,975,000,000.00		16,045,000,000.00
Meningkatnya kualitas dan Standar Pelayanan Minimal	Persentase keterisian data standar pelayanan minimal (%)	100	100	100	50,000,000.00	100	50,000,000.00	100	55,000,000.00	100	55,000,000.00	100	75,000,000.00
Meningkatnya kualitas data LPPD	Persentase keterisian data IKK LPPD (%)	100	100	100	600,000,000.00	100	650,000,000.00	100	650,000,000.00	100	650,000,000.00	100	700,000,000.00
Meningkatnya administrasi kewilayahan	Persentase ketersediaan data toponim kota tarakan (%)	0	0	20	85,000,000.00	50	85,000,000.00	80	100,000,000.00	100	100,000,000.00	100	100,000,000.00
	Persentase kecamatan dan kelurahan yang difasilitasi (%)	100	100	100		100		100		100		100	
Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Persentase kebijakan Kesra yang terlaksana (%)	94	100	100	14,000,000,000.00	100	14,000,000,000.00	100	14,000,000,000.00	100	14,000,000,000.00	100	14,000,000,000.00
Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Persentase produk hukum yang harmonis dengan peraturan perundang - undangan yang lebih tinggi (%)	100	100	100	265,000,000.00	100	265,000,000.00	100	265,000,000.00	100	265,000,000.00	100	265,000,000.00
	Persentase produk hukum yang terdokumentasi dan tersosialisasi (%)	100	100	100		100		100		100		100	
Tertanganinya pengaduan kasus hukum	Persentase kasus hukum yang tertangani (%)	100	100	100	350,000,000.00	100	350,000,000.00	100	350,000,000.00	100	350,000,000.00	100	350,000,000.00
Meningkatnya fasilitasi kerjasama daerah	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	540,000,000.00	100	540,000,000.00	100	555,000,000.00	100	555,000,000.00	100	555,000,000.00
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					1,085,000,000.00		1,085,000,000.00		1,100,853,200.00		1,110,853,200.00		1,250,853,200.00
Meningkatnya BUMD dan BLUD yang berkinerja sehat	Persentase BUMD dan BLUD yang sehat (%)	66.67	66.67	66.7	145,000,000.00	66.8	145,000,000.00	66.8	145,000,000.00	66.8	145,000,000.00	66.8	235,000,000.00



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Meningkatnya kinerja TPID	Persentase rekomendasi kebijakan TPID yang dilaksanakan (%)	100	100	100	135,000,000.00	100	135,000,000.00	100	135,000,000.00	100	135,000,000.00	100	135,000,000.00
meningkatnya kualitas kebijakan UMKM	Persentase kebijakan UMKM yang terlaksana (%)	100	100	100	300,000,000.00	100	300,000,000.00	100	300,000,000.00	100	300,000,000.00	100	300,000,000.00
meningkatnya kinerja TPKAD	Persentase capaian rencana aksi TPKAD (%)	n/a	80	80	50,000,000.00	85	50,000,000.00	90	50,000,000.00	95	50,000,000.00	100	50,000,000.00
Meningkatnya kualitas pelaksanaan administrasi pembangunan	Persentase realisasi fisik (%)	96.13	100	100	110,000,000.00	100	110,000,000.00	100	110,853,200.00	100	120,853,200.00	100	120,853,200.00
	Persentase realisasi keuangan (%)	93.36	100	100		100		100		100		100	
Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ (Poin)	100	100	100	210,000,000.00	100	210,000,000.00	100	210,000,000.00	100	210,000,000.00	100	210,000,000.00
meningkatnya kualitas kebijakan SDA	Persentase kebijakan SDA yang terlaksana (%)	100	100	100	135,000,000.00	100	135,000,000.00	100	150,000,000.00	100	150,000,000.00	100	200,000,000.00
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					44,323,668,371.00		44,323,669,271.00		44,323,669,271.00		44,323,669,271.00		44,323,669,271.00
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					26,782,736,127.00		25,852,736,127.00		27,382,736,127.00		25,252,736,127.00		25,327,736,127.00
Meningkatnya Penguatan Internal Akuntabilitas Kinerja	Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	5,761,780,174.00	100	5,761,780,174.00	100	5,761,780,174.00	100	5,761,780,174.00	100	5,761,780,174.00
Meningkatnya Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	100	100	100	21,020,955,953.00	100	20,090,955,953.00	100	21,620,955,953.00	100	19,490,955,953.00	100	19,565,955,953.00
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					17,540,932,244.00		18,470,933,144.00		16,940,933,144.00		19,070,933,144.00		18,995,933,144.00
Meningkatnya kualitas pembahasan APBD	Ketepatan penetapan Perda APBD Tahun N (%)	100	100	100	951,000,000.00	100	951,000,000.00	100	951,000,000.00	100	951,000,000.00	100	951,000,000.00
Meningkatnya Kajian Peraturan Perundang-undangan	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (%)	100	100	100	1,802,980,000.00	100	1,802,980,900.00	100	1,802,980,900.00	100	1,802,980,900.00	100	1,805,480,900.00
Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (%)	100	100	100	678,000,000.00	100	678,000,000.00	100	678,000,000.00	100	678,000,000.00	100	678,000,000.00
Meningkatnya Kualitas Persidangan	Persentase Rapat-Rapat DPRD (%)	100	100	100	10,986,602,244.00	100	11,916,602,244.00	100	10,386,602,244.00	100	12,516,602,244.00	100	12,439,102,244.00
Meningkatnya Kualitas Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Pelaksanaan Penyerapan Aspirasi dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat (%)	100	100	100	3,122,350,000.00	100	3,122,350,000.00	100	3,122,350,000.00	100	3,122,350,000.00	100	3,122,350,000.00
5.01 - PERENCANAAN					8,371,763,262.00		8,186,263,262.00		8,328,463,262.00		8,212,763,262.00		8,309,963,262.00
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6,338,863,382.00		6,153,363,382.00		6,165,363,382.00		6,119,863,382.00		6,146,863,382.00
Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja	Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti (%)	78	78	78.01	5,488,081,382.00	78.1	5,488,081,382.00	78.15	5,488,081,382.00	78.2	5,488,081,382.00	100	5,488,081,382.00

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Meningkatnya layanan kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	92.27	92.27	92.27	850,782,000.00	92.5	665,282,000.00	93	677,282,000.00	93.5	631,782,000.00	94	658,782,000.00
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					760,000,000.00		760,000,000.00		760,000,000.00		760,000,000.00		760,000,000.00
Selarasnya dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	100	100	100	560,000,000.00	100	560,000,000.00	100	560,000,000.00	100	560,000,000.00	100	560,000,000.00
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPd (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100	
Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Capaian Kinerja Pembangunan daerah (persentase) (%)	97.25	97.35	97.45	200,000,000.00	97.55	200,000,000.00	97.65	200,000,000.00	97.75	200,000,000.00	97.85	200,000,000.00
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					1,272,899,880.00		1,272,899,880.00		1,403,099,880.00		1,332,899,880.00		1,403,099,880.00
Selarasnya dokumen perencanaan pembangunan pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	100	100	100	424,999,940.00	100	424,999,940.00	100	424,999,940.00	100	424,999,940.00	100	424,999,940.00
Selarasnya dokumen perencanaan pembangunan daerah pada bidang Infrastruktur, SDA dan Perekonomian	Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur (%)	100	100	100	230,400,000.00	100	230,400,000.00	100	360,600,000.00	100	290,400,000.00	100	360,600,000.00
	Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100	
Meningkatnya kualitas monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Capaian Kinerja Pembangunan pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (persentase) (%)	100	100	100	15,000,000.00	100	15,000,000.00	100	15,000,000.00	100	15,000,000.00	100	15,000,000.00
Meningkatnya kualitas monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pada bidang Infrastruktur, SDA dan Perekonomian	Capaian kinerja Pembangunan pada bidang Infrastruktur, SDA dan Perekonomian (%)	99.19	99.2	99.21	177,500,000.00	99.22	177,500,000.00	99.23	177,500,000.00	99.24	177,500,000.00	99.25	177,500,000.00
Selarasnya dokumen perencanaan pembangunan pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	100	100	100	424,999,940.00	100	424,999,940.00	100	424,999,940.00	100	424,999,940.00	100	424,999,940.00



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					745,000,000.00		745,000,000.00		745,000,000.00		745,000,000.00		745,000,000.00
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					620,000,000.00		620,000,000.00		620,000,000.00		620,000,000.00		620,000,000.00
Meningkatnya kualitas Kajian kelibangan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	87.5	-	100	620,000,000.00	100	620,000,000.00	100	620,000,000.00	100	620,000,000.00	100	620,000,000.00
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					125,000,000.00		125,000,000.00		125,000,000.00		125,000,000.00		125,000,000.00
Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	57.1	-	82	125,000,000.00	84	125,000,000.00	86	125,000,000.00	88	125,000,000.00	90	125,000,000.00
5.02 - KEUANGAN					109,073,190,785.48		109,073,190,785.48		109,073,190,785.48		109,073,190,785.48		109,073,190,785.48
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					92,489,770,085.48		92,489,770,085.48		92,489,770,085.48		92,489,770,085.48		92,489,770,085.48
Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja	Persentase tindakan lanjut evaluasi SAKIP (%)	100	100	100	86,287,446,685.48	100	86,222,446,685.48	100	86,287,446,685.48	100	86,287,446,685.48	100	86,287,446,685.48
Meningkatnya Layanan Kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	88.46	89	90	6,202,323,400.00	91	6,267,323,400.00	92	6,202,323,400.00	93	6,202,323,400.00	94	6,202,323,400.00
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					9,186,220,990.00		9,186,220,990.00		9,186,220,990.00		9,186,220,990.00		9,186,220,990.00
Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	37	40	40	2,780,012,720.00	40	2,780,012,720.00	40	2,780,012,720.00	40	2,780,012,720.00	40	2,780,012,720.00
	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	33	40	40		40		40		40		40	
Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	95	95	95	5,682,221,000.00	95	5,682,221,000.00	95	5,682,221,000.00	95	5,682,221,000.00	95	5,682,221,000.00
	Persentase penurunan SILPA	-28%	13%	13%		13%		13%		13%		13%	
Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	100	100	100	723,987,270.00	100	723,987,270.00	100	723,987,270.00	100	723,987,270.00	100	723,987,270.00
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					3,904,681,950.00		3,904,681,950.00		3,904,681,950.00		3,904,681,950.00		3,904,681,950.00
Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	100	100	100	3,904,681,950.00	100	3,904,681,950.00	100	3,904,681,950.00	100	3,904,681,950.00	100	3,904,681,950.00

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					3,492,517,760.00		3,492,517,760.00		3,492,517,760.00		3,492,517,760.00		3,492,517,760.00
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	100	100	100	3,492,517,760.00	100	3,492,517,760.00	100	3,492,517,760.00	100	3,492,517,760.00	100	3,492,517,760.00
5.03 - KEPEGAWAIAN					15,190,104,697.00		15,190,104,697.00		15,190,104,697.00		15,190,104,697.00		15,190,104,697.00
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					14,193,202,797.00		14,193,202,797.00		14,193,202,797.00		14,193,202,797.00		14,193,202,797.00
Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja	Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	13,728,295,527.00	100	13,728,295,527.00	100	13,728,295,527.00	100	13,728,295,527.00	100	13,728,295,527.00
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	0	77	78	464,907,270.00	80	464,907,270.00	81	464,907,270.00	82	464,907,270.00	85	464,907,270.00
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					996,901,900.00		996,901,900.00		996,901,900.00		996,901,900.00		996,901,900.00
Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	98	98	98	108,470,900.00	98	108,470,900.00	98	108,470,900.00	98	108,470,900.00	98	108,470,900.00
Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian pemerintah kota	Persentase layanan administrasi kepegawaian terselesaikan tepat waktu sesuai SOP (%)	90	90	90	324,874,300.00	95	324,874,300.00	95	324,874,300.00	95	324,874,300.00	95	324,874,300.00
Meningkatnya kualitas pengelolaan sistem informasi kepegawaian	Persentase data ASN yang diupdate (%)	95	95	95	57,051,000.00	95	57,051,000.00	95	57,051,000.00	95	57,051,000.00	95	57,051,000.00
Meningkatnya pengembangan Karir ASN	Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya (%)	90	90	90	506,505,700.00	90	506,505,700.00	95	506,505,700.00	95	506,505,700.00	100	506,505,700.00
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					855,000,000.00		855,000,000.00		855,000,000.00		855,000,000.00		855,000,000.00
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					855,000,000.00		855,000,000.00		855,000,000.00		855,000,000.00		855,000,000.00
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional (Persentase)	50	50	50	795,000,000.00	50	795,000,000.00	50	795,000,000.00	50	795,000,000.00	50	795,000,000.00
Meningkatnya layanan penjaminan mutu dan sertifikasi kompetensi	Persentase ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi (%)	25	25	25	60,000,000.00	26	60,000,000.00	26	60,000,000.00	27	60,000,000.00	30	60,000,000.00
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					15,846,121,227.00		15,587,760,477.00		15,496,121,227.00		15,587,760,477.00		15,496,121,227.00
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10,307,682,837.00		10,049,322,087.00		9,957,682,837.00		10,049,322,087.00		9,957,682,837.00



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Meningkatnya kompetensi dan profesionalitas APIP	Persentase APIP yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai kebutuhan (%)	0	100	100	1,506,067,800.00	100	1,506,067,800.00	100	1,506,067,800.00	100	1,506,067,800.00	100	1,506,067,800.00
	Persentase pelaksanaan PKPT sesuai rencana dan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100	
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	0	86	86.5	2,083,132,900.00	87	1,824,772,150.00	87.5	1,733,132,900.00	88	1,824,772,150.00	88	1,733,132,900.00
Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja	Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti (%)	-	100	100	6,718,482,137.00	100	6,718,482,137.00	100	6,718,482,137.00	100	6,718,482,137.00	100	6,718,482,137.00
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					3,258,076,530.00		3,258,076,530.00		3,258,076,530.00		3,258,076,530.00		3,258,076,530.00
Meningkatnya efektivitas evaluasi kinerja	Persentase tindak lanjut evaluasi SAKIP (%)	-	60	62.5	230,000,000.00	65	230,000,000.00	67.5	230,000,000.00	70	230,000,000.00	72.5	230,000,000.00
Meningkatnya efektivitas tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Keuangan APIP	Persentase tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Keuangan APIP oleh PD (%)	0	65	70	2,327,513,330.00	85	2,327,513,330.00	90	2,327,513,330.00	95	2,327,513,330.00	100	2,327,513,330.00
Meningkatnya efektivitas pemantauan tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan/Pengawasan auditor eksternal	Tindak lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-11 (%)	87.55	87.56	87.57	700,563,200.00	87.58	700,563,200.00	87.59	700,563,200.00	87.6	700,563,200.00	87.61	700,563,200.00
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBLAJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					2,280,361,860.00		2,280,361,860.00		2,280,361,860.00		2,280,361,860.00		2,280,361,860.00
Meningkatnya efektivitas pencegahan korupsi	Indeks MCP (Monitoring Center for Prevention) Area Intervensi APIP (Indeks)	86.52	87	87.5	466,757,500.00	88	466,757,500.00	88	466,757,500.00	89	466,757,500.00	89.5	466,757,500.00
Meningkatnya efektivitas pengendalian internal perangkat daerah	Persentase PD yang menerapkan manajemen risiko (%)	100	100	100	992,529,360.00	100	992,529,360.00	100	992,529,360.00	100	992,529,360.00	100	992,529,360.00
Meningkatnya komitmen PD dalam pembangunan Zona Integritas	Persentase PD yang berhasil diusulkan ke penilaian ZI Nasional (%)	6.5	6.5	6.5	28,700,000.00	6.5	28,700,000.00	6.5	28,700,000.00	6.5	28,700,000.00	6.5	28,700,000.00
Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengawasan dan Quality Assurance (QA) serta pelayanan konsultasi	Survey kepuasan pelaksanaan pengawasan dan QA serta pelayanan konsultasi (Angka)	-	86	86.5	792,375,000.00	87	792,375,000.00	87.5	792,375,000.00	88	792,375,000.00	88.5	792,375,000.00
7.01 - KECAMATAN TARAKAN TENGAH					15,351,383,278.00		15,351,383,278.00		15,351,383,278.00		15,351,383,278.00		15,351,383,278.00
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11,270,425,498.00		11,270,425,498.00		11,270,425,498.00		11,270,425,498.00		11,270,425,498.00
Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja	Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	10,223,387,798.00	100	10,223,387,798.00	100	10,223,387,798.00	100	10,223,387,798.00	100	10,223,387,798.00

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	-	90	90,25	1,047,037,700.00	90,55	1,047,037,700.00	90,75	1,047,037,700.00	91	1,047,037,700.00	91,15	1,047,037,700.00
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00
Meningkatnya layanan kecamatan	Persentase Layanan Kecamatan Terselamatkan Tepat Waktu sesuai SOP (%)	-	100	100	5,000,000.00	100	5,000,000.00	100	5,000,000.00	100	5,000,000.00	100	5,000,000.00
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					3,734,330,000.00		3,734,330,000.00		3,734,330,000.00		3,734,330,000.00		3,734,330,000.00
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Aktif (%)	100	100	100	3,734,330,000.00	100	3,734,330,000.00	100	3,734,330,000.00	100	3,734,330,000.00	100	3,734,330,000.00
	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam musrenbang di Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100	
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					30,000,000.00		30,000,000.00		30,000,000.00		30,000,000.00		30,000,000.00
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Aduan yang Terselamatkan (%)	100	100	100	30,000,000.00	100	30,000,000.00	100	30,000,000.00	100	30,000,000.00	100	30,000,000.00
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					311,627,780.00		311,627,780.00		311,627,780.00		311,627,780.00		311,627,780.00
Meningkatnya kualitas kafilah MTQ	Persentase Kafilah yang Mengikuti MTQ di Tingkat Kota (%)	29.58	29.58	29.7	301,627,780.00	29.75	301,627,780.00	29.82	301,627,780.00	30	301,627,780.00	30.25	301,627,780.00
Terfasilitasinya konflik pertanahan	Persentase Aduan Pertanahan yang Difasilitasi (%)	100	100	100	10,000,000.00	100	10,000,000.00	100	10,000,000.00	100	10,000,000.00	100	10,000,000.00
7.01 - KECAMATAN TARAKAN BARAT					15,854,201,600.00		15,842,071,600.00		15,852,571,600.00		15,849,701,600.00		15,842,071,600.00
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11,540,216,000.00		11,528,086,000.00		11,538,586,000.00		11,535,716,000.00		11,528,086,000.00
Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja	Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	10,412,326,000.00	100	10,411,926,000.00	100	10,411,926,000.00	100	10,411,926,000.00	100	10,411,926,000.00
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	-	80.1	80.2	1,127,890,000.00	80.3	1,116,160,000.00	80.4	1,126,660,000.00	80.5	1,123,790,000.00	80.6	1,116,160,000.00
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00
Meningkatnya layanan kecamatan	Persentase Layanan Kecamatan Terselamatkan Tepat Waktu sesuai SOP (%)	-	100	100	5,000,000.00	100	5,000,000.00	100	5,000,000.00	100	5,000,000.00	100	5,000,000.00



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					3,998,985,600.00		3,998,985,600.00		3,998,985,600.00		3,998,985,600.00		3,998,985,600.00
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Aktif (%)	97	97.5	97.8	3,998,985,600.00	98	3,998,985,600.00	98.6	3,998,985,600.00	98.8	3,998,985,600.00	99.3	3,998,985,600.00
	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam musrenbang di Kecamatan (%)	99.2	99.2	99.4		99.6		99.7		99.7		99.7	
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					30,000,000.00		30,000,000.00		30,000,000.00		30,000,000.00		30,000,000.00
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Aduan yang Terselesaikan (%)	100	100	100	30,000,000.00	100	30,000,000.00	100	30,000,000.00	100	30,000,000.00	100	30,000,000.00
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					280,000,000.00		280,000,000.00		280,000,000.00		280,000,000.00		280,000,000.00
Meningkatnya kualitas kafilah MTQ	Persentase Kafilah yang Mengikuti MTQ di Tingkat Kota (%)	31.17	31.18	31.58	270,000,000.00	31.79	270,000,000.00	31.82	270,000,000.00	32.03	270,000,000.00	32.24	270,000,000.00
Terfasilitasinya konflik pertanahan	Persentase Aduan Pertanahan yang Difasilitasi (%)	100	100	100	10,000,000.00	100	10,000,000.00	100	10,000,000.00	100	10,000,000.00	100	10,000,000.00
7.01 - KECAMATAN TARAKAN TIMUR					21,000,589,294.00		21,000,589,294.00		21,000,589,294.00		21,000,589,294.00		21,000,589,294.00
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					15,964,424,274.00		15,964,424,274.00		15,964,424,274.00		15,964,424,274.00		15,964,424,274.00
Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja	Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	14,739,209,644.00	100	14,739,209,644.00	100	14,739,209,644.00	100	14,739,209,644.00	100	14,739,209,644.00
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	-	90	90.02	1,225,214,630.00	90.03	1,225,214,630.00	90.05	1,225,214,630.00	90.06	1,225,214,630.00	90.07	1,225,214,630.00
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00
Meningkatnya layanan kecamatan	Persentase Layanan Kecamatan Terselesaikan Tepat Waktu sesuai SOP (%)	-	100	100	5,000,000.00	100	5,000,000.00	100	5,000,000.00	100	5,000,000.00	100	5,000,000.00
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					4,661,165,020.00		4,661,165,020.00		4,661,165,020.00		4,661,165,020.00		4,661,165,020.00
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Aktif (%)	100	100	100	4,661,165,020.00	100	4,661,165,020.00	100	4,661,165,020.00	100	4,661,165,020.00	100	4,661,165,020.00

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kota Tarakan Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam musrenbang di Kecamatan (%)	94	95	95		95		95		95		95	
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Aduan yang Terselesaikan (%)	100	100	100	50,000,000.00	100	50,000,000.00	100	50,000,000.00	100	50,000,000.00	100	50,000,000.00
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					320,000,000.00		320,000,000.00		320,000,000.00		320,000,000.00		320,000,000.00
Meningkatnya kualitas kafilah MTQ	Persentase Kafilah yang Mengikuti MTQ di Tingkat Kota (%)	21.1	21.4	21.5	300,000,000.00	21.5	300,000,000.00	21.5	300,000,000.00	21.5	300,000,000.00	21.5	300,000,000.00
Terfasilitasinya konflik pertanahan	Persentase Aduan Pertanahan yang Difasilitasi (%)	100	100	100	20,000,000.00	100	20,000,000.00	100	20,000,000.00	100	20,000,000.00	100	20,000,000.00
7.01 - KECAMATAN TARAKAN UTARA					10,387,638,343.00		10,371,638,343.00		10,347,638,343.00		10,347,638,343.00		10,347,638,343.00
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8,418,518,343.00		8,402,518,343.00		8,378,518,343.00		8,378,518,343.00		8,378,518,343.00
Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja	Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	7,645,058,443.00	100	7,645,058,443.00	100	7,645,058,443.00	100	7,645,058,443.00	100	7,645,058,443.00
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	-	91.84	91.94	773,459,900.00	92.09	757,459,900.00	92.24	733,459,900.00	92.53	733,459,900.00	92.84	733,459,900.00
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00
Meningkatnya layanan kecamatan	Persentase Layanan Kecamatan Terselesaikan Tepat Waktu sesuai SOP (%)	-	100	100	5,000,000.00	100	5,000,000.00	100	5,000,000.00	100	5,000,000.00	100	5,000,000.00
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					1,699,120,000.00		1,699,120,000.00		1,699,120,000.00		1,699,120,000.00		1,699,120,000.00
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Aktif (%)	100	100	100	1,699,120,000.00	100	1,699,120,000.00	100	1,699,120,000.00	100	1,699,120,000.00	100	1,699,120,000.00
	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam musrenbang di Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100	
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					20,000,000.00		20,000,000.00		20,000,000.00		20,000,000.00		20,000,000.00



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Aduan yang Terselamatkan (%)	100	100	100	20,000,000.00	100	20,000,000.00	100	20,000,000.00	100	20,000,000.00	100	20,000,000.00
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					245,000,000.00		245,000,000.00		245,000,000.00		245,000,000.00		245,000,000.00
Meningkatnya kualitas kafilah MTQ	Persentase Kafilah yang Mengikuti MTQ di Tingkat Kota (%)	42.48	42.48	50	230,000,000.00	51	230,000,000.00	52	230,000,000.00	53	230,000,000.00	54	230,000,000.00
Terfasilitasinya konflik pertanahan	Persentase Aduan Pertanahan yang Difasilitasi (%)	100	100	100	15,000,000.00	100	15,000,000.00	100	15,000,000.00	100	15,000,000.00	100	15,000,000.00
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					6,824,043,659.00		9,740,043,659.00		9,744,043,659.00		9,740,043,659.00		9,740,043,659.00
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					635,928,284.00		3,551,928,284.00		3,555,928,284.00		3,551,928,284.00		3,551,928,284.00
Meningkatnya Penguatan Internal Akuntabilitas Kinerja	Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	323,817,044.00	100	3,239,817,044.00	100	3,239,817,044.00	100	3,239,817,044.00	100	3,239,817,044.00
Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	100	100	100	312,111,240.00	100	312,111,240.00	100	316,111,240.00	100	312,111,240.00	100	312,111,240.00
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					1,592,664,975.00		1,592,664,975.00		1,592,664,975.00		1,592,664,975.00		1,592,664,975.00
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, UUD 1945 , Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI	Persentase keaktifan pembauran kebangsaan (%)	78.43	79.00	80.00	1,592,664,975.00	81.5	1,592,664,975.00	83	1,592,664,975.00	84.5	1,592,664,975.00	86	1,592,664,975.00
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					2,455,050,000.00		2,455,050,000.00		2,455,050,000.00		2,455,050,000.00		2,455,050,000.00
Meningkatnya Pembinaan Pendidikan Politik	Capaian pembinaan pendidikan politik (%)	100	100	100	2,455,050,000.00	100	2,455,050,000.00	100	2,455,050,000.00	100	2,455,050,000.00	100	2,455,050,000.00
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					1,450,000,000.00		1,450,000,000.00		1,450,000,000.00		1,450,000,000.00		1,450,000,000.00

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Tertib Administrasi dan Memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan (%)	80	81	81.5	1,450,000,000.00	83	1,450,000,000.00	84.5	1,450,000,000.00	86	1,450,000,000.00	87.5	1,450,000,000.00
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					500,000,000.00		500,000,000.00		500,000,000.00		500,000,000.00		500,000,000.00
Meningkatnya pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Capaian pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat (%)	100	100	100	500,000,000.00	100	500,000,000.00	100	500,000,000.00	100	500,000,000.00	100	500,000,000.00
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					190,400,400.00		190,400,400.00		190,400,400.00		190,400,400.00		190,400,400.00
Meningkatnya deteksi dini konflik sosial	Persentase laporan deteksi dini yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	190,400,400.00	100	190,400,400.00	100	190,400,400.00	100	190,400,400.00	100	190,400,400.00



4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

a. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Tarakan, khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan masyarakat, layanan umum dan daya saing daerah. Pencapaian tujuan ini dapat ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja program atau indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri pada setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis dirumuskan dengan mengambil indikator dari indikator sasaran dan indikator tujuan (*Impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan pada dasarnya merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode tahun 2025-2030 yang telah direncanakan. Dengan kata lain pencapaian indikator kinerja daerah berkontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Sedangkan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah adalah merupakan indikator utama tercapainya pembangunan Kota Tarakan periode tahun 2025-2030.

Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi SKPD. Indikator Kinerja Utama pemerintah daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2030 sebagai berikut.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Kunci (IKU) Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	Satuan	Kondisi 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	78,03	78,41	78,91	79,41	79,91	80,41	80,91
2	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	74,27	74,30	74,66	75,01	75,37	75,72	76,08
3	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,37	10,53	10,64	10,74	10,85	10,95	11,06
4	Angka Harapan Lama sekolah	Tahun	14,22	14,41	14,54	14,67	14,79	14,92	15,05
5	Indeks ketimpangan gender	Poin	0,352	0,351	0,35	0,34	0,32	0,31	0,30
6	Indeks pembangunan keluarga	Poin	66,67	66,90	67,12	67,35	67,68	68,68	69,68
7	Angka kemiskinan	Persen	5,56	5,40	5,09	4,79	4,49	4,18	3,88
8	Angka kemiskinan ekstrem	Persen	0,93	0,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	Poin	80,17	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	86,00
10	Indeks Infrastruktur	Poin	66,31	67,15	68,13	69,08	70,04	71,18	72,16
11	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak terjangkau dan berkelanjutan	Persen	68,54	71,08	73,51	75,82	78,01	80,11	82,11
12	Rasio gini	Poin	0,232	0,25	0,248	0,245	0,243	0,24	0,238
13	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,71	6,09	6,19	6,29	6,39	6,49	6,59
14	Tingkat inflasi	Persen	1,6	2,5 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1	2,0 ± 1	2,0 ± 1	2,0 ± 1
15	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Poin	83,00	85,00	87,00	89,00	91,00	93,00	95,00
16	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	5,11	4,90	4,69	4,47	4,28	4,09	4,04
17	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	77,17	80	81	82	83	84	85
18	Nilai SAKIP	Poin	64,89	66,03	70,11	71,51	71,88	72,35	72,72
19	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
20	Indeks Pelayanan Publik	Poin	4,08	4,08	4,09	4,09	4,09	4,10	4,10
21	Indeks SPBE	Poin	3,21	3,00	3,12	3,25	3,37	3,50	3,62
22	Persentase Penurunan Emisi GRK	ton karbon dioksida ekuivalen (tCO2e)	-	225,049.00	236,699.24	199,601.85	115,993.74	98,862.73	172,844.67
23	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Poin	90,60	90,10	89,60	89,10	88,60	88,10	87,60
24	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	68,27	70,06	70,14	70,23	70,31	70,40	70,49
25	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,70	0,712	0,724	0,736	0,748	0,76	0,772



b. Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator kinerja daerah merupakan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja seluruh penyelenggara pemerintahan daerah Kota Tarakan tahun 2025-2030, yang merupakan indikator program prioritas pembangunan daerah.

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Daerah (IKD)

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI							
1	Prevalensi ketidakcukupan pangan	Persen	13,36	12,72	12,10	11,51	10,96	10,42
2	Konsumsi Listrik Perkapita	Kwh	951	1.349,50	1.748,00	2.146,50	2.545,00	2.943,50
3	Akses Rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan	Persen	66,31	67,49	68,62	69,69	70,71	71,69
4	Kapasitas Air Baku	Persen	147,67	145,00	162,12	168,88	184,86	181,51
5	Kapasitas Tampungan Air	m3/Kapita	3,98	3,91	3,85	3,80	4,17	4,10
6	Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman	Persen	4,12	5,11	6,49	8,20	9,78	10,00
7	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	Persen	18,00	22,50	27,00	31,50	36,00	40,50
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	70,06	70,14	70,23	70,31	70,40	70,49
9	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Pengumpulan Sampah	Persentase	98,24	98,36	98,48	98,52	98,64	98,83
10	Persentase Penurunan Emisi GRK	ton karbon dioksida ekuivalen (tCO2e)	225,049.00	236,699.24	199,601.85	115,993.74	98,862.73	172,844.67
11	Indeks Ketahanan Daerah	Persen	0,712	0,724	0,736	0,748	0,76	0,772
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,09	6,19	6,29	6,39	6,49	6,59
2	Angka kemiskinan	Persen	5,40	5,09	4,79	4,49	4,18	3,88
3	PDRB perkapita	Juta	136	148	161	173	186	198
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,90	4,69	4,47	4,28	4,09	4,04
5	Rasio Gini	Angka	0,25	0,248	0,245	0,243	0,24	0,238
6	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,30	74,66	75,01	75,37	75,72	76,08
7	Angka Kelahiran Hidup	Angka	2,24	2,23	2,22	2,21	2,20	2,19
8	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Persen	12	11.8	11.5	11.2	10.9	10.6



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
9	Angka Kematian Ibu	per 100.000 kelahiran hidup	89,4	89	86	84	77	75
10	Angka Kematian Balita	per 1000 kelahiran hidup	6,9	6,7	6,5	6,4	6,3	6,3
11	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate)	Persen	90	90	90	90	90	90
12	Cakupan kepesertaan Aktif jaminan kesehatan nasional	Persen	81	81	81,50	82,50	83,50	84
13	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	Persen	35	46	55	61	70	80
14	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	Persen	80	85	90	93	95	95
15	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,53	10,64	10,74	10,85	10,95	11,06
16	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,41	14,54	14,67	14,79	14,92	15,05
17	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum untuk Literasi Membaca.	Persen	85,21	85,46	85,71	85,96	86,21	86,46
18	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum untuk Numerasi.	Persen	54,11	54,61	55,11	55,61	56,11	56,61
19	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persen	67,77	69,16	70,55	71,94	73,33	74,72
20	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	75,19	77,44	79,69	81,94	84,20	86,20
21	Indeks Pembangunan Keluarga	Poin	66,90	67,12	67,35	67,68	68,68	69,68
22	Indeks Ketimpangan Gender	Poin	0,36	0,35	0,34	0,32	0,31	0,30
23	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin	55,57	56,21	56,86	57,50	58,15	58,79
III ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1	Rasio PDB industri pengolahan	Persen	11,00	12,06	13,12	14,18	15,25	16,31
2	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan & Minum	Persentase	2,00	2,12	2,25	2,37	2,50	2,62
3	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	36	38,12	40,25	42,37	44,50	46,62
4	Jumlah Tamu wisatawan mancanegara	Ribu Orang	9,3	9,9	10,5	11,1	11,8	12,4
5	Indeks inovasi Daerah	Poin	40,98	41,5	42	42,5	43	44
6	Indeks Infrastruktur	Poin	67,15	68,13	69,08	70,04	71,18	72,16
7	Rumah tangga dengan akses hunian layak terjangkau dan berkelanjutan	Persen	71,08	73,51	75,82	78,01	80,11	82,11
8	Tingkat Inflasi	Persen	2,5 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1	2,0 ± 1	2,0 ± 1	2,0 ± 1
IV ASPEK PELAYANAN UMUM								

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Tarakan Tahun 2025-2029**



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Sistem pemerintahan berbasis elektronik	Poin	3,00	3,12	3,25	3,37	3,50	3,62
2	Indeks daya saing daerah	Poin	3,45	3,48	3,52	3,55	3,59	3,62
3	Indeks Demokrasi Indonesia	Poin	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
4	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	80	81	82	83	84	85
5	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
6	Nilai SAKIP	Poin	66,03	70,11	71,51	71,88	72,35	72,72
7	Survey Kepuasan Masyarakat	Poin	88,58	88,59	88,60	88,61	88,62	88,63
8	Indeks Zakat Nasional	Poin	0,20	0,23	0,26	0,29	0,32	0,35
9	Indeks Akses Keuangan Daerah	Poin	4.82	4.84	4.86	4.87	4.89	4.90
10	Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimum	Persen	100	100	100	100	100	100
INDIKATOR KINERJA KUNCI								
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							
1	Skor Kemampuan Literasi Jenjang SD	Poin	67,35	69,85	72,35	74,85	77,35	79,85
2	Skor Kemampuan Literasi Jenjang SMP	Poin	79,42	80,52	81,62	82,72	83,82	84,92
3	Skor Kemampuan Numerasi Jenjang SD	Poin	55,19	58,09	60,99	63,89	66,79	69,69
4	Skor Kemampuan Numerasi Jenjang SMP	Poin	67,51	69,01	70,51	72,01	73,51	75,01
5	Angka Partisipasi Sekolah (5-6 Tahun) PAUD	Persen	69,04	72,23	75,26	78,30	81,34	84,31
6	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15 Tahun SD/SMP	Persen	97,99	98,25	98,52	98,78	99,04	99,31
7	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Tahun Kesetaraan	Persen	26,81	30,90	35,00	39,10	43,20	47,30
8	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	Persen	100	100	100	100	100	100
9	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	Persen	76,57	77,07	77,57	78,07	78,57	79,07
10	Iklim Inklusivitas Jenjang SD	Indeks	59,30	61,80	64,30	66,80	69,30	71,80
11	Iklim Inklusivitas Jenjang SMP	Indeks	61,68	64,08	66,48	68,88	71,28	73,68
12	Iklim Keamanan Jenjang SD	Indeks	74,48	75,38	76,28	77,18	78,08	78,98
13	Iklim Keamanan Jenjang SMP	Indeks	73,70	75,20	76,70	78,20	79,70	81,20
14	Iklim Kebinekaan Jenjang SD	Indeks	72,77	73,77	74,77	75,77	76,77	77,77
15	Iklim Kebinekaan Jenjang SMP	Indeks	72,84	73,84	74,84	75,84	76,84	77,84
B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
1	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/ analis	Persen	14,17	29,92	45,67	61,42	77,17	92,91



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persen	87,73	89,92	92,01	93,99	95,87	97,64
3	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Persen	68,37	74,56	79,90	84,80	86,45	88,17
4	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Persen	73,75	74,28	74,80	75,32	75,84	76,36
5	Jumlah hari layanan penerbitan KKPR berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah	Hari	20	20	20	20	20	20
6	Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota	Persen	0	12,5	31,25	43,75	62,50	81,25
7	Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota	Persen	5,74	5,74	5,74	8,55	8,55	19,98
8	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	Persen	71,44	73,02	74,52	75,94	77,29	78,56
9	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	Persen	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5
10	Persentase Peningkatan perlindungan kawasan dari abrasi dan banjir rob kewenangan kabupaten/kota	Persen	82,66	82,66	89,79	96,92	96,92	96,92
11	Persentase pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persen	17,78	35,55	53,33	71,11	85,55	100
C URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
1	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Persen	5,62	6,1	6,57	7,04	7,66	7,96
2	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Persen	100	100	100	100	100	100
3	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat Pemerintah provinsi memperoleh program Daerah yang fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Persen	100	100	100	100	100	100
4	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	Persen	16.26	29.73	43.08	57.04	71.25	100
5	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	Persen	2,52	2,78	3,03	3,29	3,54	3,79
D URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah	Persentase	39,29	39,57	39,71	39,85	39,99	40,13
2	Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah	Persentase	28,10	28,80	30,75	57,12	76,12	85,76
3	Persentase terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi	Persentase	100	100	100	100	100	100
4	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persen	100	100	100	100	100	100
5	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal Kelebihan dari Tanah Maksimum dan Tanah Absentee	Persen	0	100	100	100	100	100
E URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								
1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Persen	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00
2	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten/kota	Persentase	24.49	26.34	27.86	29.36	30.88	32.39
3	Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	Persen	25.00	25.00	25.00	25.00	40.00	40.00
F URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	70,06	70,14	70,23	70,31	70,4	70,49
2	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Poin	55.72	56.24	57.81	58.32	60.74	61.84
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	Persen	40	42	45	46	48	50
G URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								
1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Persentase	69	70	72	75	80	82
2	Jumlah Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Persentase	13.8	12.3	11.2	10.2	9.5	8.8
3	Pertumbuhan Wirausaha	Persentase	16	14.1	12.6	11.4	10.4	9.6
H URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	Persen	0.01	1	1.09	1.2	1.25	1.5
2	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Persentase	15	15.15	15.32	15.5	15.69	15.93
I URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	47.5	48	50	53	55	58
J URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100
2	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100
4	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100
7	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100
8	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100
9	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100
10	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100
11	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100
12	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100
K URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								
1	Produksi Perikanan Tangkap	Persen	102	104.04	106.12	108.24	110.41	112.62
2	Produksi Perikanan Budidaya	Persen	103	106.09	109.27	112.55	115.93	119.41
L URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN								
1	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD	Persentase	41	40	40	40	40	40
2	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase	17	18	19	20	21	22
3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Persentase	90	91	92	93	94	95

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Persentase	23	24	25	26	27	28
5	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Persentase	34	40	40	40	40	40
6	Persentase Penurunan SILPA	Persentase	4.2	5	5	5	5	5
M INSPEKTORAT DAERAH								
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3	3	3	3	3	3
2	Level MRI	Level	3	3	3	3	3	3
3	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)
4	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Persentase	87.56	87.57	87.58	87.59	87.6	87.61
N SEKRETARIAT DAERAH								
1	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Poin	100	100	100	100	100	100
2	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Poin	90	100	100	100	100	100
3	Tingkat Kematangan UKPBJ	Poin	100	100	100	100	100	100
4	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N	Nilai	91.02	91.1	91.15	92.05	92.07	93
O URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK								
1	Persentase ARG Daerah	Persen	10,5	11	12	13	14	15
2	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	100	100	100	100	100	100
3	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	100	100	100	100	100	100
P URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Angka	2,24	2,23	2,22	2,21	2,20	2,19
2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	Persen	62	62,5	62,8	63	63,3	63,5
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	14	13,6	13	12,6	12	11,6
4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15 -19 tahun	25,5	25	24	23	22	21
Q URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Akta kelahiran yang diterbitkan	Persen	95	96	97	98	99	100
5	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persen	62	64	66	68	70	72
6	Jumlah Data Profil Kependudukan yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	1	1
7	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Persen	10	20	30	40	50	60
R URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								
1	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, Terkini	Persentase	36,93	36,94	36,95	36,96	37,00	37,01
S URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								
1	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	5,76	6,48	7,2	8,29	9,01	10,09
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	Persen	1,4	1,5	1,63	1,79	1,96	2,09
3	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota	Persen	26,44	26,66	27,21	29,97	32,68	35,27
4	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Persen	51,43	51,44	51,45	51,46	51,47	51,48
5	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persentase	95	100	100	100	100	100
T URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
1	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan	Persen	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100	100	100	100	100	100
3	Jumlah PPNS pada Satpol pp	Persen	100	100	100	100	100	100
4	Persentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkada serta Penyelenggaraan Tibumtranmas	Persen	100	100	100	100	100	100
5	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persen	100	100	100	100	100	100

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Tarakan Tahun 2025-2029**



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	100
7	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	1000	1000	1000	1000	1000	1000
8	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	320	320	320	320	320	320
9	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	50	50	50	50	50	50
U URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								
1	Peningkatan produksi tanaman pangan	Persen	0,095	0,096	0,097	0,098	0,099	0,10
2	Peningkatan produksi hortikultura	Persen	0,13	0,15	0,16	0,17	0,18	0,20
3	Peningkatan produksi komoditas peternakan	Persen	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49
4	Peningkatan produksi komoditas perkebunan	Persen	0.79	0.80	0.81	0.82	0.83	0.84
5	Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman pangan, hortikultura	Persen	100	100	100	100	100	100
6	Persentase wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (diperoleh dari Surveilance Penyakit dari 5 PHMS)	Persen	65	65	70	70	75	75
V URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								
1	Persentase jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota	Persen	28.42	29.20	29.96	30.70	31.60	32.10
2	Skor pola pangan harapan kabupaten/kota	Nilai	77	78	79	80	81	82
3	Persentase daerah rentan rawan pangan	Persen	5	20	15	15	15	10
4	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	Persen	70	70	75	75	75	75
W URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN								
1	Persentase program prioritas nasional yang didukung program daerah	Persen	100	100	100	100	100	100
X URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENELITIAN								
1	Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100
2	Rasio produk inovasi yang dimanfaatkan pemerintah, masyarakat, industri, dan badan usaha di daerah	Rasio	80	82	84	86	88	90



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Y	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							
1	Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat	Persentase	1,63	1,65	1,67	1,69	1,7	1,72
2	Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi	Persentase	1	2	3	4	5	6
Z	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							
1	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Persentase	41,79	45,52	47,76	50	52,23	54,47
2	Persentase Tenaga Kebudayaan yang memperoleh sertifikasi profesi dibidang kebudayaan	Persentase	10,52	15,78	21,05	26,31	31,57	36,84
3	Persentase Cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang didaftarkan	Persentase	41,79	45,52	47,76	50	52,23	54,47
AA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							
1	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang non Bintang)	Persentase	3,06	3,67	4,18	4,32	4,46	4,6
2	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	Persentase	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
3	Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	Persentase	15	15,5	16	16,5	17	17,5
AB	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEGAWAIAN							
1	Nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN	Indeks	75	80	85	90	95	95

BAB V

PENUTUP

Dokumen RPJMD Kota Tarakan tahun 2025 – 2029 memiliki peran yang strategis dalam memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan selama lima tahun ke depan. Pada bagian ini akan disampaikan mengenai Kesimpulan substantif perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, kaidah pelaksanaan RPJMD sebagai arahan bagi perangkat daerah dalam melaksanakan amanat RPJMD, serta arahan pelaksanaan evaluasi.

5.1. Kesimpulan

Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025–2029 yang berisi gambaran kondisi daerah hingga perumusan isu strategis pembangunan jangka menengah daerah dan juga indikasi program serta kerangka pendanaan, merupakan pedoman bagi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kota Tarakan selama kurun waktu 5 tahun yang akan datang yang nantinya akan dimutakhirkan dalam dokumen rancangan akhir RPJMD Kota Tarakan. Rancangan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029 merupakan sub sistem dari RPJPD Kota Tarakan 2025-2045, RPJPD Provinsi Kalimantan Utara 2025-2045 dan juga merupakan sub sistem RPJP Nasional 2025-2045.

Rancangan RPJMD ini menjadi acuan dan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan rancangan rencana strategis perangkat daerah di Kota Tarakan yang berdimensi waktu lima tahunan dan RPJMD ini menjadi acuan juga dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tarakan yang berdimensi tahunan.

Keberhasilan pembangunan jangka menengah daerah Kota Tarakan dalam mewujudkan visi yang ditetapkan perlu didukung oleh komitmen kepemimpinan daerah yang kuat dan demokrasi, serta konsistensi



kebijakan Pemerintah. Pembangunan jangka menengah daerah juga perlu mewujudkan keberpihakan pembangunan kepada rakyat dan juga peran serta aktif semua pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029 merupakan pedoman bagi pemerintah Kota Tarakan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 sampai tahun 2030, serta merupakan dokumen yang harus dipedomani oleh perangkat daerah dalam menyusun rencana strategis perangkat daerah tahun 2025-2029. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun anggaran 2025 telah ditetapkan berdasarkan kaidah masa transisi RPJMD periode sebelumnya, oleh karena itu dikarenakan masa kepemimpinan Kepala Daerah periode ini dimulai ketika masa anggaran telah berjalan atau pertengahan tahun anggaran maka RPJMD ini ditetapkan untuk 5 tahun kedepan hingga tahun anggaran 2030.
2. Perangkat Daerah Kota Tarakan berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat dalam RPJMD Tahun 2025-2029 melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah Provinsi, serta masyarakat termasuk dunia usaha.
3. Walikota dan Wakil Walikota Tarakan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah;
4. Dalam rangka menjamin tercapainya target indikator kinerja daerah dalam RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029 diperlukan langkah-langkah optimalisasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah setiap tahunnya;



5. Walikota dan Wakil Walikota Tarakan berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029 kepada masyarakat;
6. Bappeda Litbang Kota Tarakan melaksanakan pengendalian dan evaluasi berkala terhadap RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029;
7. Penyusunan RKPD Kota Tarakan pada Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2030 berpedoman pada RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029, yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Tarakan Tahun 2025 sampai dengan 2030;
8. Kepala Perangkat Daerah Kota Tarakan berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029;
9. Seluruh Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029 dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;
10. Renja Perangkat Daerah yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD (RKA-OPD);

WALI KOTA TARAKAN,

KHAIRUL